



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024



Pemerintah Kabupaten Batang
Tahun 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN BAB I-1

1.1 LATAR BELAKANG BAB I-1

1.2 DASAR HUKUM BAB I-3

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN BAB I-5

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN..... BAB I-8

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD BAB I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... BAB II-1

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... BAB II-1

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi BAB II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat BAB II-29

2.1.3 Aspek Daya Saing BAB II-76

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum BAB II-10

2.1.5 Capaian Pemulihan Ekonomi DaerahBAB II-**Error!**

Bookmark not defined.

2.1.6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal BAB II-106

2.2 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... BAB II-114

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar BAB II-118

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar BAB II-136

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan BAB II-163

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan BAB II-172

E. Unsur Kewilayahan BAB II-185

F. Unsur Pemerintahan Umum..... BAB II-211

2.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... BAB II-213

a. Permasalahan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar BAB II-222

- b. Permasalahan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar..... BAB II-225
 - c. Permasalahan Urusan Pilihan BAB II-229
 - d. Permasalahan Urusan Penunjang..... BAB II-230
- 2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah BAB II-233
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB III-1
- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... BAB III-1
 - 3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah BAB III-2
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... BAB III-5
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... BAB IV-1
- 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026 . BAB IV-4
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 BAB IV-9
 - 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 BAB IV-9
 - 4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024..... BAB IV-23
 - 4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 BAB IV-25
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB V-1
- 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024 BAB V-1
- 5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024..... BAB V-2
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.. BAB VI-1
- 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024 BAB VI-1
- 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB VI-2
- 6.3 Indikator Kinerja dan Program Prioritas Pembangunan .. BAB VI-29
- 6.4 Indikator Kinerja Daerah BAB VI-51
- BAB VII PENUTUP..... BAB VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Disisi lain, penyusunan RKPD bagi Kabupaten yang masa jabatan bupati berakhir pada tahun 2022 seperti Kabupaten Batang, mendasari instruksi menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2023-2026 yang menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

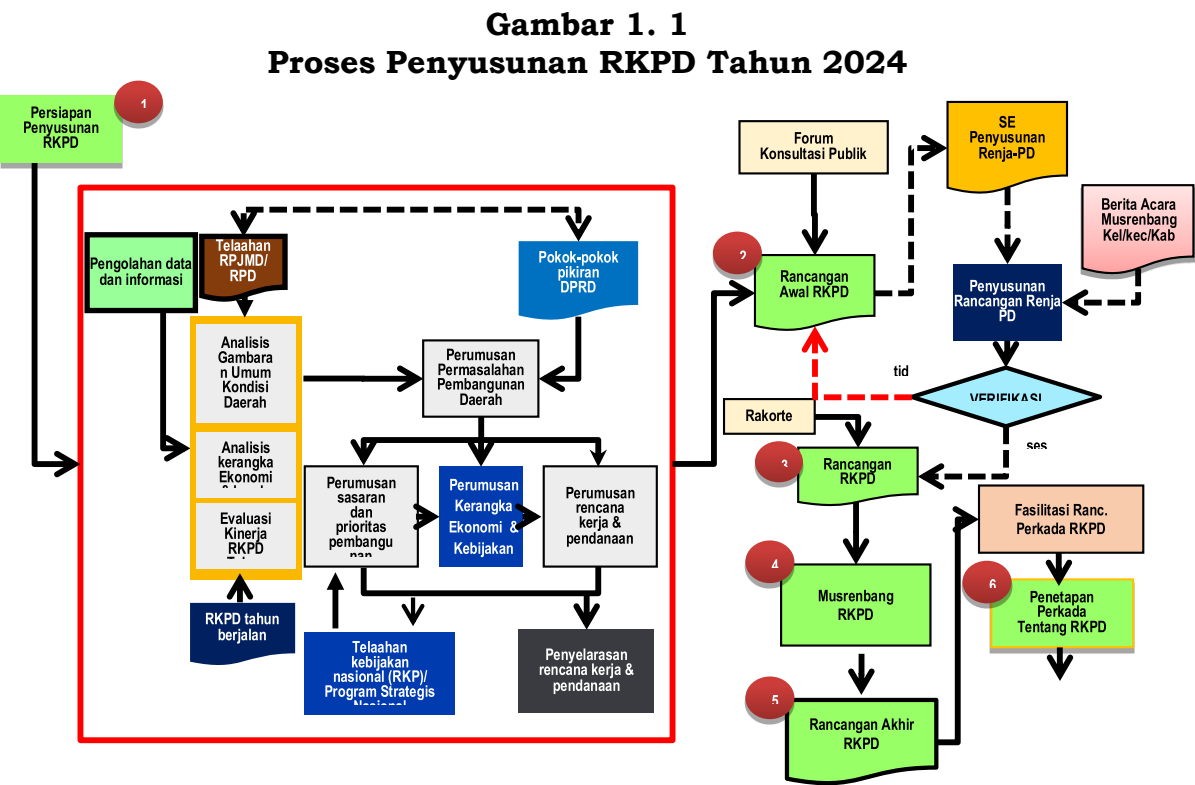
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang disusun berbasis data (*data-based planning*), berbasis risiko (*risk based planning*), dengan pendekatan *money follow program* dengan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting yakni a) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD/RPD ; b) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah; c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD/RPD ; d) Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Penyusunan program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2024 memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Batang sesuai Tema Pembangunan Tahun 2024 adalah **“Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah”**.

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 meliputi: a) Persiapan penyusunan RKPD,

- b) Penyusunan rancangan awal RKPD, c) Penyusunan rancangan RKPD, d) Pelaksanaan musrenbang RKPD, e) Perumusan rancangan akhir RKPD, dan f) Penetapan RKPD tahun 2024.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 secara sederhana terlihat pada gambar berikut ini.



Sejalan dengan amanat peraturan perundang undangan diatas, penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan hal yang amat penting dalam rangka implementasi program dan kegiatan pembangunan tahunan. Melalui RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 akan dirumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan secara khusus bagi masyarakat Batang.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

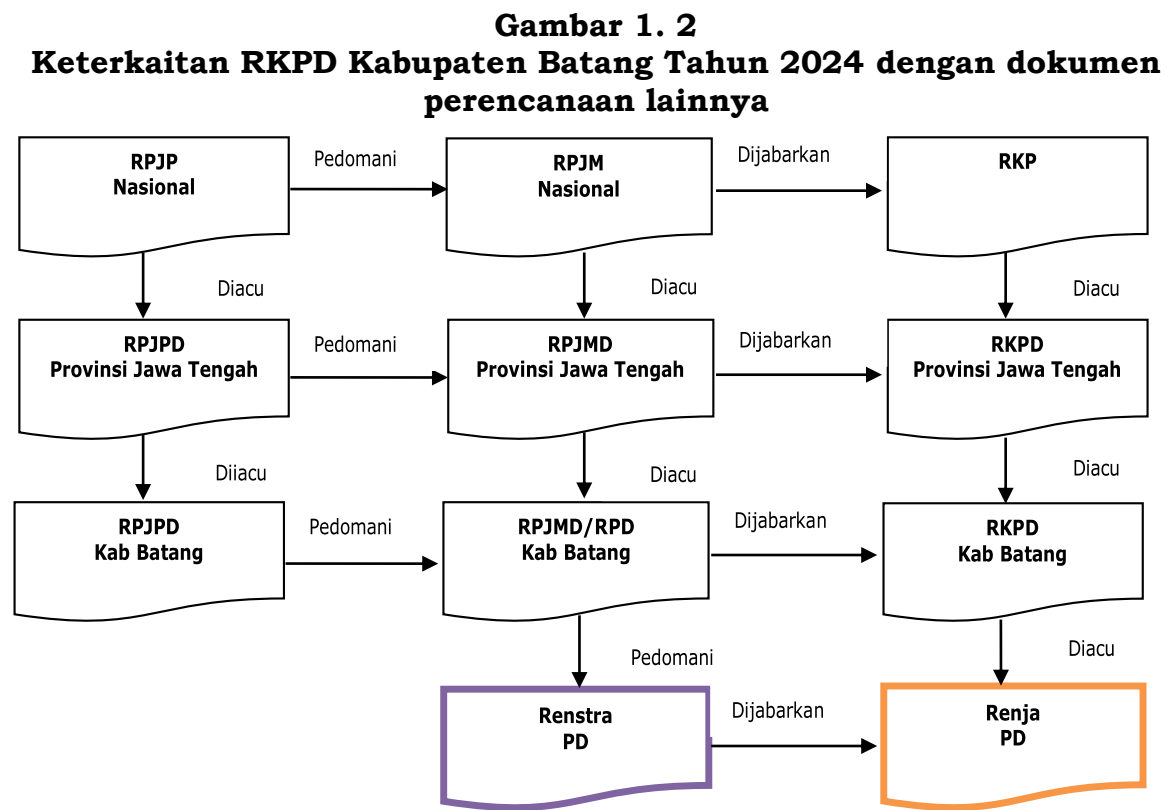
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 dan dengan tetap menjaga sinergitas dengan dokumen perencanaan lainnya ditingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, secara hierarki, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Batang Tahun 2024 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 akan digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024, serta sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Tahun 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2024.

Secara ringkas hubungan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

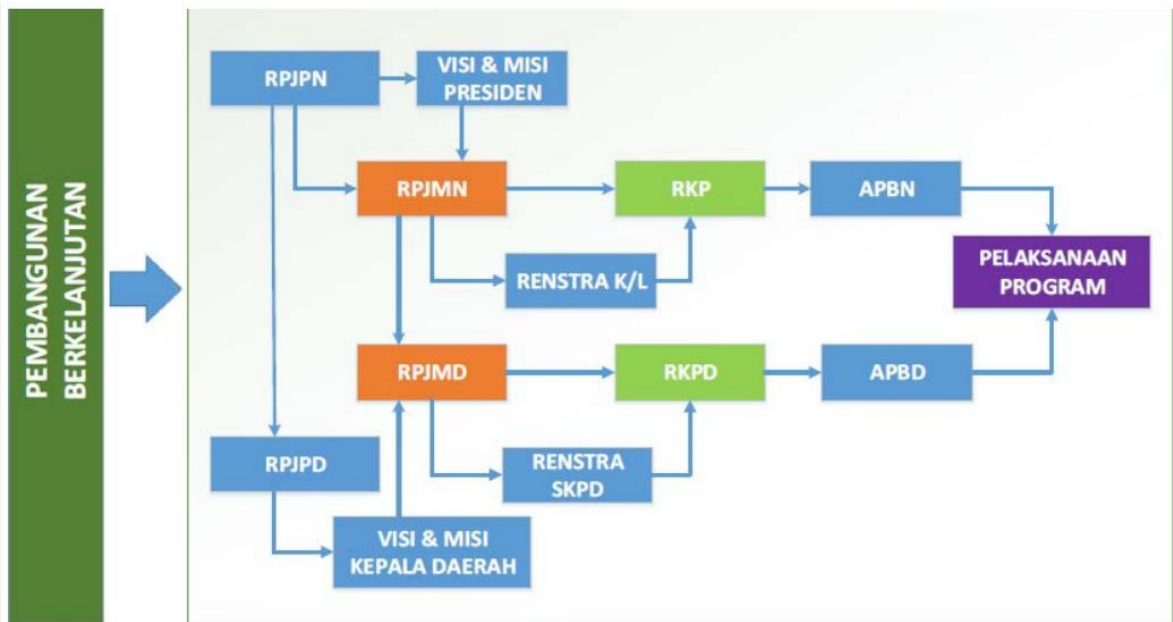


a. Keterkaitan RKPD dengan SDG’s

Integrasi pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional dan daerah. Dalam rencana pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah dan diterjemahkan melalui

tujuan sasaran Kabupaten, kemudian dijadikan sebuah rencana pembangunan daerah, dari hasil RPJMD maka dibuat sebuah Renstra SKPD untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaan program maka bersumber dari APBD. Dengan pola integrasi seperti ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan baik ditingkatan pusat ataupun tingkatan daerah.

Gambar 1. 3
Keterkaitan dokumen Perencanaan Daerah dengan SGD's

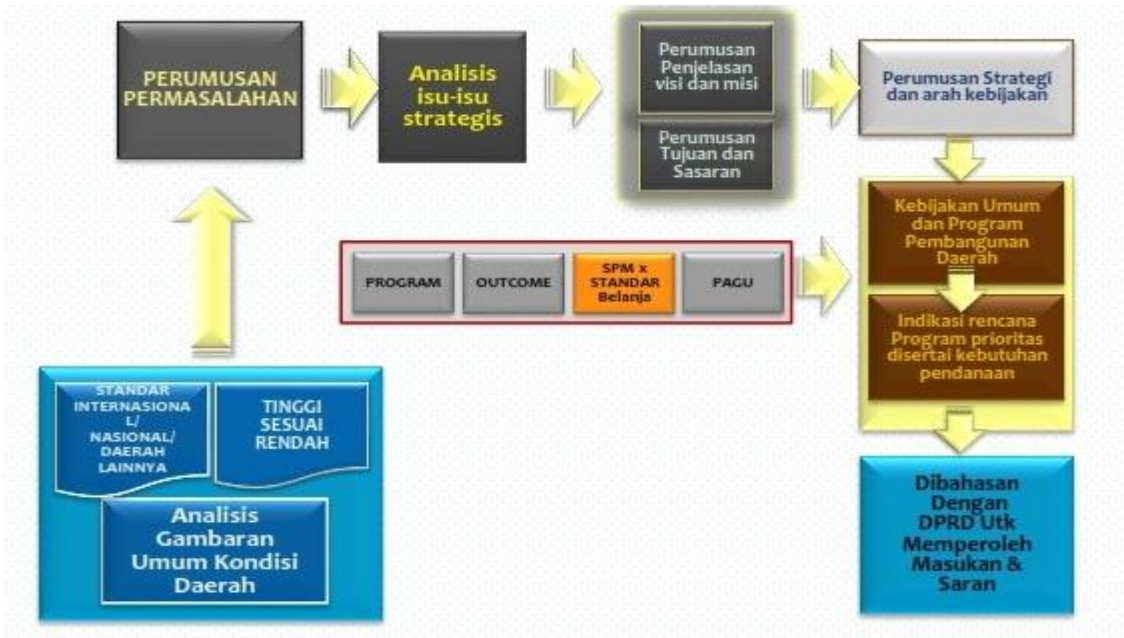


Sumber : Bappenas, 2017

b. Keterkaitan RKPD dengan SPM

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar (SPM) dimuat dalam dokumen RKPD dimana kondisi dan rencana pemenuhan harus diintegrasikan dalam setiap substansi di RKPD. Perumusan pemenuhan SPM dalam dokumen RKPD meliputi kondisi eksisting pemenuhan SPM ditahun berjalan, besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar, serta perogram/ kegiatan beserta target capaian, alokasi dana indikatif, serta sumber pendanaan pemenuhan pelayanan dasar ditahun perencanaan.

Gambar 1. 4
Integrasi SPM dalam RKPD



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2024, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024.

Sementara tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2024.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Tahun 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2024.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaah kondisi ekonomi makro Kabupaten Batang mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan prioritas yang termuat dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi serta tindak lanjut yang diperlukan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

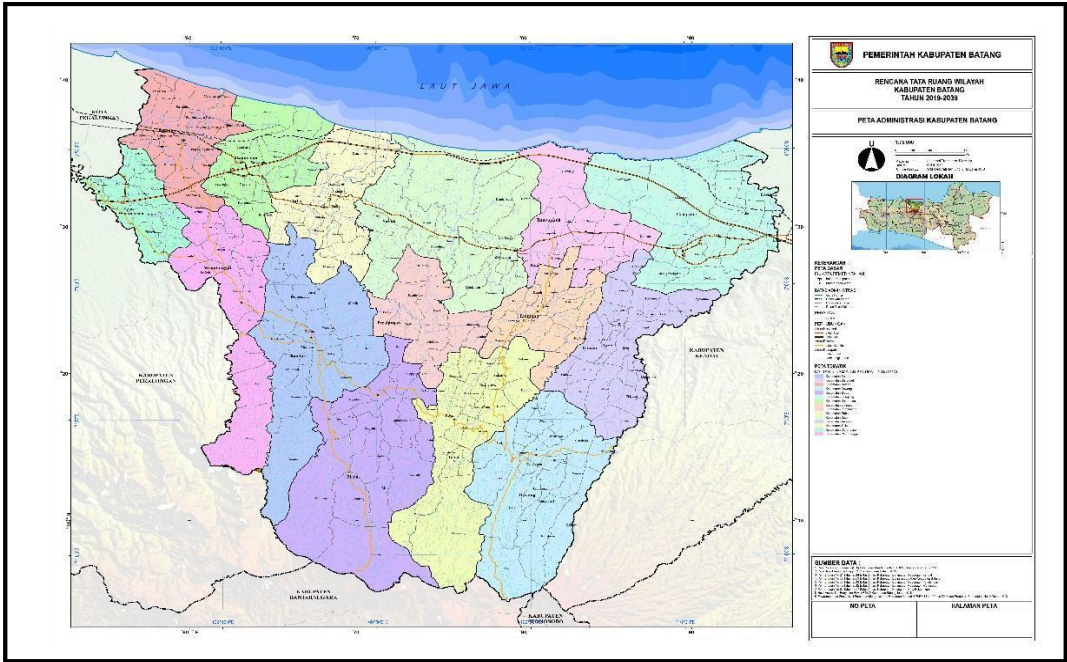
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

1. Geografis

Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 85.721 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar dengan batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Batang



Sumber : RTRW Kabupaten Batang 2019-2039

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan.

Kecamatan Batang terdiri dari 12 desa 9 kelurahan; Kecamatan Wonotunggal terdiri dari 15 desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 desa; Kecamatan Bandar terdiri dari 17 desa; Kecamatan Blado terdiri dari 18 desa; Kecamatan Reban terdiri dari 19 desa; Kecamatan Tulis terdiri dari 17 desa; Kecamatan Subah terdiri dari 17 desa; Kecamatan Limpung terdiri dari 17 desa; Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 desa; Kecamatan Bawang terdiri dari 20 desa; Kecamatan Tersono terdiri dari 20 desa; Kecamatan Kandeman terdiri dari 13 desa; Kecamatan Pecalungan terdiri dari 10 desa, serta Kecamatan Banyuputih terdiri dari 11 desa.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang

Kecamatan	Luas (Ha)	Desa/Kel	Dukuh	RT	RW
01. Wonotunggal	5.565,54	15	71	197	61
02. Bandar	7.936,76	17	79	351	71
03. Blado	9.644,78	18	74	234	68
04. Reban	6.947,07	19	67	248	68
05. Bawang	7.696,92	20	88	354	104
06. Tersono	5.135,60	20	79	263	73
07. Gringsing	7.989,29	15	89	313	83
08. Limpung	3.271,72	17	80	233	70
09. Banyuputih	4.242,36	11	49	175	47
10. Subah	9.166,67	17	68	287	72
11. Pecalungan	3.342,14	10	56	182	54
12. Tulis	4.419,15	17	52	173	52
13. Kandeman	4.060,20	13	62	231	59
14. Batang	3.931,44	21	114	493	111
15. Warungasem	2.445,61	18	68	221	73
Jumlah	85.721	248	1.096	3.955	1.066

Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kabupaten Batang berada di tengah-tengah pulau jawa, dan merupakan koridor jalan pantura yang merupakan koridor pertumbuhan Pulau Jawa. Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

1.	Pekalongan	:	9 km
2.	Pemalang	:	43 km
3.	Tegal	:	72 km
4.	Brebes	:	85 km
5.	Cirebon	:	144 km
6.	Jakarta	:	392 km
7.	Kendal	:	64 km
8.	Semarang	:	93 km
9.	Surabaya	:	480 km

Gambar 2. 2 Posisi Kabupaten Batang



Sumber: Bapelitbang Kab. Batang, 2021

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Secara Morfologi, wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi 3, yaitu wilayah bagian utara, wilayah bagian tengah dan wilayah bagian selatan.

Morfologi wilayah bagian utara, mencakup Kecamatan Gringsing, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Batang, yaitu:

- Bagian Barat dan bagian timur terbentuk sedimentasi, wilayah

bagian tengah terjadi karena pengangkatan parsial dan sedimentasi setempat.

- Dilalui jalan arteri Primer Pantura, jalan Tol, KA
- Direncanakan pelabuhan pengumpul.
- Berkembang perkotaan dan Industri

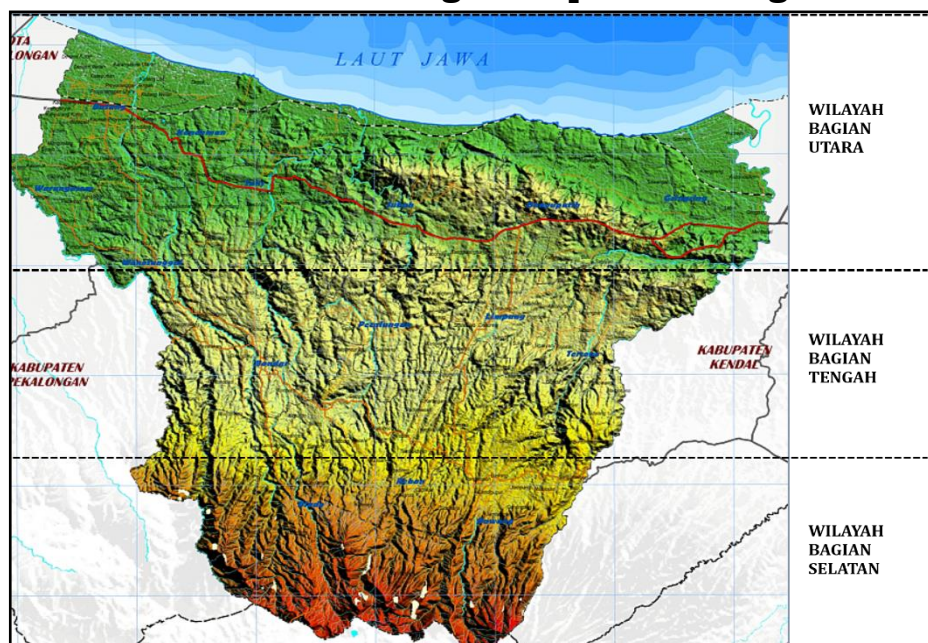
Morfologi wilayah bagian tengah, mencakup Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, dan Kecamatan Warungasem, yaitu:

- Terbentuk karena pelapukan batuan gunung (sebagian besar jenis tanah Latosol)
- Dilalui jalan Provinsi (JKP-1)
- Sebagian besar dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan hutan rakyat

Morfologi wilayah bagian selatan, yang mencakup Kecamatan Bawang, Kecamatan Reban, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Wonotunggal, yaitu:

- Merupakan bagian dari puncak Pegunungan Dieng dan Rogojembangan.
- Merupakan daerah rawan bencana tanah longsor dan gunung berapi.
- Sebagian tanah diluar kawasan hutan digunakan untuk budidaya sayur-sayuran

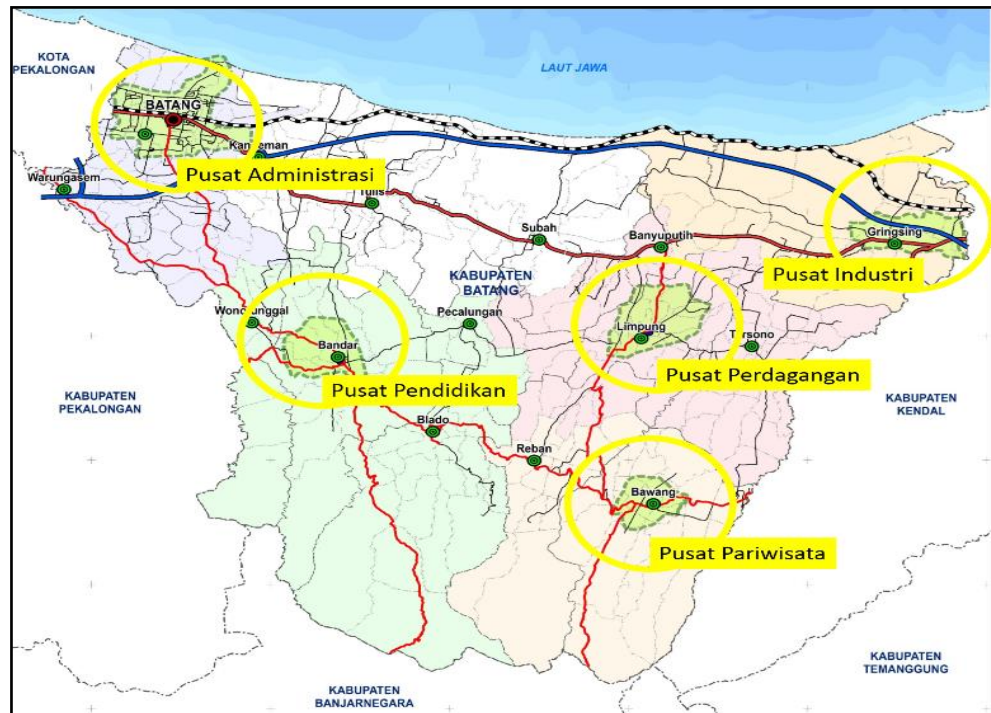
Gambar 2. 3
Peta Morfologi Kabupaten Batang



Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Strategi pusat pertumbuhan dilaksanakan melalui rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang terbentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten. Sistem perkotaan dimaksud meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PPL meliputi Kawasan Perkotaan Batang dan Kawasan Perkotaan Limpung. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK meliputi Kawasan Perkotaan Tulis, Kawasan Perkotaan Banyuputih, Kawasan Perkotaan Warungasem, Kawasan Perkotaan Bandar, Kawasan Perkotaan Kandeman, Kawasan Perkotaan Wonotunggal, Kawasan Perkotaan Subah, Kawasan Perkotaan Pecalungan, Kawasan Perkotaan Blado, Kawasan Perkotaan Reban, Kawasan Perkotaan Bawang, Kawasan Perkotaan Tersono dan Kawasan Perkotaan Gringsing. PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPL meliputi Kawasan Desa Sengon Kecamatan Subah, Kawasan Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang, Kawasan Desa Maduguwongjati Kecamatan Gringsing, Kawasan Desa Sidalang Kecamatan Tersono, Kawasan Desa Toso Kecamatan Bandar, Kawasan Desa Kembanglangit Kecamatan Blado, dan Kawasan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal.

Gambar 2. 4
Peta 5 Wilayah Pengembangan Kabupaten Batang



Sumber : Master Development Plan 5 Kota Pusat Pertumbuhan Kabupaten Batang Tahun 2018

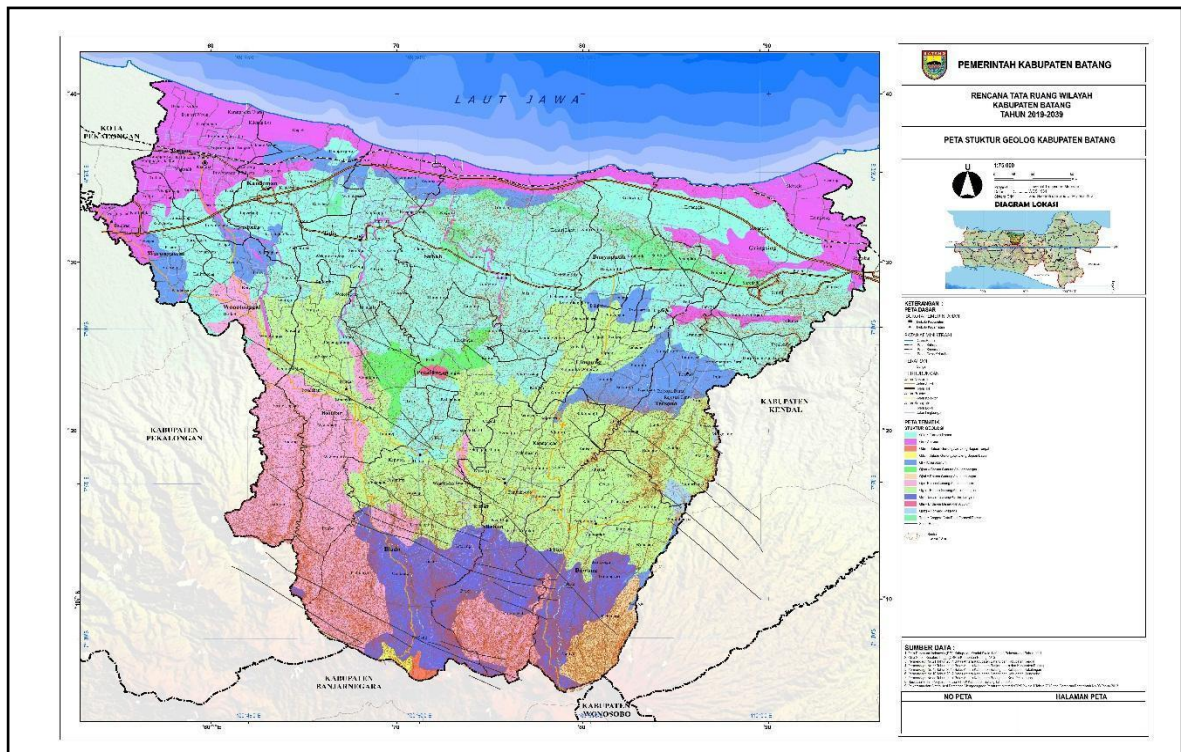
Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata diatas 2.000 m, yaitu:

a. Gunung Prau	: tinggi 2.565 mdpl
b. Gunung Sipandu	: tinggi 2.241 mdpl
c. Gunung Gajah Mungkur	: tinggi 2.101 mdpl
d. Gunung Alang	: tinggi 2.239 mdpl
e. Gunung Butak	: tinggi 2.222 mdpl

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan berbasis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam.

Dari kondisi geologi wilayah Kabupaten Batang sebagian besar adalah pegunungan dengan geologi sebagai berikut: Aluvial 13,08%; aluvial dan endapan danau 0,11%; anggota batupasir 1,74%, Batuan gunung api Dieng 0,29%, Batuan gunungapi Jembangan 46,38%, Formasi Damar 32,00%, Formasi Kaligetas 0,31% dan Kipas Aluvial 6,10%. Susunan geologi tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

Gambar 2. 5
Peta Geologi Kabupaten Batang



Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

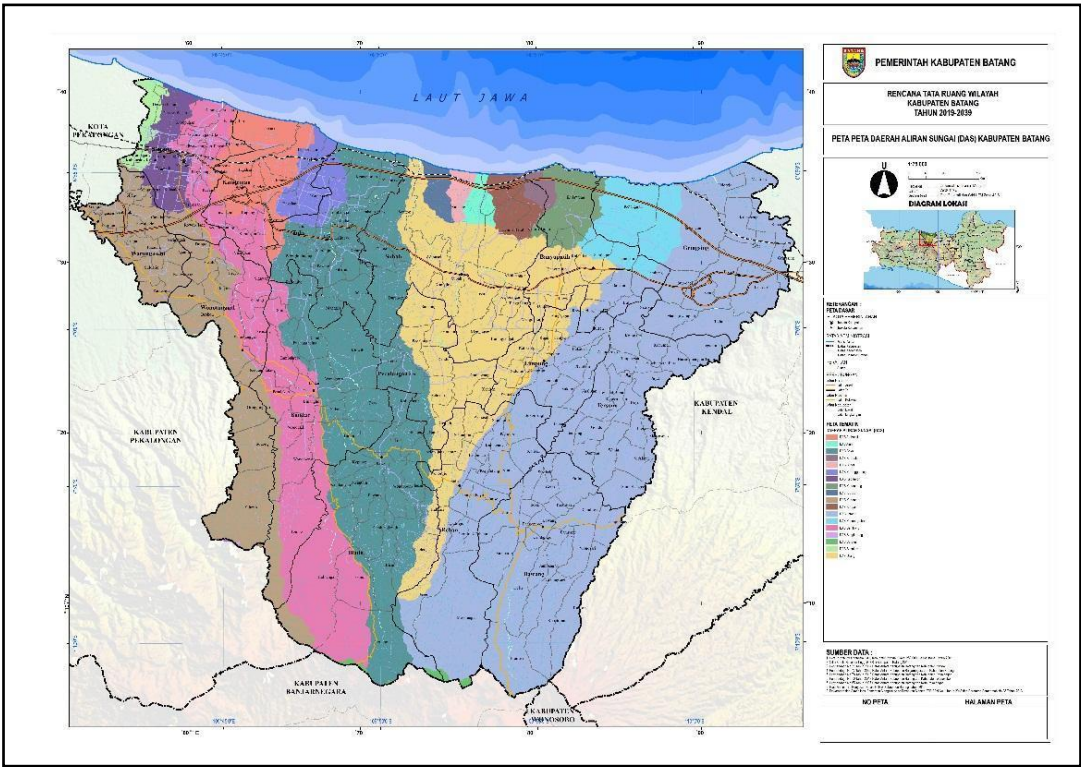
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Batang memiliki 14 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mana DAS tersebut masuk dalam 2 Wilayah Sungai (WS) kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah yaitu WS Pemali-Comal dan WS Bodri-Kuto. Pada WS Pemali-Comal terdapat 11 DAS yang meliputi DAS Kupang, DAS Gabus, DAS Sambong, DAS Sono, DAS Karanggeneng, DAS Boyo, DAS Urang, DAS Kretek, DAS Bugel, DAS Kuripan, dan DAS Kedondong.

Sedangkan pada WS Bodri-Kuto terdapat 4 DAS meliputi DAS Brontak, DAS Kedondong, DAS Kuto, dan DAS Pesanggrahan. Data Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Batang

No.	Wilayah Sungai/ Daerah Aliran Sungai	Kabupaten	Pengelola
I.	WS Pemali-Comal		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Kupang	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
2.	DAS Gabus	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
3.	DAS Sambong	Kab. Batang	
4.	DAS Sono	Kab. Batang	
5.	DAS Karanggeneng	Kab. Batang	
6.	DAS Boyo	Kab. Batang	
7.	DAS Urang	Kab. Batang	
8.	DAS Kretek	Kab. Batang	
9.	DAS Bugel	Kab. Batang	
10.	DAS Kuripan	Kab. Batang	
11.	DAS Kedondong	Kab. Batang	
II.	WS Bodri-Kuto		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Brontak	Kab. Batang	
2.	DAS Kedondong	Kab. Batang	
3.	DAS Kuto	Kab. Batang dan Kab. Kendal	
4.	DAS Pesanggrahan	Kab. Batang dan Kab. Kendal	

Gambar 2. 6
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Batang



Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Dari aspek klimatologi, diketahui bahwa suhu udara rata-rata di Kabupaten Batang berkisar berkisar antara 25°C-32°C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 55 persen sampai dengan 91 persen. Sedangkan untuk curah hujan, menurut data pengukuran tinggi curah hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, selama tahun 2021 rata-rata hari hujan terbanyak berada pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 23,20 hari. Rata-rata curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Februari yaitu 970,07 mm.

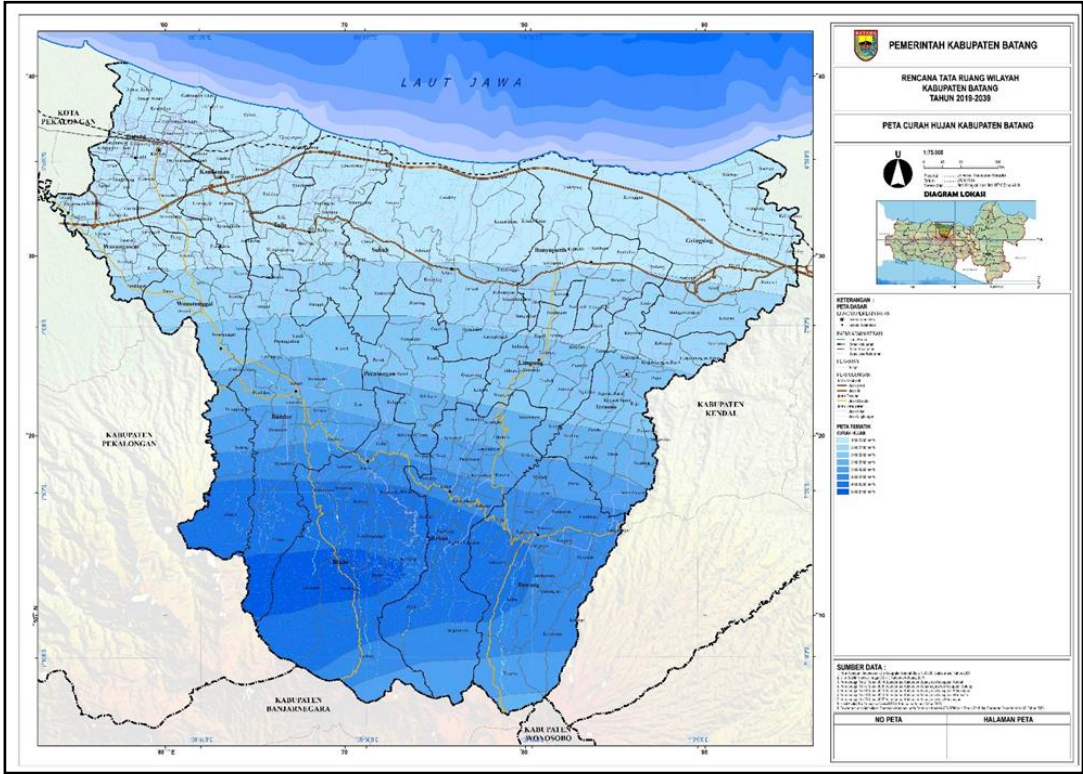
Tabel 2. 3
Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan
di Kabupaten Batang Tahun 2022

No	Bulan	Rata-rata Hari Hujan Bulanan (Hari)	Rata-rata Curah Hujan Bulanan (mm)
1	Januari	20,20	471,93
2	Februari	22,87	511,53
3	Maret	16,13	263,53
4	April	13,27	184,14
5	Mei	1,13	310,00

No	Bulan	Rata-rata Hari Hujan Bulanan (Hari)	Rata-rata Curah Hujan Bulanan (mm)
6	Juni	13,93	189,53
7	Juli	8,80	130,13
8	Agustus	6,20	96,87
9	September	9,40	104,17
10	Oktober	19,33	412,87
11	November	15,80	288,67
12	Desember	18,53	439,87
Rata rata 2022		14,97	283,60
Rata rata 2021		12,70	299,66
Rata rata 2020		11,83	304,58
Rata rata 2019		11,16	177,35

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka, BPS 2023

Gambar 2. 7
Peta Curah Hujan Kabupaten Batang



Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Kabupaten Batang yang terbagi menjadi 15 kecamatan memiliki luas total yaitu 85.721 Ha. Berdasarkan hasil digitasi tutupan lahan pada tahun 2021, luas Kabupaten Batang terdiri dari

13.532 Ha atau 15,8% adalah lahan terbangun dan 72.189 Ha atau 84,2% adalah lahan tidak terbangun.

Dari lahan terbangun tersebut terdapat industri seluas 5.028 Ha (5,9%), permukiman seluas 8.036 Ha (9,4%), PLTU seluas 219 Ha (0,3%), dan jalan seluas seluas 250 Ha (0,3%). Sedangkan dari lahan tidak terbangun terdapat cagar alam seluas 82 Ha (0,1%), hutan seluas 17.987 Ha (21,0%), perkebunan seluas 2.773 Ha (3,2%), Sawah seluas 17.386 Ha (20,3%), tegalan seluas 32.380 Ha (37,8%), dan tubuh perairan seluas 1.580 Ha (1,8%).

Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Batang terdapat beberapa perubahan pada beberapa tahun terakhir. pada berdasarkan hasil digitasi, pada tahun 2016 lahan sawah di Kabupaten Batang seluas 17.487 Ha, kemudian pada tahun 2018 terdapat sedikit pengurangan luasan sebesar 0,03% menjadi 17.481 Ha, dan data terakhir menunjukkan pada tahun 2020 terdapat pengurangan lahan sebesar 0,54% sawah menjadi 17.386 Ha. Pengurangan lahan sawah memang berkaitan erat dengan dinamika perekonomian, walaupun begitu lahan sawah harus dilindungi untuk menjamin ketahanan pangan di masa depan. Besaran Lahan Sawah yang Dilindung (LSD) berdasarkan hasil verifikasi aktual, dari luas 17.064,67 ha LSD yang ditetapkan dalam Kepmen ATR/ Ka BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, LSD yang disepakati dipertahankan adalah seluas 15.228,12 ha dan yang disepakati tidak dapat dipertahankan adalah seluas 1.404,39 ha.

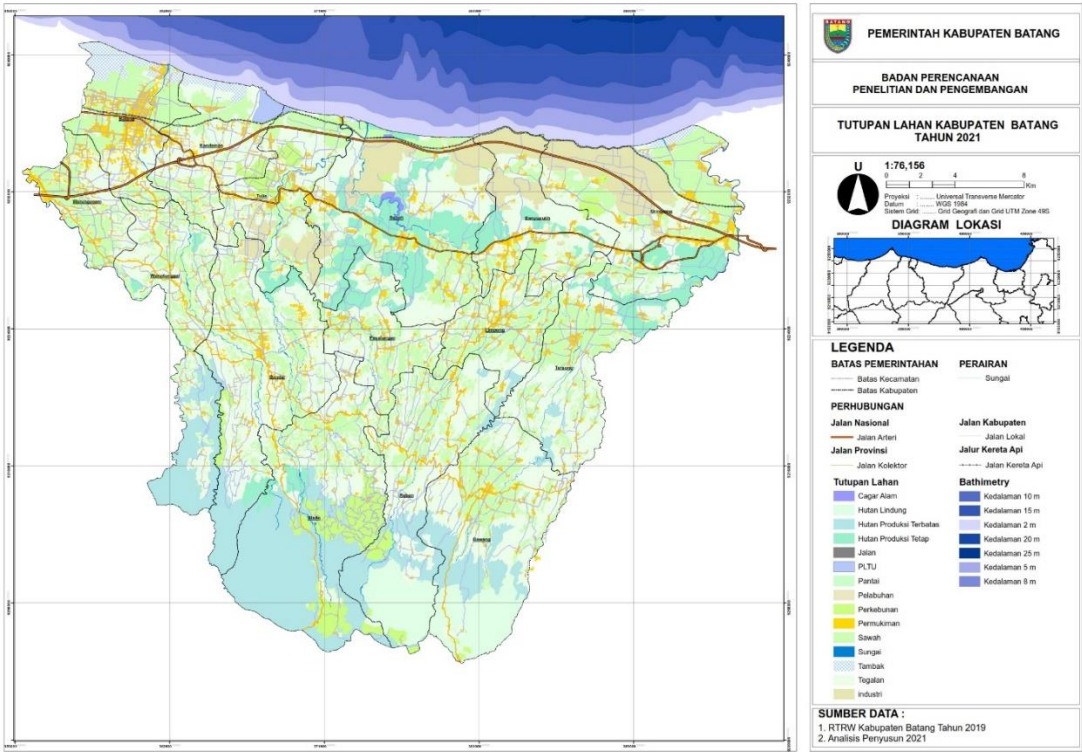
Tabel 2. 4
Tutupan Lahan Kabupaten Batang Tahun 2021

No.	Tutupan Lahan	Luah (Ha)
1	Cagar Alam	82
2	Hutan Lindung	2.930
3	Hutan Produksi Terbatas	9.442
4	Hutan Produksi Tetap	5.615
5	Industri	5.028
6	Jalan	250

No.	Tutupan Lahan	Luah (Ha)
7	Pantai	33
8	Perkebunan	2.773
9	Permukiman	8.036
10	PLTU	219
11	Sawah	17.386
12	Sungai	596
13	Tambak	952
14	Tegalan	32.380
Jumlah Luas		85.721

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang
2021

Tabel 2. 5
Peta Tutupan Lahan Tahun 2021



Sumber: Digitasi citra satelit 2021

Dengan berbagai macam kondisi tersebut menggambarkan juga bahwa wilayah Kabupaten Batang berpotensi rawan bencana alam. Melihat potensi luasan wilayah bencana di Kabupaten Batang, setidaknya terdapat 24.202 ha merupakan daerah rawan banjir meskipun dengan tingkat bahaya yang berbeda, yaitu 4.555 ha

bahaya rendah, 5.713 ha bahaya sedang dan 13.934 ha bahaya tinggi. Sekitar 35.821 ha merupakan daerah rawan tanah longsor, dengan tingkat bahaya rendah seluas 5.158 ha, bahaya sedang seluas 19.483 ha, dan tingkat bahaya tinggi seluas 11.179 ha . Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Batang seluas 718 ha juga berpotensi terkena abrasi.

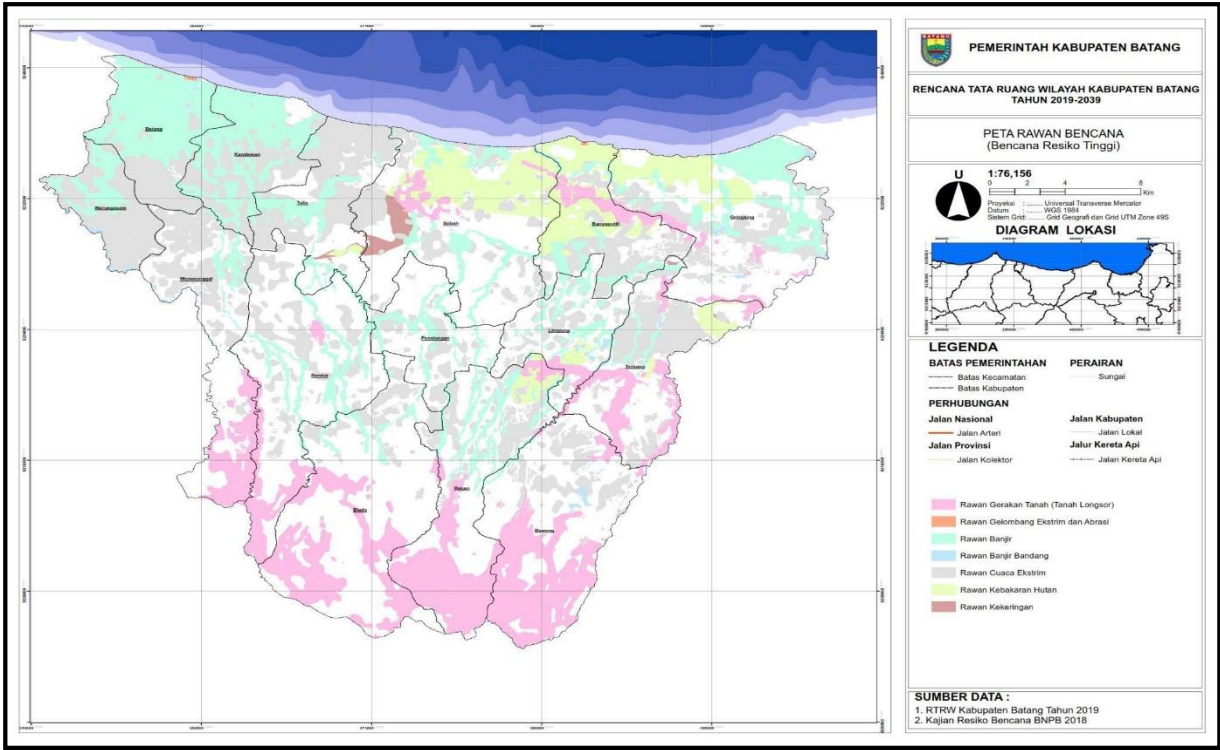
Tabel 2. 6
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Batang

No	Jenis Bahaya	Tingkat Risiko	Luas Bahaya (Ha)	Luas Permukiman Terdampak (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp.Milyar)	Ekonomi (Rp. Milyar)	Lingkungan (Ha)
1	Banjir	TINGGI	9.850	2.791,67	188.405	701.872	411.104	0
2	Banjir Bandang	TINGGI	4.041	144,46	57.394	382.137	177.927	8
3	Cuaca Ekstrem	TINGGI	35.842	9.025,32	652.504	5.108.009	1.352.170	0
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	TINGGI	7.813	11,85	146.486	584.549	348.510	0
5	Gempa Bumi	SEDANG	0	492,70	0	0	0	0
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	TINGGI	25.025	12,74	0	0	960.958	2.088
7	Kekeringan	TINGGI	178.864	1.137,20	807.593	0	4.500.054	4.728
8	Tanah Longsor	TINGGI	28.238	140,35	58.445	596.296	1.718.013	21

Sumber: Data INARISK BNPB, 2022 dan Dokumen KRB Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Batang. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) dari 8 (delapan) jenis bahaya di Kabupaten Batang memiliki potensi dengan tingkat risiko TINGGI. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Batang dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Batang dan perlu terus diantisipasi melalui mitigasi dan penanganan pasca bencana dan kesiapan dimasa mendatang untuk antisipasi jika sewaktu waktu kejadian tersebut terulang kembali, sehingga dampak bencana baik korban jiwa maupun materiil dapat diminimalisir.

Gambar 2. 8
Peta Rawan Bencana Di Kabupaten Batang



Sumber: RTRW Kabupaten Batang 2019-2039 dan KRB BNPB 2018

Peta diatas hanya menampilkan risiko bencana tinggi yang termuat dalam dokumen Kajian Rawan Bencana tahun 2018 yang disusun oleh BNPB yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.

Sampai dengan tahun 2021, terjadi 60 kejadian bencana di Kabupaten Batang dengan jenis bencana antara lain angin topan, banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 66 bencana, kejadian bencana di tahun 2019 lebih tinggi tercatat 100 bencana. Dilihat dari kondisi kejadian bencana pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Batang kedepan masih perlu kewaspadaan yang ekstra khususnya dampak dari anomali cuaca seperti tanah longsor dan angin topan walaupun secara data tercatat sudah mengalami penurunan bencana dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 2. 7
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Batang

No	Tahun	Kejadian Bencana						Jumlah
		Kebakaran	Angin Topan	Tanah Longsor	Laka Laut	Jembatan Ambrol	Banjir	
1	2017	11	6	11	0		2	30
2	2018	46	5	8	0		2	61
3	2019	39	12	14	0		35	100
4	2020	35	5	18	0		8	66
5	2021	8	19	22	3	1	7	60

Sumber: BPBD Kabupaten Batang 2022

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Batang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Batang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam.

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk pengelolaan kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya selain itu juga diarahkan pada 5 (lima) satuan wilayah pengembangan (SWP). Arah kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya sebagai berikut.

- 1. Kawasan Peruntukan Lindung
Kawasan peruntukan lindung diarahkan pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan ekosistem *mangrove*.
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung terdapat di Kecamatan Bawang, Blado dan Reban seluas kurang lebih 2.937 ha. Kawasan resapan air dengan kriteria memiliki kelerengan diatas 40%

tersebar di Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis dan Wonotunggal seluas 1.880 ha.

- b. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar embung, dan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan.

Sempadan pantai diatur sepanjang 100 meter dari garis pantai yang ditentukan berada di Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah dan Tulis seluas kurang lebih 134 ha. Sempadan sungai meliputi sungai tidak bertanggung di dalam dan luar kawasan perkotaan, sungai bertanggung di dalam dan luar kawasan perkotaan serta sungai yang terpengaruh pasang surut tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan sekitar embung atau waduk ditentukan 50 meter dari tepi muka air tertinggi. Kemudian untuk RTH di perkotaan meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Batang dengan luas 2.508 ha terdiri dari 1.672 ha RTH publik dan 836 ha RTH privat.

- c. Kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam (cagar alam) berada di Kecamatan Subah seluas 103,65 ha yang terdiri dari Cagar Alam Peson Subah I seluas 9,68 ha, Cagar Alam Peson Subah II seluas 10,61 ha dan Cagar Alam Ulolanang Kecubung seluas 83,36 ha.
- d. Kawasan cagar budaya berupa kawasan kota pusaka di Kecamatan Batang, Wonotunggal dan Blado, serta peninggalan bersejarah berupa aset pusaka alam, aset pusaka budaya ragawi, aset pusaka budaya tak ragawi dan aset pusaka saujana yang tersebar di seluruh kecamatan.
- e. Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, puting beliung, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi dan letusan gunung api, kebakaran, kekeringan dan gerakan tanah. Dengan area sebagai berikut :
 1. Kawasan rawan bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi meliputi seluruh kecamatan
 2. Kawasan rawan bencana banjir bandang dengan kelas bahaya tinggi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Banyuputih dengan kelas bahaya sedang dan Kecamatan Pecalungan yang tidak rawan bencana banjir bandang.

3. Kawasan rawan bencana angin puting beliung dengan kelas bahaya sedang meliputi seluruh kecamatan.
4. Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi meliputi Kecamatan Batang, Gringsing, Kandeman, Subah dan Tulis.
5. Kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan kelas bahaya sedang meliputi Kecamatan Blado, Bawang dan Reban.
6. Kawasan rawan bencana kebakaran dengan kelas bahaya sedang terdiri dari kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono dan Tulis. Kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Batang, Kawasan Perkotaan Limpung dan Kawasan Perkotaan Bandar.
7. Kawasan rawan bencana kekeringan dengan kelas bahaya sedang meliputi seluruh kecamatan.
8. Kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan kelas bahaya tinggi dengan luas kurang lebih 3.993 ha meliputi Kecamatan Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado, Gringsing, Limpung, Reban, Subah, Tersono dan Wonotunggal.
9. Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi kawasan imbuhan yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) Pekalongan-Pemalang dan CAT Subah serta sempadan mata air yang ditetapkan paling sedikit dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air meliputi mata air Bismo, Siu dan Sigintung di Kecamatan Blado, mata air Watulumbung di Kecamatan Reban, mata air Ngreco, Sikidang dan Kuntulan di Kecamatan Bawang, mata air Klesem di Kecamatan Wonotunggal.
10. Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan pantai berhutan mangrove dengan luas kurang lebih 122 ha meliputi Kecamatan Banyuputih dengan luas 18 ha, Batang dengan luas 21 ha, Gringsing dengan luas 24 ha, Kandeman dengan luas 37 ha, Subah dengan luas 7 ha dan Tulis dengan luas 15 ha.

2. Kawasan Peruntukan Budi Daya

Kawasan peruntukan budidaya diarahkan untuk pengembangan kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

- a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 8.705,53 ha meliputi Kecamatan Bandar, Blado, Reban dan Wonotunggal. Kawasan hutan produksi tetap seluas 6.634,57 ha meliputi Kecamatan Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado, Gringsing, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, Wonotunggal.
- b. Kawasan hutan rakyat seluas 1.134 ha meliputi Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, Wonotunggal.
- c. Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.
 1. Kawasan tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka penyediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Batang dengan luas kurang lebih 26.394 ha yang meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas 16.675 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas 9.719 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
 2. Kawasan hortikultura dengan luas 10.807 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
 3. Kawasan perkebunan berupa perkebunan rakyat dengan luas 4.009 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
 4. Kawasan peternakan berupa pengembangan kegiatan budi daya ternak unggas, hewan kecil, dan hewan besar berada di seluruh kecamatan.
- d. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan yang dilengkapi dengan sarana penunjang.
 1. Kawasan perikanan tangkap meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut.

2. Kawasan perikanan budidaya berupa budi daya tambak seluas 283 ha di Kecamatan Batang, Gringsing dan Subah, dan budidaya air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan.
 3. Kawasan perikanan yang dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut meliputi Pelabuhan Perikanan Klidang Lor berada di Kecamatan Batang, Pelabuhan Perikanan Roban berada di Kecamatan Subah dan Pelabuhan Perikanan Celong berada di Kecamatan Banyuputih.
- e. Kawasan pertambangan dan energi meliputi kawasan pertambangan mineral logam dan batuan di Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih Gringsing, Wonotunggal, Bandar dan Blado. Kawasan panas bumi di Kecamatan Bawang dan kawasan pembangkitan tenaga listrik PLTU di Kecamatan Kandeman dan Tulis, PLTP di Kecamatan Bawang dan PLTMH di seluruh kecamatan.
 - f. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.310 ha berada di Kecamatan Bandar, Banyuputih, Batang, Blado, Gringsing, Kandeman, Reban, Tulis, dan Wonotunggal. Luasan kawasan peruntukan industri tersebut belum termasuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dari 450 ha menjadi 4.300 ha.
 - g. Kawasan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan. Pariwisata alam meliputi wisata pantai di Kecamatan Batang, Kandeman, Banyuputih, Gringsing. Kemudian agrowisata berada di Kecamatan Blado dan wisata alam lainnya. Pariwisata budaya meliputi wisata sejarah berada di Reban, Wonotunggal, Gringsing. Wisata kampung batik di Kecamatan Batang serta wisata religi di Kecamatan Kandeman dan Blado. Pariwisata buatan wisata air dan kawasan wisata lainnya dikembangkan di seluruh kecamatan. Destinasi wisata unggulan meliputi Pantai Sigandu sebagai ikon destinasi wisata pantai berada di Kecamatan Batang, agrowisata Sikembang sebagai ikon destinasi wisata pegunungan, wisata alam Bukit

Sikuping sebagai ikon destinasi wisata petualangan dan wisata budaya Silurah sebagai ikon destinasi wisata budaya.

- h. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan seluas 8.358 ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 8.875 ha.

Sedangkan arahan kebijakan kawasan strategis didasarkan atas fungsi kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi yaitu:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Koridor Perkotaan Batang-Kandeman;
 - b. Kawasan Pelabuhan Batang;
 - c. Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegero dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
 - b. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan;
 - c. Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan;
 - d. Pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah;
 - e. Pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegero dan Pagilaran;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas di lokasi PLTU Jawa Tengah
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan;
- b. Pengaturan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi wilayah secara geografis dan administrasi maka potensi pengembangan wilayah dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya menjadi 5 (lima) Satuan Wilayah Pengembangan sebagai berikut:

- a. Satuan Wilayah Pengembangan Batang dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Batang meliputi:

1. Kecamatan Batang;
2. Kecamatan Kandeman; dan
3. Kecamatan Warungasem.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini perdagangan dan jasa; pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan; perikanan; industri perikanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri dan jasa; peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri; pengolahan hasil perikanan; pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegoro dan Pagilaran serta pengembangan komoditas pertanian perkebunan.

- b. Satuan Wilayah Pengembangan Bandar dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Bandar meliputi:

1. Kecamatan Wonotunggal;
2. Kecamatan Pecalungan;
3. Kecamatan Bandar; dan
4. Kecamatan Blado.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; agroindustri; perdagangan dan jasa; perikanan darat; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: peningkatan produktivitas komoditas

hortikultura dan pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen, pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegero dan Pagilaran, pelestarian kawasan hutan lindung, percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung, serta peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan pertambangan.

- c. Satuan Wilayah Pengembangan Subah dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Subah meliputi:

1. Kecamatan Subah; dan
2. Kecamatan Tulis.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah industri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan pertambangan; perikanan; perdagangan dan jasa; transit perjalanan; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri; peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan industri; pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pengembangan komoditas pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen serta peningkatan produktivitas komoditas hortikultura.

- d. Satuan Wilayah Pengembangan Gringsing dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gringsing meliputi:

1. Kecamatan Gringsing; dan
2. Kecamatan Banyuputih.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah industri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; pertambangan; perikanan; perdagangan dan jasa; transit perjalanan; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri, peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan industri; pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan

komoditas pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen.

- e. Satuan Wilayah Pengembangan Limpung dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Limpung meliputi:
 - 1. Kecamatan Limpung;
 - 2. Kecamatan Tersono;
 - 3. Kecamatan Reban; dan
 - 4. Kecamatan Bawang.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perdagangan dan jasa; agroindustri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; pertambangan; perikanan darat; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: pengembangan agroindustri, peningkatan produktivitas komoditas hortikultura; pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen, pelestarian kawasan hutan lindung, percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung serta peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan pertambangan.

Tabel 2. 8
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Batang (Ha)

No.	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Rakyat
1	Bandar	-	829,06	265,95	304,88
2	Banyuputih	-	-	531,64	-
3	Batang	-	-	-	-
4	Bawang	1.597,97	853,99	480,84	122,94
5	Blado	2,80	4.344,98	314,97	69,49
6	Gringsing	-	-	1.030,19	-
7	Kandeman	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Rakyat
8	Limpung	-	-	119,58	53,77
9	Pecalungan	-	-	400,04	-
10	Reban	1.336,98	1.086,20	85,88	7,68
11	Subah	-	-	2.620,59	169,80
12	Tersono	-	-	543,28	82,33
13	Tulis	-	-	144,66	0,40
14	Warungasem	-	-	-	-
15	Wonotunggal	-	1.591,30	96,95	322,28
	Grand Total	2.937,75	8.705,53	6.634,56	1.133,56

Sumber: RTRW Kab. Batang 2019-2039

Dari tabel diketahui Kawasan hutan sesuai peruntukannya, area Kawasan hutan lindung terluas berada di Kecamatan Bawang seluas 1.597,97 Ha, hutan lindung sangat dijaga kelestariannya dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi. untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas terluas berada di Kecamatan Blado seluas 4.344,98 Ha, Pada Hutan Produksi Terbatas diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sedangkan area Kawasan Hutan Produksi Tetap terluas di Kecamatan Subah seluas 2.620,59 Ha, masyarakat diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya tetapi dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan. Area Kawasan Hutan Rakyat terluas di Kecamatan Wonotunggal seluas 322,28 Ha, dalam Kawasan hutan rakyat diperbolehkan bersyarat pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan.

3. Demografi

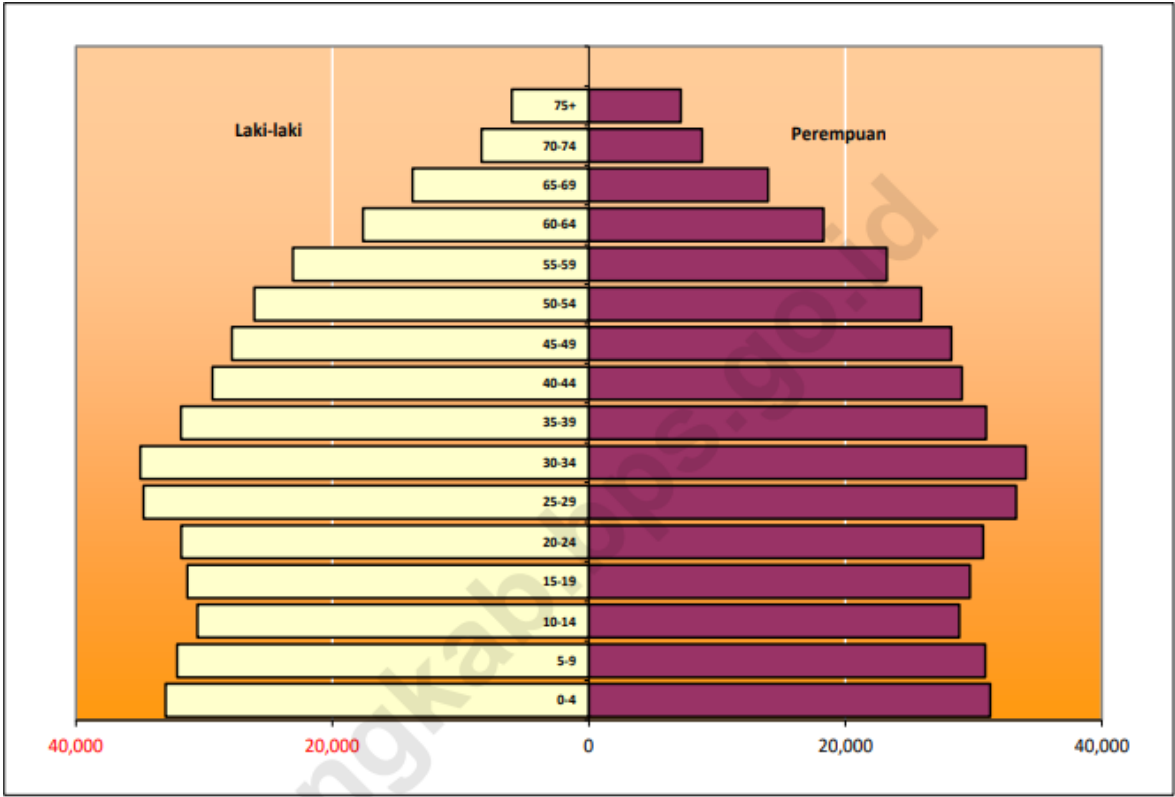
Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan Data dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 817.100 jiwa dengan komposisi 412.365 laki-laki dan 404.735 perempuan. Penduduk terbanyak di Kecamatan Batang sebanyak 16, 35 persen dan paling sedikit di kecamatan Pecalungan 4,12 persen dari total penduduk Kabupaten Batang. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 sebesar 2,18 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tahun 2021 mencapai 966,5963 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang dengan kepadatan sebesar 3.447,210 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Blado sebesar 493,572 jiwa/km².

Tabel 2. 9
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki Laki	Perempuan	
1	Wonotunggal	19.723	19.358	39.081
2	Bandar	36.551	36.483	73.034
3	Blado	23.062	23.271	46.333
4	Reban	20.905	20.210	41.115
5	Bawang	28.025	28.352	56.377
6	Tersono	20.843	20.434	41.277
7	Gringsing	32.417	31.736	64.153
8	Limpung	22.788	22.938	44.726
9	Subah	27.370	26.473	53.843
10	Tulis	20.330	19.369	39.699
11	Batang	68.974	67.171	136.145
12	Warungasem	27.430	27.414	54.844
13	Kandeman	28.361	27.939	56.300
14	Pecalungan	16.711	16.147	32.858
15	Banyuputih	18.875	18.440	37.315
Jumlah		412.365	404.735	817.100

Sumber: Batang dalam Angka, 2023

Gambar 2. 9
Piramida Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2022



Sumber:Kabupaten Batang Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Kelompok Usia
Tahun 2022

Usia	Total			
	Pria	Wanita	Jumlah	%
0-4	33.004	31.305	64.309	7,87
5-9	32.116	30.910	63.026	7,71
10-14	30.518	28.882	59.400	7,27
15-19	31.306	29.715	61.021	7,47
20-24	31.779	30.757	62.536	7,65
25-29	34.734	33.319	68.053	8,33
30-34	34.989	34.084	69.073	8,45
35-39	31.817	30.987	62.804	7,69
40-44	29.359	29.095	58.454	7,15
45-49	27.834	28.266	56.100	6,87
50-54	26.082	25.919	52.001	6,36
55-59	23.072	23.235	46.307	5,67
60-64	17.621	18.292	35.913	4,40
65-69	13.751	13.980	27.731	3,39
70-74	8.383	8.821	17.204	2,11
75+	6.000	7.168	13.168	1,61
Jumlah	412.365	404.735	817.100	100

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2023

Dari Gambar 2.10 dan Tabel 2.8 diketahui bahwa berdasarkan kelompok usia penduduk, populasi penduduk usia muda dan produktif lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk populasi usia non produktif. Pertumbuhan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), sedangkan penduduk kabupaten Batang terbanyak berada pada rentang usia 30 - 34 tahun sebanyak 8,52 persen. Kondisi ini disebut sebagai bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif semakin banyak dan jumlah penduduk non produktif semakin berkurang. Bonus demografi akan menjadi keuntungan bagi suatu daerah jika penduduk produktif tersebut merupakan penduduk yang berkualitas yaitu berpendidikan tinggi dan terampil atau berkeahlian.

Selain indikator diatas, terdapat indikator demografi lain yang juga penting. Indikator tersebut adalah Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Selama periode 2018-2022, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 45,02 persen. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2018 dari 100 penduduk usia produktif Kabupaten Batang menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Batang terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 42,78 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif Kabupaten Batang tahun 2022 menanggung beban 42-43 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas).

Tabel 2. 11
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan

**Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Batang
Tahun 2018 - 2022**

TAHUN	TIDAK / BELUM TAMAT SD	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	STRATA
2018	26,00	35,53	19,04	15,43	1,10	2,80
2019	24,38	37,01	20,39	14,17	1,02	3,03
2020	24,58	33,86	20,35	16,97	0,81	3,44
2021	24,92	33,71	21,69	16,02	0,66	2,99
2022	23,94	33,60	21,48	17,13	0,80	3,05

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

Tingkat pendidikan penduduk berusia diatas 10 tahun selama 5 (lima) tahun terakhir (2017 - 2021) di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel 2.9. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase penduduk pada masing-masing tingkat pendidikan relatif stabil dan belum ada peningkatan yang signifikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingginya persentase penduduk yang tidak tamat SD dan tamat SD dan rendahnya persentase pendudukan yang lulus Diploma dan Sarjana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi rendah. Hal ini berpengaruh pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum menunjukkan peningkatan secara signifikan.

Tabel 2. 12
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<= SD	50,99	57,00	53,28
SMP	22,75	17,51	20,76
SMA / SMK	21,36	14,38	18,70
Dipl / Univ	4,89	11,12	7,26

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, 2020

Selain berpengaruh pada capaian Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pendidikan penduduk juga berpengaruh pada tingkat pendidikan angkatan kerja. Dari Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja penduduk Batang pada Tahun 2020 mayoritas adalah lulusan SD (53,28%). Sedangkan lulusan sekolah menengah (SMP

dan SMA/SMK) hampir seimbang yaitu sebesar 20,76% untuk lulusan SMP dan 18,70% untuk lulusan SMA/SMK. Lulusan diploma/universitas menduduki porsi paling kecil yaitu sebesar 7,26%.

Tabel 2. 13
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang

Kelompok Usaha	2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian (A)	26,64	18,59	23,58	25,75	15,93	21,81
Industri (M)	38,18	27,64	37,69	37,69	31,15	35,07
Jasa-jasa (S)	35,18	53,77	36,56	36,56	52,92	43,12

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang Tahun 2020-2021

Lapangan pekerjaan utama berdasarkan kelompok usaha dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Batang yang berusia 15 tahun keatas pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.9. dari tabel ini dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Batang bekerja pada sektor industri yaitu sebesar 37,69% pada Tahun 2020 dan menurun menjadi 35,07% pada Tahun 2021. persentase penduduk yang bekerja pada kelompok usaha pertanian juga mengalami penurunan dari 23,58% pada Tahun 2020 menjadi 21,81% pada Tahun 2021. Penurunan persentase penduduk yang bekerja pada kelompok usaha industri dan pertanian ini berdampak pada peningkatan persentase penduduk yang bekerja pada kelompok usaha jasa-jasa dari 36,56% pada Tahun 2020 menjadi 43,12% pada Tahun 2021.

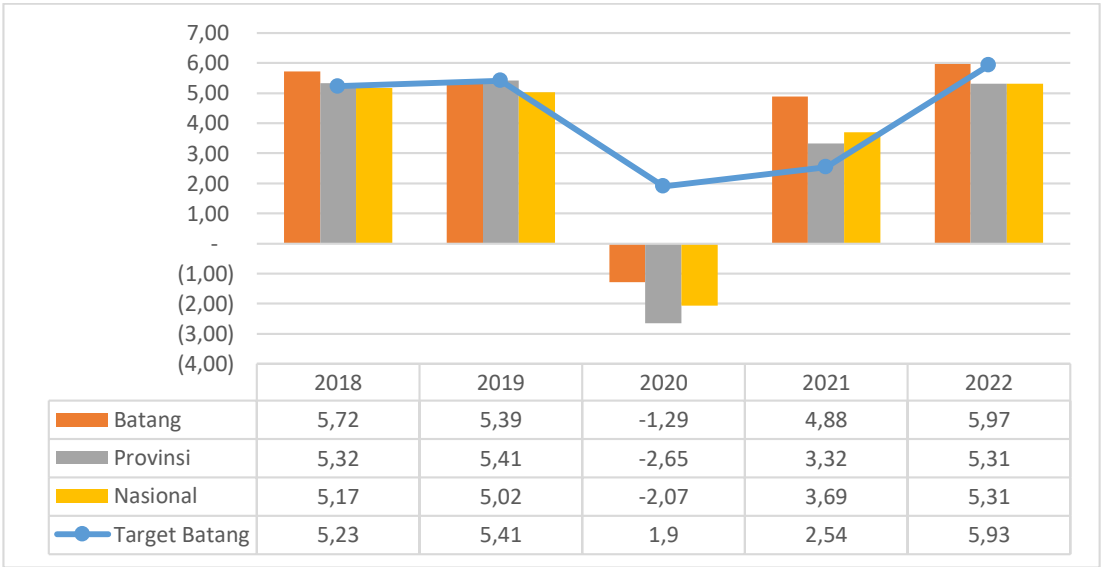
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kesejahteraan sosial dapat dilihat dari kondisi capaian indikator berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada kisaran minus 1,29 persen hingga 5,97 persen. Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 5,72 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen akibat dari adanya pandemi *Covid-19*. Capaian ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,90 persen. Bukan hanya di Kabupaten Batang, pandemi *Covid-19* juga menyebabkan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen dan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Batang meningkat menjadi 4,88 persen, lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu sebesar 2,54 persen. Angka ini juga masih lebih tinggi dibanding dengan capaian provinsi dan nasional yakni sebesar 3,32 persen dan 3,69 persen. Kemudian meningkat kembali menjadi 5,97 persen dimana angka capaian ini jauh lebih tinggi dibanding capaian provinsi (5,31 persen), nasional (5,31 persen) serta target PE Kabupaten Batang (5,93 persen). Kondisi ekonomi Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2018 – 2022 sebagaimana tersaji dalam grafik gambar berikut :

Gambar 2. 10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang tidak terlepas dari sumbangan dari masing-masing sektor perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Kabupaten Batang mengalami tren kenaikan tiap tahun. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2022 berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang 8.717.236,63 juta rupiah (34,20%) dari total PDRB yang disusul dari sektor Pertanian dengan menyumbang sebesar 5.051.904,20 juta rupiah (19,82%). Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3.175.421,16 juta rupiah (12,46%) dan sektor konstruksi sebesar 1.854.880,61 juta rupiah (7,28%) yang kemudian di lima besar terakhir penyumbang PDRB terbesar dari sektor Jasa Pendidikan 1.408.731,62 juta rupiah (5,53%).

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang Tahun 2022 mencapai 25.488.048,01 juta rupiah, jumlah ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 23.125.755,99 juta rupiah. Selengkapnya PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2018-2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 14
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.181.085,29	4.395.176,61	4.656.020,56	4.746.326,78	5.051.904,20
B	Pertambangan dan Penggalian	633.002,46	646.533,89	660.610,77	706.207,85	722.803,73
C	Industri Pengolahan	6.964.171,94	7.436.242,61	7.368.499,52	7.883.059,12	8.717.236,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.002,95	13.758,78	14.383,77	15.673,91	16.649,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.144,91	22.419,44	23.209,85	23.743,67	24.779,49
F	Konstruksi	1.149.571,74	1.196.356,29	1.189.042,66	1.668.969,88	1.854.880,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.617.230,73	2.848.979,37	2.746.140,70	2.946.563,79	3.175.421,16
H	Transportasi dan Pergudangan	452.060,78	497.698,55	375.835,73	396.530,85	744.366,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	750.914,53	830.855,81	784.096,84	845.052,24	1.058.517,93
J	Informasi dan Komunikasi	518.948,47	579.618,62	679.710,57	710.773,34	734.157,78

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	352.044,55	367.418,38	369.556,79	394.436,65	431.428,06
L	Real Estate	210.244,34	224.537,47	222.325,48	227.883,62	242.399,80
M,N	Jasa Perusahaan	78.879,81	88.522,90	84.314,96	87.603,25	97.502,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	482.288,48	503.877,61	504.043,88	495.122,31	517.915,64
P	Jasa Pendidikan	1.224.573,58	1.345.408,13	1.353.876,24	1.371.476,63	1.408.731,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147.548,12	160.514,55	179.312,69	186.521,06	196.704,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	383.863,79	427.945,48	408.311,82	419.811,05	492.648,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		20.180.576,47	21.585.864,48	21.619.292,81	23.125.755,99	25.488.048,01

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

Sedangkan PDRB atas harga konstan Kabupaten Batang tahun 2022 sebesar 16.704.986,75 juta rupiah meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 15.764.265,54 juta rupiah. Kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor Industri Pengolahan dengan menyumbang sebesar 5.445.934,39 juta rupiah (32,60%) selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 3.016.331,06 juta rupiah (18,05%). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2.308.457,86 juta rupiah (13,81%) dari PDRB yang kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 1.160.652,38 juta rupiah (6,95%) dan lima besar penyumbang terbesar terakhir dari sektor Jasa Pendidikan sebesar 867.162,11 juta rupiah (5,19%). Peningkatan terbesar ADHK menurut Lapangan Usaha pada tahun 2022 berada di sektor Transportasi dan Pergudangan yakni mencapai angka 77,41% yang kemudian disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,32%.

Tabel 2. 15
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga
Konstan Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.771.604,81	2.861.458,05	2.977.772,61	2.963.785,83	3.016.331,06
B	Pertambangan dan Penggalian	402.437,45	406.042,94	405.324,81	428.966,34	425.714,77
C	Industri Pengolahan	4.828.125,72	5.091.398,13	4.947.572,62	5.164.177,57	5.445.934,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.042,04	11.662,00	12.376,51	13.600,45	14.337,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.975,42	18.616,75	19.059,92	19.292,48	19.742,41
F	Konstruksi	818.649,82	827.610,09	819.046,23	1.112.109,97	1.160.652,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.061.866,97	2.195.585,27	2.102.712,81	2.227.173,18	2.308.457,86
H	Transportasi dan Pergudangan	391.360,47	424.195,54	310.474,56	317.018,69	562.440,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	576.397,63	628.835,79	588.060,38	619.311,59	745.174,61
J	Informasi dan Komunikasi	556.287,38	614.640,75	719.911,65	752.583,55	775.319,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	245.049,54	251.831,84	253.493,64	259.462,43	260.903,41
L	Real Estate	174.238,65	183.684,34	181.361,19	183.778,74	192.365,06
M,N	Jasa Perusahaan	56.819,31	61.948,33	57.775,36	59.304,10	63.195,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	333.338,64	343.704,55	339.564,23	337.041,69	343.078,99
P	Jasa Pendidikan	787.758,45	849.340,21	848.468,12	849.039,14	867.162,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.831,92	115.243,59	125.776,75	129.472,68	134.422,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	307.841,59	341.086,84	321.825,63	328.147,12	369.755,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.448.625,81	15.226.885,02	15.030.577,04	15.764.265,54	16.704.986,75

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2023

Tabel 2. 16
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022

Sektor PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.13	3.24	4.06	-0.47	1.77
B. Pertambangan dan Penggalian	8.26	0.90	-0.18	5.83	-0.76
C. Industri Pengolahan	6.33	5.45	-2.82	4.38	5.46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.87	5.61	6.13	9.89	5.42
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.69	3.57	2.38	1.22	2.33
F. Konstruksi	10.88	1.09	-1.03	35.78	4.36
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.51	6.49	-4.26	5.95	3.65
H. Transportasi dan Pergudangan	4.71	8.39	-26.50	1.68	77.42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.79	9.10	-6.48	5.31	20.32
J. Informasi dan Komunikasi	10.53	10.49	17.13	4.54	3.02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.83	2.77	0.66	2.35	0.56
L. Real Estate	5.12	5.42	-1.26	1.33	4.67
M,N. Jasa Perusahaan	7.53	9.03	-6.74	2.65	6.56
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.13	3.11	-1.20	-0.74	1.79
P. Jasa Pendidikan	6.65	7.82	-0.10	0.07	2.13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	7.76	6.87	9.14	2.94	3.82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9.64	10.80	-5.65	1.96	12.68
Produk Domestik Regional Bruto	5.72	5.39	-1.29	4.88	5.97

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2023

Pada tahun 2022, pertumbuhan positif terjadi pada hampir semua sektor lapangan usaha kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh negatif di angka -0.76% . Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan perekonomian di Kabupaten Batang pasca terdampak pandemi Covid 19. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh hingga 77,42% setelah pada tahun 2020

tumbuh negatif di angka -26,50%. Sektor konstruksi kembali menurun ditahun 2022 walaupun sempat mengalami pertumbuhan signifikan akibat adanya pembangunan Kawasan Industri tahun 2021.

Tabel 2. 17
Distribusi persentase PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Sektor PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,72	20,36	21,53	20,52	19,82
B. Pertambangan dan Penggalian	3,14	3,00	3,06	3,05	2,84
C. Industri Pengolahan	34,51	34,45	34,08	34,09	34,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10
F. Konstruksi	5,70	5,54	5,50	7,22	7,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,97	13,20	12,70	12,74	12,46
H. Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,31	1,75	1,71	2,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	3,85	3,63	3,65	4,15
J. Informasi dan Komunikasi	2,57	2,69	3,14	3,07	2,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,74	1,70	1,71	1,71	1,69
L. Real Estate	1,04	1,04	1,03	0,99	0,95
M,N. Jasa Perusahaan	0,39	0,41	0,39	0,38	0,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	2,33	2,33	2,14	2,03
P. Jasa Pendidikan	6,07	6,23	6,26	5,93	5,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	0,73	0,74	0,83	0,81	0,77
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,90	1,98	1,89	1,82	1,93
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Jika dilihat dari distribusi persentase PDRB, seperti pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Batang masih

didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan (34,20%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (19,82%); dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,46%). Pada tahun 2022, ketiga sektor tersebut berkontribusi sebesar 66,48% dari total PDRB Kabupaten Batang, turun sebesar 0,87% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 67,35%. Dari ketiga sektor tersebut, penurunan kontribusi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang turun 0,7% pada tahun 2022 menjadi 19,82% dari 20,52% pada tahun 2021.

Sektor Konstruksi mengalami kenaikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Batang. Dari 5,50% pada tahun 2020, menjadi 7,22% di tahun 2021, atau mengalami kenaikan sebesar 1,72%. Pembangunan Kawasan industri menjadi faktor penting kenaikan persentase distribusi pada sektor tersebut. Sementara sektor-sektor lain cenderung stabil tanpa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan.

Nilai ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran mencapai 25.488.048.01 juta rupiah, yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 17.860.508.26 (70,07%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6.810.506,03juta rupiah (26,72%). Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 77,90 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori. Nilai PDRB Kabupaten Batang ADHB menurut pengeluaran selama periode tahun 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut masih dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel 2. 18
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)				
	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.405.094,23	15.465.989,48	15.568.041,10	16.184.573,40	17.860.508.26

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)				
	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	318.417,84	366.508,69	352.637,80	364.824,14	410.823.63
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.521.548,44	1.543.955,31	1.527.434,99	1.567.301,04	1.584.128.07
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8.578.176,99	8.625.319,98	6.116.316,15	6.229.771,65	6.810.506.03
Perubahan Inventori	2.995.114,50	- 476.473,55	521.481,68	390.464,63	500.782.76
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 7.637.775,54	- 3.939.580,44	- 2.364.548,91	- 1.611.178,87	-1.678.700.73
Produk Domestik Regional Bruto	20.180.576,47	21.585.719,48	21.621.362,81	23.125.755,99	25.488.048.01

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2023

Selama periode 2018-2022, konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran tahun 2022 peranannya masih begitu dominan yaitu sebesar 71,33 persen. Pengeluaran untuk pembentukan modal atau kapital (PMTB) porsinya terhadap PDRB menempati urutan kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2022 porsi PMTB sebesar 24,84 persen. Pada pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tahun 2022, hanya mencapai 5,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membentuk PDRB tidak mendominasi. Pada tahun 2018-2022, perdagangan Kabupaten Batang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa net ekspor barang dan jasa bernilai negatif, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Batang selama kurun waktu 2018-2022 selalu menunjukkan posisi “defisit” dimana mencapai -6,18 persen di tahun 2022. Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1,37 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian, sehingga pada masa mendatang akan semakin meningkat.

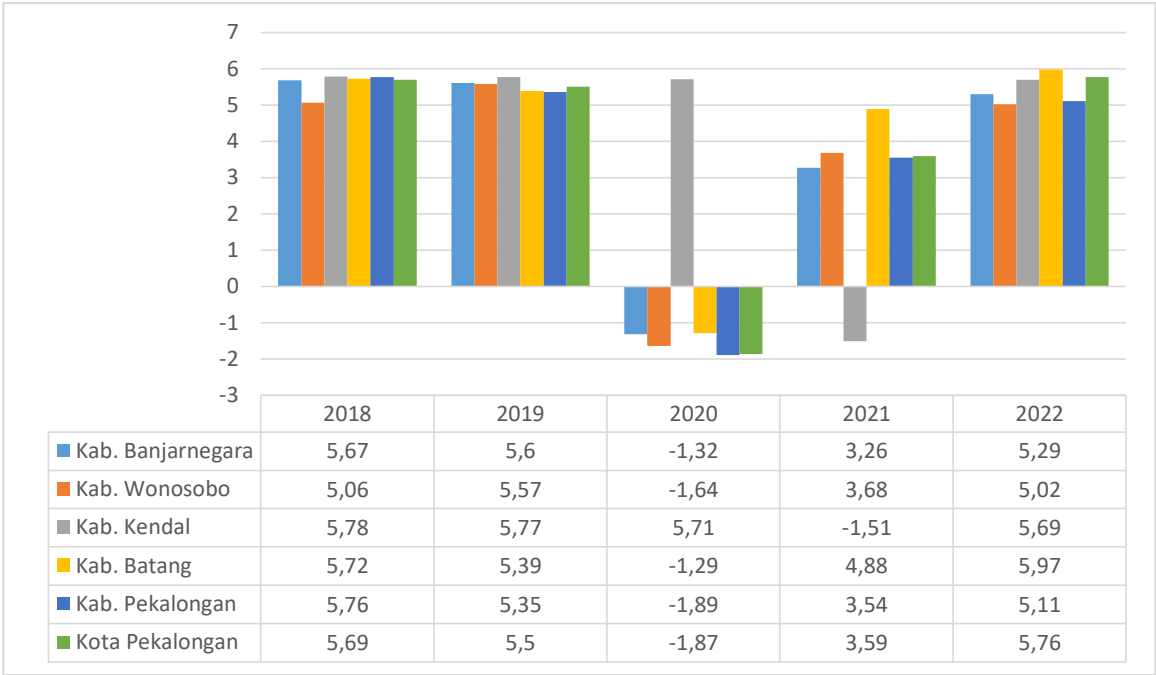
Tabel 2. 19
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten
Batang Tahun 2018 – 2022

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.701.889,34	11.196.748,99	11.068.624,84	11.265.953,40	11.916.678,77
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	204.284,29	229.889,33	217.574,16	218.713,77	229.482,09
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	964.636,04	971.488,58	960.782,78	960.632,13	961.400,63
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.610.136,30	5.357.248,90	3.839.547,20	3.924.731,82	4.150.417,12
Perubahan Inventori	1.358.284,85	- 434.472,76	504.245,43	372.517,51	479.746,43
Ekspor Barang dan Jasa	- 4.390.605,01	- 2.094.018,01	- 1.560.197,36	- 978.283,08	- 1.032.738,29
Produk Domestik Regional Bruto	14.448.625,81	15.226.885,02	15.030.577,04	15.764.265,54	16.704.986,75

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Kontraksi ekonomi di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Kabupaten/Kota di sekitar Batang hingga mencapai rentang minus 1,29 persen hingga minus 1,89 persen. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 ini, kondisi ekonomi di sekitar kabupaten/kota sekitar Batang sudah berangsur membaik yang ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2022 meningkat hingga menjadi 5,97 persen dari capaian 4,88 persen di tahun 2021. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan 5 Kabupaten/Kota sekitar yakni Kabupaten Kendal sebesar 5,69 persen, Kabupaten Wonosobo sebesar 5,02 persen, Kota Pekalongan sebesar 5,76 persen, Kabupaten Pekalongan sebesar 5,11 persen, dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 5,29 persen.

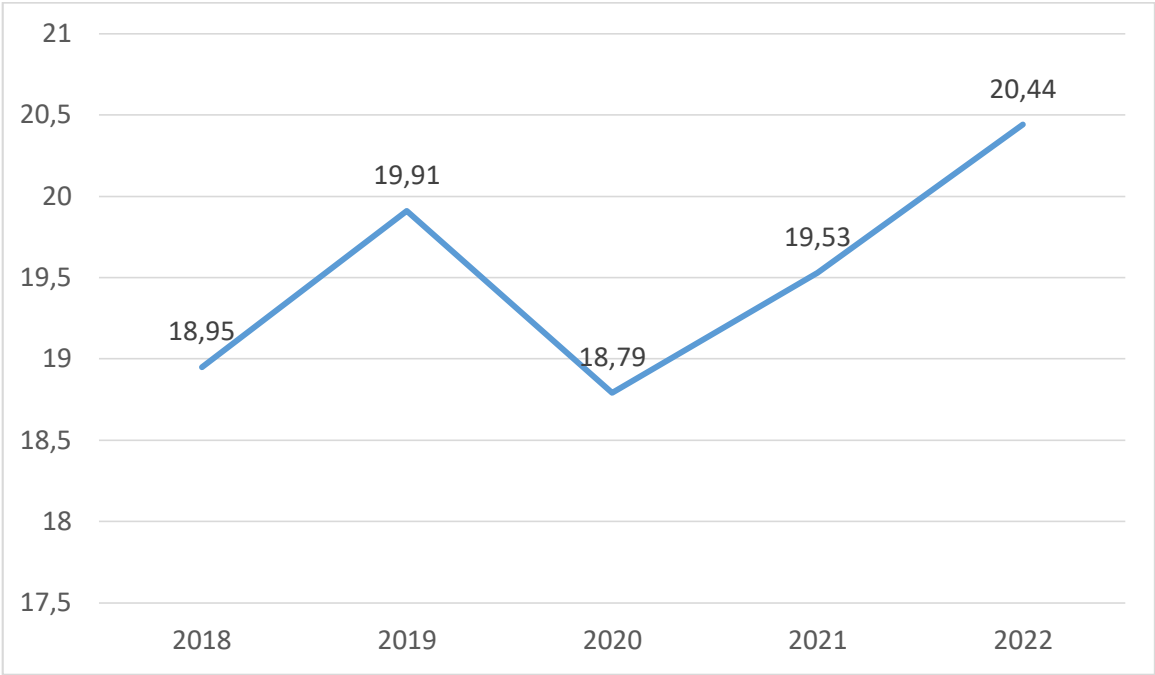
Gambar 2. 11
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan mengetahui besarnya nilai pendapatan per kapita yaitu dengan menghitung PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Batang kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan walaupun sempat menurun akibat adanya pandemi COVID 19 di tahun 2020. PDRB ADHK Kabupaten Batang tahun 2018 sebesar 18,95 juta Rupiah terus meningkat menjadi sebesar 20,44 juta Rupiah di tahun 2022, namun akibat dampak pandemi Covid-19, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Batang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 18,79 juta rupiah.

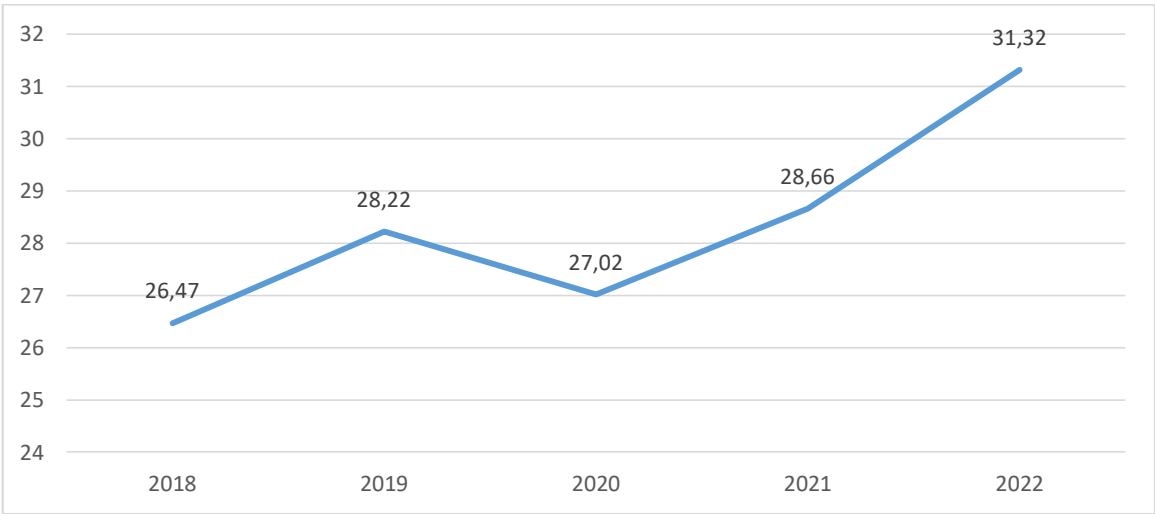
Gambar 2. 12
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Batang (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Batang 2023

Capaian PDRB per kapita ADHB Kabupaten Batang kurun 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018 sebesar 26,47 juta rupiah meningkat menjadi sebesar 26,47 persen menjadi 28,22 juta rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Batang mengalami penurunan menjadi sebesar 27,02 juta rupiah dan mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2022 menjadi sebesar 31,32. Perubahan PDRB per Kapita tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian juga karena faktor inflasi.

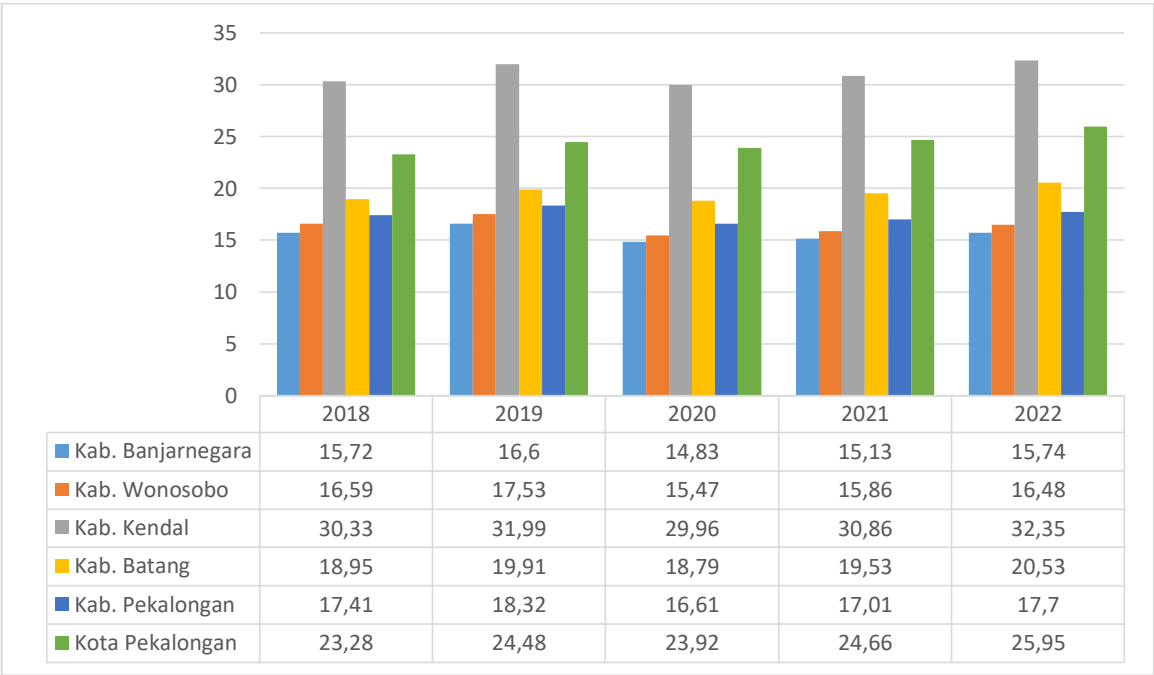
Gambar 2. 13
PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Batang



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

Capain PDRB Per Kapita Kabupaten Batang (20,53%) jika dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar terlihat lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara (15,74%), Kabupaten Wonosobo (16,48%), dan Kabupaten Pekalongan (17,7%). Namun capaian Kabupaten Batang tidak lebih tinggi dengan Kabupaten Kendal (32,35%) dan Kota Pekalongan (25,95%), sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :

Gambar 2. 14
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK dengan rata rata
capaian wilayah sekitar



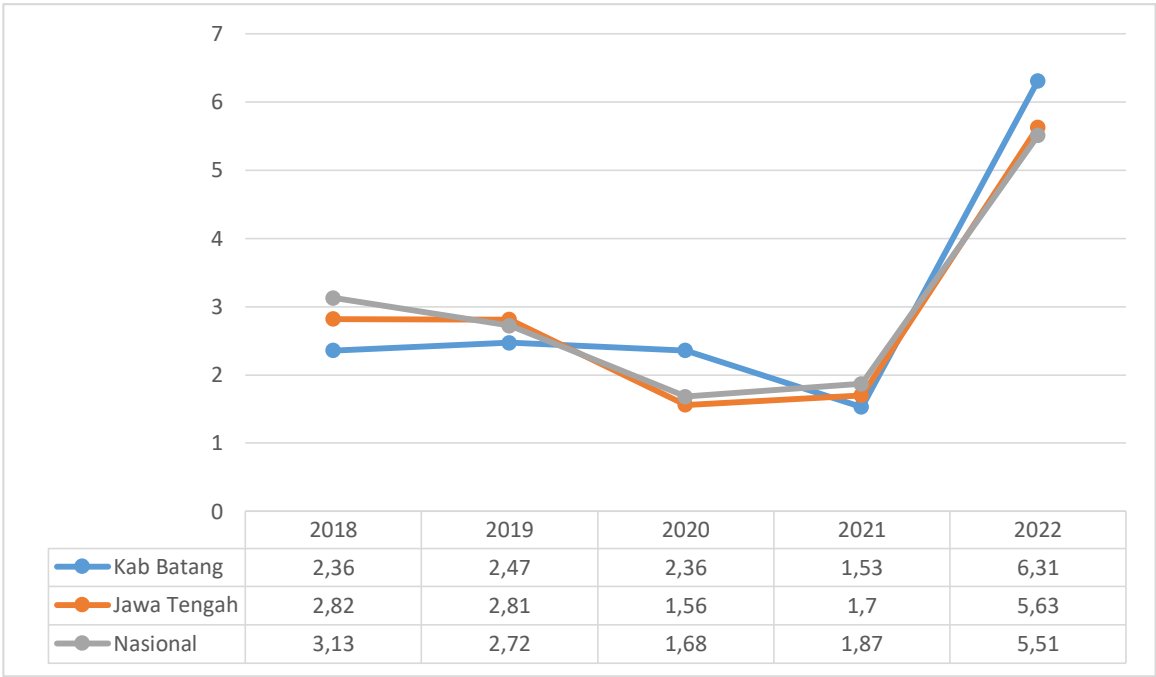
Sumber : Prov Jateng dalam Angka, 2023

2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Batang dalam kurun waktu tahun 2018-2022 relatif terkendali berada pada rentang 1,53 persen hingga 6,31 persen, pada tahun 2018 laju inflasi Kabupaten Batang sebesar 2,36 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang pada tahun yang sama mengalami inflasi sebesar 2,82 persen dan inflasi nasional berada pada angka 3,13 persen. Pada tahun 2022, inflasi Kabupaten Batang sebesar 6,31 persen, provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi 5,63 persen dan secara nasional angka inflasi berada pada angka 5,51 persen.

Sejak tahun 2020 angka inflasi tidak dihitung pada semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, angka inflasi hanya dihitung pada 6 Kota yaitu Tegal, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Semarang dan Surakarta. Angka inflasi Kabupaten Batang mengacu pada angka inflasi Kota Tegal tahun 2018-2022 selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2. 15
Laju inflasi Kabupaten Batang dibandingkan
Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

3. Tingkat Ketimpangan

Jumlah pendapatan atau distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk atau wilayah. Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai range nilai 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati 0 menunjukkan semakin rendah ketimpangannya dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan semakin tinggi ketimpangan (jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar). Secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

0,00 < G < 0,35	pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
0,35 ≤ G ≤ 0,50	pemerataan / ketimpangan sedang
G > 0,50	pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Namun sejak tahun 2016, indeks Gini sudah tidak lagi dilakukan di tingkat Kabupaten. Alternatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan di daerah adalah menggunakan indikator ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Distribusi pengeluaran Kabupaten Batang pada pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah berdasarkan kriteria Bank Dunia 2018-2022 pada kurun waktu empat tahun terakhir berada pada kisaran diatas 17 persen, tahun 2018 sebesar 21,14 persen yang terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar 22,41 yang artinya tingkat ketimpangan di Kabupaten Batang berada pada kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2. 20
Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten
Batang Tahun 2018-2022

Kategori	40% bawah	40% tengah	20% atas
2018	21,14	37,54	41,32
2019	21,56	39,65	38,79
2020	21,26	40,61	38,13
2021	21,79	38,97	39,24
2022	22,41	39,06	38,53

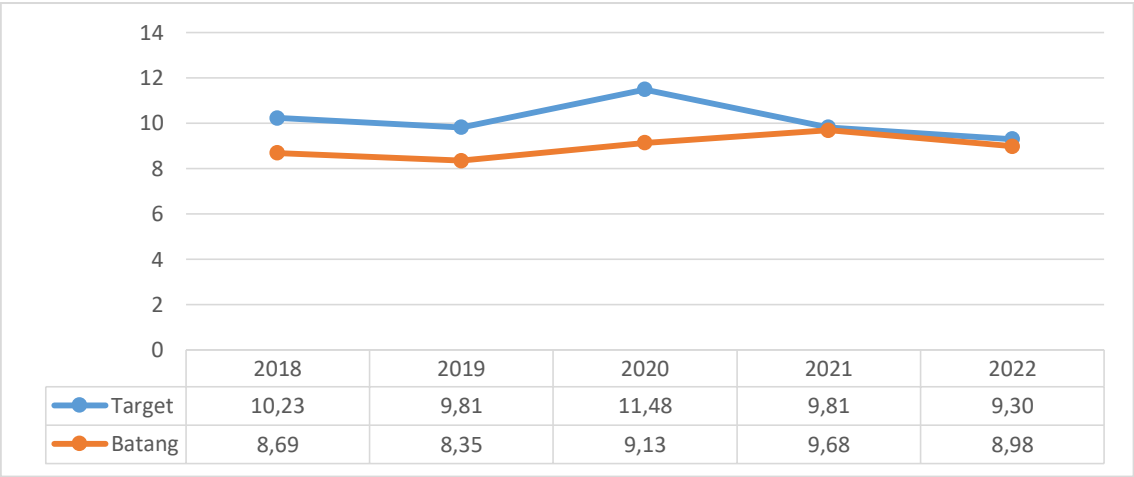
Sumber : BPS Batang, 2023

4. Kondisi Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Batang berfluktuasi dari periode tahun 2018-2022, dari sebesar 8,69% pada tahun 2018 menjadi 8,98% pada tahun 2022. Kondisi kemiskinan Kabupaten Batang mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 namun menurun kembali di tahun 2022. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 49.394 KK terdampak secara ekonomi dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal inilah menyebabkan

angka kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2020 naik menjadi 9,13% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,35%. Tingkat perubahan persentase penduduk miskin tahun 2021 lebih tinggi 0,55 % jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020, dari angka 9,13 % meningkat menjadi 9,68%. Hal ini disebabkan dampak pandemi *Covid* masih belum sepenuhnya pulih, terutama pada masyarakat yang terdampak masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat perubahan persentase penduduk miskin sebelum dan sesudah pandemi *Covid -19* terlihat meningkat dari sebesar 8,25 % di tahun 2019 menjadi 9,68 % di tahun 2021. Berbagai upaya dan strategi dalam rangka pemulihan dampak *COVID -19* di masyarakat mulai terasa pada tahun 2022, dimana penduduk miskin di Kabupaten Batang menurun hingga di angka 8,98% jauh diatas target yang telah ditentukan oleh Kabupaten Batang yakni di angka 9,30%.

Gambar 2. 16
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan target daerah
tahun 2018 - 2022



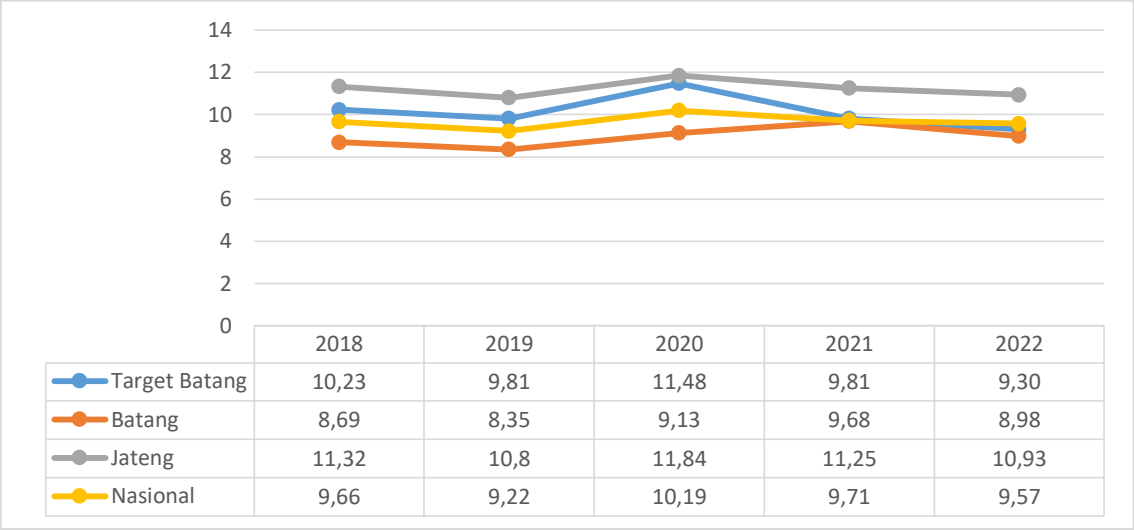
Sumber : SITIKA Kab. Batang, 2023

Bebearapa upaya yang telah dilakukan guna pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Batang salah satunya melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, pangan, rumah layak, dan akses KB, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial/subsidi untuk masyarakat miskin, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan jaminan sosial dan jaminan kesehatan warga miskin.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Batang di Tahun 2022 jauh dibawah angka capaian Provinsi Jawa tengah dan Nasional yakni pada

angka 8,98% dimana capaian provinsi sebesar 10,93% dan nasional sebesar 9,57%. Selengkapnya pada gambar berikut :

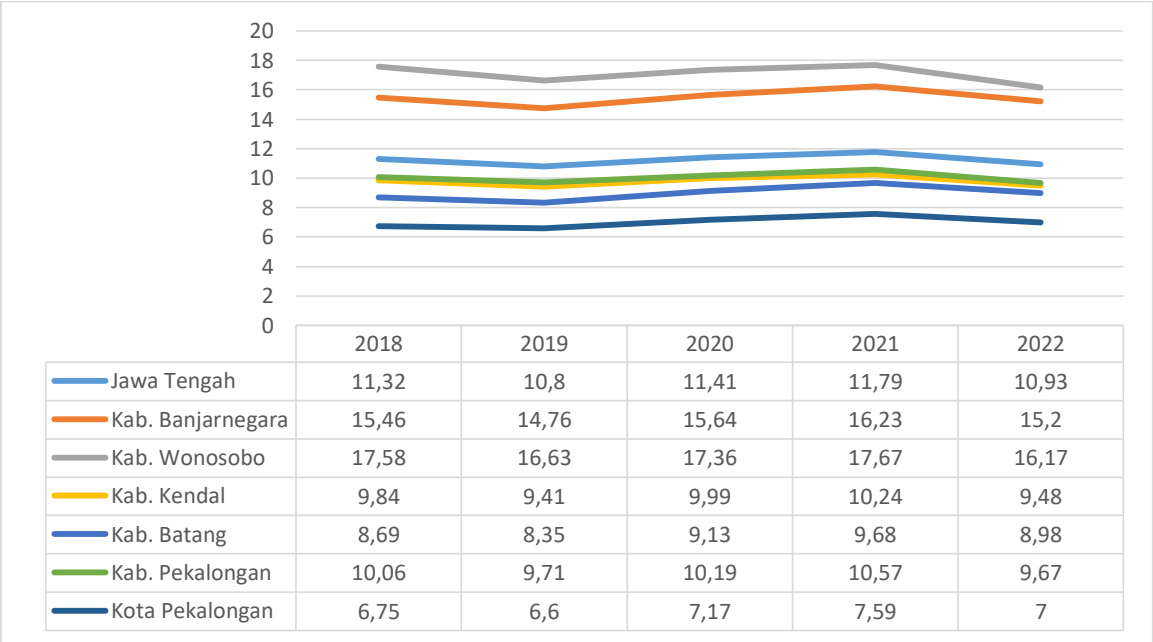
Gambar 2. 17
Perbandingan pencapaian persentase penduduk miskin daerah dengan capaian provinsi dan nasional tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, persentase penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2021 masih lebih rendah dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 15,20%, Kabupaten Wonosobo sebesar 16,17%, Kabupaten Kendal sebesar 9,48% dan Kabupaten Pekalongan sebesar 9,67%, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan Kota Pekalongan yaitu sebesar 7,00%.

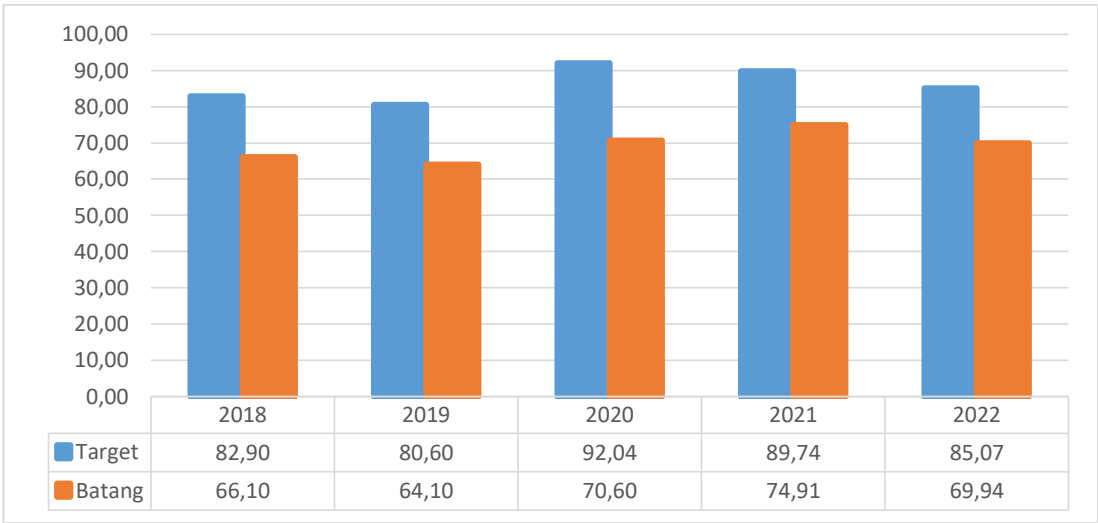
Gambar 2. 18
Perbandingan perubahan persentase penduduk miskin dengan capaian kab/kota sekitar tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Sejalan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang periode tahun 2018-2022 juga berfluktuas, dimana tahun 2018 sebanyak 66,10 ribu jiwa mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi sebanyak 74,91 ribu jiwa karena terdampak pandemi Covid-19. Namun kembali menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 69,94 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan efek dari upaya pemulihan Covid-19 mulai berdampak di masyarakat. Selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

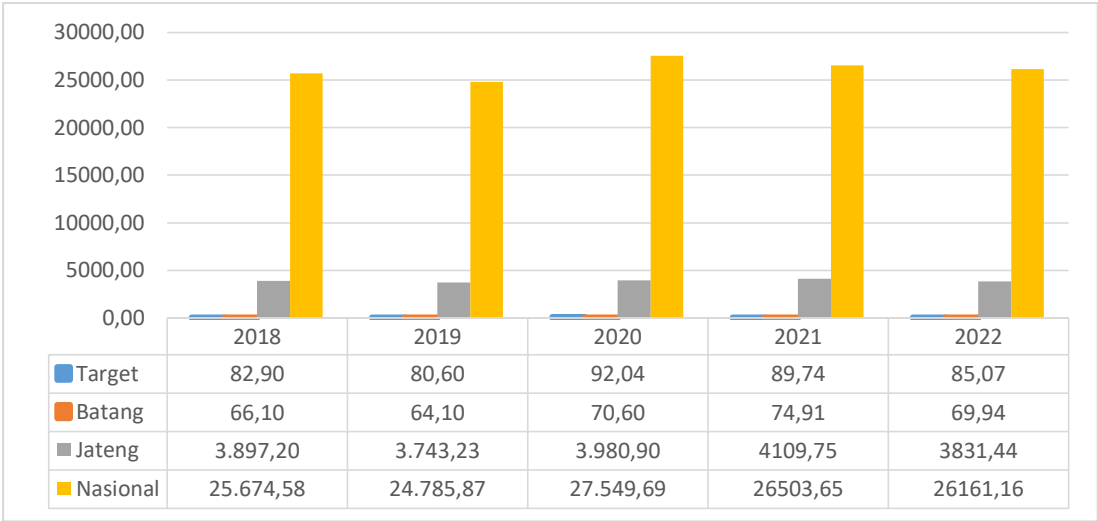
Gambar 2. 19
Perbandingan jumlah penduduk miskin dengan target daerah di Kabupaten Batang Tahun 2018 – 2022 (ribu jiwa)



Sumber : BPS Kab. Batang, 2022

Tingkat perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang sebelum dan sesudah pandemi Covid 19 dibanding dengan capaian nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 semakin meningkat. Namun mengalami penurunan di tahun 2022. Sedangkan untuk capaian nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren cenderung menurun dimana sempat mengalami peningkatan ditahun 2020. Sebagaimana tersaji berikut ini :

Gambar 2. 20
Perbandingan Pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah
dengan capaian nasional Tahun 2018 - 2022



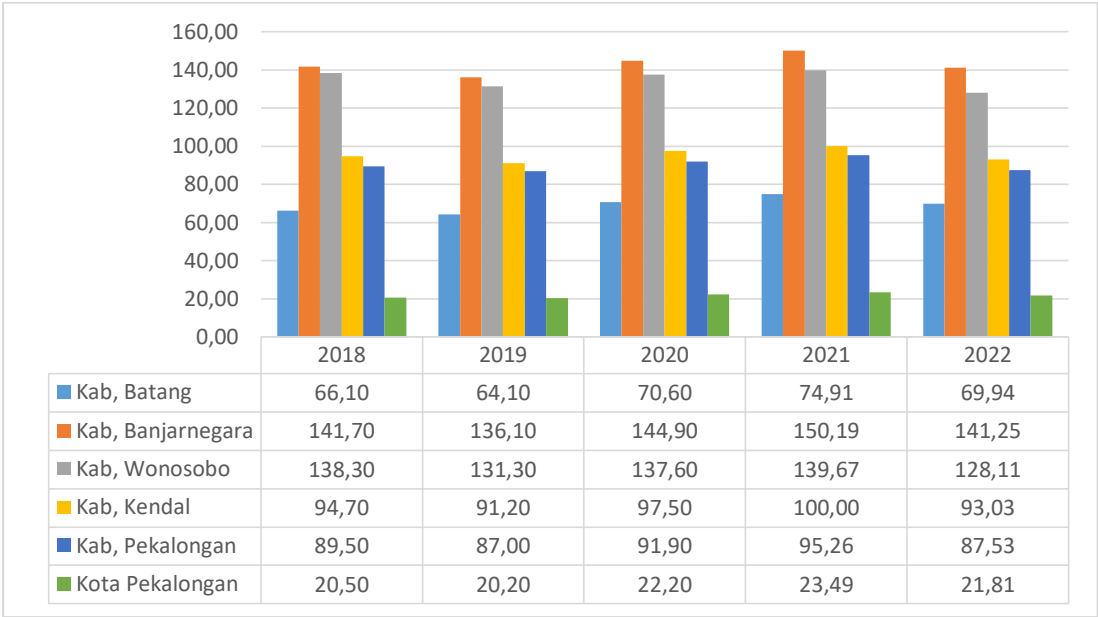
Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di sekitar, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang tahun pada tahun 2022 masih lebih rendah dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang pada tahun 2022 sejumlah 69,94 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Banjarnegara sebesar 141,25 ribu jiwa, Kabupaten Wonosobo sebesar 128,11 ribu jiwa, Kabupaten Kendal sebesar 93,03 ribu jiwa, Kabupaten Pekalongan sebesar 87,53 ribu jiwa dan Kota Pekalongan sebesar 23,49 ribu jiwa. Namun demikian, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota Pekalongan sebesar 21,81 ribu jiwa. Tingkat Pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar -6,63%. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Tahun 2022.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2018-2022 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 2. 21
Perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten

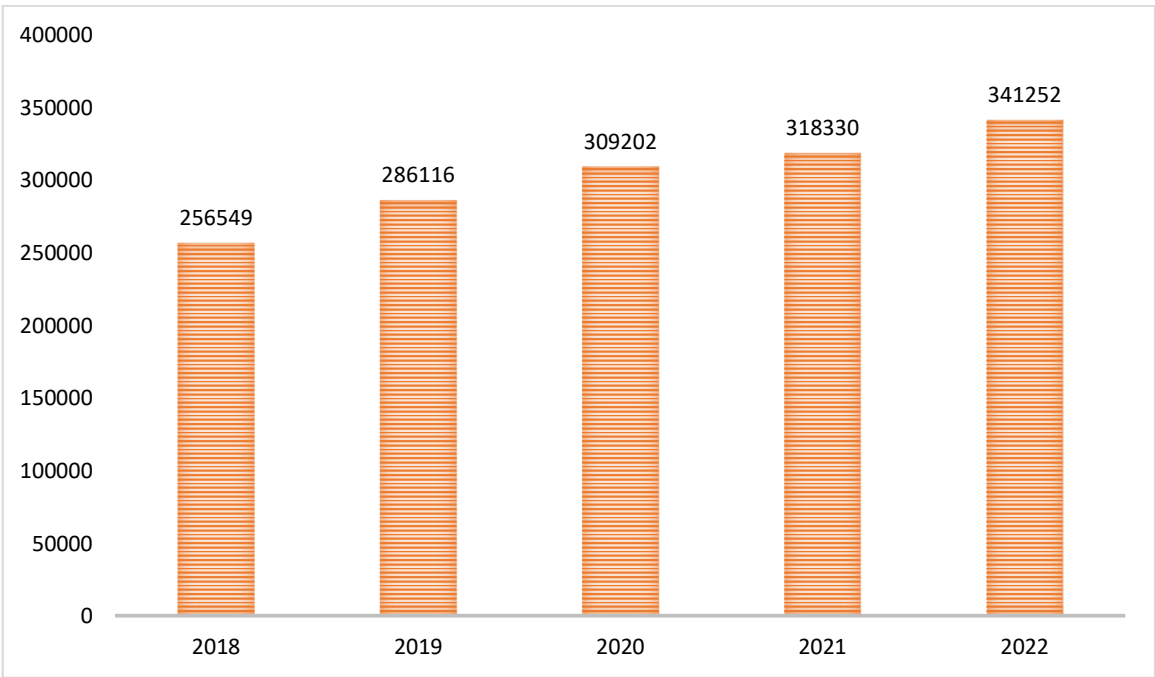
**Batang dengan rata rata capaian wilayah kab/kota sekitar
Tahun 2018 - 2022**



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2023

Garis kemiskinan di Kabupaten Batang terus meningkat pada periode 2018-2022. Garis kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2018 sebesar Rp 256.549,- dan pada tahun 2022 sebesar Rp 341.252,- per kapita per bulan dan termasuk ke dalam kategori Garis Kemiskinan Rendah.

Gambar 2. 22
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018,

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang berada pada angka 1,08 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,69 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,43 menurun di tahun 2022 menjadi 1,26. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.

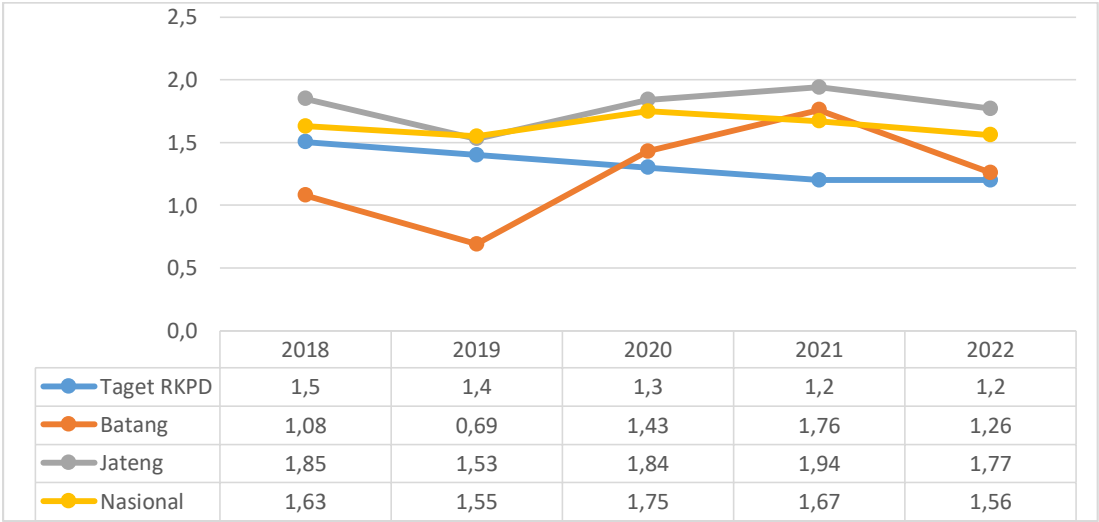
Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di atas provinsi dan nasional;
- 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan di atas nasional;
- 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional.

Berdasarkan posisi relative di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang tahun 2022 sebesar 1,26 masuk dalam kategori Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah yang artinya bahwa Kabupaten Batang memiliki P1 dibawah provinsi sebesar 1,77 dan nasional sebesar 1,56.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

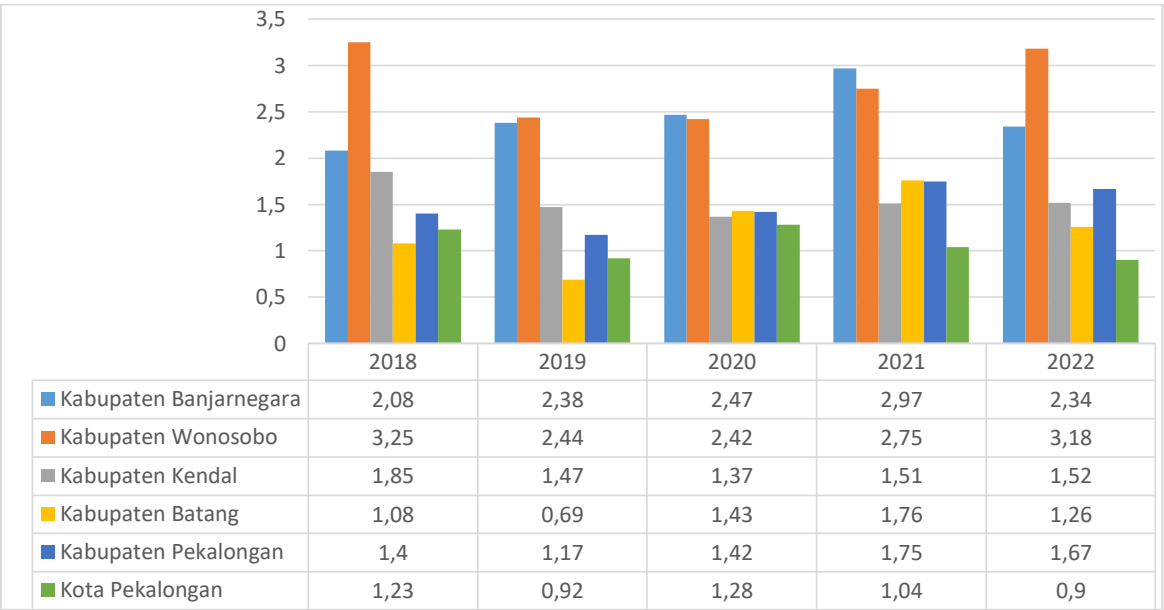
Gambar 2. 23
Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Prov Jateng, 2023

Pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang dengan Kabupaten/Kota sekitar dari tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2. 24
Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang dengan rata rata capaian Kab/Kota sekitar Tahun 2018 - 2022

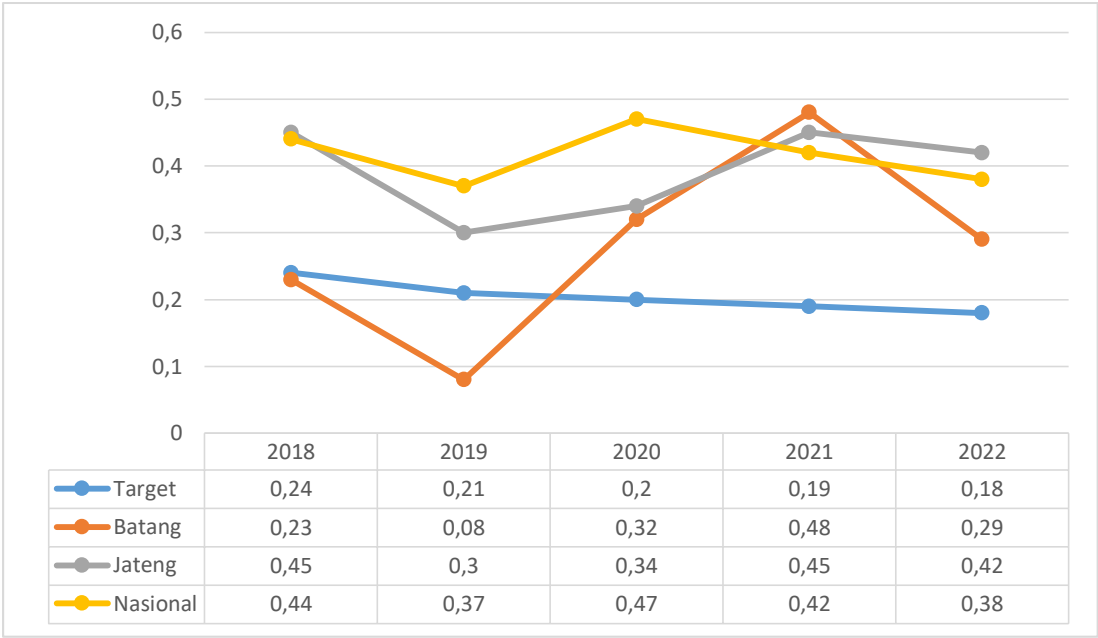


Sumber : BPS Prov Jateng, 2023

Jika dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), selama periode 2018-2022, keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019. Pada tahun 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang berada pada angka 0,23, lebih rendah dari provinsi dengan indeks sebesar 0,45 dan nasional sebesar 0,44. Namun Pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Batang Kembali meningkat menjadi 0,32 dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi sebesar 0,29. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil. Namun P2 kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021, disebabkan dampak Covid-19 yang berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin Kabupaten Batang.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 25
Tingkat Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Batang (P2) Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional masuk pada kategori rendah, yang artinya Kabupaten Batang memiliki P2 di bawah provinsi (0,42) dan di bawah nasional (0,38).

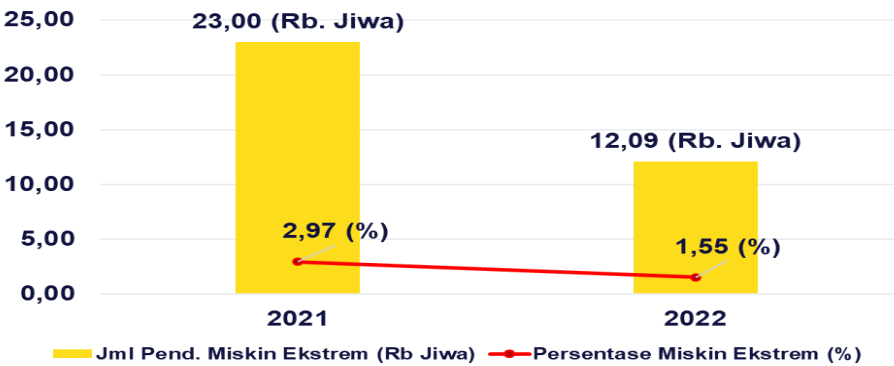
Gambar 2. 26
Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang denan Capaian Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022.

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian persentase penduduk miskin dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batang dan Nasional berada pada rentang yang sama dari tahun 2018 – 2022.

Gambar 2. 27
Kondisi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Batang Tahun 2021-2022



Sumber: BPS, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan data diatas, persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Batang mengalami penurunan dari 2,97% pada Tahun 2021 menjadi 1,55% pada Tahun 2022. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Batang juga mengalami penurunan dari 23.000 jiwa pada Tahun 2021 menjadi 12.090 jiwa pada Tahun 2022. Penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem ini merupakan hasil konvergensi atau kerja bersama semua pihak (stakeholder) yang terkait, baik

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun non pemerintah seperti Forum CSR, Baznas, UPZ dan Lazis.

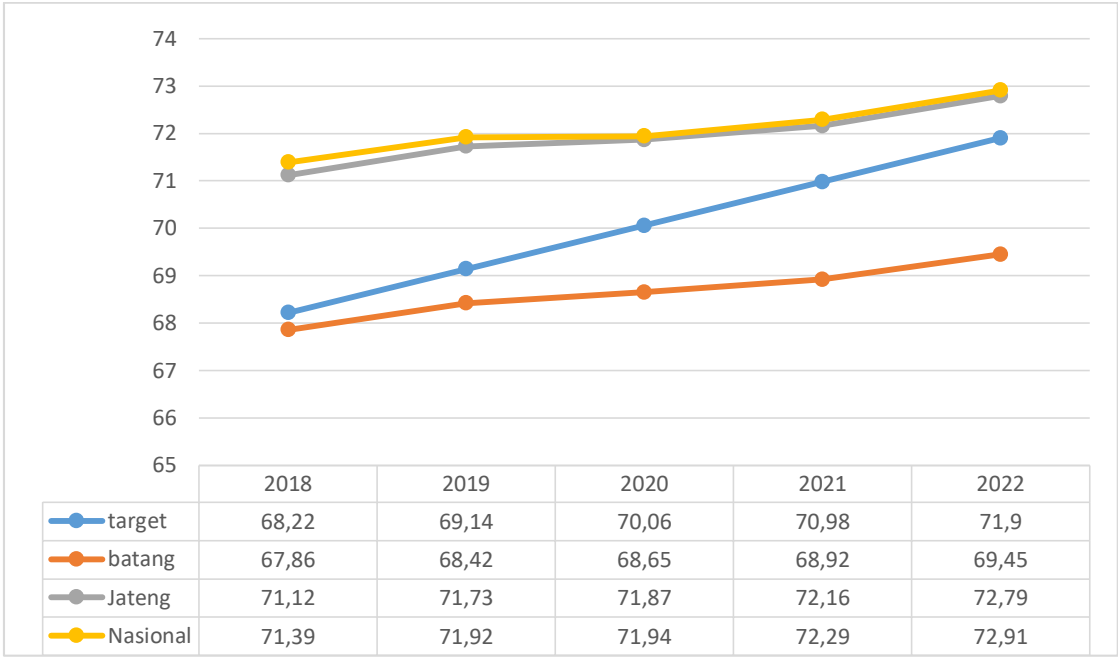
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*). Untuk melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu:

- IPM rendah, jika nilai $IPM < 60$;
- IPM sedang, jika nilai $60 < IPM < 70$;
- IPM tinggi, jika nilai $70 < IPM < 80$;
- IPM sangat tinggi, jika nilai $IPM > 80$.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menurut metode baru menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya dimana pada kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kabupaten Batang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Batang sebesar 67,86 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Bahkan terjadinya pandemi *Covid19* tahun 2020 hingga 2021 tidak memberi dampak negatif pada capaian IPM di Kabupaten Batang. Berdasarkan rilis BPS Kabupaten Batang, tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Batang sebesar 68,92 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 69,45. Meskipun nilai IPM Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan, namun IPM Kabupaten Batang ini masih masuk dalam kategori sedang dan lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian nasional. Perkembangan IPM Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar yang tersaji dibawah ini :

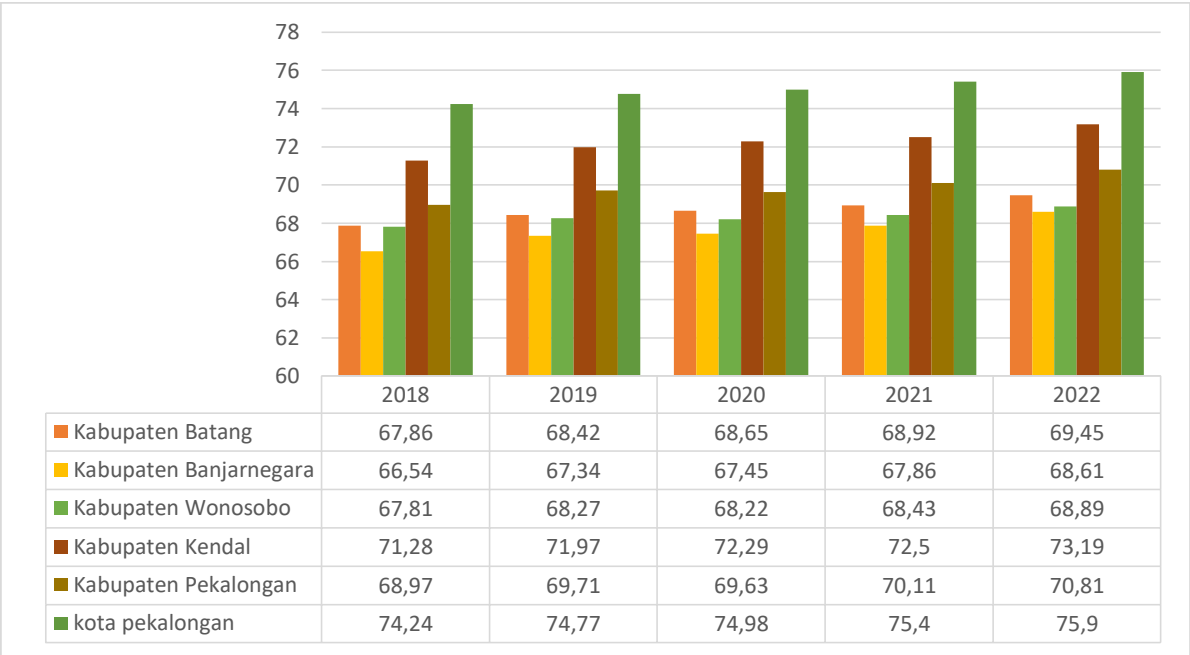
Gambar 2. 28
IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Capaian IPM Kabupaten Batang, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Banjarnegara (68,81) dan Kabupaten Wonosobo (68,89), namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Pekalongan (70,81), Kabupaten Kendal (73,19) dan Kota Pekalongan (75,90). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Batang dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 29
IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Jawa Tengah 2022

IPM merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan kepada 4 indikator pembentuk. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Angka

Harapan Hidup, 2) Harapan Lama Sekolah, 3) Rata-rata Lama Sekolah, dan (4) Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Dari keempat indikator pembentuk IPM tersebut, kesemuanya mengalami kenaikan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pencapaian IPM yaitu penyusunan program dan kegiatan terpadu lintas sektoral dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat yang diharapkan masyarakat dengan ekonomi yang cukup dapat mempengaruhi tingkat motivasi untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut diharapkan akan berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Upaya lainnya adalah dengan melaksanakan inovasi pelayanan pendidikan yang mengarah kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan anak di masa depan, hal ini diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan Angka Harapan Hidup dan pengeluaran per kapita masyarakat karena sejatinya pendidikan merupakan bekal bagi mereka untuk bertahan hidup di masa depan.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Batang mencapai 74,56 tahun, terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 74,79 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 HLS Kabupaten Batang mencapai 11,88 tahun meningkat menjadi 12,14 tahun pada tahun 2022. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 RLS Kabupaten Batang mencapai 6,62 tahun meningkat menjadi 6,90 tahun pada tahun 2022. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Batang menunjukkan perkembangan dalam periode tahun 2018-2022, yaitu sebesar Rp. 9 203 ribu Rp/orang/tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 9.972 ribu Rp/orang /tahun pada tahun 2022.

Tabel 2. 21

Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
AHH (TH)	74,56	74,59	74,69	74,74	74,79
HLS (TH)	11,88	12,00	12,01	12,13	12,14

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
RLS (TH)	6,62	6,63	6,87	6,88	6,90
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu Rp/orang/th)	9203	9573	9431	9524	9972
IPM	67,86	68,42	68,65	68,92	69,45

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

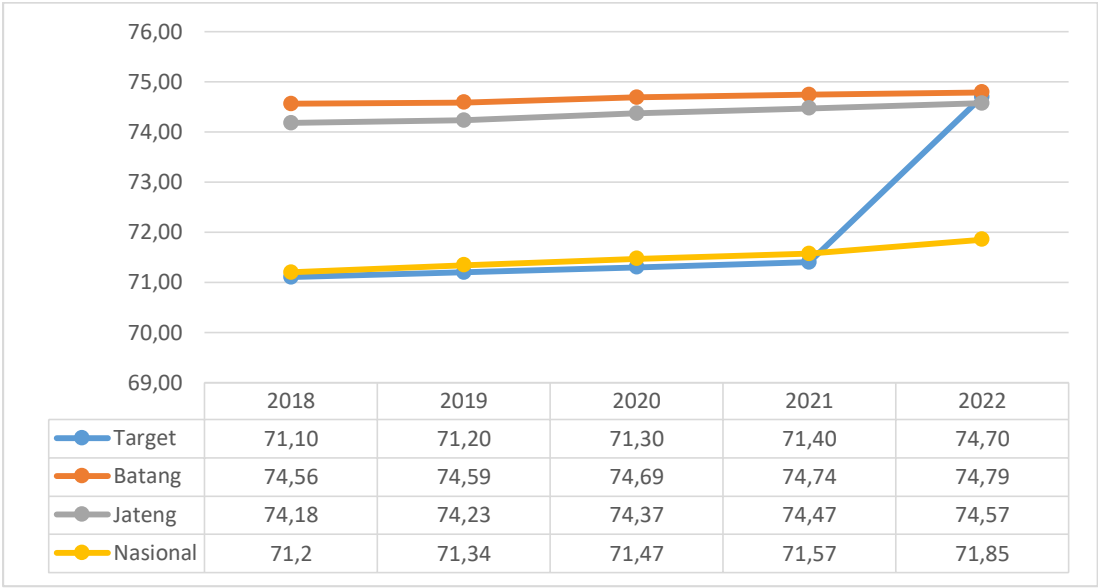
Beberapa faktor yang mempengaruhi AHH bersifat kompleks, antara lain aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi AHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan upaya melalui paradigma sehat dengan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor.

Perwujudan peningkatan AHH dipengaruhi kesehatan ibu, bayi, balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang komprehensif di sepanjang siklus hidup mulai dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup keluarga, komunitas, puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan.

Pencapaian AHH Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 sebesar 74,56 tahun naik menjadi 74,79 tahun pada tahun 2022. Capaian ini lebih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 74,47 tahun dan Nasional 71,57 tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan target, capaian AHH dalam periode tahun 2018-2022 lebih baik atau telah melampaui target yang ditetapkan. Selengkapnya pada gambar berikut :

Gambar 2. 30
Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan

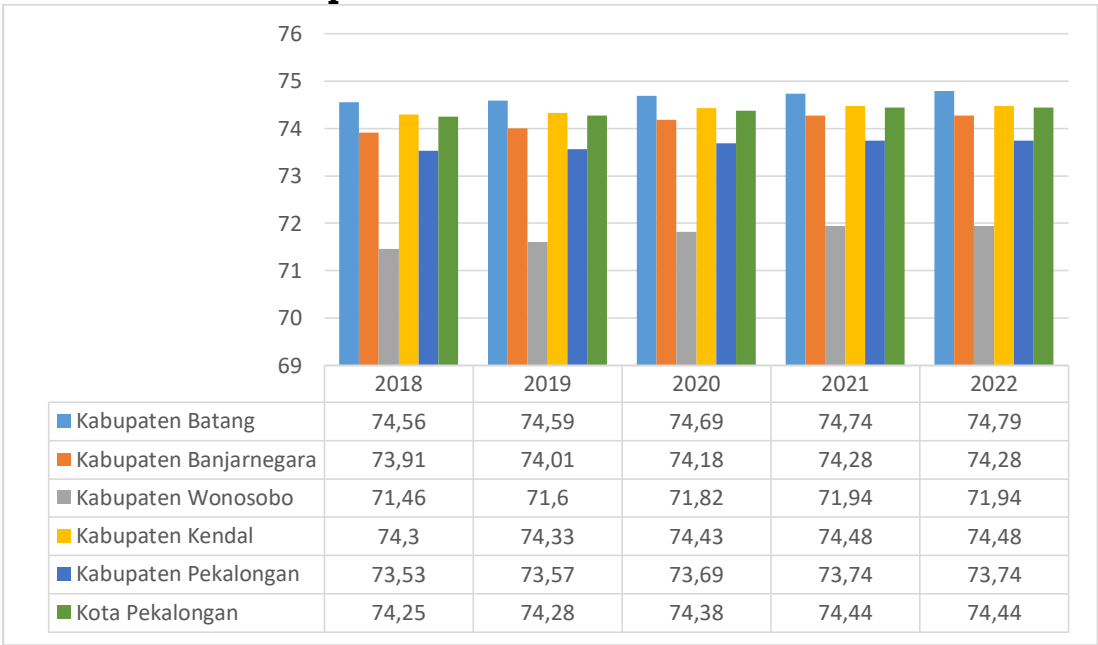
dengan Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Capaian AHH Kabupaten Batang dalam periode tahun 2018-2022 juga lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan.

Gambar 2. 31
Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan dengan
Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Jateng, 2022

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

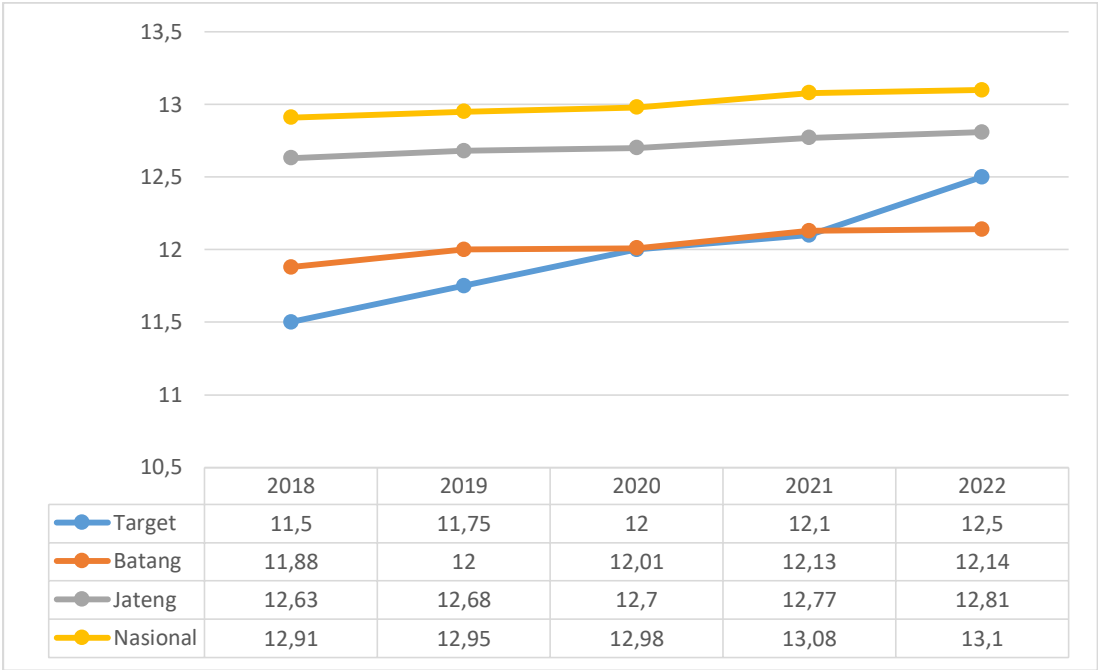
Pencapaian HLS Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 11,88 tahun naik menjadi 12,14 tahun pada tahun 2022. Namun demikian, meskipun HLS Kabupaten Batang terus meningkat dalam periode lima tahun terakhir, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 12,81 tahun dan Nasional 13,10 tahun, sehingga kedepan diperlukan upaya guna meningkatkan angka HLS Kabupaten Batang, serta lebih mewaspadai potensi anak putus sekolah dengan melibatkan peran masyarakat dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pendidikan.

Permasalahan utama selain kondisi ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang yaitu perubahan paradigma dan *mindset* masyarakat tentang pendidikan. Sehingga upaya peningkatan HLS ini perlu diperkuat dengan adanya sosialisasi menyeluruh melalui berbagai bentuk dan media agar masyarakat dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan.

Upaya lain dalam peningkatan HLS seperti pemerataan akses layanan Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang juga terus diupayakan melalui optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, pelaksanaan pendidikan dasar bebas pungutan dan berkualitas sesuai standar pendidikan nasional, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola layanan pendidikan terus dilakukan guna mendukung pencegahan anak putus sekolah serta perbaikan akses dan layanan pendidikan di Kabupaten Batang.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selengkapnya tersaji pada gambar berikut :

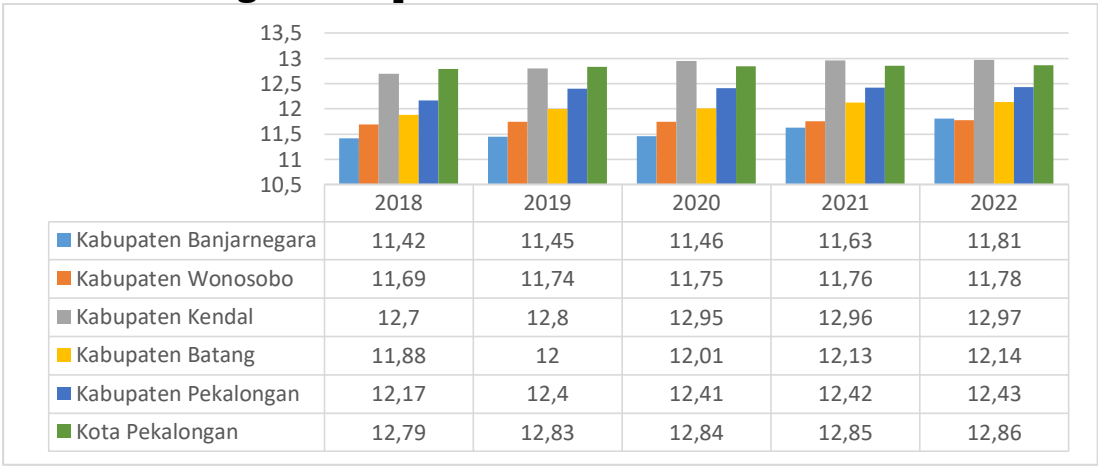
Gambar 2. 32
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan
dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Capaian angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang pada tahun 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan kabupaten sekitar Kabupaten Kabupaten Kendal sebesar 12,97; Kabupaten Pekalongan sebesar 12,43 dan Kota Pekalongan sebesar 12,86. Namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara sebesar 11,81 dan Kabupaten Wonosobo sebesar 11,78 sebagaimana pada diagram berikut :

Gambar 2. 33
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

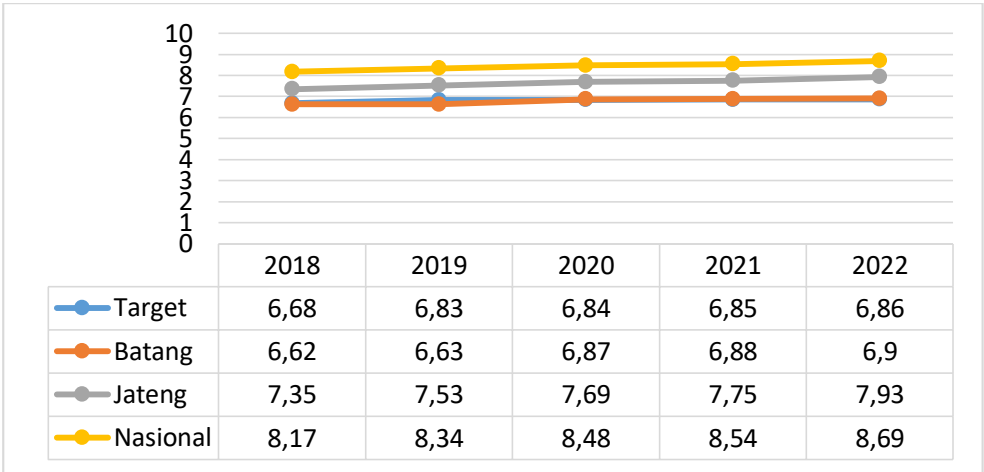
Pencapaian RLS Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 6,62 tahun

naik menjadi 6,90 tahun pada tahun 2022. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 7,93 tahun dan Nasional 8,69 tahun.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan HLS diantaranya Penelusuran AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah). AUSTS meliputi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SD/MI, usia 12-15 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SMP/MTs, dan usia 15-18 yang sedang tidak bersekolah di SMA/SMK/MA dan menyalurkannya kembali ke sekolah formal atau melalui pendidikan kesetaraan serta membebaskan biaya pendidikannya. Optimalisasi peran masyarakat dan sekolah dalam mewaspadai anak-anak putus sekolah serta mengawal lulusan sekolah agar tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya juga terus ditingkatkan melalui kegiatan belajar mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) selain upaya peningkatan pembiayaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola pelayanan. Jumlah PKBM eksisting di Kabupaten Batang hingga tahun 2023 ini sebanyak 23 unit PKBM.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tersaji pada gambar berikut :

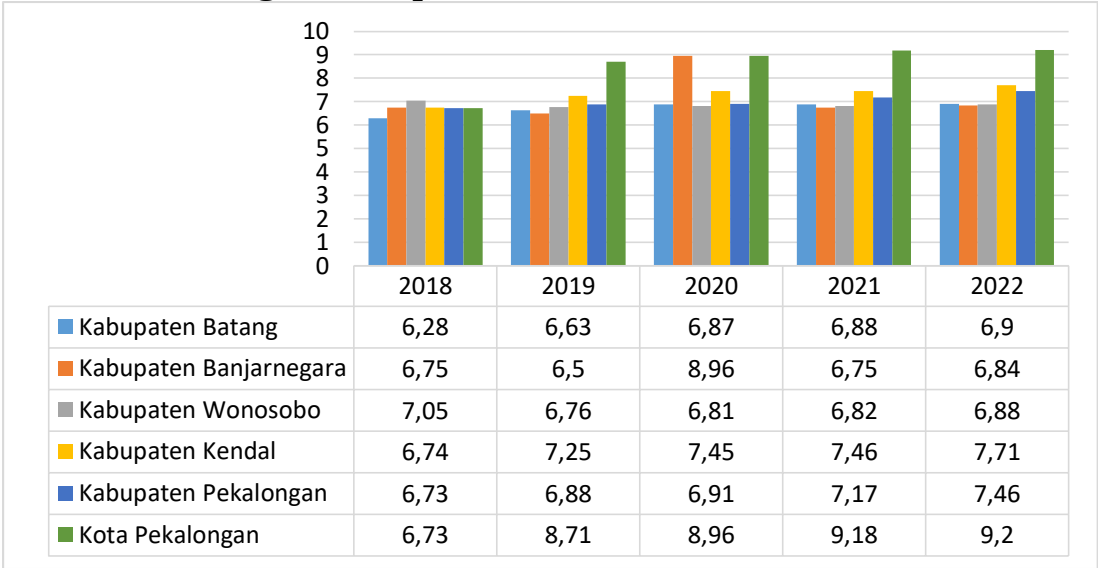
Gambar 2. 34
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang tahun 2022 sebesar 6,90 tahun jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,84 tahun dan kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 6,88 tahun, namun lebih rendah dari Kabupaten Kendal sebesar 7,71 tahun, Kabupaten Pekalongan sebesar 7,46 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 9,20 tahun.

Gambar 2. 35
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2022

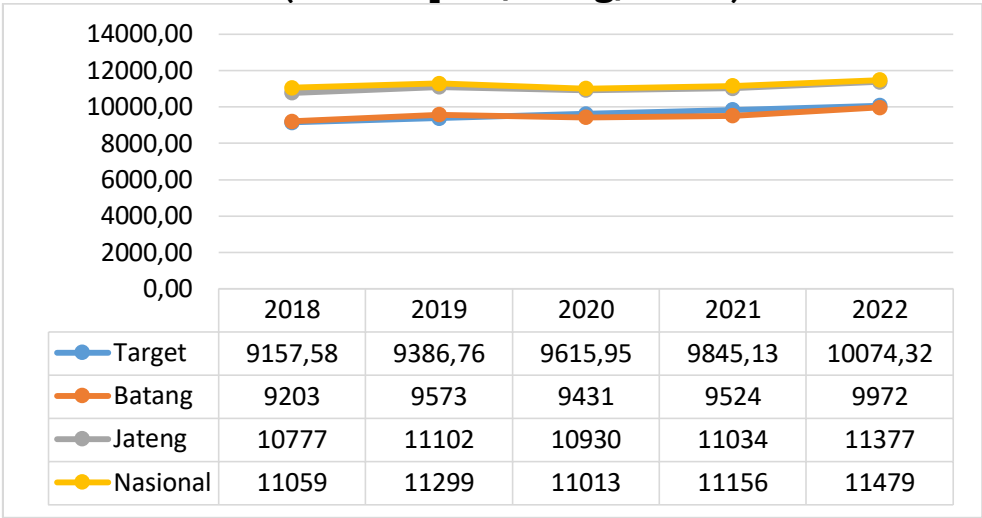


Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

d. Pengeluaran per Kapita

Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2018 sebesar Rp 9203 ribu per orang per tahun naik menjadi menjadi Rp 9972 ribu per orang per tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 9.431 ribu per orang per tahun karena adanya pandemi *Covid-19* namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 9.524 ribu per orang per tahun meskipun pandemi *Covid-19* belum berakhir. Meskipun capaian pengeluaran per kapita naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini juga lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 11.377 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar 11.479 ribu per orang per tahun. Selengkapnya pada grafik berikut :

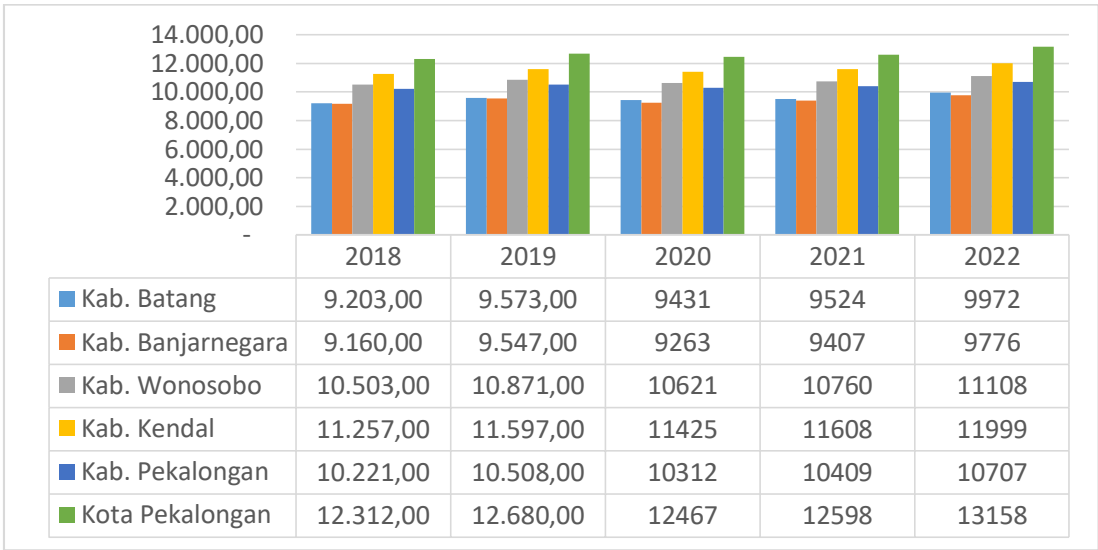
Gambar 2. 36
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

Pengeluaran per kapita Kabupaten Batang tahun 2021 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 9.407 ribu/orang/tahun namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 10.760 ribu/orang/tahun, Kabupaten Kendal sebesar Rp 11.608 ribu/orang/tahun, Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 10.409 ribu/orang/tahun dan Kota Pekalongan sebesar Rp 12.598 ribu/orang/tahun.

Gambar 2. 37
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2022 (ribu rupiah/orang/tahun)



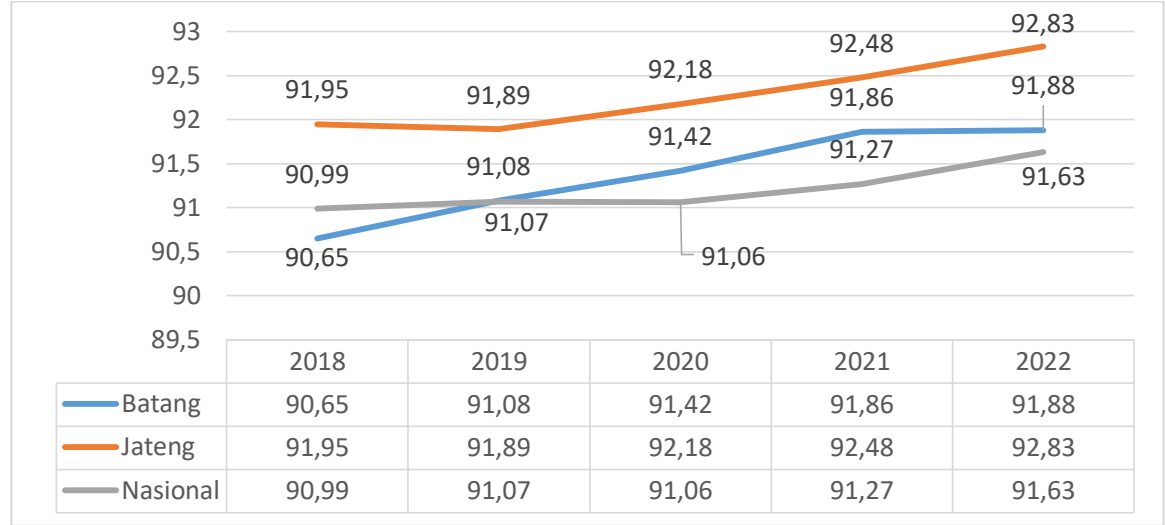
Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender (pemilahan jenis kelamin setiap komponennya). IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding laki-laki berada pada angka 100. Jika angka IPG makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

Gambar 2. 38
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



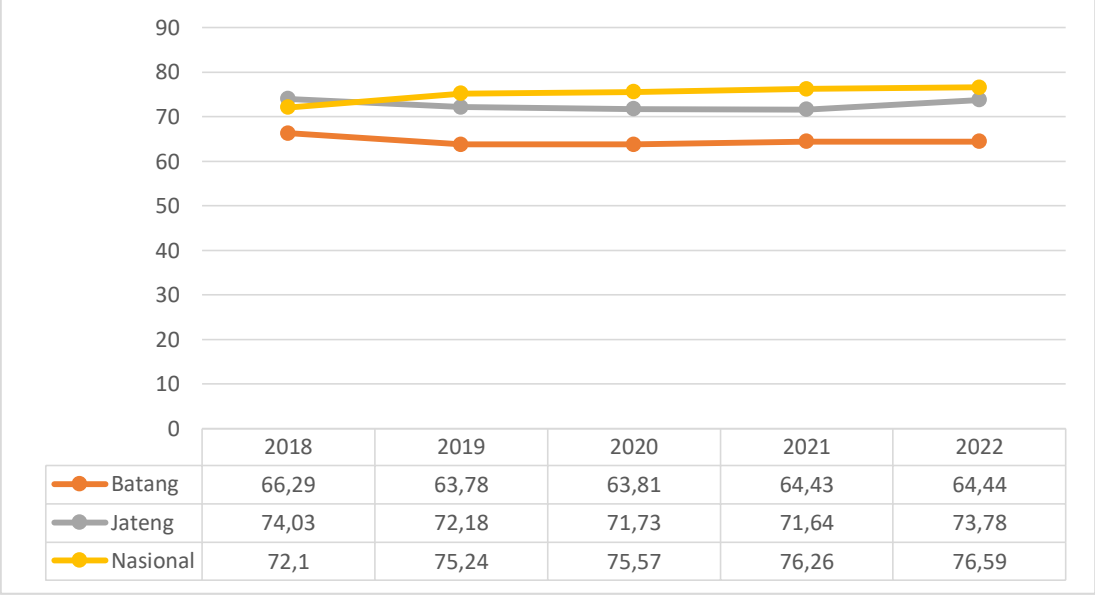
Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

IPG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 sebesar 90,65, mengalami kenaikan menjadi 90,65 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 naik menjadi 91,08 dan kembali naik di tahun berikutnya hingga sebesar 91,42 pada tahun 2020 dan menjadi 91,86 di tahun 2021. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 92,48 namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional 91,27.

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian IDG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2018 sebesar 66,29 meningkat menjadi 64,44 pada tahun 2022, namun demikian capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 73,78 dan Nasional 76,59. Selengkapnya pada gambar berikut:

Gambar 2. 39
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



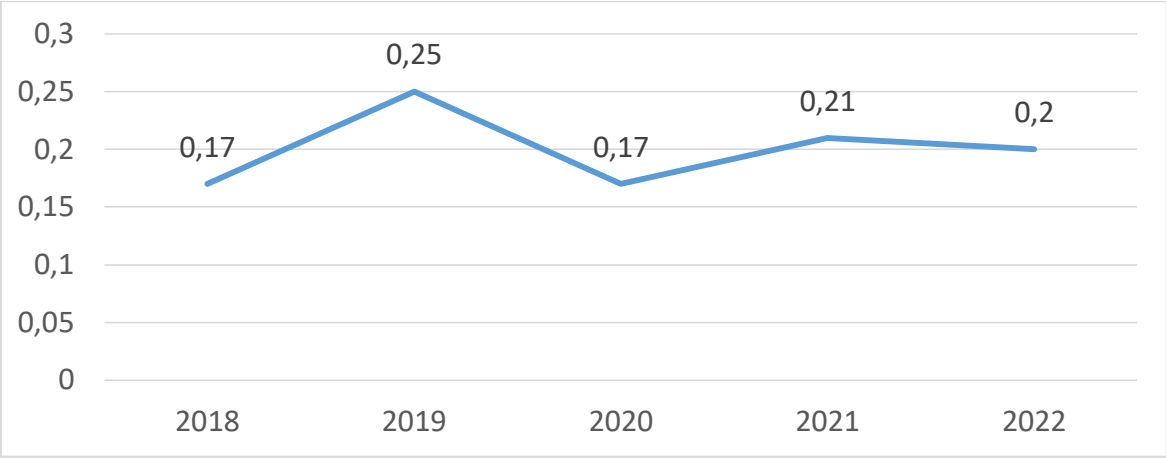
Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

8. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2018-2022, dari 0,17% pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 0,25%, kemudian turun pada Tahun 2020 menjadi 0,17% dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,21% yang kemudian menurun menjadi 0,20% di tahun 2022. Fluktuasi pada prevalensi gizi buruk sangat dipengaruhi oleh Angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan menurunnya bayi yang ditimbang yang menyebabkan kasus gizi buruk tidak terdeteksi secara cepat/dini, sehingga pemulihannya menjadi lebih lama. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan balita diantaranya dengan memberikan intervensi pada balita kurus dengan pemberian PMT pemulihan, memberikan perawatan pada balita gizi buruk serta meningkatkan penyuluhan pada ibu-ibu untuk menimbang balitanya ke posyandu, untuk mengetahui tumbuh kembang balita. Peningkatan balita gizi buruk ini mengindikasikan

bahwa kedepan diperlukan upaya yang lebih keras untuk menurunkan angka prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Batang.

Gambar 2. 40
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Batang

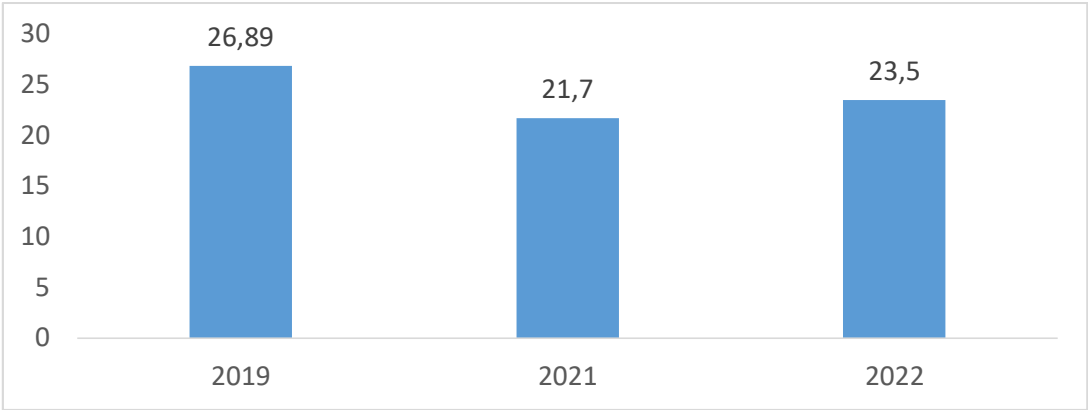


Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu *intake* zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (*stunting*). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Mendasari hal tersebut, kondisi stunting di Kabupaten Batang berdasarkan data SSGBI (Studi Status Gizi Balita di Indonesia) dan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) pada Tahun 2019-2022 berfluktuasi menurun. Pada Tahun 2019 persentase stunting sebesar 26,89%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 21,7% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 23,5%. Sedangkan untuk tahun 2020 pengukuran tidak dilaksanakan karena pandemi Covid.

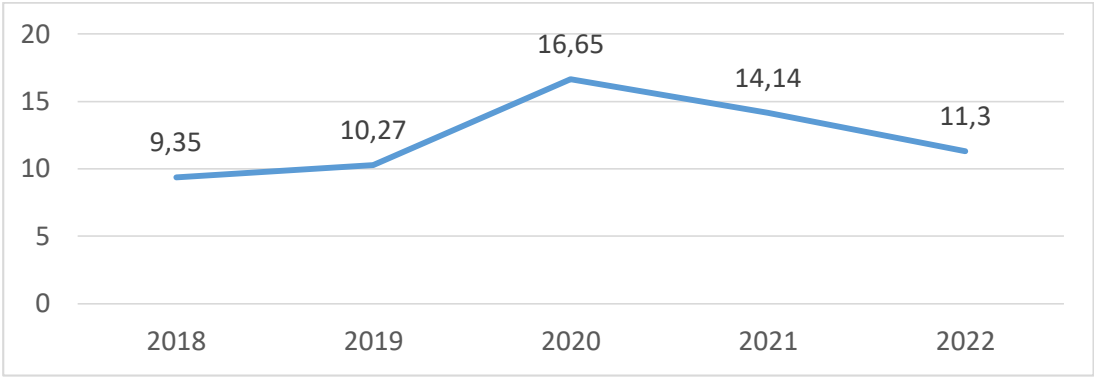
Gambar 2. 41
Prevalensi Stunting berdasarkan data SSGBI dan SSGI
Tahun 2019-2022



Sumber: SSGBI (2019) & SSGI (2021-2022)

Sedangkan terkait kondisi stunting di Kabupaten Batang berdasarkan data e -PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada Tahun 2018-2022 fluktuatif. Pada Tahun 2018-2019 terjadi peningkatan persentase stunting dari 9,35 % menjadi 10,27%. Sementara tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 16,65%. Namun demikian, tahun 2021 prevalensi stunting turun menjadi 14,14%, hingga di tahun 2022 menjadi sebesar 11,30%. Perhitungan stunting tahun 2017-2019 analisis perhitungan persentase stunting menggunakan cara analisis manual, sedangkan pada tahun 2020- 2022 perhitungan persentase stunting mulai menggunakan aplikasi e-PPGBM (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang lebih akurat dan detail.

Gambar 2. 42
Prevalensi Stunting Kabupaten Batang (e-PPGBM)
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2023

Baik berdasarkan data SSGI maupun e-PPGBM, dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Batang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan intervensi program dan kegiatan untuk

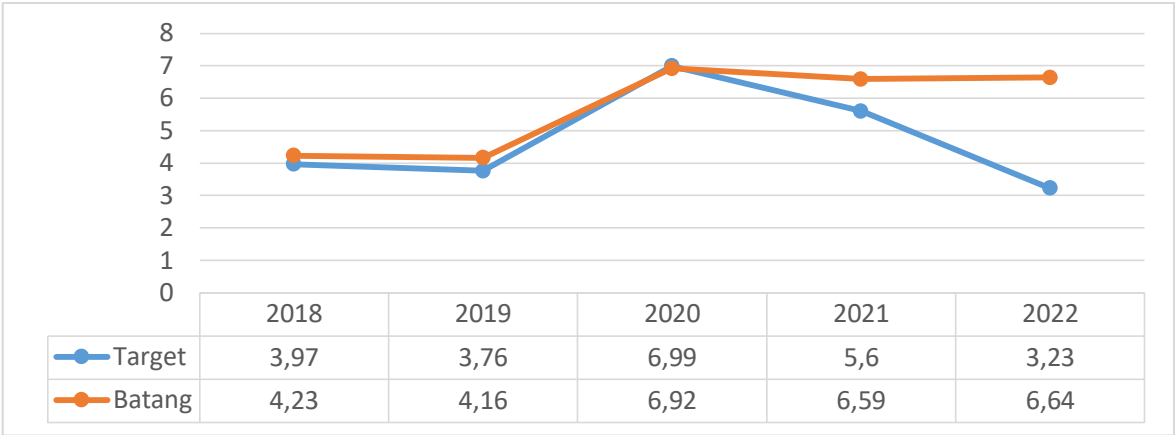
menurunkan persentase stunting. Intervensi yang dilakukan tersebut meliputi intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, dengan sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Intervensi program dan kegiatan dalam rangka penurunan persentase stunting ini berhasil menurunkan angka persentase stunting dari 14,14% pada Tahun 2020 menjadi 11,30% pada tahun 2022 atau berkurang sebesar 2,84%.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang selama periode 2018-2022 fluktuatif, yaitu sebesar 4,23 persen pada tahun 2018 dan menurun menjadi 4,19 di tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 6,92 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi sebesar 6,64 persen. Adanya Pandemi *Covid-19* berdampak pada meningkatnya angka TPT menjadi sebesar 6,92 persen pada tahun 2020. Dampak Pandemi *Covid-19* dirasakan cukup signifikan utamanya pada masyarakat yang saat ini termasuk dalam kelompok 40 persen berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan, yang terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha UKM, pedagang pasar, pedagang kaki lima, ojek online, dan lain-lainnya. Kondisi inilah kemudian yang berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Batang pada tahun 2020.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam penanganan dampak *Covid-19* diantaranya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja utamanya bagi masyarakat terdampak *Covid-19* dengan program padat karya di sektor infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan kerja dan serta mendorong kemandirian berwirausaha melalui bantuan alat. Upaya tersebut berdampak pada menurunnya angka TPT pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,59%. Namun demikian, kembali meningkat menjadi 6,64 % di tahun 2022 yang disebabkan karena banyaknya masyarakat usia produktif perantau kembali ke daerah dalam kondisi menganggur dengan harapan dapat bekerja di Kawasan Industri Kabupaten Batang. Sehingga perhitungan jumlah usia produktif kembali meningkat akibat banyaknya pekerja rantau yang kembali ke daerah dalam kondisi menganggur dan pencari kerja pendatang luar daerah yang berharap dapat bekerja di Kabupaten Batang.

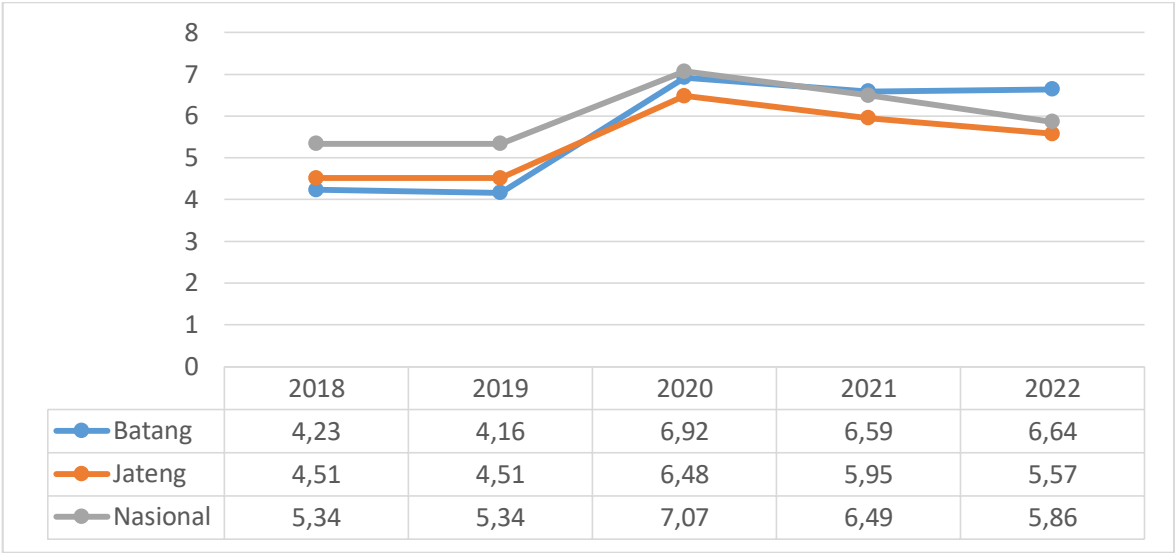
Gambar 2. 43
Perbandingan TPT dengan target daerah Kabupaten Batang
Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kab. Batang, 2022

Capaian TPT Kabupaten Batang Tahun 2022 masih lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dimana capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57 persen dan Nasional sebesar 5,86 persen.

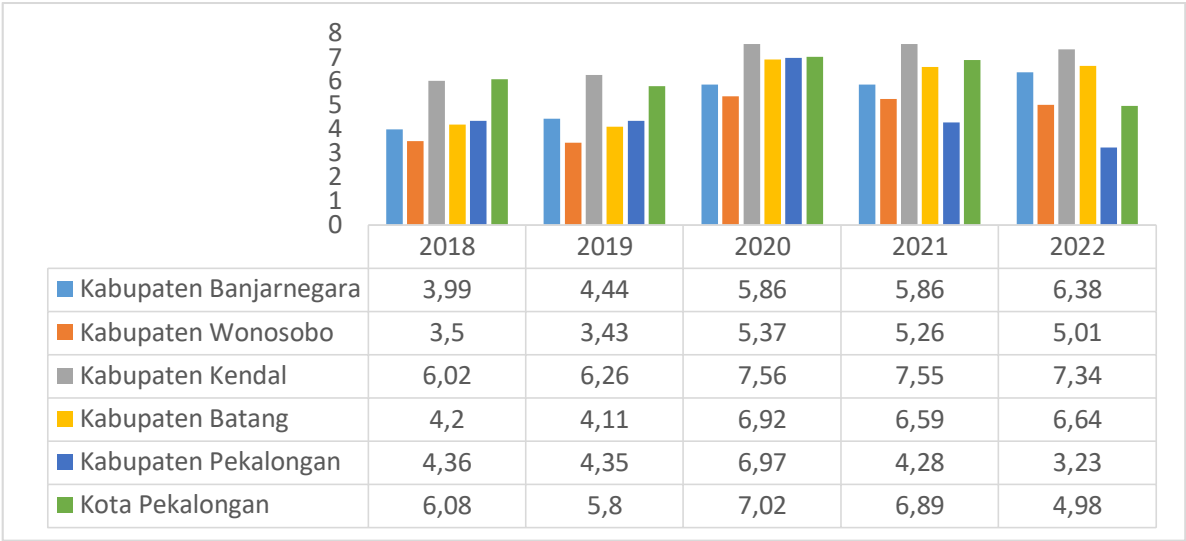
Gambar 2. 44
Perbandingan perubahan pencapaian TPT dengan capaian Provinsi
dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

Tingkat Pertumbuhan jumlah penganggur TPT Kabupaten Batang sebesar 6,64 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Kendal sebesar 7,34 persen. Namun demikian masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Pekalongan sebesar 3,23 persen, Kabupaten Wonosobo sebesar 5,01 persen, Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,38 persen, dan Kota Pekalongan sebesar 4,98 persen.

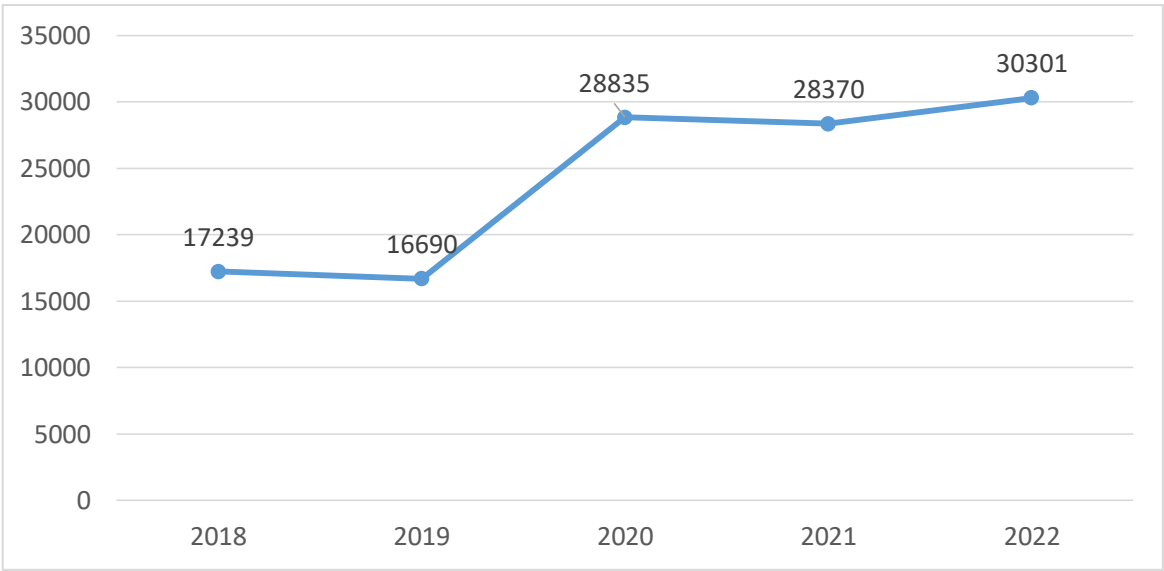
Gambar 2. 45
Perbandingan perubahan TPT daerah dengan Kab/Kota
Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Tingkat pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Batang Tahun 2018 – 2022 cenderung fluktuatif yakni pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menurun dari 17239 jiwa menjadi 16690 yang kemudian meningkat kembali hingga 30301 jiwa di tahun 2022. Sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini :

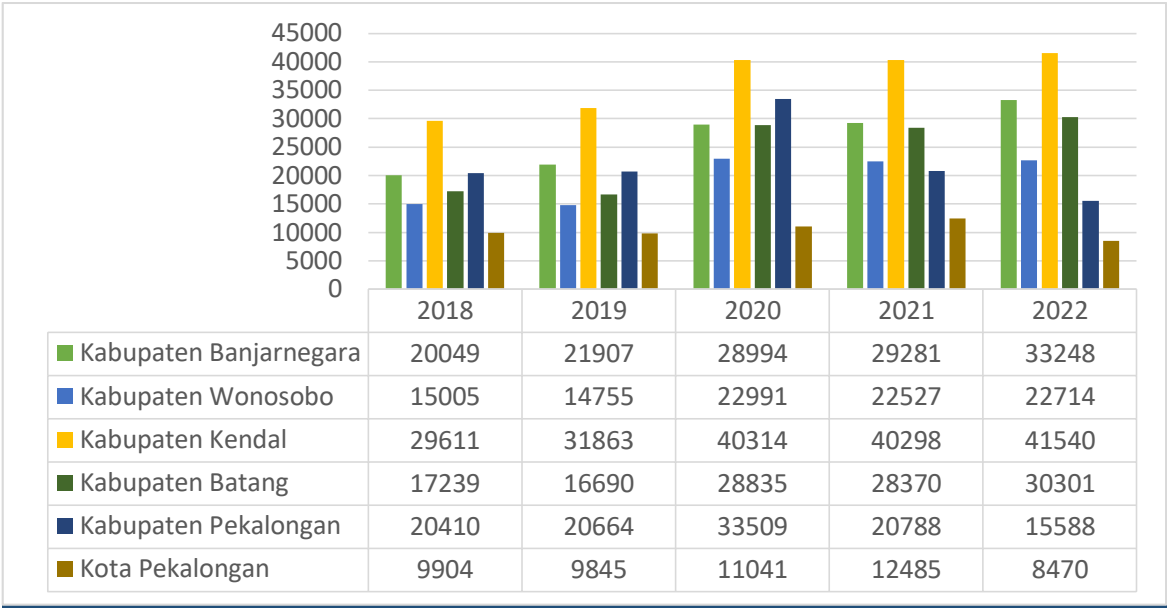
Gambar 2. 46
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Batang
Tahun 2018 - 2022 (jiwa)



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Pertumbuhan jumlah penganggur di wilayah kab/kota sekitar Batang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Dimana kondisi jumlah penganggur sebelum dan sesudah pandemi Covid 19 terus meningkat hingga tahun 2021.

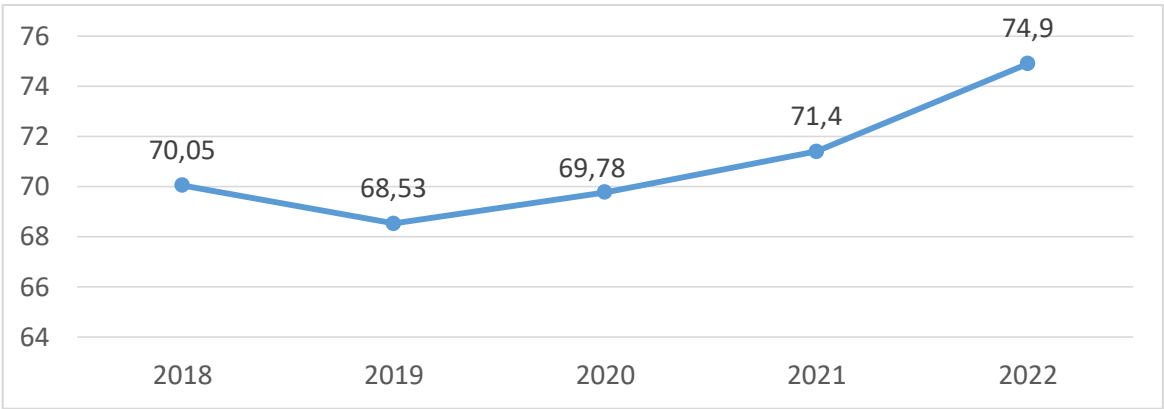
Gambar 2. 47
Perbandingan pertumbuhan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian Kab/Kota sekitar Tahun 2018 - 2022 (jiwa)



Sumber : BPS Prov Jateng, 2022

Pada tahun 2022, jumlah penganggur tertinggi ada di Kabupaten Kendal sebesar 41540 penganggur dengan penurunan tertinggi berada di Kabupaten Pekalongan dari 20788 penganggur tahun 2021 menjadi 15588 tahun 2022 dan Kota Pekalongan dari 12485 tahun 2021 menurun menjadi 8470 tahun 2022.

Gambar 2. 48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

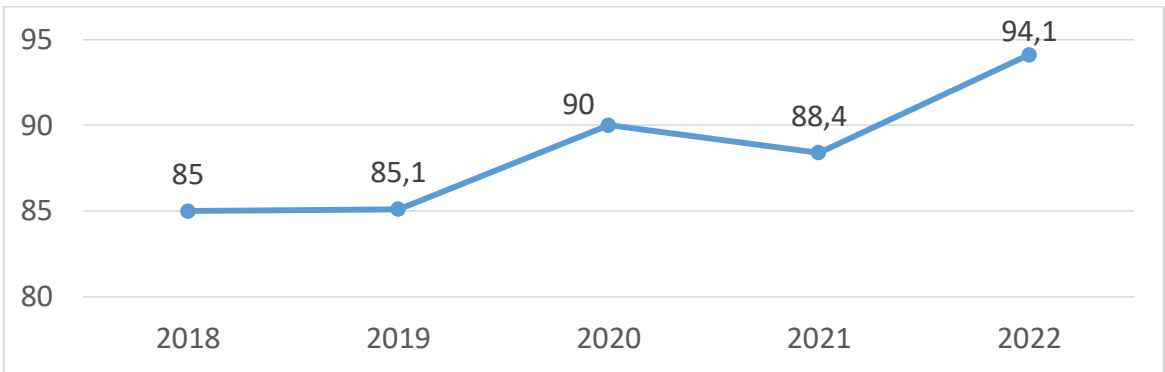
Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, sebesar 70,05 persen pada tahun 2018, meningkat menjadi 71,40 persen pada tahun 2021. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 68,53 persen yang disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk usia kerja sementara jumlah angkatan kerja cenderung tetap. Namun seiring bertambahnya

jumlah penduduk yang bekerja tingkat partisipasi angkatan kerja dapat kembali meningkat hingga tahun 2022 menjadi 74,90 persen.

10. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan sebagai susunan proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Keragaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang periode 2018-2022 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 2. 49
Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2023

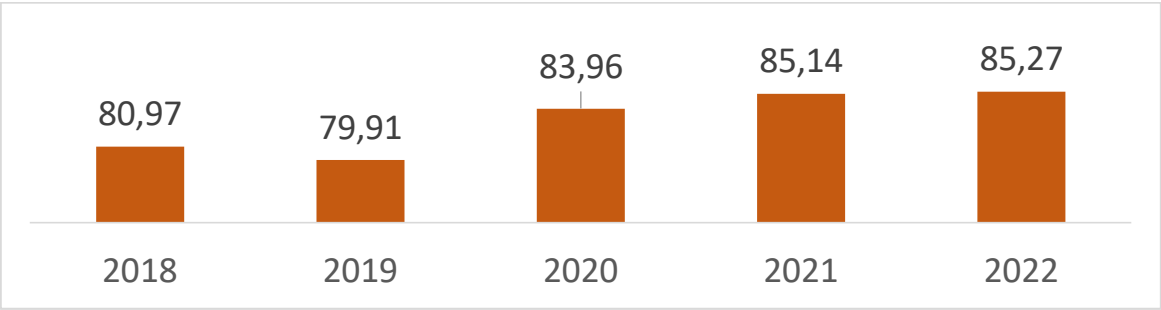
Skor PPH dalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebesar 85 menjadi sebesar 90 pada tahun 2020. Namun demikian terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 88,40 yang kemudian meningkat menjadi 94,10 di tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan keberagaman pola konsumsi masyarakat mulai terlihat.

11. Pelayanan Publik

Salah satu fungsi pemerintah dalam kehidupan bernegara adalah memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UPP), baik yang pelaksanaannya difasilitasi maupun dilakukan secara mandiri oleh masing masing UPP (dilaksanakan sendiri maupun kerjasama pihak ketiga). Pengukuran IKM di Kabupaten Batang berfluktuasi meningkat dalam

periode 2018-2022. Tahun 2018 capaian IKM Kabupaten Batang sebesar 80,97 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 menjadi sebesar 85,27 persen. Hal ini mengindikasikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk kualitas pelayanan publik cukup berhasil. Upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan diantaranya melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada UPP. Dalam periode lima tahun terakhir penerapan SOP dan SPP pada UPP di Kabupaten Batang sudah mencapai angka 100%. Meningkatnya pelayanan publik di Kabupaten Batang juga didukung oleh adanya layanan elektronik atau *e-service* melalui website, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan inovasi terbaru yaitu dibentuknya *Service Point* di Kecamatan Gringsing yang rencananya akan dikembangkan di setiap kecamatan. Serta untuk persentase Perangkat Daerah telah memiliki website aktif mencapai angka 100%.

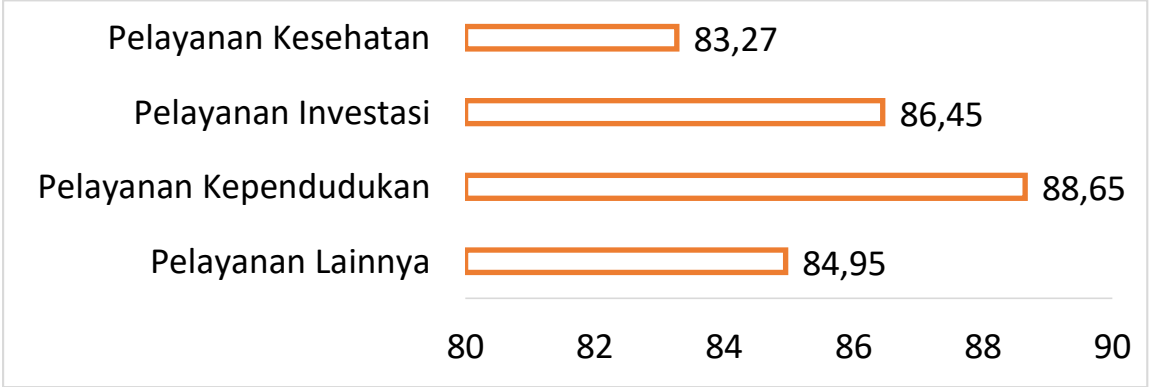
Gambar 2. 50
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Batang



Sumber: Setda Kabupaten Batang Tahun 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM untuk berbagai jenis pelayanan seperti pelayanan kesehatan, Pelayanan Investasi, Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Lainnya pada tahun 2022 tergambar dalam grafik berikut ini :

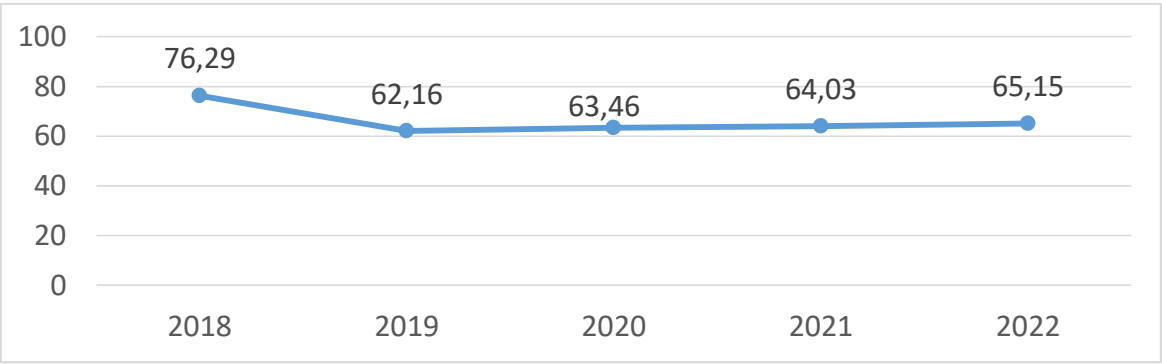
Gambar 2. 51
Nilai IKM berdasarkan jenis pelayanan Tahun 2022



Sumber : Bag Organisasi Setda, 2023

Sedangkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi. Tahun 2018 capaian PMPRB Kabupaten Batang sebesar 76,29 yang kemudian menurun menjadi 62,16 ditahun 2019 dan meningkat hingga 65,15 ditahun 2022.

Gambar 2. 52
Nilai Pemeringkatan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)



Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang Tahun 2023

a. Transparansi

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Selain kualitas dan profesionalisme aparatur serta akuntabilitas kinerja pembangunan, keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi juga menjadi faktor penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima.

• PPID

Undang-undang Nomor 14 tahun tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017.

Pemerintah Kabupaten Batang juga membentuk PPID Pembantu untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di tingkat Perangkat Daerah dan kemudian dilaporkan ke PPID. Sejak PPID dibentuk mulai dari tahun 2017, jumlah PPID Pembantu yang melapor ke PPID mengalami peningkatan, dari sebanyak 44 PD (84,61%) di tahun 2017 menjadi sebesar 48 PD (100%) di tahun 2020.

Tabel 2. 22
Jumlah PPID Pembantu (PD) yang Melapor ke PPID

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
1	Jumlah PPID Pembantu yang melapor ke PPID	PD	47	48	48	48	48
2	Tingkat PD yang melapor ke PPID	%	98,07	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2023

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, sebagai bentuk peningkatan transparansi Kabupaten Batang juga telah menerapkan sistem informasi berbasis web melalui aplikasi sistem pengendalian pembangunan (simpelbang) yang dapat diakses oleh masyarakat.

• **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mendorong percepatan produk dalam Negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah,

Pemerintah Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Bupati Batang Nomor 500/119/2022 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Batang serta Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 020/006/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Pada APBD Tahun 2023.

Dalam Surat Edaran tersebut diarahkan untuk PA/KPA wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% dari total Anggaran untuk Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 65 ayat 2 dan 3 yaitu “Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri” dan “Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah”. Menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Guna mendukung gerakan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Batang diperlukan sinergisitas seluruh Perangkat Daerah melalui perannya masing-masing sebagai berikut :

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berperan aktif dalam mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi agar berpartisipasi dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
- 2) Inspektur Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
- 3) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk memfasilitasi pendaftaran akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi serta mendampingi/memfasilitasi pendaftaran dan penanyangan produk (on boarding) ke dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.

- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
- 5) Perangkat Daerah ikut mendorong penyedia yang sudah bermitra untuk menayangkan dan menambah jumlah produk serta meningkatkan transaksi belanja melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

Adapun capaian P3DN sampai tanggal 31 Desember 2022 realisasi sebesar Rp. 163.752.646.832,00 atau sebesar 70,4 % dari total belanja Barang/Jasa yang telah di validasi

b. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu syarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya adalah adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Menpan RB, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu dari 62,64 (B) pada tahun 2018 terus meningkat menjadi 67,27 (B) pada tahun 2022.

Tabel 2. 23
Nilai SAKIP Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

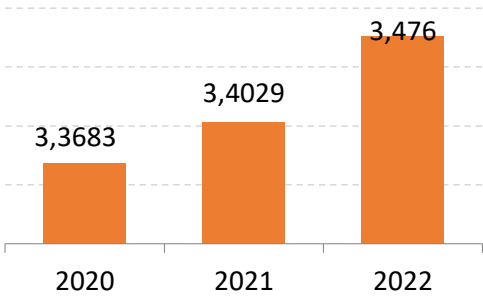
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
1	Nilai SAKIP	skor	62,64	65,02	66,14	66,30	67,27
			(B)	(B)	(B)	(B)	(B)

Sumber: Setda Kabupaten Batang Tahun 2023

2.1.3 Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Daerah

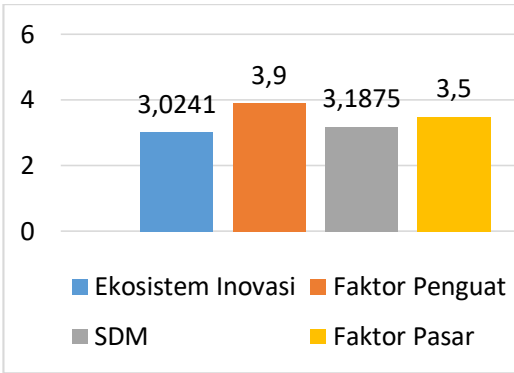
Gambar 2. 53
Hasil Penilaian Daya Saing Daerah
Tahun 2020-2022



Sumber : Litbang Kab Batang, 2023

Tahapan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah yang optimal. Pembentuk Daya Saing Daerah dapat dihitung dari 4 (empat) aspek, yaitu : Faktor Penguat, Sumber Daya Manusia, Faktor Pasar dan Ekosistem Inovasi. Empat aspek ini dikontribusi oleh 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator.

Gambar 2. 54
Aspek PDSK Kabupaten Batang Tahun 2022



Ditahun 2022, Aspek Faktor Penguat di Kabupaten Batang menempati peringkat ke-dua dengan nilai sebesar 3,95437 dari nilai tertinggi 3,95437 dan nilai terendah 3,1875.

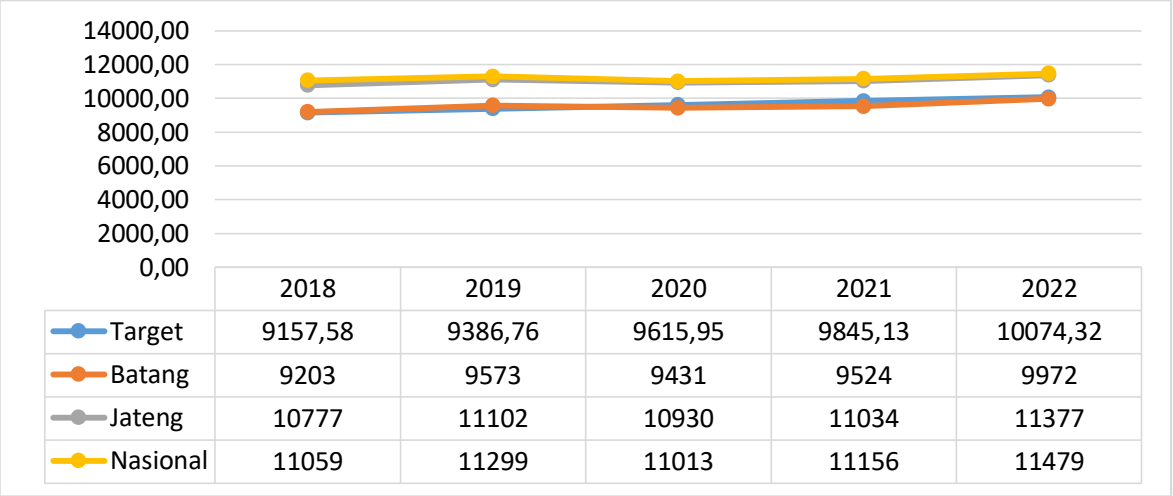
- 1.1 Aspek Ekosistem Inovasi
Pengembangan ekosistem inovasi sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan revolusi industri. Kemampuan inovasi bertumpu pada lembaga litbang untuk mendukung ekosistem inovasi yang terbagi dalam beberapa pilar antara lain :
 - a. Pilar Dinamika Bisnis
 - b. Pilar Kapasitas Inovasi
 - c. Pilar Kesiapan Teknologi
- 1.2 Aspek Faktor Penguat, terbagi dalam beberapa dimensi antara lain kelembagaan yang tertata, infrastruktur yang memadai dan perekonomian Daerah yang mantap.
- 1.3 Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*, aspek sumber daya manusia ini ditunjang oleh kesehatan dan pendidikan serta keterampilan yang semakin membaik.

1.4 Aspek Faktor Pasar/ *Market*, penilaian aspek pasar ini ditunjang dari pilar akses keuangan, ketenagakerjaan, serta ukuran pasar.

2. **Pengeluaran per Kapita**

Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2018 sebesar Rp 9.203 ribu per orang per tahun dan berfluktuasi naik menjadi Rp 9.972 ribu per orang per tahun pada tahun 2022. Walaupun pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan menjadi Rp 9.431 ribu per orang per tahun namun telah meningkat kembali hingga capaian Rp 9.972 ribu per orang per tahun tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang memberi hasil yang positif terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Meskipun capaian pengeluaran per kapita tahun 2022 naik, namun jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 11.377 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar 11.479 ribu per orang per tahun. Selengkapnya dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 2. 55
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022
(Ribu Rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

3. **Infrastruktur**

a. **Infrastruktur**

Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan prasarana transportasi berupa Jalan, agar pelaksanaan barang dan jasa berjalan dengan lancar. Sistem jaringan jalan di Kabupaten

Batang terdiri dari 589,731 km jalan kewenangan nasional, 37,31 km jalan kewenangan provinsi dan 552,42 km merupakan jalan kewenangan kabupaten.

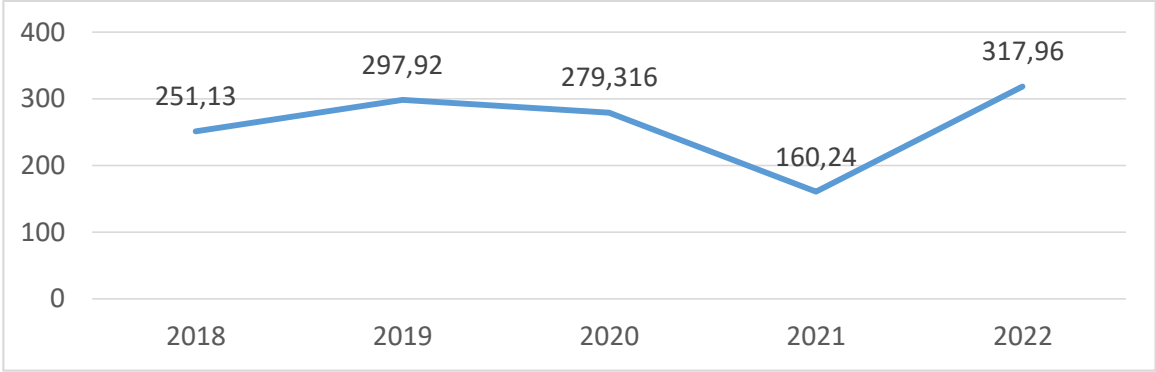
Tabel 2. 24
Kondisi Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten
di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

No	Kondisi jalan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
1	Baik	Km	251,13	297,92	279,316	160,240	317,96
2	Sedang	Km	17,67	95,87	111,788	249,694	148,75
3	Rusak Ringan	Km	26,74	90,37	64,967	83,792	56,88
4	Rusak Berat	Km	256,88	68,28	96,350	58,595	28,83

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2023

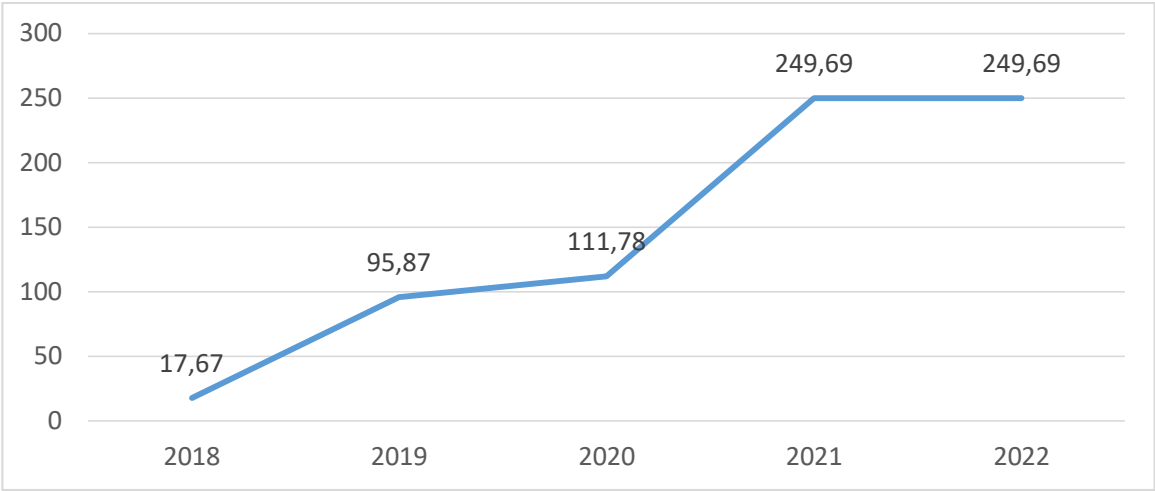
Panjang jalan dalam kondisi baik dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2018 sepanjang 251,13 km naik menjadi sepanjang 297,92 km pada tahun 2019, kemudian ada penurunan menjadi 160,202 Km pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 317,96 km di tahun 2022. Namun pada jalan kondisi sedang mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022 dimana pada tahun 2018 dengan panjang jalan 17,67 km menjadi 148,75 km jalan dengan kondisi sedang pada tahun 2022. Demikian juga dengan panjang jalan dalam kondisi rusak berat, juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari panjang jalan 256,88 km yang rusak berat pada tahun 2018, menjadi 28,83km panjang jalan yang mengalami rusak berat pada tahun 2022.

Gambar 2. 56
Panjang Jalan Kondisi Baik Kewenangan Kabupaten Batang Tahun
2018-2022 (km)



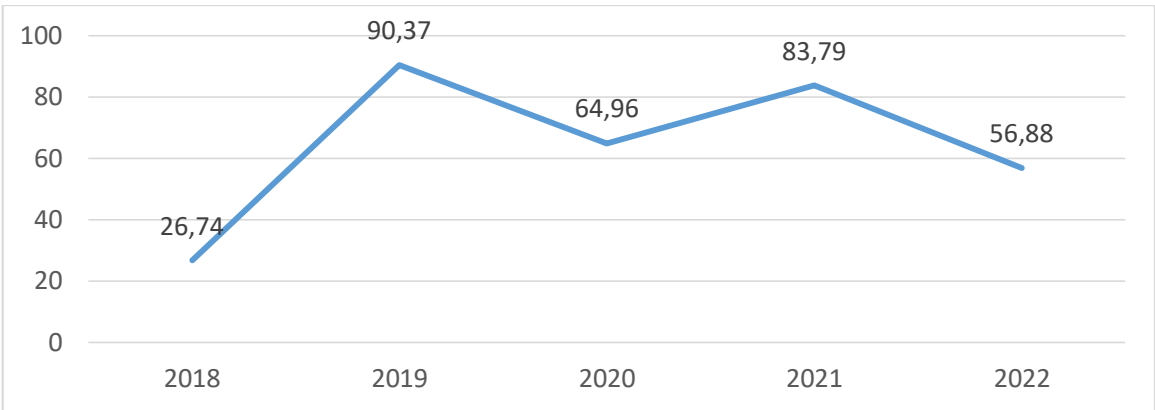
Sumber : Batang dalam Angka, 2023

Gambar 2. 57
Panjang Jalan Kondisi Rusak Sedang Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



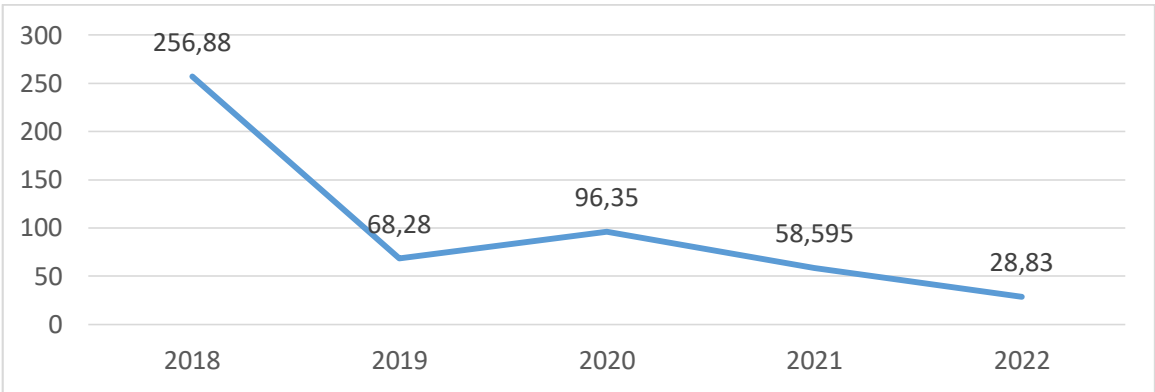
Sumber : Batang dalam Angka, 2023

Gambar 2. 58
Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber : Batang dalam Angka, 2023

Gambar 2. 59
Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber : Batang dalam Angka, 2023

b. Sumber Daya Air

1. Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi bertujuan untuk memenuhi permintaan air irigasi bagi daerah layanan. Di Kabupaten Batang, luas areal jaringan irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten seluas 20.329,896 Ha. Pemerintah Kabupaten Batang terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, hal ini dapat dilihat dari luasan irigasi dalam kondisi baik yang luasannya terus meningkat dalam periode lima tahun terakhir.

Tabel 2. 25
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
Tahun 2018-2022

NO	Kondisi Irigasi	Stn	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	Ha	10.008,41	10.595,94	11.561,61	11.676,97	12.628,93
2	Rusak	Ha	10.321,49	9.733,95	8.768,28	8.652,92	7.700,966
	Total luas	Ha	20.329,90	20.329,90	20.329,90	20.329,89	20.329,89

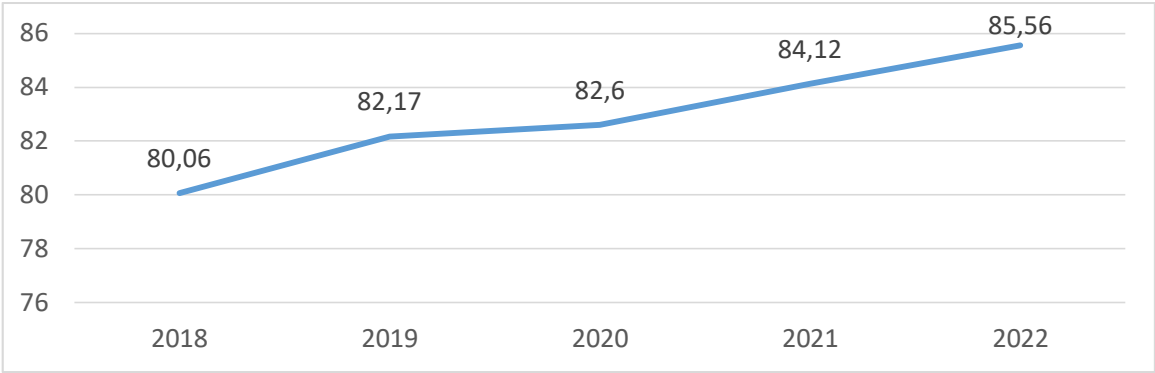
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2023

Pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 10.008,41 ha dan terus meningkat menjadi 12.628,93 ha pada tahun 2022. Luasan irigasi dalam kondisi baik ini juga lebih besar dibandingkan dengan luasan irigasi dalam kondisi rusak yaitu sebesar 7.700,966 ha pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Batang oleh pemerintah Kabupaten Batang cukup berhasil.

2. Akses Air Minum dan sanitasi

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia. Pelayanan terhadap akses air minum di Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data cakupan layanan akses air minum yang terus meningkat dari tahun 2018-2022, dari 80,06% di tahun 2018 menjadi 85,56% di tahun 2022.

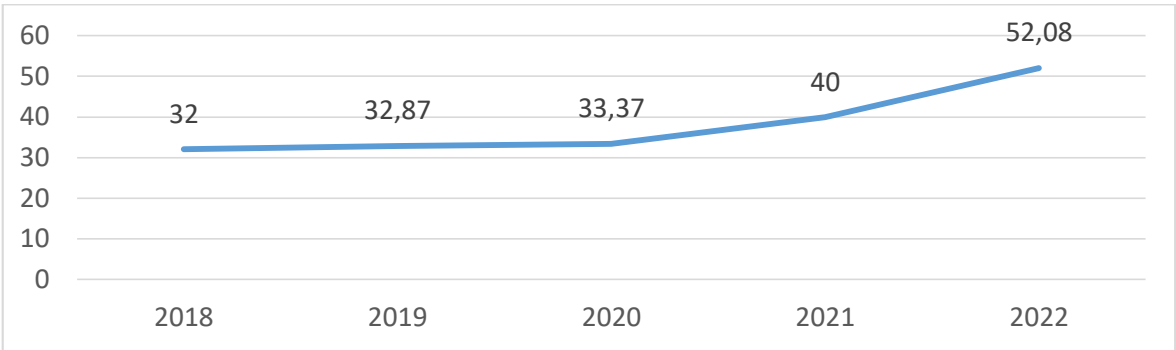
Gambar 2. 60
Persentase Cakupan Layanan Akses Air Minum Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

Persentase pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Cakupan air minum perpipaan meningkat dari 32% di tahun 2018 menjadi 52,08% di tahun 2022. Grafik peningkatan persentase pelayanan air minum perpipaan dapat dilihat pada gambar berikut :

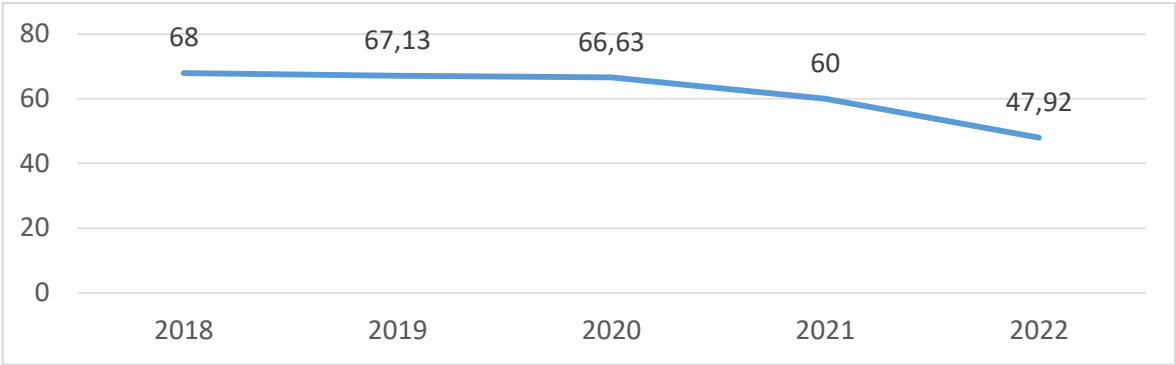
Gambar 2. 61
Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber : DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

Persentase cakupan pelayanan air minum non perpipaan di Kabupaten Batang mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 68% menjadi sebesar 47,92% pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan cakupan layanan air minum pada jaringan perpipaan sehingga mengurangi persentase cakupan layanan air minum pada jaringan non perpipaan.

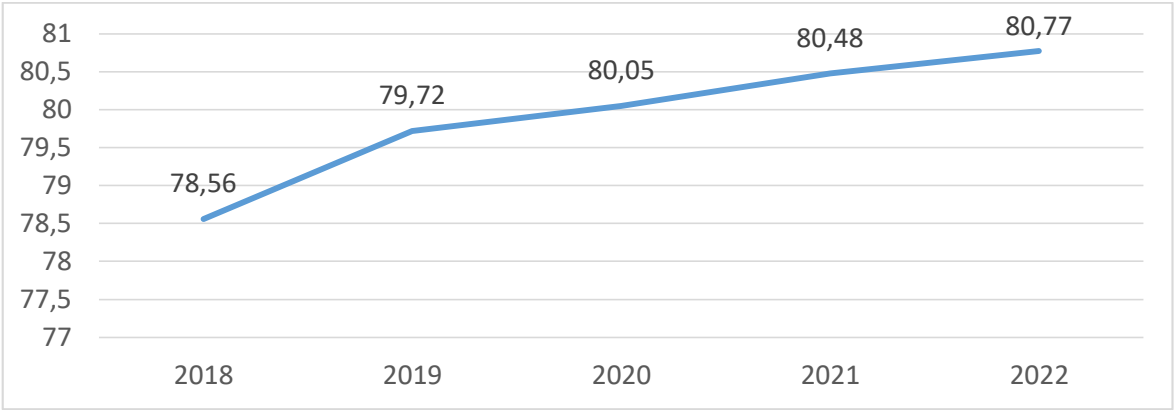
Gambar 2. 62
Persentase Cakupan Layanan Air Minum Non Perpipaan
di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber : DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

Demikian juga untuk cakupan layanan akses sanitasi, dalam periode 2018-2022 terus mengalami peningkatan dari 78,56% di tahun 2018 menjadi 80,77% di tahun 2022.

Gambar 2. 63
Cakupan layanan akses sanitasi Kabupaten Batang



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

3. Rasio Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB ADHK

Jumlah net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang menunjukkan angka negatif dalam kurun waktu 2018-2022, yang artinya nilai impor masih lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor di Kabupaten Batang. Pada tahun 2018 sebesar 4,390,960.67, disebabkan karena nilai impor yang tinggi seiring masuknya mesin impor untuk industri dan PLTU. Dengan selesainya proyek PLTU, defisit semakin mengecil sampai dengan tahun 2022 menjadi 1.032.738,28 juta rupiah. Sedangkan untuk nilai ekspor, di Kabupaten Batang masih didongkrak oleh komoditas pertanian. Demikian halnya dengan rasio net ekspor barang dan jasa jika dibandingkan dengan total PDRB ADHK juga

berfluktuasi menurun yaitu dari -30,39% pada tahun 2018 menurun hingga tahun 2022 menjadi sebesar -6,18%.

Tabel 2. 26
Rasio Ekspor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang

Tahun	PDRB ADHK (Juta Rp)	Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rp)	Rasio
2018	14.448.625,8	-4.390.960,67	-30,39
2019	15.226.885,73	-2.094.116,5	-13,75
2020	15.030.577	-1.559.690,55	-10,38
2021	15.764.265,54	-1.058.270,41	-6,71
2022	16.704.986,75	-1.032.738,29	-6,18

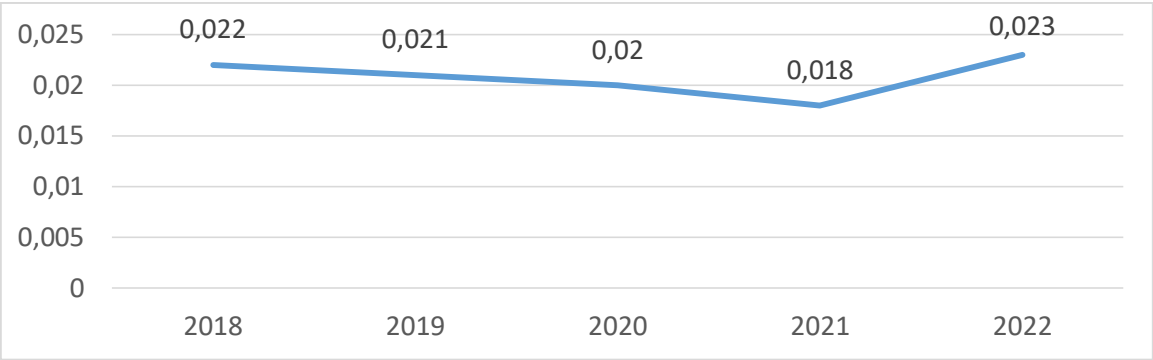
Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2023

4. Kondusifitas wilayah

a. Gangguan Keamanan yang tertangani

Angka kriminalitas di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dalam periode tahun 2018-2022, tahun 2018 sebesar 0,022%, menjadi 0,023% di tahun 2022 dimana dalam capaian 5 tahun tersebut mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 sebesar 0,018%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondusivitas di Kabupaten Batang cukup terjaga.

Gambar 2. 64
Angka Kriminalitas di Kabupaten Batang



Sumber: Kepolisian Resort Batang Tahun 2023, diolah

b. Jumlah Pos Kamling

Jumlah Poskamling di Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun terakhir, dari 1.832 unit pada tahun 2018 berkurang menjadi 1.184 unit dan kembali bertambah menjadi 1.223 unit pada tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 1795 poskamling di tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2. 27
Jumlah Pos Kamling di Kabupaten Batang

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	BATANG	221	178	368	219	219
2	WARUNGASEM	55	67	67	76	76
3	WONOTUNGGAL	125	92	106	110	110
4	BANDAR	169	144	296	259	259
5	BLADO	60	39	29	87	87
6	REBAN	170	87	187	115	115
7	TULIS	59	76	53	110	110
8	KANDEMAN	108	34	118	110	110
9	PECALUNGAN	155	24	34	53	53
10	SUBAH	221	192	191	171	171
11	LIMPUNG	149	73	168	138	138
12	GRINGSING	74	95	139	87	87
13	TERSONO	115	71	95	60	60
14	BAWANG	105	36	71	78	78
15	BANYUPUTIH	46	70	54	122	122
JUMLAH		1832	1278	1976	1795	1795

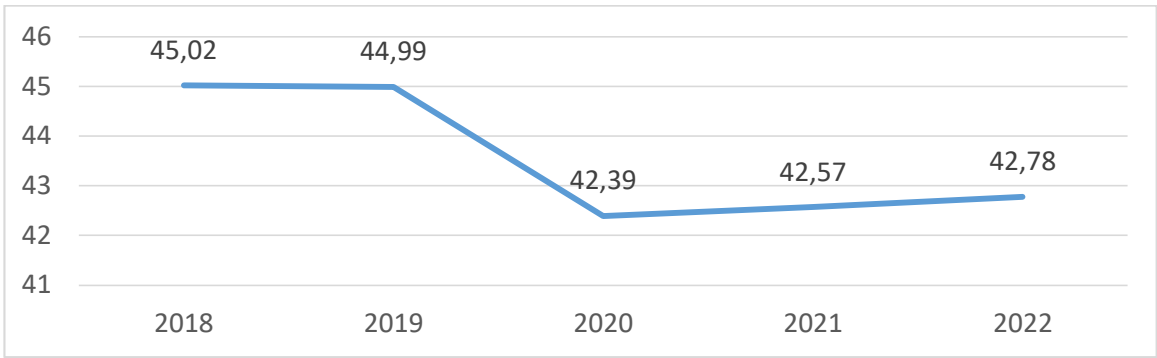
Sumber: Satpol PP Kabupaten Batang Tahun 2022

5. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan, maka akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Gambar 2. 65
Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Batang



Sumber: SITIKA Kab. Batang, 2023

Selama periode 2018-2022, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 45,02 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif, maka menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Batang terus mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 42,78 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42-43 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung berkurang, belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumber daya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja. Hal ini karena pada usia produktif tapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

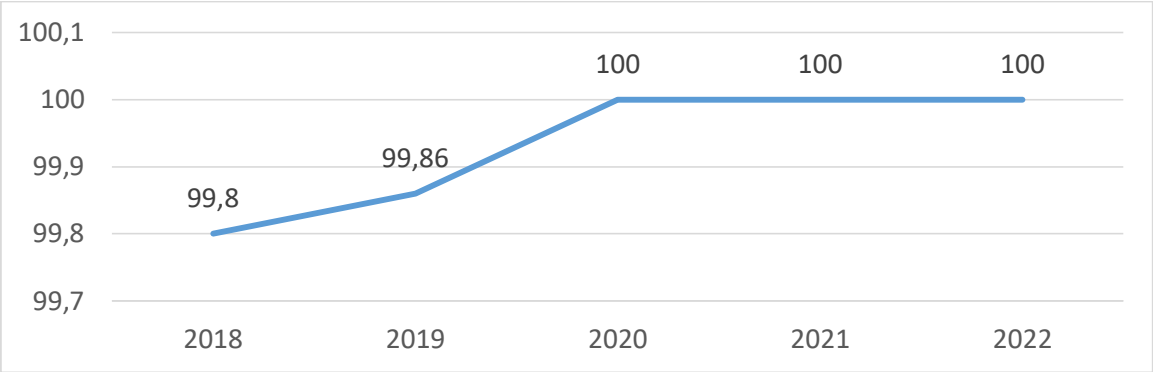
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan perhatian khusus terhadap

penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan kabupaten dan dalam rangka pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pelayanan dasar untuk jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Kualitas pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan, antara lain Angka Melek Huruf, angka partisipasi sekolah, dan penyediaan prasarana sarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, secara keseluruhan baik APK dan APM semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dan dapat dilihat pada tabel berikut.

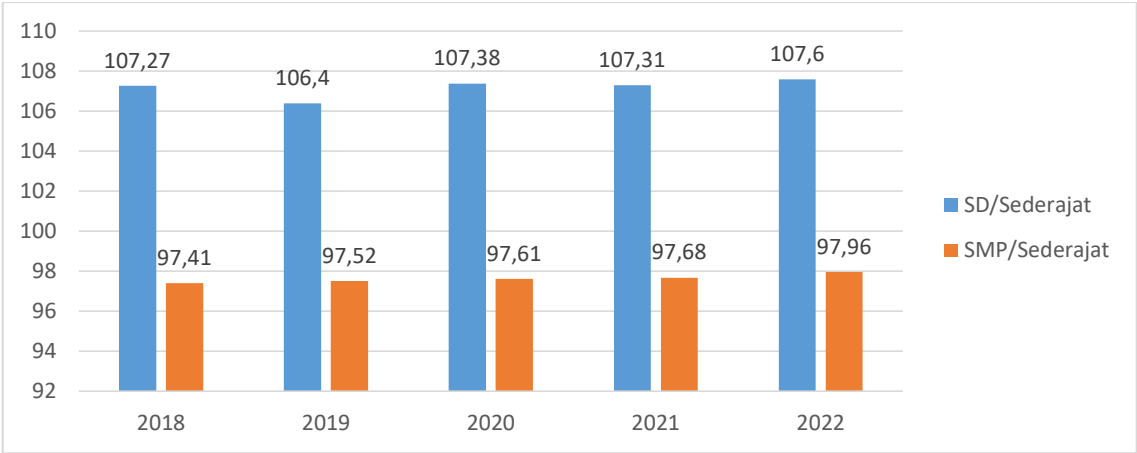
Gambar 2. 66
Angka Melek Huruf kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: SITIKA Kab. Batang, 2023

Angka Melek Huruf Kabupaten Batang cenderung meningkat dalam kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2018 Angka Melek Huruf Kabupaten Batang sebesar 99,46%, terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 100% pada tahun 2020 dan bertahan hingga tahun 2022. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan Angka Melek Huruf diantaranya melalui penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dengan melibatkan SKB dan PKBM.

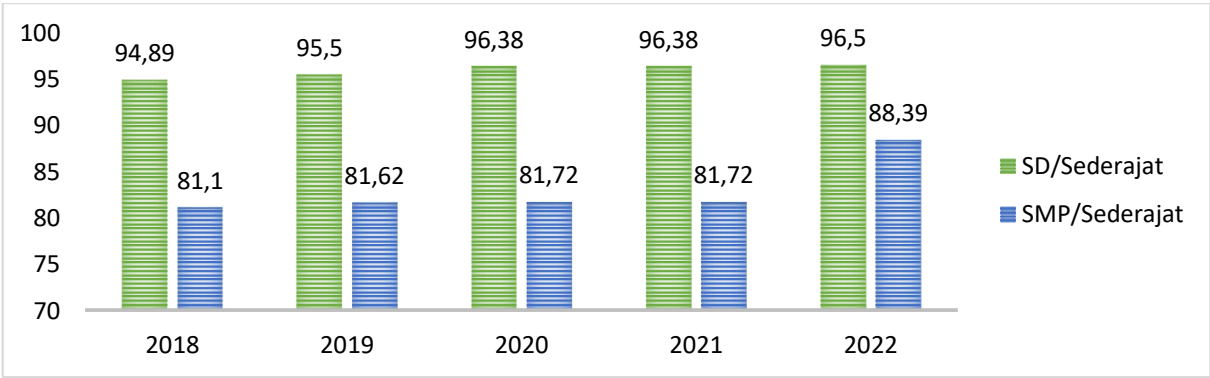
Gambar 2. 67
Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: SITIKA Kab. Batang, 2023

Jika dilihat APK per jenjang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir APK SD/MI/ sederajat cenderung berfluktuasi naik, dari 107,21 pada tahun 2018 kemudian terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 menjadi sebesar 107,60. Sedangkan APK Smp/MTs/ sederajat cenderung meningkat dalam 2018-2022, dari 96,41 pada tahun 2018 menjadi 97,96 pada tahun 2022.

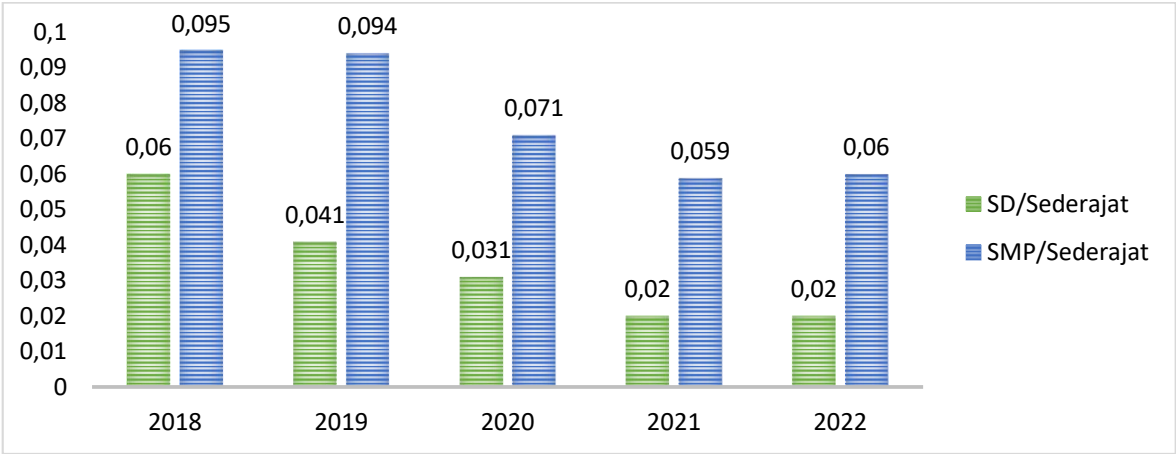
Gambar 2. 68
Angka Partisipasi Murni Per Jenjang Pendidikan Kab. Batang
Tahun 2018-2022



Sumber : SITIKA Kab. Batang, 2023

APM pada jenjang SD/MI/ sederajat terus mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir, sebesar 94,89 pada tahun 2018 meningkat menjadi 96,50 pada tahun 2022. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan dari 81,10 di tahun 2018 menjadi 88,39 di tahun 2022.

Gambar 2. 69
Angka Putus Sekolah Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

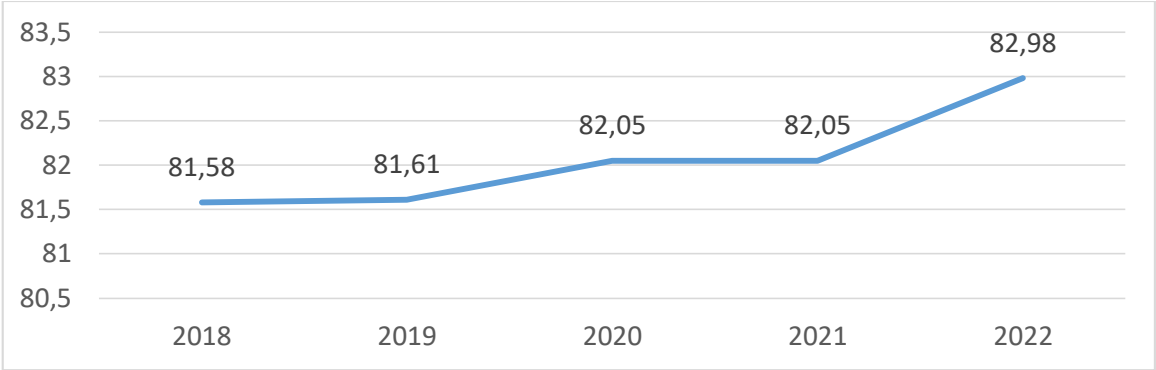


Sumber : Disdikbud Kab, Batang, 2022

Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/Sederajat pada tahun 2018 menunjukkan angka 0,06% dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 0,02%. Sedangkan pada jenjang SMP/Sederajat, angka putus sekolah cenderung menurun dimana realisasi sebesar 0,095% di tahun 2018 dan terus menurun menjadi 0,06% di tahun 2022. Indikator Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0,10% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Upaya penanganan anak tidak sekolah akan terus dilaksanakan melalui pemenuhan layanan Pendidikan PAUD dan Dikdas serta strategi pencegahan melalui penguatan PKBM.

Sedangkan Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat dari 81,58% pada tahun 2018 menjadi 82,98% pada tahun 2022. Selengkapnya dijelaskan pada grafik berikut ini :

Gambar 2. 70
Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

Tabel 2. 28
Kondisi sarpras pendidikan Kab.Batang
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Stn	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94.39	94.48	94.48	94,61	85,00
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	84.42	84.43	84.43	85,15	86,00
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	62.26	63.93	64.21	65,08	56,00
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	15.37	18.28	18.28	19.31	56,00

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2023

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini bangunan sekolah SD/MI menurun dari 94,39% pada tahun 2018 menjadi 85,00% pada tahun 2022, sedangkan bangunan sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik meningkat dari 84,42% pada tahun 2018 menjadi 86,00% pada tahun 2022. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar dalam periode tahun 2018-2022 menurun dari 62,26% di tahun 2018 menjadi sebesar 56,00% pada tahun 2022, sedangkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir yaitu dari 15,37% pada tahun 2018, naik menjadi 56,00% pada tahun 2022.

Tabel 2. 29
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
	Angka Pendidikan yang ditamatkan						
1	a. Jenjang SD/Sederajat	%	72,66	74,00	76,00	51,00	67,40
2	b. Jenjang SMP/Sederajat	%	35,95	38,00	38,00	28,21	26,22

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2023

Angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD/ sederajat cenderung berfluktuasi naik pada periode tahun 2018-2022 dari 72,66% pada tahun 2018 menjadi 67,40% pada tahun 2022. Pada jenjang SMP/ sederajat juga berfluktuasi menurun pada periode lima tahun

terakhir dari 35,95% pada tahun 2018 menjadi 26,22% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras untuk kembali meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan baik jenjang SD/ sederajat maupun SMP/ sederajat.

Sedangkan kualitas tenaga pendidik berdasarkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari 81,10% di tahun 2018 yang meningkat menjadi 92,81% di tahun 2022. Selengkapnya dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 30
Guru yang Memenuhi Kualifikasi
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	81,10	88,88	89,37	90,11	92,81

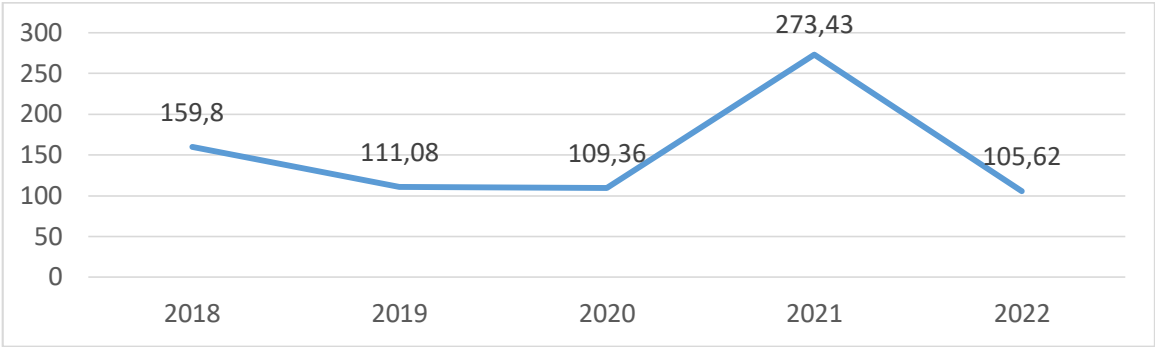
Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2023

2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Batang terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang yaitu Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 2 (dua) Rumah Sakit meliputi RSUD Batang dan RSUD Limpung serta 1 (satu) Rumah Sakit swasta yaitu Rumah Sakit Umum QIM, puskesmas rawat inap sebanyak 4 buah, puskesmas rawat jalan sebanyak 17 buah, puskesmas pembantu sebanyak 42 buah, puskesmas keliling/ambulan sebanyak 23 buah, Poliklinik Kesehatan Desa sebanyak 200 unit serta posyandu sebanyak 1.224 buah yang tersebar di seluruh Kabupaten Batang.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan prevalensi gizi buruk pada Balita.

Gambar 2. 71
Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang (per 100.000 KH)



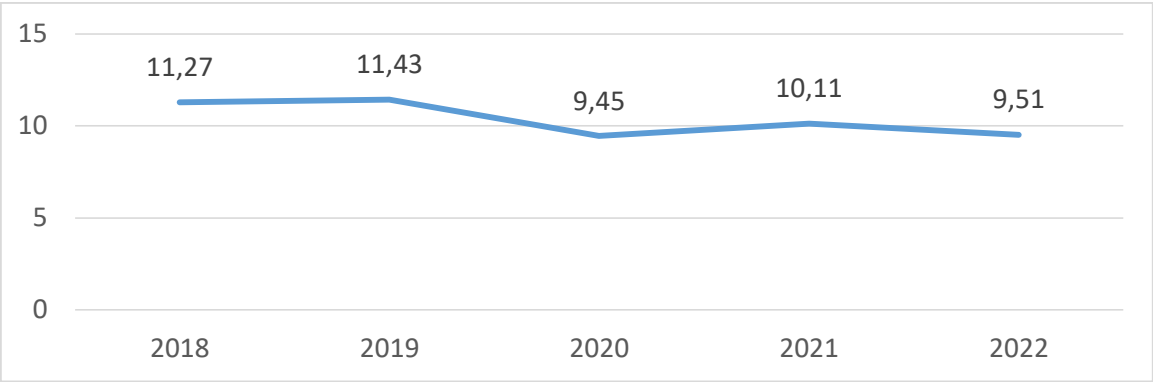
Sumber: SITIKA Kab. Batang, 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi naik dan turun, dari 159,8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 menurun hingga 109,36 di tahun 2020 dan meningkat kembali hingga 273,43 di tahun 2021 dan menurun kembali menjadi 105,62 di tahun 2022. Kasus AKI di Kabupaten Batang antara lain disebabkan oleh masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) karena adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu diwaktu hamil, komplikasi kebidanan dan masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur. Persentase terbesar dari AKI disebabkan oleh penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB dan hipertensi. Namun demikian, terdapat perbaikan sehingga terdapat penurunan angka kematian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang membawa hasil positif. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5-ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Dukungan terhadap pencapaian SDG's dapat dilihat dari kinerja pencapaian gizi, yang ditunjukkan pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi gizi buruk. Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan daerah tahun 2023, akan dilakukan melalui aktivitas yang kongkrit utamanya hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan audit kematian *maternal perinatal* untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perumusan rencana intervensi;
2. Menugaskan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk melakukan pembinaan kepada Puskesmas, termasuk mengupayakan penugasan dokter spesialis di Puskesmas secara berkala;
3. Menggalakkan Kembali Gerakan 5Ng dengan memberdayakan kader-kader yang ada di tingkat desa/kelurahan;
4. Memperkuat kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal.

Gambar 2. 72
Angka Kematian Bayi per 1000 KH Kabupaten Batang



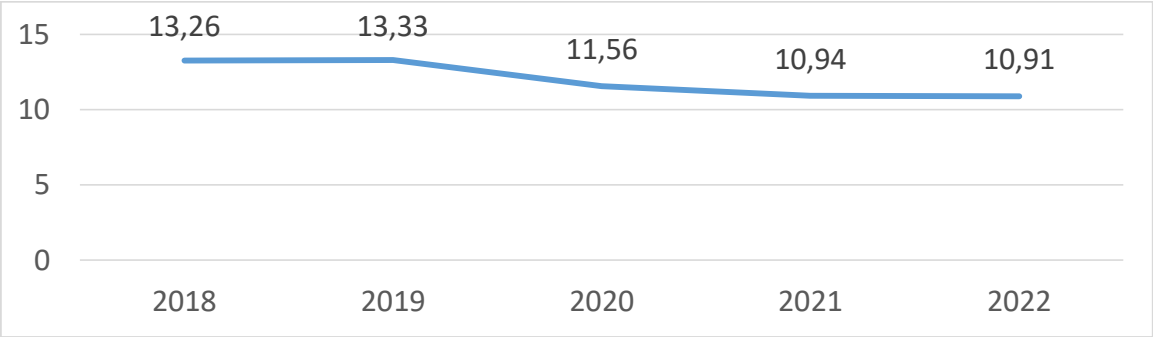
Sumber: SITIKA Kab. Batang, 2023

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam periode tahun 2018-2022 cenderung menurun, dari 11,27 per 1000 KH pada tahun 2018 turun menjadi 9,45 per 1000 KH pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka AKB naik kembali menjadi sebesar 12,3 per 1000 KH yang kemudian menurun kembali menjadi 9,51 per 1000 KH di tahun 2022. Meningkatnya AKB ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya angka komplikasi neonatal dan meningkatnya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan PMT pada ibu hamil KEK, pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan neonatus dan bayi serta meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta pemberian vit A

pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun sehingga pada tahun 2020 angka AKB dapat diturunkan menjadi sebesar 9,67 per 1000 KH, namun perlu ada perbaikan kembali untuk menjadi evaluasi pada tahun 2021, karena AKB yang kembali naik.

Kondisi capaian Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Batang cenderung menurun dari tahun 2018-2022 yaitu dari 13,26 per 1000 KH pada tahun 2018 menurun menjadi 10,91 per 1000 KH pada tahun 2022. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penurunan AKBA diantaranya melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali setahun, memberikan imunisasi lanjutan dan memberikan vitamin A, namun perlu ditingkatkan kembali untuk kembali menurunkan angka AKBA ini. Selengkapnya dijelaskan dalam grafik berikut ini :

Gambar 2. 73
Angka Kematian Balita per 1000 KH Kabupaten Batang



Sumber: SITIKA Kab. Batang, 2023

Pemenuhan sarana prasarana kesehatan berdasarkan indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

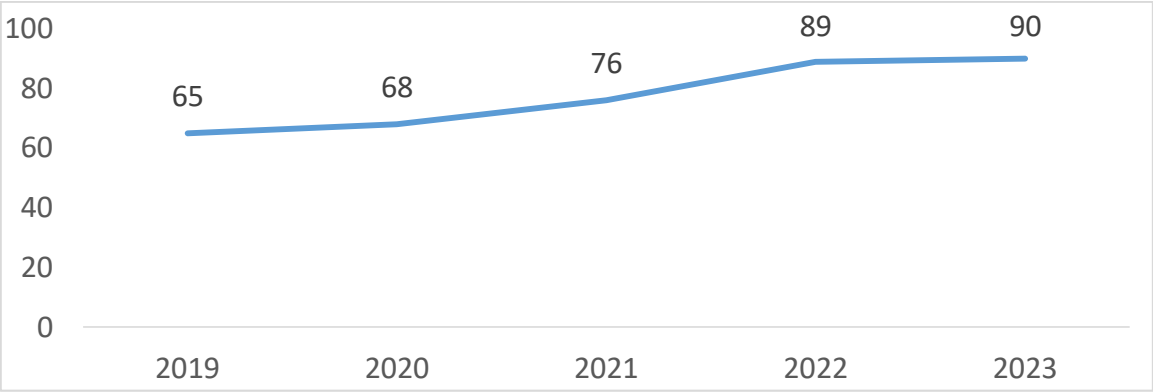
Tabel 2. 31
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit per satuan penduduk Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per penduduk	1:9.372	1:9.372	1:9.564	1:9.539	1:9.635
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per penduduk	1:256.194	1:256.194	1:258.230	1:270.282	1:276.192

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2023

Perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah melalui program *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang adalah melakukan penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat, sosialisasi Perda KTR, pengaktifan Germas dan penguatan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pengadaan jamban sehat dan pemberian stimulan jamban keluarga

Gambar 2. 74
Peningkatan Jumlah Desa ODF di Kabupaten Batang
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinkes Kab. Batang, 2023

Tahun 2020, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Batang yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 68 desa/kelurahan meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 65 desa/kelurahan. tahun 2021 jumlah desa terverifikasi ODF meningkat menjadi 76 desa/kelurahan dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 89 desa. Kemudian di tahun 2023 awal tahun terdapat penambahan 1 desa ODF menjadi 90 desa di Kabupaten Batang. Sebaran desa yang terverifikasi ODF di Kabupaten Batang tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 32
Persebaran data ODF Kabupaten Batang Tahun 2023

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	Binangun	Bandar
2	Pesalakan	Bandar
3	Wonodadi	Bandar
4	Wonomerto	Bandar
5	Kalangsono	Banyuputih
6	Penundan	Banyuputih
7	Timbang	Banyuputih

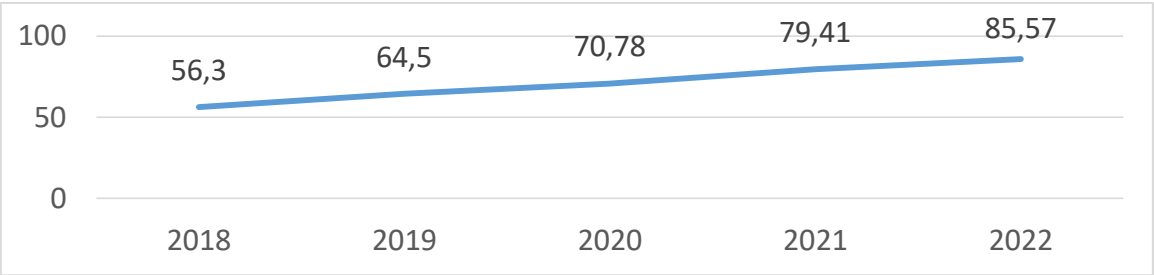
NO	NAMA DESA	KECAMATAN
8	Cepokokuning	Batang
9	Pangempon	Bawang
10	Pasusukan	Bawang
11	Pranten	Bawang
12	Sangubanyu	Bawang
13	Cokro	Blado
14	Kalipancur	Blado
15	Kalisari	Blado
16	Kalitengah	Blado
17	Gondang	Blado
18	Surodadi	Gringsing
19	Sentul	Gringsing
20	Tedunan	Gringsing
21	karanggeneng	Kandeman
22	Gombong	Pecalungan
23	Keninten	Pecalungan
24	Siguci	Pecalungan
25	Kalisari	Reban
26	Pacet	Reban
27	Durenombo	Subah
28	Kalimanggis	Subah
29	Clapar	Subah
30	Kemiri Timur	Subah
31	Jatisari	Subah
32	Sendang	Tersono
33	Sumurbanger	Tersono
34	Margosono	Tersono
35	Sidalang	Tersono
36	Kebumen	Tersono
37	Harjo. Barat	Tersono
38	Tegalombo	Tersono
39	Harjo. Timur	Tersono
40	Kalipucang kulon	Batang
41	Kalisalak	Batang
42	Karanganyar	Batang
43	Kecepak	Batang
44	Pasekaran	Batang
45	Kandeman	Kandeman
46	Bakalan	Kandeman
47	Lawangaji	Kandeman
48	Depok	Kandeman
49	Tragung	Kandeman
50	Wonokerso	Kandeman
51	Ujungnegoro	Kandeman
52	Karanggeneng	Kandeman
53	Juragan	Kandeman
54	Sempu	Limpung
55	Kalisalak	Limpung
56	Pungangan	Limpung

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
57	Lobang	Limpung
58	Tulis	Tulis
59	Ponowareng	Tulis
60	Posong	Tulis
61	Sembojo	Tulis
62	Simbangjati	Tulis
63	Cluwuk	Tulis
64	Kenconorejo	Tulis
65	manggis	Tulis
66	Kedungsegog	Tulis
67	Kaliwareng	Warungasem
68	Pejambon	Warungasem
69	Sariglagah	Warungasem
70	Pesaren	Warungasem
71	Cepagan	Warungasem
72	Masin	Warungasem
73	Banjiran	Warungasem
74	Wasrungasem	Warungasem
75	Gapuro	Warungasem
76	Sawahjoho	Warungasem
77	Candiareng	Warungasem
78	Lebo	Warungasem
79	Menguneng	Warungasem
80	Terban	Warungasem
81	Sijono	Warungasem
82	Silurah	Wonotunggal
83	Sodong	Wonotunggal
84	Gringgingsari	Wonotunggal
85	Kedungmalang	Wonotunggal
86	Brokoh	Wonotunggal
87	Brayo	Wonotunggal
88	Kemligi	Wonotunggal
89	Siwatu	Wonotunggal
90	Dringo	Wonotunggal

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambar 2. 75
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

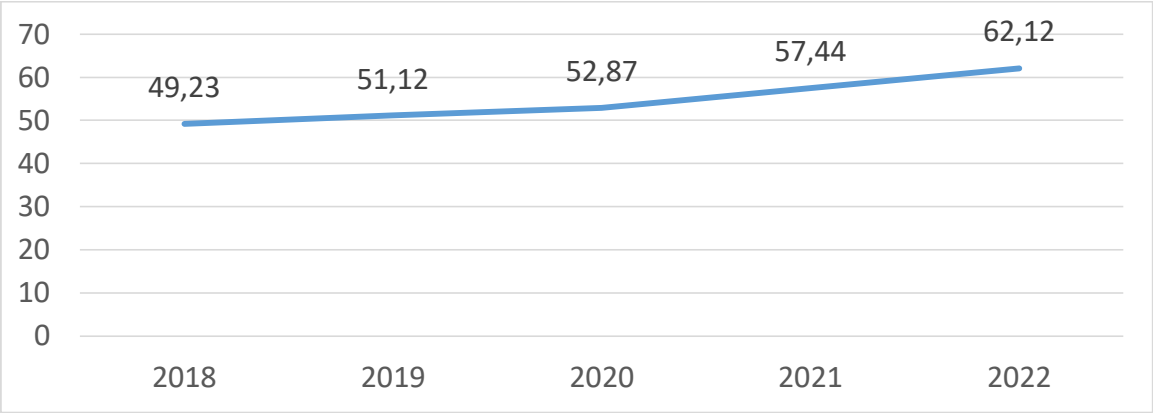


Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2023

Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten sepanjang 552,42 km, dengan kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2018-2021, yaitu sebesar 56,3% pada tahun 2018 menjadi 85,57% pada tahun 2022. Meskipun panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan, namun kondisi panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat juga masih cukup tinggi karena angka masih diatas 20%, sehingga masih diperlukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik

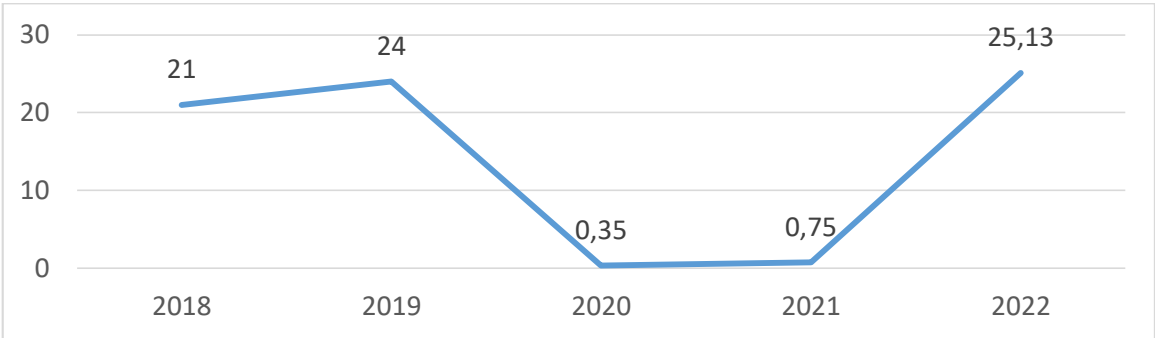
Selain dilihat dari kondisi jalan, pembangunan infrastruktur tak terlepas dari kondisi irigasi daerah. Kondisi irigasi Kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat pada periode lima tahun terakhir, dari tahun 2018 sebesar 49,23% meningkat menjadi 62,12% pada tahun 2022, meskipun demikian kedepan masih perlu lebih ditingkatkan karena masih banyaknya bangunan irigasi yang rusak disebabkan umurnya sudah lama dan tidak tertangani dengan baik serta seringnya terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan irigasi. Sebagaimana kondisi irigasi dari tahun 2018-2022 tergambar dalam grafik berikut ini :

Gambar 2. 76
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2023

Gambar 2. 77
Luas Drainase Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) di Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022



Sumber : DPUPR Kab. Batang, 2022

Capaian rasio ruang terbuka hijau berfluktuasi dalam periode tahun 2018-2022, yaitu sebesar 15,35% pada tahun 2018 menurun pada tahun 2019 menjadi 7,34% kemudian meningkat kembali menjadi 25,42 di tahun 2022. Sedangkan persentase ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang tahun 2018 - 2022 cenderung stagnan di angka 72,73 dari tahun 2018-2021 dan menurun menjadi 72,15 ditahun 2022. Hal ini disebabkan kondisi riil pemanfaatan ruang di lapangan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah dipetakan pada RTRW sehingga terjadi simpangan pemanfaatan ruang.

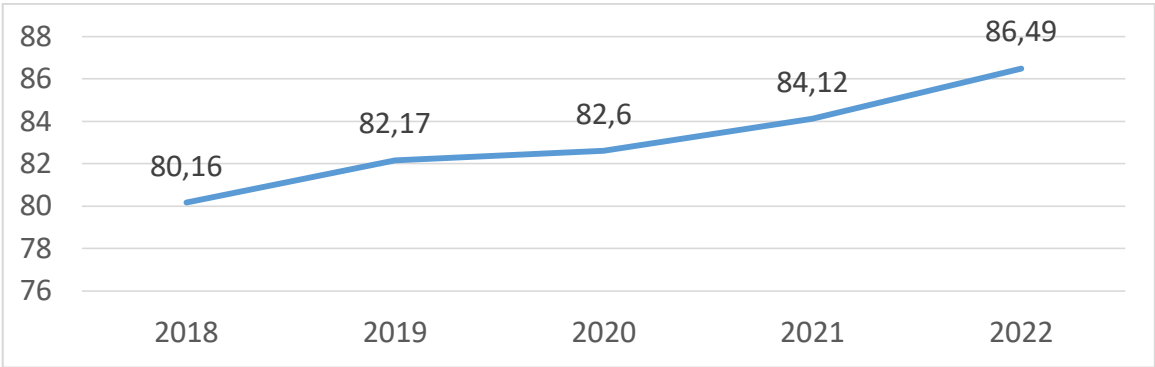
Tabel 2. 33
Rasio RTH dan Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang (%)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	%	15,35	7,34	24,32	28,83	25,42
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	72,73	72,73	72,73	72,73	72,15

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2023

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia. Pelayanan terhadap akses air minum di Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data cakupan layanan akses air minum yang terus meningkat dari tahun 2018-2022, dari 80,16% di tahun 2018 menjadi 86,49% di tahun 2022.

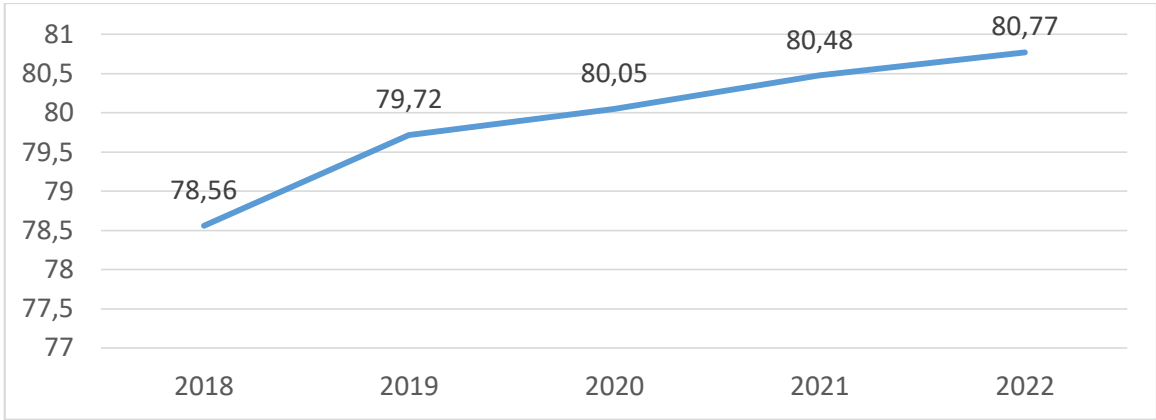
Gambar 2. 78
Cakupan layanan akses air minum Kabupaten Batang (%)



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

Demikian juga untuk cakupan layanan akses sanitasi, dalam periode 2018-2022 terus mengalami peningkatan dari 78,56% di tahun 2018 menjadi 80,7% di tahun 2022.

Gambar 2. 79
Cakupan layanan akses sanitasi Kabupaten Batang

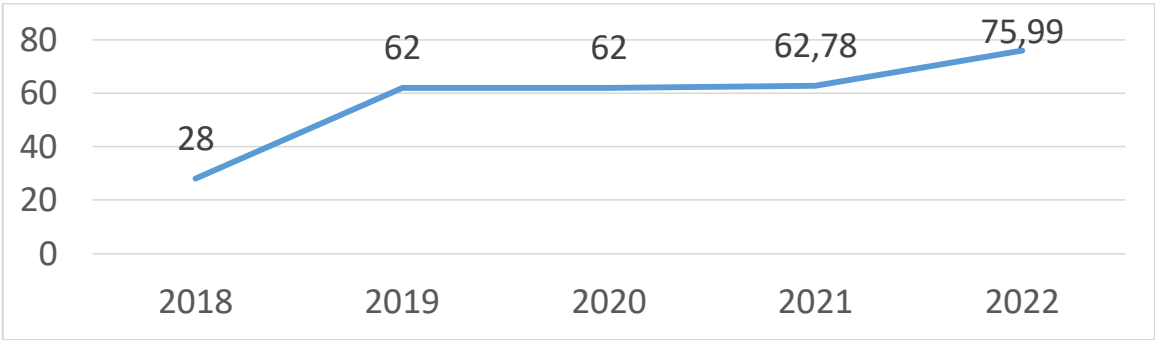


Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Batang dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dari persentase pengurangan luasan kawasan kumuh yang meningkat dari tahun 2018–2022. Dari tahun 2018 sebesar 28%, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 75,99%.

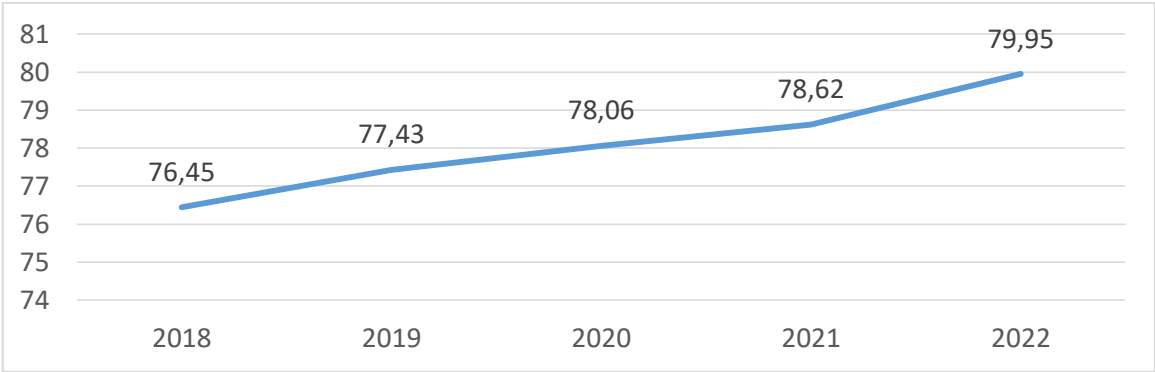
Gambar 2. 80
Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 76,45% menjadi 79,95% pada tahun 2022. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang melalui pemugaran rumah tidak layak huni.

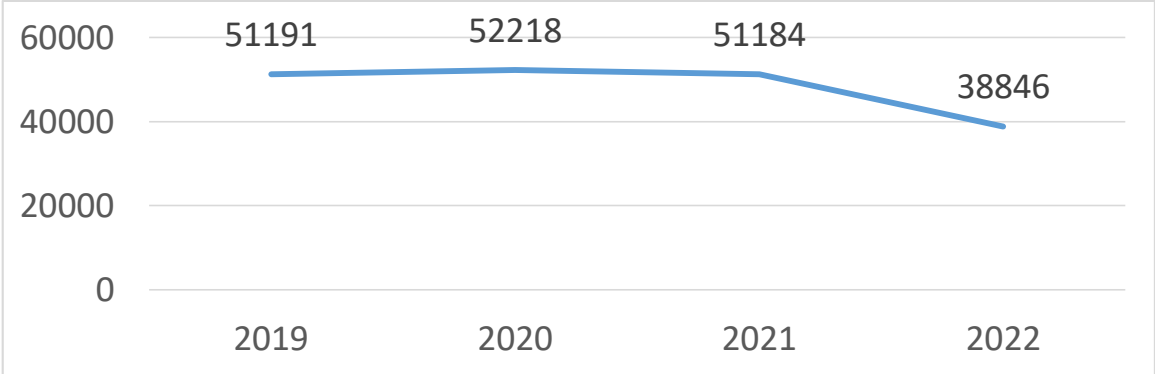
Gambar 2. 81
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Batang (%)



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu semula sebesar 51.191 menjadi 38.846 pada tahun 2022,

Gambar 2. 82
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Batang



Sumber : DPRKP, 2023

Penambahan perumahan formal tahun 2022 menjadi 9,12% dari tahun 2018 yang hanya sebesar 6% meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan infrastruktur lingkungan perumahan yang layak terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 27% menjadi 66,09% pada tahun 2022, walaupun sempat menurun ditahun 2021 dengan capaian 75%. Demikian juga dengan persentase rumah Sehat di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 76,45% meningkat menjadi 79,95% pada tahun 2022 walaupun capaian tahun 2022 sempat menurun dari tahun 2021 sebesar 90%.

Tabel 2. 34
Prosentase Penambahan perumahan formal dan Prosentase Rumah Sehat Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
1	Prosentase penambahan perumahan formal	%	6	7	8	9	9,12
2	Prosentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak	%	27	55	60	75	66,09
3	Prosentase Rumah Sehat	%	76,45	7,43	78,06	90,00	79,95

Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

5. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

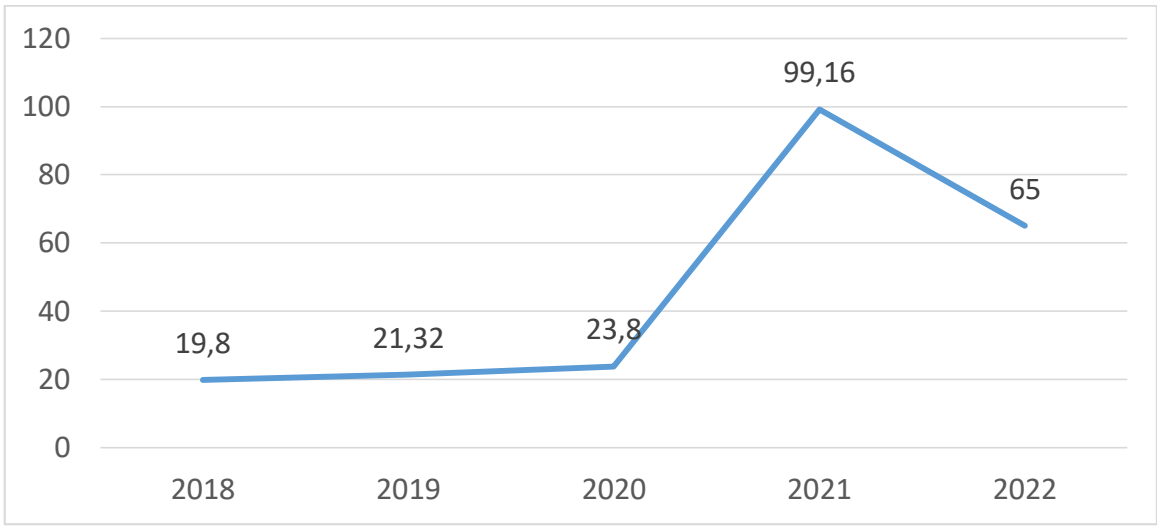
Penanganan PMKS yang tertangani bersifat fluktuatif dalam periode 2018-2022. Pada Tahun 2018 PMKS yang tertangani sebesar 19,8% dan terus mengalami peningkatan hingga 99,16% ditahun 2021 namun terjadi penurunan kembali di tahun 2022 menjadi sebesar 65%. Penurunan persentase PMKS yang tertangani ini terjadi karena adanya penambahan Namun demikian, pelayanan dasar bagi PMKS yang juga merupakan salah satu indikator SPM urusan Sosial ini capaiannya masih relatif kecil, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait penyediaan rumah singgah, karena Kabupaten Batang belum memiliki rumah singgah sehingga pelayanan dasar bagi PMKS belum paripurna.

Rendahnya capaian penanganan PMKS pada Tahun 2018 - 2020 terjadi karena proses pendataan DTKS mulai dilaksanakan dengan

menggunakan aplikasi SIKS-NG sehingga terjadi penambahan jumlah PMKS di Kabupaten Batang. Pada Tahun 2020 proses pemutakhiran dan verifikasi validasi DTKS mulai dilaksanakan tetapi belum mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial sehingga data PMKS dalam DTKS belum mengalami pengurangan secara signifikan. Selain itu, pada Tahun 2020, untuk mengatasi dampak Pandemi, pemerintah memberikan banyak bantuan untuk warga miskin baik melalui Anggaran APDB, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun Dana Desa.

Pada Tahun 2022, proses verifikasi dan validasi sudah berjalan sehingga jumlah warga miskin yang masuk ke dalam DTKS berkurang dari 426.263 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 160.595 jiwa pada Tahun 2021 kemudian meningkat kembali menjadi 502,596 jiwa ditahun 2022. Fluktuasi ini terjadi karena pada saat proses verifikasi dan validasi ditemukan data warga yang tidak valid, misalnya sudah meninggal dunia atau sudah tidak miskin. Fluktuasi jumlah warga miskin ini berpengaruh signifikan terhadap jumlah bantuan membuat persentase penanganan PMKS pada setiap tahunnya.

Gambar 2. 83
PMKS yang tertangani Kabupaten Batang

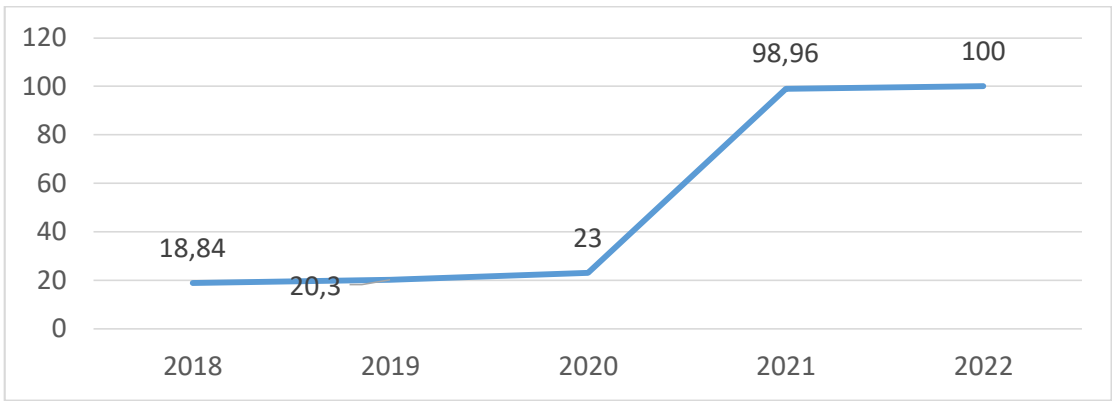


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023

Salah satu upaya penanganan PMKS adalah mendorong dan menciptakan kemandirian sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara optimal. Salah satu media/alat untuk mendukung proses rehabilitasi sosial adalah pemberian stimulan/bantuan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun demikian, banyaknya bantuan sosial untuk PMKS dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dari 18,84% di tahun 2018 menjadi 100% di tahun 2022, meskipun pada tahun

2018 capaiannya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena asistensi untuk lanjut usia dan asistensi orang dengan kecacatan tidak diberikan, namun disisi lain diberikan alokasi bantuan untuk korban bencana dan operasional rawat inap bagi anggota keluarga PMKS yang dirawat di rumah sakit. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan yang disebabkan oleh sudah tertatanya data base PMKS (dalam hal ini termasuk di dalamnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban warga akibat adanya Pandemi Covid-19.

Gambar 2. 84
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

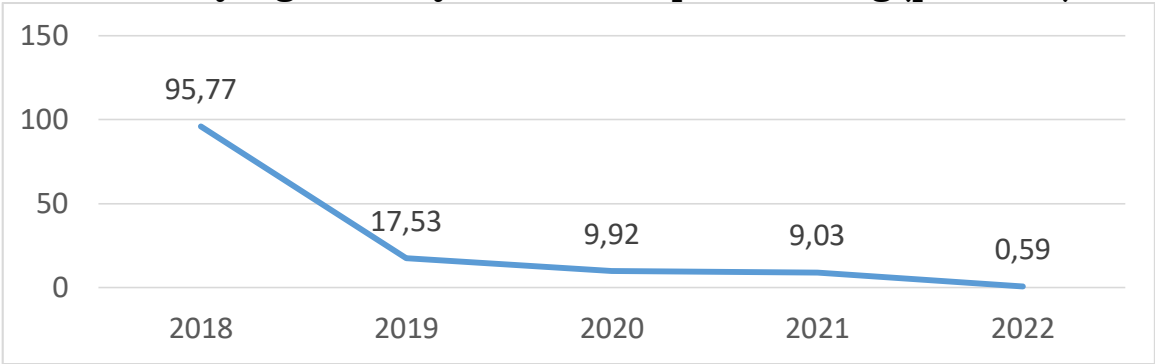


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

Penanganan PMKS juga dilakukan melalui pemberdayaan sosial bagi PMKS dengan membentuk kelompok usaha bersama keluarga miskin, RTLH dan santunan kematian bagi warga miskin.

Kinerja pemberdayaan sosial dapat dilihat dari capaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan dalam periode lima tahun terakhir (2018-2022). Persentase PMKS yang diberdayakan fluktuatif, pada tahun 2018 sebesar 95,77 per 1000 dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 0,59 per 1000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras terkait peningkatan pemberdayaan PMKS di Kabupaten Batang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan asistensi sosial bagi PMKS antara lain berupa asistensi kepada para penyandang disabilitas, asistensi lanjut usia serta santunan kematian kepada untuk ahli waris warga miskin yang meninggal dunia.

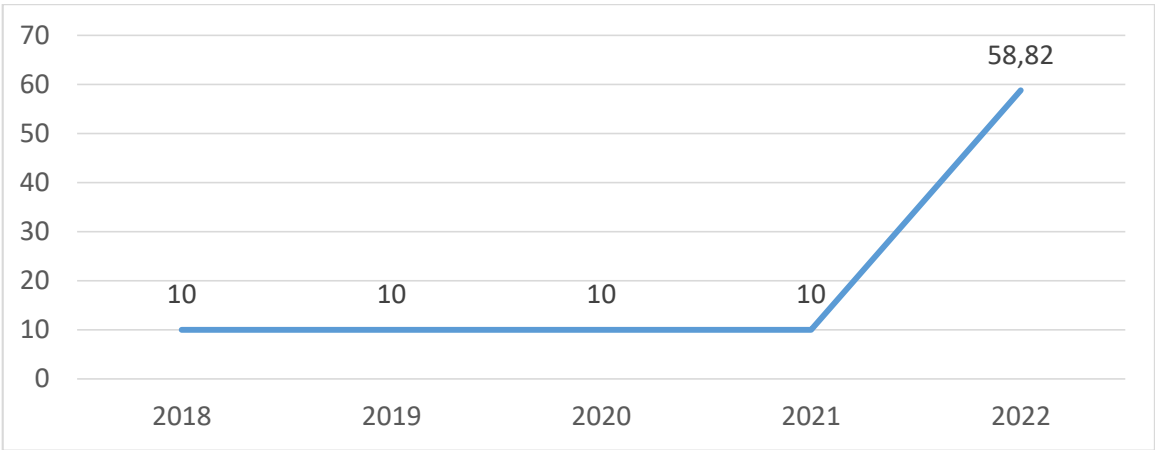
Gambar 2. 85
PMKS yang Diberdayakan di Kabupaten Batang (per 1000)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023

Sedangkan Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan capaiannya cenderung stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2018 hingga 2021 terdapat 10% panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan, kemudian meningkat menjadi 58,82% ditahun 2022.

Gambar 2. 86
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Gangguan keamanan yang tertangani di Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2018-2022, tahun 2018 sebesar 69,09%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 87,97% karena terdapat kasus yang dilaporkan tidak semuanya dapat diselesaikan pada tahun berkenaan, tetapi baru dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2020 kinerja penyelesaian tindak pidana meningkat menjadi sebesar 82,82%, dan kembali mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 70,61%, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 35
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Kabupaten Batang

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana (%)
		Lapor	Selesai	
1	2018	165	114	69,09
2	2019	158	139	87,97
3	2020	163	135	82,82
4	2021	149	107	71,81
5	2022	194	137	70,61

Sumber: Kepolisian Resort Batang Tahun 2022

Dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat tak terlepas dari peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain. Jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Batang saat ini berjumlah 6.305 personil. Jumlah ini belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Satlinmas minimal 32 orang per desa, sehingga jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Batang sebanyak 32 orang x 248 desa/kel = 7.936 personil.

b. Penanggulangan Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Batang terdiri dari kawasan rawan tanah longsor (gerakan tanah), kawasan rawan gelombang pasang/banjir dan kawasan rawan abrasi laut.

Di Kabupaten Batang tercatat setidaknya 150 kejadian bencana pada periode tahun 2018 – 2022 dimana Cuaca Ekstrem (Angin) merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi sebanyak 28 kali. Kejadian bencana lainnya yang sering terjadi adalah tanah longsor dan banjir. Sebagaimana pada tabel berikut:

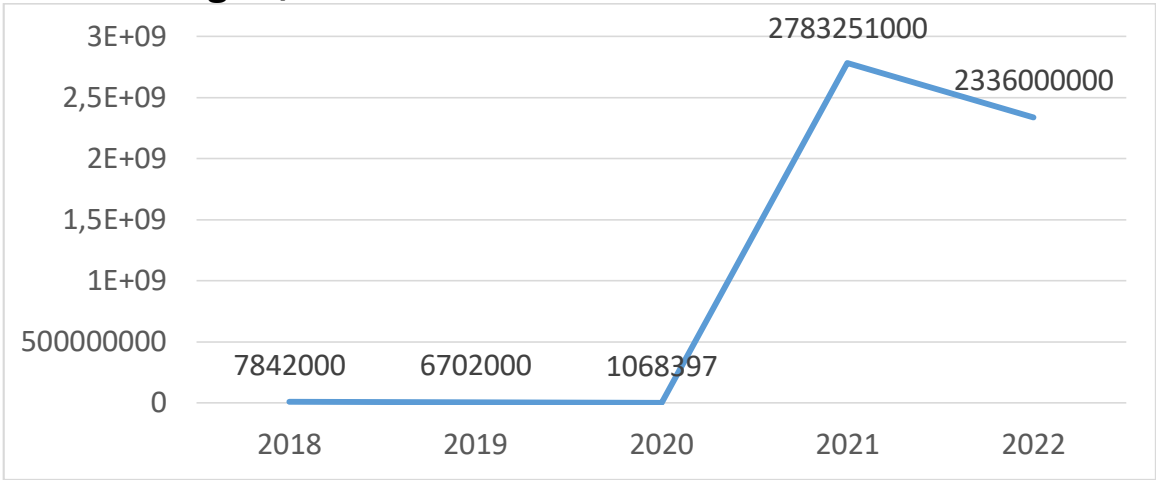
Gambar 2. 87
Kejadian Bencana Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

Kejadian Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
Banjir	2	11	0	2	15
Bandang	0	0	0	0	0
Cuaca ekstrim	6	9	17	20	28
Gelombang ektrim	0	0	0	0	0

Kejadian Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
Karhutla	1	0	0	0	0
kekeringan	0	0	0	0	0
Gempa bumi	0	0	0	0	0
Tanah longsor	3	5	1	12	18

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana, 2022

Tabel 2. 36
Kerugian/Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2018-2022



Sumber: BPBD Kabupaten Batang Tahun 2023

Kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi, pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.018.000.000,- yang kemudian meningkat hingga tahun 2021 dengan total kerugian Rp 2.783.251.000,- dan pada tahun 2022 turun dengan total kerugian sebesar Rp 2.336.000.000,- sebagaimana gambar berikut.

Melihat potensi luasan wilayah bencana di Kabupaten Batang, setidaknya terdapat 24.202 ha merupakan daerah rawan banjir meskipun dengan tingkat bahaya yang berbeda, yaitu 4.555 ha bahaya rendah, 5.713 ha bahaya sedang dan 13.934 ha bahaya tinggi. Sekitar 35.821 ha merupakan daerah rawan tanah longsor, dengan tingkat bahaya rendah seluas 5.158 ha, bahaya sedang seluas 19.483 ha, dan tingkat bahaya tinggi seluas 11.179 ha . Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Batang seluas 718 ha juga berpotensi terkena abrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 37
Potensi Bencana di Kabupaten Batang

No.	Jenis Bencana	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	4.555	5.713	13.934	24.202	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
2	Banjir Bandang	268	756	1.498	2.523	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	-	49.138	19	49.157	Sedang
4	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	-	283	436	718	Tinggi
5	Gempa Bumi	85.426	-	-	85.426	Rendah
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	24.111	16.298	-	40.409	Sedang
7	Kekeringan	-	85.426	-	85.426	Sedang
8	Letusan Gunungapi Dieng	135	454	27	616	Sedang
9	Tanah Longsor	5.158	19.483	11.179	35.821	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Batang Tahun 2022

Pada fase pra bencana tahap mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan berperan penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan mitigasi, masyarakat memahami potensi dan resiko bencana yang berada di lingkungan mereka, Sosialisasi/penyuluhan kebencanaan dan penanggulangannya menjadi sangat dibutuhkan agar masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana dan mitigasi struktural berupa penguatan bangunan fisik pencegah/pengurang dampak bencana yang sesuai dengan karakteristik bencananya. Disamping hal tersebut perlu dibangun sistem peringatan dini/early warning system untuk jenis-jenis bencana agar program pengurangan resiko berjalan baik.

Pada Fase tanggap darurat dukungan relawan penanggulangan bencana lebih optimal apabila ditunjang Sarana prasarana dan peralatan kebencanaan yang memadai. Untuk mencapai kondisi pemulihan saat tanggap darurat dalam waktu singkat perlu mobilisasi relawan dan peralatan kebencanaan, beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain pemenuhan sarana seperti perahu karet dan prasarana lainnya untuk memenuhi respon time penanganan bencana.

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Kabupaten Batang baru dilaksanakan di tahun 2019 sebanyak 2 desa.

Sedangkan upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan melalui mitigasi non struktural antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana. Pemasangan EWS untuk tahun 2015 sebanyak 2 buah, sedangkan pemasangan rambu jalur evakuasi sebanyak 13 buah di tahun 2018.

Meskipun kejadian bencana di Kabupaten Batang hanya pada tahun 2020 yang terdapat korban jiwa yang meninggal (1 jiwa), namun masyarakat yang terdampak bencana perlu mendapatkan penanganan dan bantuan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara normal serta pemulihan dari dampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu diantaranya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Selama kurun waktu 2017 – 2021, beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Batang baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam dan jumlah korbannya terinci pada tabel berikut :

Tabel 2. 38
Jumlah Korban Bencana (jiwa) di Kabupaten Batang

Tahun	Jumlah Korban			
	Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	2
2020	1	0	0	0
2021	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2022 di Kabupaten Batang sebesar 74,90 persen dan 25,10 persen adalah Bukan Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Batang 2022 sebesar 6,64 persen, kondisi inimeningkat dari tahun 2021 sebesar 6,59 persen. Sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 39
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Batang (orang)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja Total
2018	389.471	17.199	406.670
2019	385.747	16.755	402.502
2020	387.741	28.835	416.576
2021	402.320	28.370	430.690
2022	426.004	30.301	456.305

Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, Angkatan Kerja tahun 2022 sebanyak 456.305 orang terbagi menjadi penduduk Bekerja 426.004 orang dengan Pengangguran 30.301 orang. Jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja sebanyak 152.951 orang, dengan komposisi penduduk sekolah sebanyak 31.871 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2022 sebanyak 426.004 orang dengan total angkatan kerja sebanyak 456.305 orang atau sebanyak 93,26 persen sedangkan persentase angkatan kerja terhadap usia kerja sebesar 74,90 persen, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 40
Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

Tahun	Penduduk 15+ Tahun	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
2018	580.534	95,77	70,05
2019	586.190	95,84	68,67
2020	586.190	95,84	68,67
2021	603.186	92,46	71,40
2022	609.256	93,36	74,90

Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2023

Salah satu penyebab angka pengangguran di Kabupaten Batang adalah jumlah lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2022 sebanyak 6.453 orang menurun jumlahnya dari tahun sebelumnya 7.234 orang. Sementara

lowongan kerja yang tersedia tahun 2022 sebanyak 3.401 lowongan meningkat dari tahun sebelumnya dimana sebanyak 2.231 lowongan. Pada tahun 2022 lowongan untuk perempuan lebih banyak tersedia sejumlah 1.907 posisi dibanding untuk laki laki sebanyak 1.494 posisi. Jumlah lowongan kerja yang tersedia selama kurun waktu 2018-2022 jumlahnya selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan masih perlunya upaya yang keras untuk memperluas atau menciptakan lapangan kerja baru.

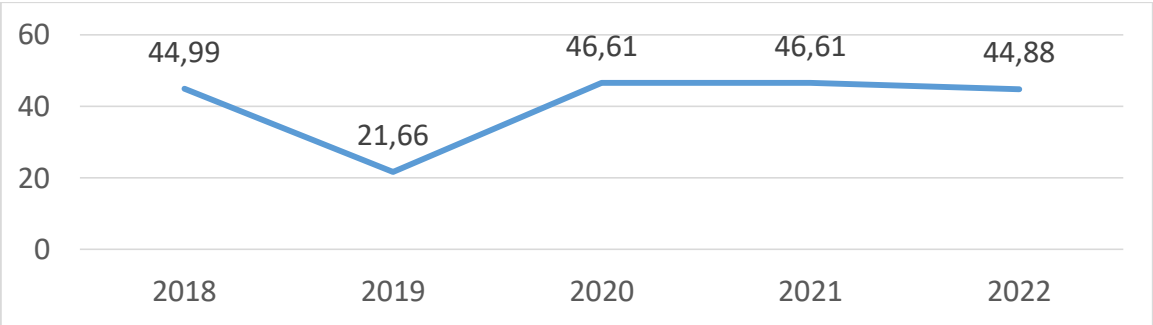
Tabel 2. 41
Jumlah Pencari Kerja dibandingkan Lowongan Kerja
di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja
2018	4.979	2.714
2019	5.327	1.649
2020	3.956	2.141
2021	7.234	2.231
2022	6.453	3.401

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2023

Sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam periode tahun 2018-2022 berfluktuasi, yaitu pada tahun 2018 sebesar 44,99% yang menurun menjadi 21,66% di tahun 2019 kemudian kembali meningkat menjadi 46,61 di tahun 2021 dan menurun kembali menjadi 44,88% ditahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan maupun menambah lapangan kerja baru serta penyiapan kapasitas SDM sesuai keahlian yang dibutuhkan melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja perlu adanya perbaikan.

Gambar 2. 88
Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Batang (orang)
Tahun 2018-2022

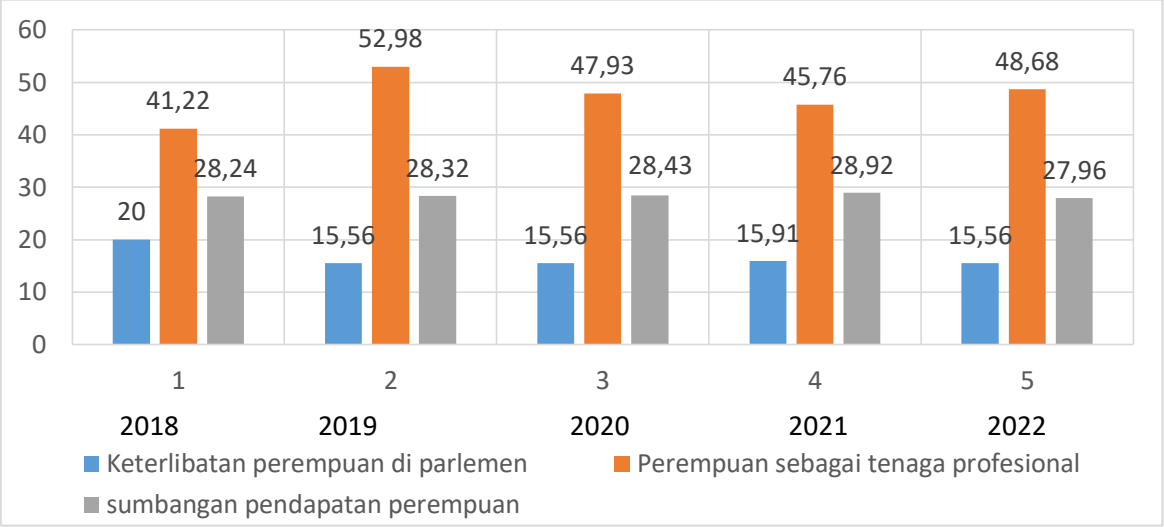


Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang, 2023

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu upaya untuk menghadapi bonus demografi karena sebesar 34,72% penduduk produktif di Kabupaten Batang adalah perempuan. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang jika dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini :

Gambar 2. 89
Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan, swasta dan legislatif Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



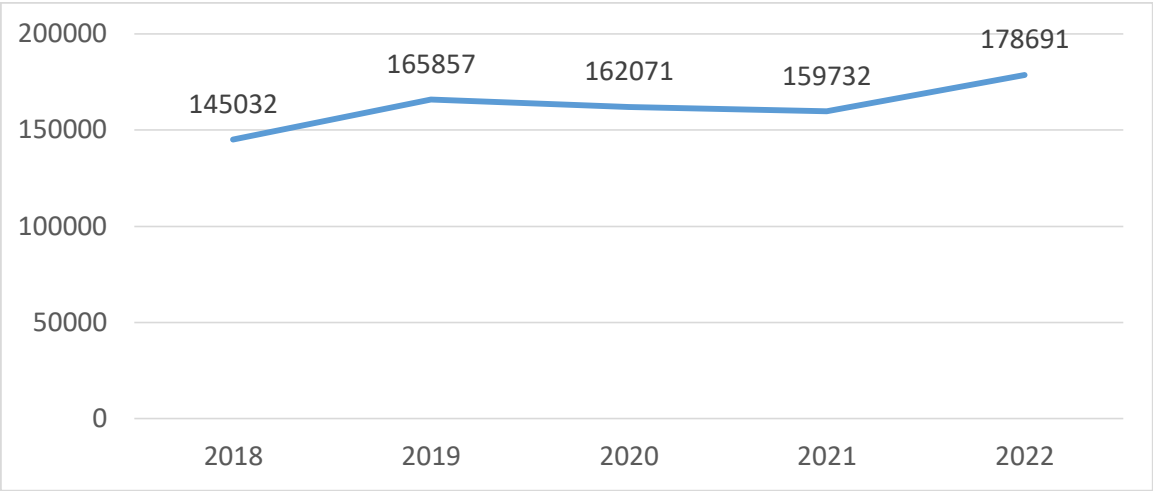
Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2023

Dari tabel diatas, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dari 20% ditahun 2018 menjadi 15,56 % di tahun 2022 namun indikator ini cukup sulit untuk ditargetkan secara langsung karena merupakan hasil dari pemilihan legislatif. Pada indikator perempuan sebagai tenaga professional di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dari 41,22% di tahun 2018 menjadi 48,68%. Hal ini menandakan peran perempuan sebagai tenaga professional di kabupaten Batang kian meningkat sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Batang. Sedangkan pada sumbangan pendapatan perempuan capaian tahun 2018 sebesar 28,24 % dan menurun hingga tahun 2022 menjadi 27,96%. Capaian ini menandakan peran perempuan dalam berkontribusi dalam pendapatan keluarga kian menurun.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Batang selama periode lima tahun terakhir (2018-2022) fluktuatif, pada tahun 2018 Partisipari angkatan kerja perempuan sebanyak 145.032 orang, kemudian

meningkat menjadi 165.857 orang di tahun 2019, namun kemudian menurun menjadi 159.732 orang pada tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebanyak 178.691 orang.

Gambar 2. 90
Partisipasi angkatan kerja perempuan (orang)



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2023

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan dengan peningkatan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak adalah adanya aturan tentang ruang atau area tanpa asap rokok, serta kerjasama antara DP3AP2KB dengan Dinas Perhubungan melalui pemasangan rambu-rambu Zona Selamat Sekolah, serta mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Meskipun capain indikator Kabupaten Layak Anak belum semua terpenuhi tetapi Pemerintah Kabupaten Batang sudah menerbitkan aturan mengenai perlindungan anak, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan KLA juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Kecamatan Ramah Anak dari 3 kecamatan ramah anak pada tahun 2018 menjadi 6 kecamatan ramah anak pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 9 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang.

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Batang pada periode 2018-2022 masih cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020, yaitu sebanyak 20 kasus naik menjadi 49 kasus pada tahun 2020. Namun,

tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 23 kasus. Kemudian meningkat kembali menjadi 37 kasus di tahun 2022.

Tabel 2. 42
Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap anak
di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Seksual	10	17	21	12	15
2	Eksplorasi	-	-	-	-	-
3	KDRT	10	7	6	-	18
4	Penelantaran	-	2	2	3	3
5	TPPO	-	-	-	-	-
6	ABH	3	5	20	8	1
	Jumlah	23	31	49	23	37

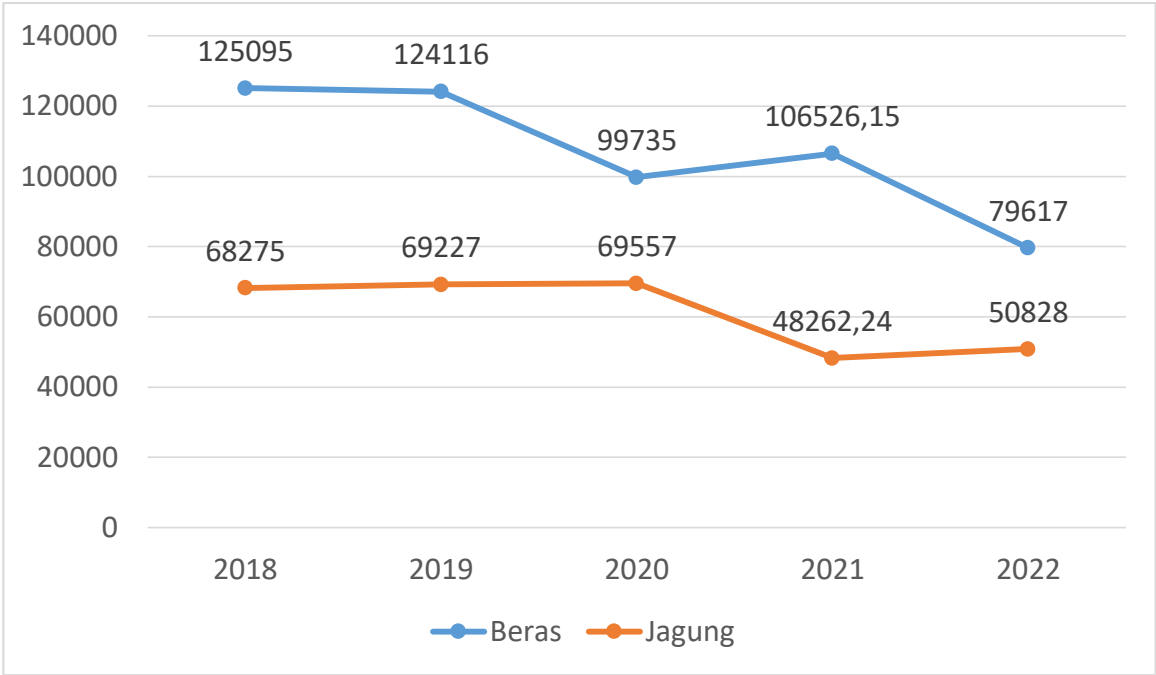
Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2023

3. Pangan

Pelayanan urusan pangan Tahun 2018 – 2022 dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Batang masih di dominasi oleh beras dan jagung. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ketersediaan beras cenderung menurun yaitu sebanyak 125.095 ton pada tahun 2018 dan terus menurun menjadi 79.617 ton di tahun 2022. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya bencana banjir pada bulan November dan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan lahan seluas 150 Ha gagal panen yang berakibat pada penurunan produksi padi dan ketersediaan beras di Kabupaten Batang. Sedangkan pada ketersediaan jagung juga menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun 2018 – 2022. Dimana pada tahun 2018 dengan ketersediaan pangan jagung sebanyak 68.275 ton kemudian berfluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 50.828 ton.

Gambar 2. 91
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Batang (ton)
Tahun 2018-2022



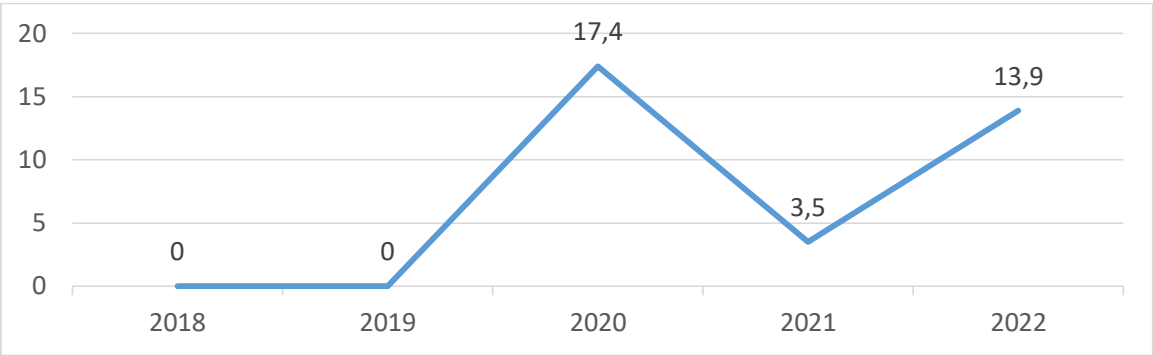
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2023

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan mencapai 100% dalam periode 2018-2022. Penyediaan informasi ini merupakan salah satu upaya yang bersifat antisipatif yaitu dengan melakukan pemantauan untuk meninjau ketersediaan produksi di tingkat produsen maupun bersifat responsif yang didukung sistem distribusi yang efektif dan efisien sehingga menciptakan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Cadangan pangan daerah digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di wilayah kabupaten Batang akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya. Cadangan pangan daerah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung berfluktuasi. Hal ini disebabkan cadangan pangan berupa gabah yang memiliki masa simpan tertentu, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang tidak setiap tahun membeli gabah baru, tetapi menghabiskan dulu stok yang masih ada. Pada akhir tahun 2018 cadangan pangan 0 namun tahun 2020 cadangan pangan daerah kembali naik menjadi 17,4 ton. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 3,5 ton dikarenakan Tidak ada kegiatan yang menunjang pengadaan cadangan pangan karena menghabiskan stok cadangan pangan yang masih ada dari tahun sebelumnya. Kemudian meningkat kembali menjadi 13,9 ton di tahun 2022. Kedepan Pemerintah Daerah akan tetap memperhatikan

alokasi cadangan pangan daerah untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga.

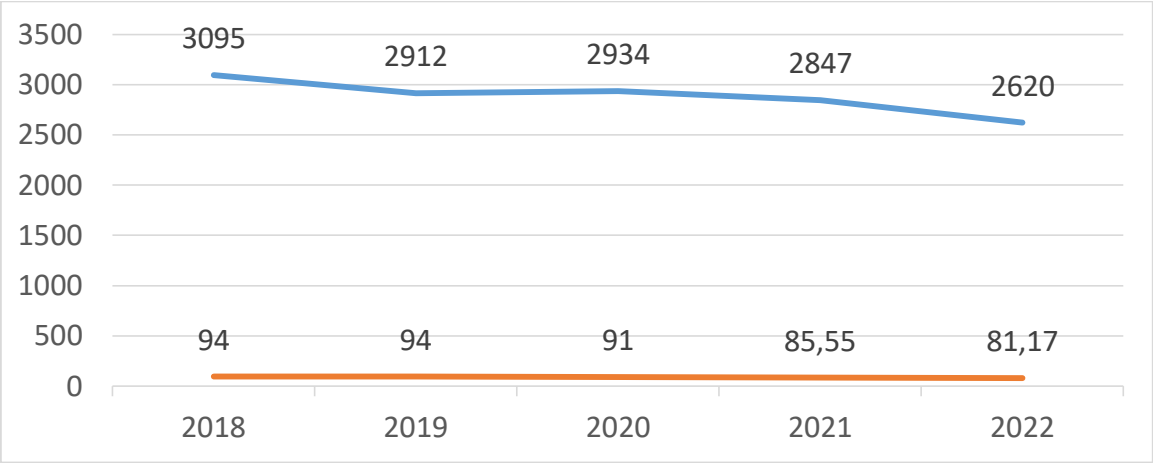
Gambar 2. 92
Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Batang (ton)



Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2023

Ketersediaan energi per kapita Kabupaten Batang dalam periode 2018-2022 juga fluktuatif dengan kecenderungan menurun, tahun 2018 sebesar 3095 kal dan menurun terus menjadi 2620 di tahun 2022. Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita yang cenderung berfluktuasi menurun dari 94 G di tahun 2018 menjadi 81,17 G di tahun 2022. Namun meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka capaian ini masih melebihi dari angka yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam jumlah yang cukup dan aman.

Gambar 2. 93
Ketersediaan energi per kapita (kal) dan protein per kapita (G)



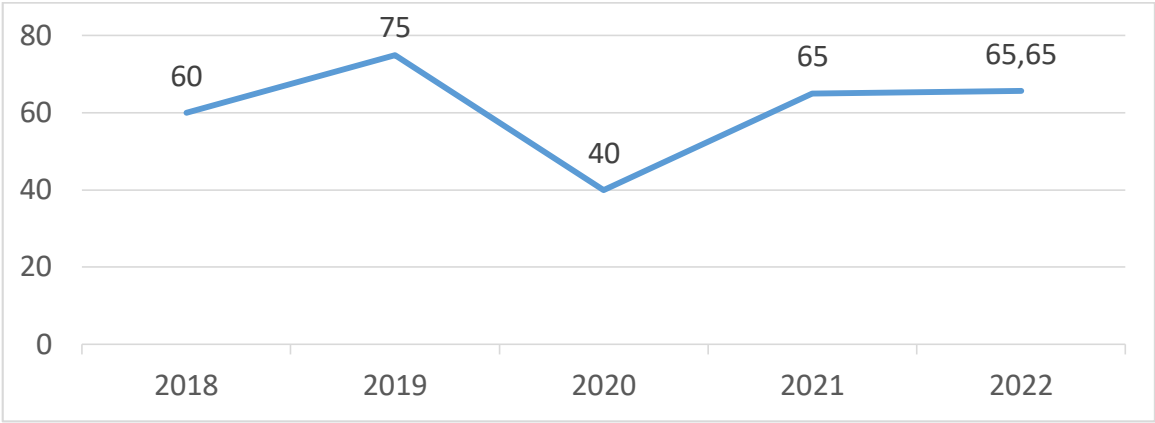
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2023

4. Pertanian

Pelayanan urusan pertanahan tahun 2018 – 2022 dilakukan melalui fasilitasi hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam periode tahun 2018-2022 fasilitasi hak atas tanah di Kabupaten

Batang cenderung berfluktuasi , pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan yang signifikan dari 60% menjadi 75%. Kemudian pada tahun 2020 terdapat penurunan menjadi 40% dan kenaikan menjadi 65,65% hingga tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kasus tanah desa yang prosesnya masih berjalan dan belum selesai sampai akhir tahun.

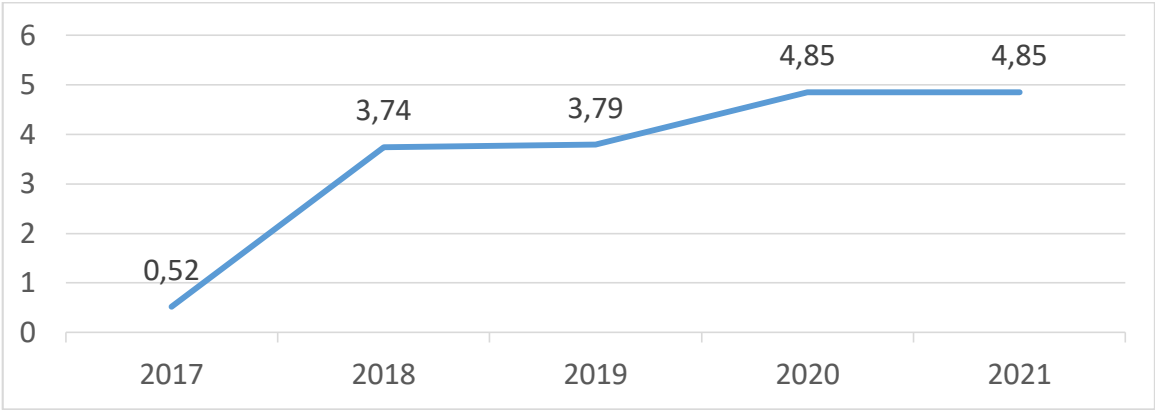
Gambar 2. 94
Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian
Permasalahan Pertanahan Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2023

Sedangkan persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Batang meningkat dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2016 seluas 0,52 persen meningkat menjadi 4,85 persen di tahun 2020.

Gambar 2. 95
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Batang



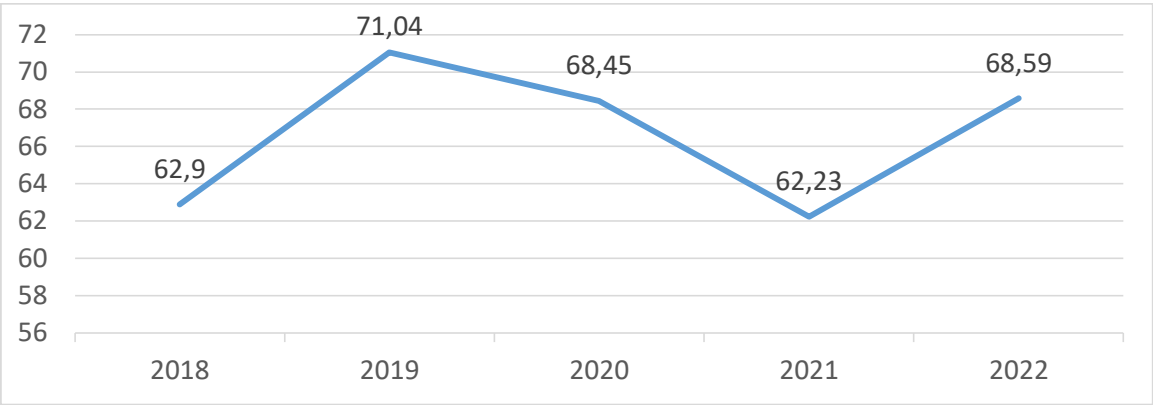
Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, mengingat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat mempunyai dampak cukup besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup. Komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Pencemaran Air, Indeks Kualitas Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang selama periode 2018-2022 meningkat yaitu dari 62,9 di tahun 2018 naik menjadi 71,04 pada tahun 2019. Namun tahun 2020 menurun menjadi 58,45 dan tahun 2021 kembali turun menjadi 62,23. Namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 menjadi sebesar 68,59. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kualitas lingkungan namun masih dalam kategori cukup baik. Pembangunan kawasan industri baru dan pembukaan lahan di daerah Batang bagian selatan mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup. Walaupun dapat dikatakan cukup berhasil, namun diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan agar keberlanjutan dapat dipertahankan.

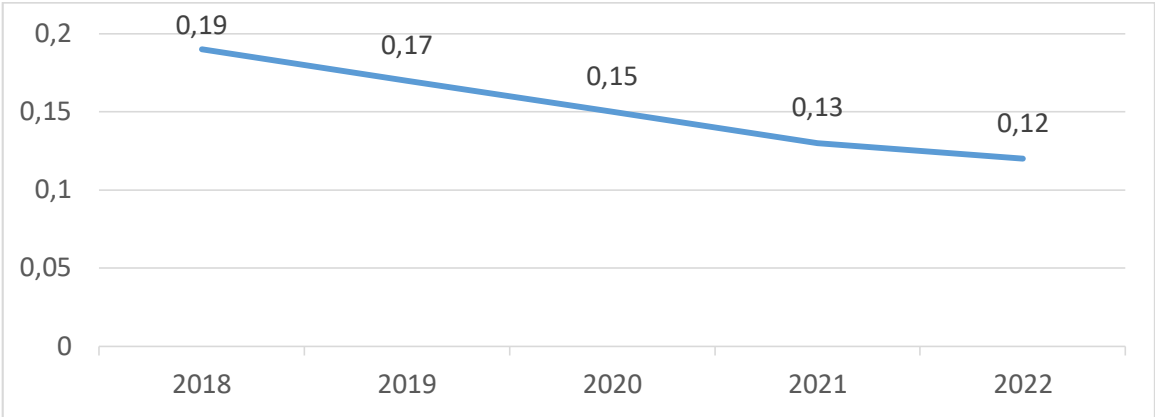
Gambar 2. 96
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2023

Jika dilihat dari salah komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air, maka dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Air di Kabupaten Batang berdasarkan hasil pemantauan status mutu air dalam periode tahun 2018-2022 berada pada rentang $0 \leq IP \leq 1$, yaitu 0,19 pada tahun 2018 dan terus menurun hingga menjadi 0,12 pada tahun 2022 yang artinya kualitas air masih memenuhi baku mutu dalam kondisi baik. Namun harus ada upaya peningkatan kinerja lingkungan hidup untuk mempertahankan kualitas air.

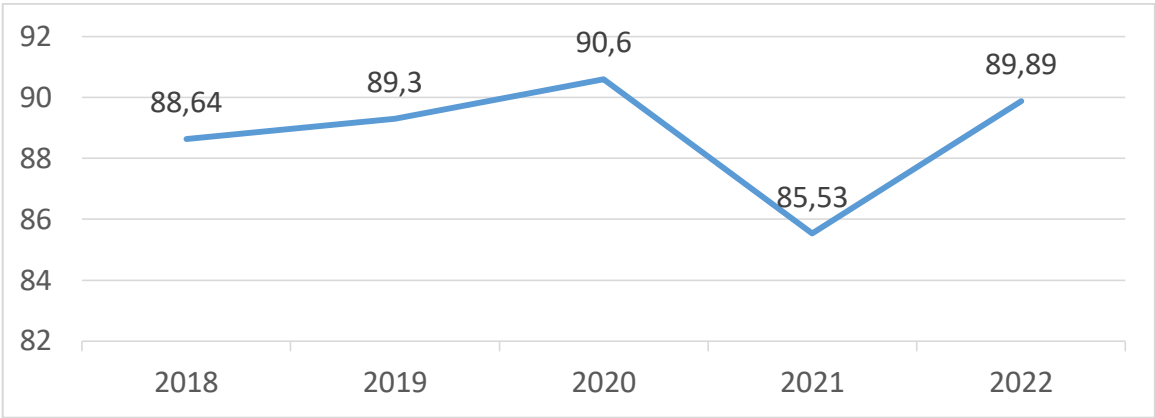
Gambar 2. 97
Indeks Kualitas Air Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2023

Demikian juga untuk Indeks Kualitas Udara juga terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 88,64 meningkat menjadi 90,6 di tahun 2020 dan mengalami penurunan kualitas pada tahun 2021 menjadi 85,53, yang mengindikasikan terjadinya penambahan pencemaran udara terutama di kawasan peruntukan industri dan daerah padat penduduk namun kembali meningkat menjadi 89,89 di tahun 2022. Walaupun kualitas udara di Kabupaten Batang masih tergolong baik namun diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja untuk mempertahankan kualitas udara.

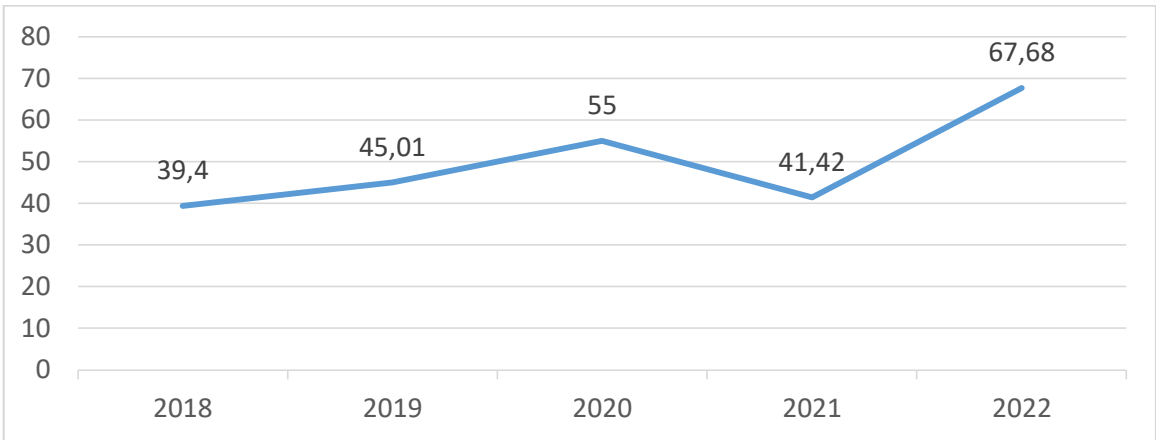
Gambar 2. 98
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2023

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai kawasan lindung, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Batang terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 39,4 persen menjadi 67,68 persen di tahun 2022.

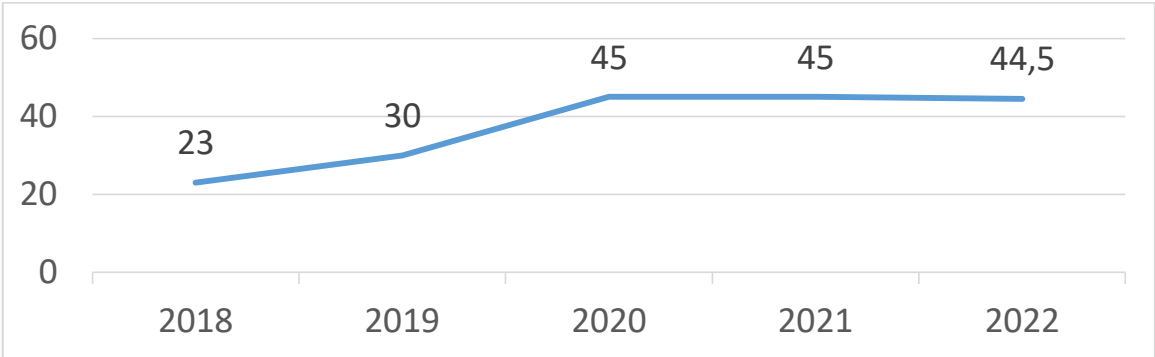
Gambar 2. 99
Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Batang (%)



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2023

Salah satu penyebab ketidakseimbangan lingkungan hidup adalah sampah yang tidak ditangani dengan baik. Bukan hanya mengganggu keseimbangan lingkungan saja, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga sosial ekonomi masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menangani masalah persampahan dapat dilihat dari kinerja penanganan sampah di Kabupaten Batang yang terus meningkat selama lima tahun terakhir (2018-2022), dari 30% sampah yang tertangani di tahun 2018 meningkat menjadi 45% di tahun 2021 dan kemudian menurun menjadi 44,5% di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan bank sampah, pembuatan TPS composting dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk menangani masalah persampahan cukup berhasil. Namun demikian, capaian penanganan sampah di Kabupaten Batang masih belum mencapai 50% karena itu kedepan upaya penanganan sampah terutama pembangunan TPA dan TPST baru perlu segera dilaksanakan karena daya tampung TPA Randukuning sudah overload.

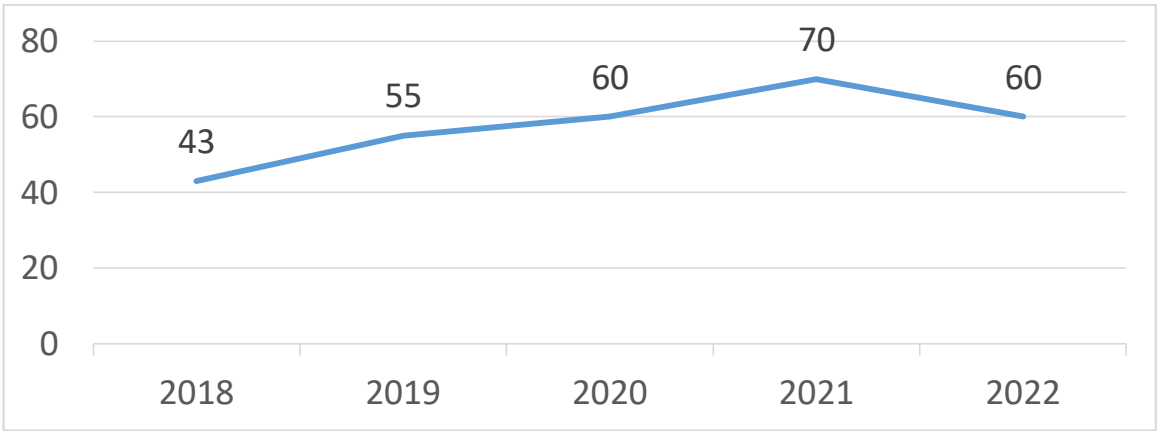
Gambar 2. 100
Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Batang



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2023

Cakupan area pelayanan penanganan persampahan juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 seluas 43 persen menjadi 70 persen di tahun 2021 kemudian menurun menjadi 60 persen di tahun 2022. Menurunnya capaian di tahun 2022 dikarenakan masih minimnya armada yang digunakan untuk pengangkutan sampah.

Gambar 2. 101
Cakupan Area Pelayanan Penanganan Sampah Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

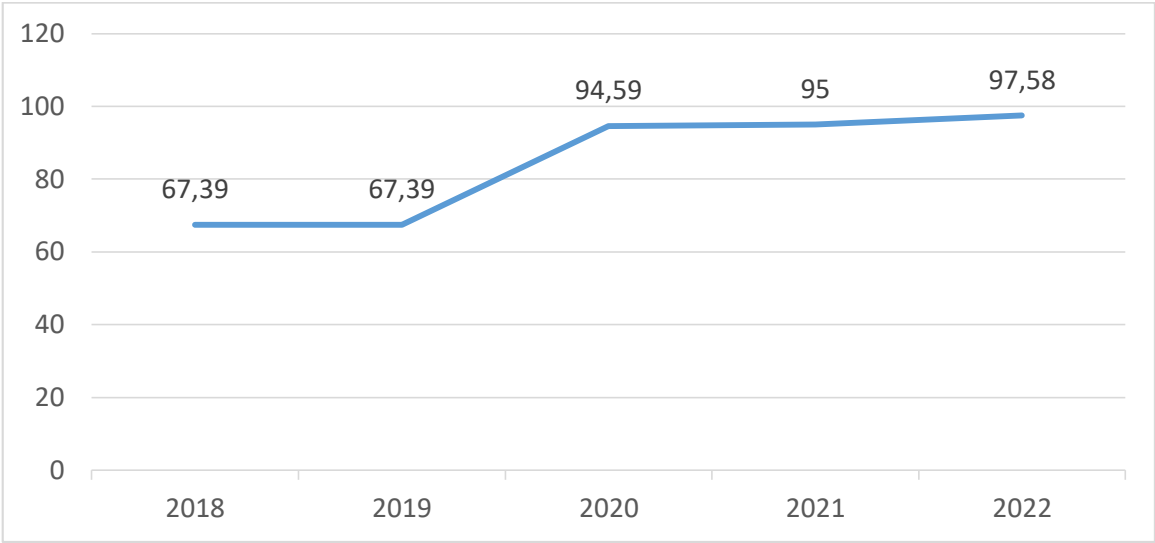


Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2023

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio kepemilikan eKTP cenderung meningkat pada periode 2018-2022, tahun 2018 dan 2019 sebesar 67,39 persen kemudian meningkat menjadi 97,59 di tahun 2022. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan dalam proses perekaman dan penerbitan eKTP telah berjalan dengan baik melalui berbagai upaya inovatif seperti jemput bola ke masyarakat secara langsung serta meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan.

Gambar 2. 102
Rasio Penduduk ber KTP elektronik Kabupaten Batang (%)

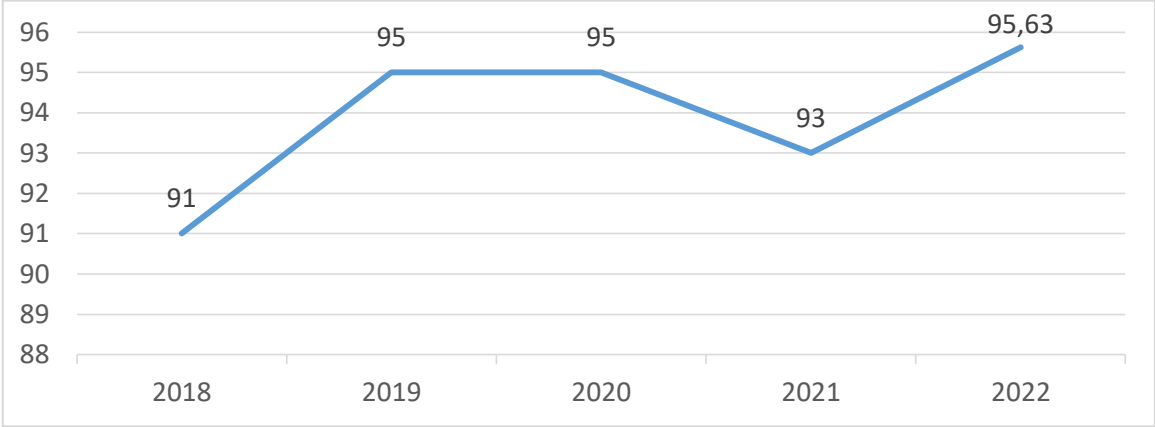


Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2023

Kepemilikan akta kelahiran dalam periode lima tahun terakhir mengalami tren cenderung meningkat dari tahun 2018 sebesar 91 persen menjadi sebesar 95,63 persen pada tahun 2022. walaupun sebelumnya terdapat stagnasi pada tahun 2019-2020 di angka 95 persen.

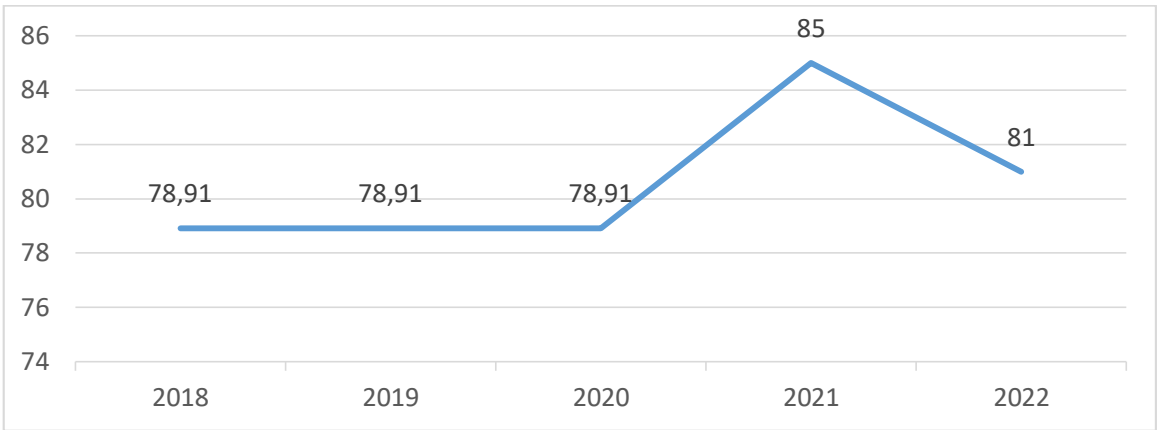
Sedangkan kepemilikan akta kematian cenderung fluktuasi pada periode lima tahun terakhir. Dari sebesar 78,91 persen pada tahun 2018 naik menjadi 85 persen pada tahun 2021. Kemudian menurun menjadi 81 persen di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai administrasi mulai meningkat namun kedepan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan diantaranya melalui sosialisasi dan meningkatkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan.

Gambar 2. 103
Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Batang (%)



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2023

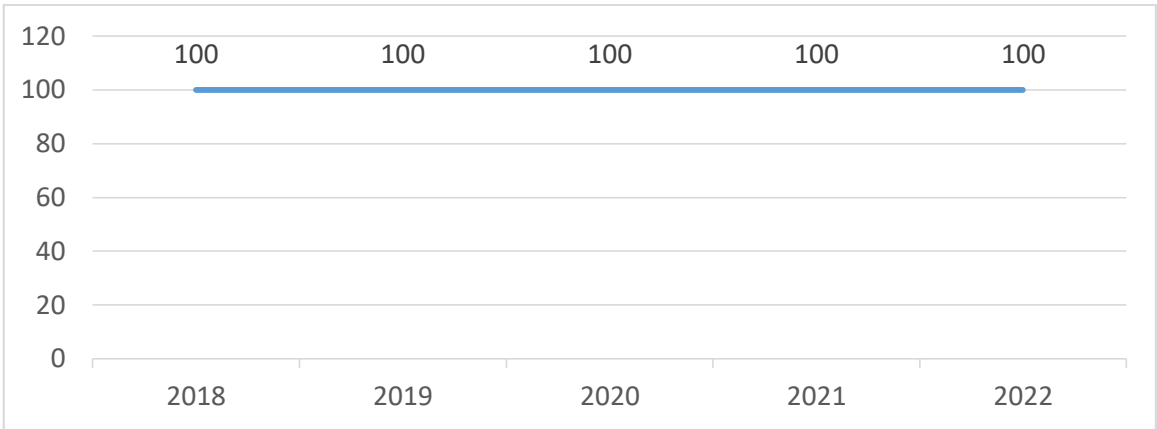
Gambar 2. 104
Rasio Akta Kematian Kabupaten Batang



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2023

Sedangkan untuk kepemilikan akta nikah, dalam periode lima tahun terakhir semua pasangan di Kabupaten Batang sudah memiliki akta nikah (100%).

Gambar 2. 105
Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Batang (%)



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2023

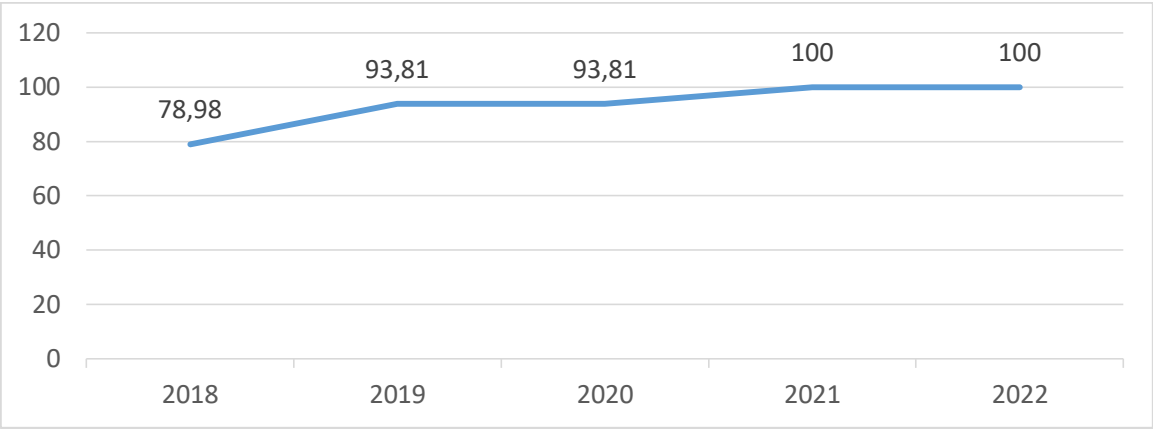
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pembinaan kelompok oleh LPM. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dari tahun 2016-2018 sebanyak 5 kelompok dan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 6 kelompok.

Persentase PKK Aktif dalam periode tahun 2018-2022 cenderung meningkat dari 78,97 persen di tahun 2018 kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 100 persen. Hal ini

mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan yang selama ini kurang aktif

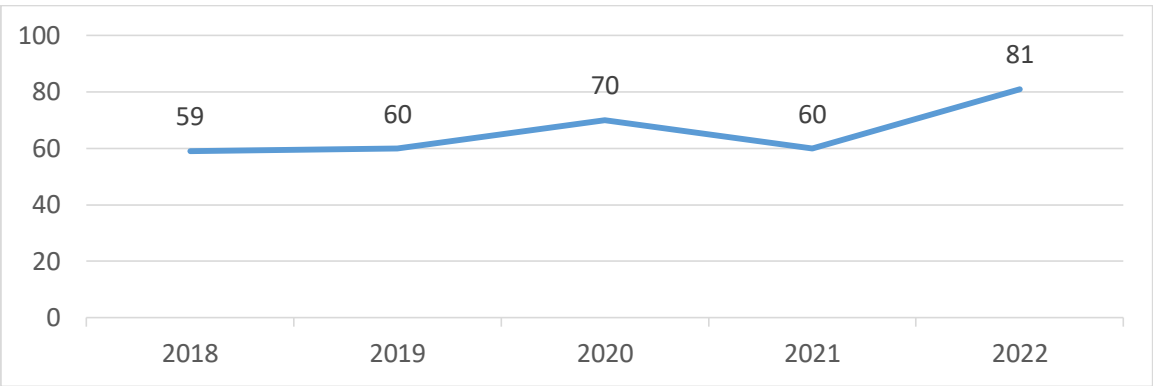
Gambar 2. 106
Persentase PKK Aktif Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat selama periode 2018-2022 cenderung berfluktuasi, pada tahun 2018 sebesar 59 persen naik menjadi 70 persen pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 60 persen dan meningkat kembali menjadi 81 persen di tahun 2022. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran tenaga pendamping desa dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

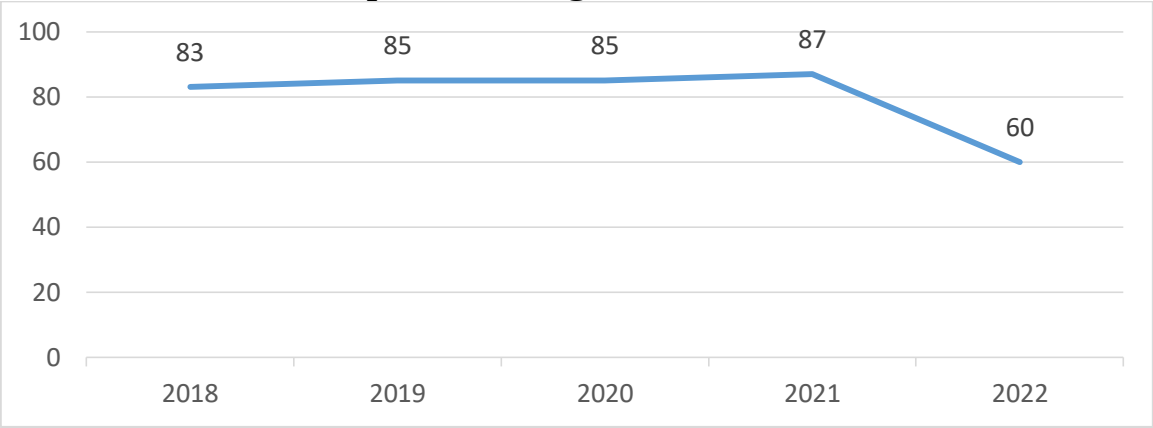
Gambar 2. 107
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik juga mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Tahun 2018 sebesar 83 persen meningkat menjadi 87 persen di tahun 2021 kemudian menurun menjadi 60 persen di tahun 2022.

Gambar 2. 108
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa dilaksanakan dengan upaya untuk menginisiasi pembentukan dan penguatan lembaga ekonomi yang terwujud dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pada Tahun 2022 di Kabupaten Batang sudah terbentuk 208 Bumdes yang terbagi menjadi 4 klasifikasi seperti yang tercantum dalam Tabel 2.43.

Tabel 2. 43
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Klasifikasi di
Kabupaten Batang Tahun 2022

NO	KLASIFIKASI BUMDES	JUMLAH
1	Dasar	132
2	Tumbuh	67
3	Berkembang	8
4	Maju	1
JUMLAH		208

Sumber: Dispermades, 2023

Pada Tahun 2022, di Kabupaten Batang terdapat 132 Bumdes yang termasuk ke dalam klasifikasi Dasar, 67 Bumdes berklasifikasi Tumbuh, 8 Bumdes berklasifikasi Berkembang dan terdapat 1 yang termasuk dalam klasifikasi Maju yaitu Bumdes Mataram Sejahtera Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang. Perkembangan pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat dilihat dari status Indeks Desa Membangun (IDM) dari masing-masing desa. Data perkembangan IDM desa berdasarkan kategorinya disajikan dalam tabel 2.44.

Tabel 2. 44
Status Desa Hasil Pemutakhiran IDM
Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

NO	STATUS DESA	JUMLAH DESA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	MANDIRI	1	0	0	0	1
2	MAJU	32	41	49	63	73
3	BERKEMBANG	192	190	184	172	165
4	TERTINGGAL	14	8	6	4	0
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0

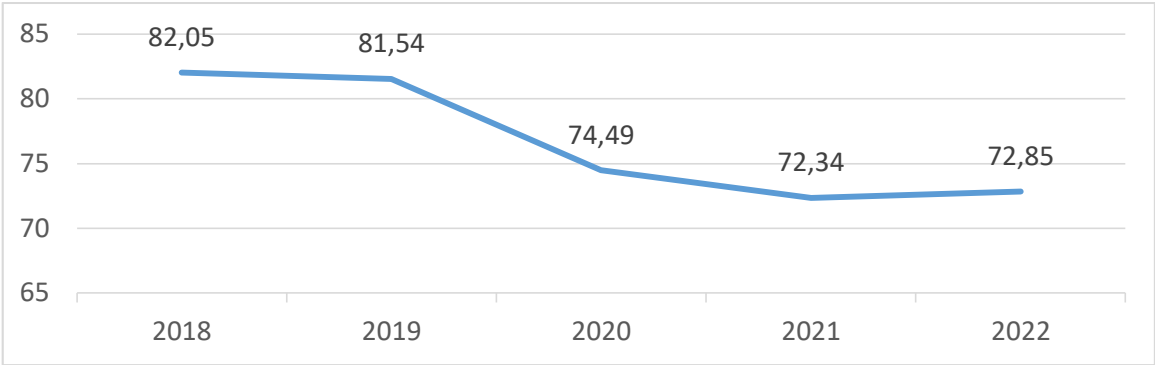
Sumber: Dispermades, 2023

Status desa hasil pemutakhiran IDM Kabupaten Batang dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 mengalami perkembangan dari Desa Tertinggal menuju Desa Mandiri. Desa dengan status tertinggal mengalami penurunan dari 14 desa pada Tahun 2019 menjadi 0 (nol) pada Tahun 2023. Desa dengan status Berkembang juga mengalami penurunan dari 192 desa pada Tahun 2019 menjadi 165 desa pada Tahun 2023. Desa berstatus Maju mengalami peningkatan dari 32 desa Pada Tahun 2019 menjadi 73 pada Tahun 2023. Sedangkan untuk Desa Mandiri mengalami fluktuasi dari 1 desa pada Tahun 2019 menjadi 0 (nol) pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Desa yang mendapat status Desa Mandiri kembali ada pada Tahun 2023. Status ini didapatkan oleh Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan hasil-hasil pembangunan kurang bisa dirasakan masyarakat dan menjadi beban berat bagi pembangunan selanjutnya. Salah satu upaya menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana, diantaranya yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat kontrasepsi.

Gambar 2. 109
Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022

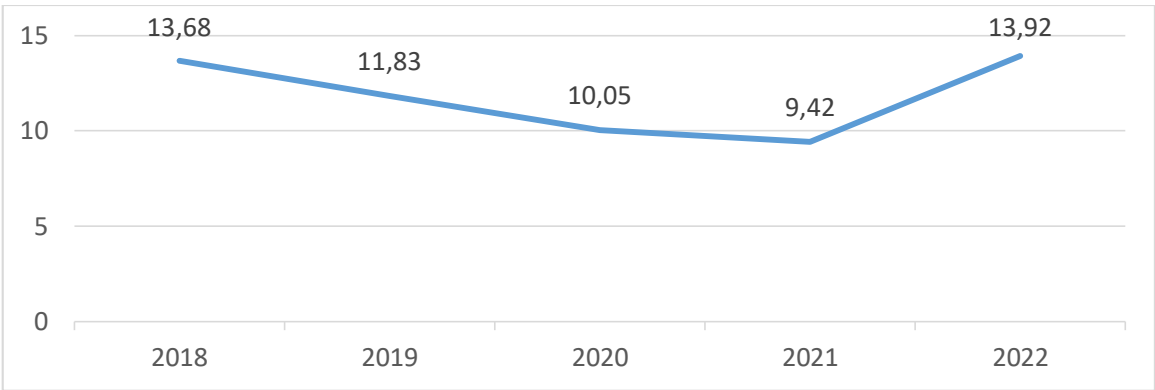


Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sebesar 82,05% persen mengalami penurunan di tiap tahun menjadi 72,85% pada tahun 2022.

Demikian juga, akseptor KB pada kurun waktu 2018-2022 mengalami penurunan tiap tahunnya, tahun 2018 sebesar 13,68 persen, tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 9,42 persen di tahun 2021. Kemudian meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 13,92 persen. Hal ini menandakan bahwa pengendalian penduduk di Kabupaten Batang tahun 2022 cukup berhasil. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Gambar 2. 110
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

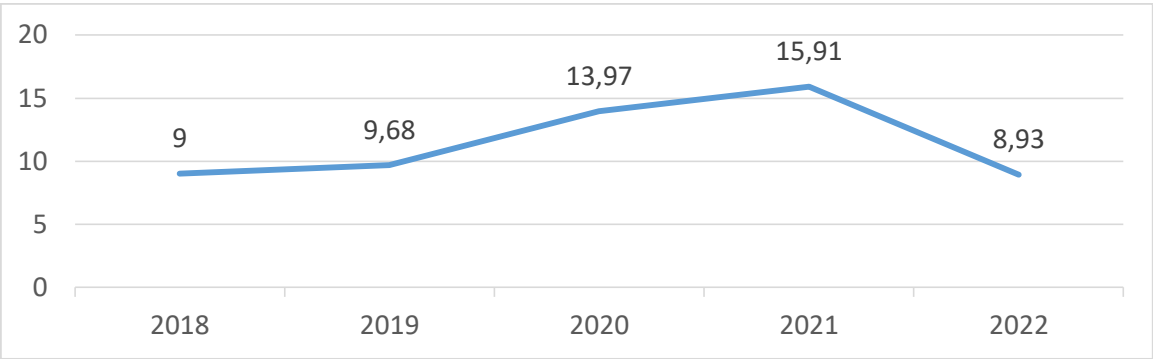


Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2023

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak ber-KB (unmetneed KB) dari tahun 2018 – 2022 secara umum mengalami tren peningkatan, dari sebesar 8,98% di tahun 2017 menjadi 15,91% di tahun 2021. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmetneed KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang

persentase unmetneed KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB. Kondisi perkembangan PUS di Kabupaten Batang selengkapnya tergambar dalam grafik berikut ini :

Gambar 2. 111
Unmetneed KB (%) di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2023

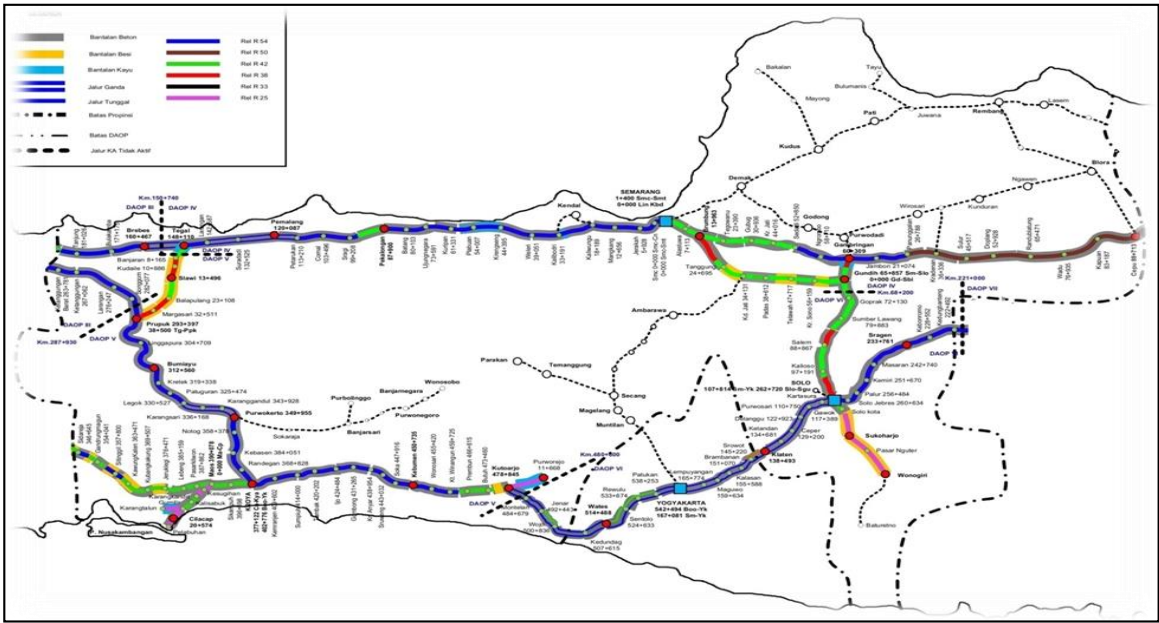
9. Perhubungan

9.1. Perkeretaapian

Untuk wilayah di Batang terdapat jaringan rel kereta api aktif digunakan sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi beban lalu lintas di jalan raya berkurang. Jika distribusi barang utamanya untuk jarak sedang dan jauh dapat dilayani dengan jaringan rel kereta api dapat menurunkan biaya logistik sehingga daya saing daerah akan meningkat.

Total panjang jalur kereta api di Batang sampai dengan tahun 2021 sepanjang 41 km/sp, jalur rel aktif/operasional. 5 stasiun dengan perincian 1 stasiun (Batang Baru) berfungsi sebagai stasiun operasional dan komersial dan 4 stasiun (Ujungnegoro, Kuripan, Plabuan dan Krengseng) berfungsi sebagai stasiun operasional. Posisi Batang yang sangat strategis karena berada jalur utara pulau jawa (Jakarta - Surabaya), sehingga jalur rel di Batang cukup padat, dan kondisi rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara cukup baik dalam keselamatan perjalanan kereta api.

Gambar 2. 112
Jaringan Jalan Rel Kereta Api di Jawa Tengah



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2019

Di Batang terdapat 22 titik perlintasan jalur kereta api dengan jalan, sebanyak 14 perlintasan jalur kereta api sudah di bangun pos dan dilengkapi dengan palang pintu serta petugas, 8 perlintasan kereta api dengan jalan belum dibangun pos, belum dilengkapi dengan palang pintu serta petugas. 14 perlintasan yang telah dilengkapi dengan pos, palang pintu serta petugas karena LHR-nya rata-rata mencapai 2.500/jam, sehingga rawan dengan kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2. 45
Persebaran Perlintasan Jalan Kabupaten Batang dengan
Rel Kereta Api Tahun 2022

No	Tempat / Lokasi	Pos	Penjagaan	Kelengkapan	Sistem Pengoperasian	Keterangan
1	Kebon Dalem Gringsing	78	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
2	Stasiun Pelabuhan Banyuputih		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
3	Kuripan Timur Subah		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
4	Kuripan Barat Subah		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
5	Roban Timur Subah		Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
6	Roban Barat Tulis		Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
7	Ujung Negro Kandeman	86	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
8	Grugak Kandeman	81	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
9	Samsat Batang	88	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	Milik KAI

No	Tempat / Lokasi	Pos	Penjagaan	Kelengkapan	Sistem Pengoperasian	Keterangan
10	Pasar Batang	89	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
11	RE Martadinata Batang	90	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
12	Yos Sudarso Batang	91	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
13	Tampangsono Batang	92	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
14	Kalisari Batang	93	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
15	Gor Batang	94	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
16	Gabus Batang	95	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2023

9.2. Perhubungan Darat

1) Terminal Penumpang

Terminal angkutan merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal tipe A yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat merupakan terminal induk yang berfungsi melayani kendaraan umum secara nasional seperti angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal tipe B atau terminal regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Sedangkan Terminal tipe C atau sub-terminal merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Pada Tahun 2022 terdapat 2 terminal tipe B, 9 terminal tipe C, dan 2 pangkalan truk namun salah satu pangkalan truk sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center. Terminal tipe B yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Blado dan Kecamatan Banyuputih, sedangkan terminal tipe C yang berada di Kabupaten Batang tersebar di Kecamatan Batang, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Limpung, Kecamatan Plemen, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tersono. Kemudian untuk pangkalan truk yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Banyuputih yaitu Pangkalan

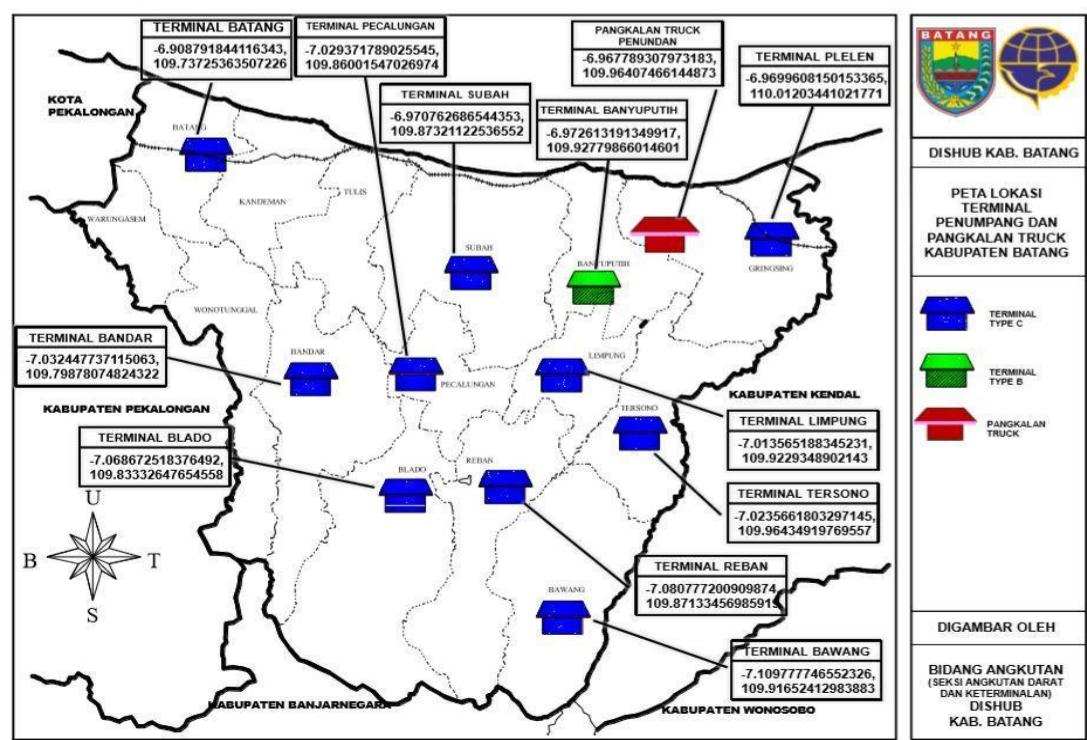
Truk Penundan dan Pangkalan Truk Petamanan, namun Pangkalan Truk Petamanan ini sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center. Persebaran terminal selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 46
Persebaran Terminal Tipe B, C, dan Pangkalan Truk
di Kabupaten Batang Tahun 2022

No	Nama Terminal	Type Terminal	Jenis Terminal	Lokasi
1	Terminal Blado	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Blado
2	Terminal Banyuputih	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Banyuputih
3	Terminal Batang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Batang
4	Terminal Bandar	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bandar
5	Terminal Bawang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bawang
6	Terminal Blado	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	BLado
7	Terminal Limpung	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Limpung
8	Terminal Plelen	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Plelen
9	Terminal Reban	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Reban
10	Terminal Subah	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Subah
11	Terminal Tersono	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Tersono
12	Pangkalan Truk Penundan (Banyuputih)	Tempat khusus parkir	Pangkalan Angkutan Barang	Banyuputih
	Pangkalan Truk Petamanan (Banyuputih)	(Dialihfungsikan menjadi Islamic Center)		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Gambar 2. 113
Persebaran Terminal Tipe B, Terminal Tipe C dan Pangkalan Truk
di Kabupaten Batang



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2021

Mendasarkan kebutuhan dan rencana tata ruang wilayah pada revisi Perda RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2039, setidaknya terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Batang yang perlu pembangunan terminal baru tipe C yaitu di Kecamatan Tulis, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Gringsing, dan Kecamatan Pecalungan.

Data jumlah trayek dan jumlah penumpang per hari pada masing-masing Terminal Tipe C di Kabupaten Batang sebagai berikut:

Tabel 2. 47
Data Jumlah Trayek dan Jumlah Penumpang per Hari
di Terminal Tipe C di Kabupaten Batang

NO	TERMINAL TYPE C	JUMLAH TRAYEK YANG MELEWATI	JUMLAH PENUMPANG PER HARI	JUMLAH KIOS/LAHAN/ BANGUNAN
1	TERMINAL BATANG	9	1980 Orang	-
2	TERMINAL BANDAR	11	816 Orang	11
3	TERMINAL LIMPUNG	13	1552 Orang	1
4	TERMINAL BAWANG	6	347 Orang	54
5	TERMINAL REBAN	3	136 Orang	13

NO	TERMINAL TYPE C	JUMLAH TRAYEK YANG MELEWATI	JUMLAH PENUMPANG PER HARI	JUMLAH KIOS/LAHAN/ BANGUNAN
6	TERMINAL SUBAH	3	852 Orang	-
7	TERMINAL TERSONO	5	164 Orang	-
8	TERMINAL BLADO	3	127 Orang	1
9	TERMINAL PLELEN	8	364 Orang	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Kondisi terminal tipe C Kabupaten Batang berdasarkan ketersediaan fasilitas yang meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, fasilitas uji kelayakan kendaraan, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan kelayakan kendaraan, fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan, informasi jadwal dan rute trayek, kantor penyelenggaraan terminal, petugas operasional terminal, ruang/tempat tunggu penumpang, toilet, sarana ibadah, ruang terbuka hijau, kios, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak angkutan, tempat merokok, drainase, lampu penerangan ruangan, lajur kedatangan, lajur keberangkatan, informasi pelayanan, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum/pribadi dan ruang menyusui masih terdapat *gap* yang cukup besar antara fasilitas yang dibutuhkan dengan fasilitas yang telah tersedia sebagai berikut :

Tabel 2. 48
Data Persandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas
pada Terminal Tipe C Kabupaten Batang

NO	JENIS FASILITAS	TERMINAL TYPE C								
		BATAN G	BANDA R	LIMPUN G	BAWAN G	REBA N	SUBA H	TERSON O	BLADO	PLELE N
1	DATA PERSANDI NGAN GAP KETERSED IAAN DAN KEBUTUH AN	0,19	0,39	0,61	0,42	0,39	0,29	0,1	0,1	0,32
2	PERSENTA SE GAP	19%	39%	61%	42%	39%	29%	10%	10%	32%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Tabel 2. 49
Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Batang

NO	JENIS FASILITAS	TERMINAL TYPE C								
		BATANG	BANDAR	LIMPUNG	BAWANG	REBAN	SUBAH	TERSONO	BLADO	PLELEN
1	Lajur Pejalan Kaki	-	-	ada	-	ada	ada	-	-	-
2	Fasilitas Keselamatan Jalan	-	-	ada	-	-	-	-	-	-
3	Jalur Evakuasi	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
4	Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Fasilitas Uji Kelayakan Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Informasi Fasilitas Keselamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Informasi Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Informasi Fasilitas Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Fasilitas Keamanan	-	-	ada	-	-	-	-	-	-
11	Media Pengaduan Gangguan Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Petugas Keamanan	-	-	ada	-	-	-	-	-	-
13	Informasi Jadwal dan Rute Trayek	-	ada	ada	ada	-	-	-	-	-
14	Kantor Penyelenggara an Terminal	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada
15	Petugas Operasional Terminal	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
16	Ruang/Tempat Tunggu Penumpang	-	ada	ada	-	ada	ada	-	-	-
17	Toilet/WC Umum	ada	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada	ada

NO	JENIS FASILITAS	TERMINAL TYPE C								
		BATANG	BANDAR	LIMPUNG	BAWANG	REBAN	SUBAH	TERSONO	BLADO	PLELEN
18	Mushola/Sarana Ibadah	-	ada	ada	ada	-	-	-	-	ada
19	Ruang Terbuka Hijau	-	ada	ada	ada	ada	-	-	-	ada
20	Kios/Ruko	-	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-
21	Fasilitas dan Petugas Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tempat Istirahat Awak Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Tempat Merokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Drainase	-	-	ada	-	-	-	-	-	-
25	Lampu Penerangan Ruangan	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	ada
26	Lajur Kedatangan	-	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	ada
27	Lajur Keberangkatan	-	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	ada
28	Informasi Pelayanan	-	-	ada	-	-	-	-	-	-
29	Tempat Naik Turun Penumpang	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
30	Tempat Parkir Kendaraan Umum/Pribadi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
31	Ruang Ibu Menyusui	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

b) Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Parkir Ditepi Jalan Umum terdapat 248 titik parkir dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel 2. 50
Rekapitulasi Data Parkir Per Wilayah
di Kabupaten Batang

No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
1	Wilayah Warungasem	2
2	Wilayah Limpung	38

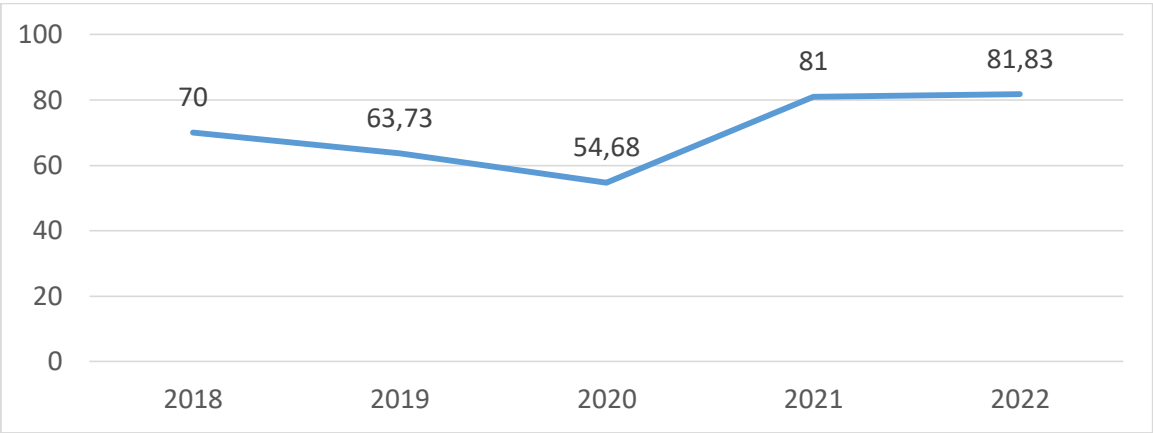
No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
3	Wilayah Subah	12
4	Wilayah Tersono	5
5	Wilayah Blado	14
6	Wilayah Bawang	8
7	Wilayah Banyuputih	4
8	Wilayah Bandar	26
9	Wilayah Batang Kota	77
10	Wilayah Pelen	1

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2023

2) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

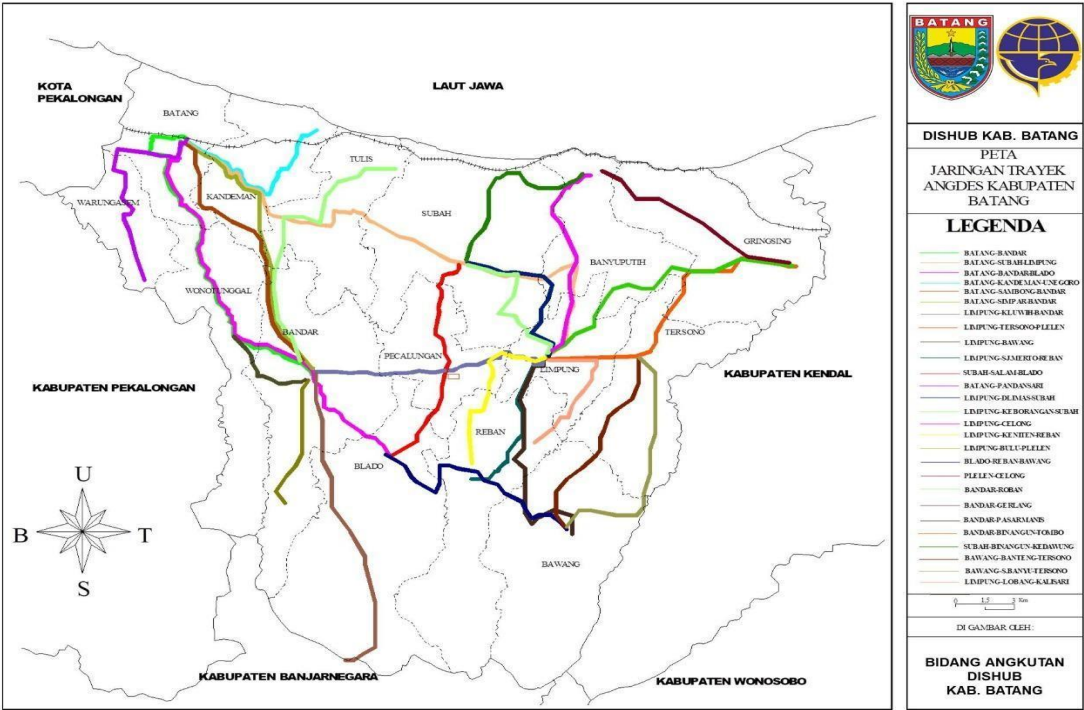
Kinerja urusan perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dapat dilihat melalui capaian rasio ijin trayek cenderung meningkat dalam periode 2018-2022 Pada tahun 2018 sebesar 70 persen, kemudian terdapat penurunan hingga tahun 2020 menjadi 54,68 persen dan ada kenaikan hingga tahun 2022 menjadi 81,83 persen. Selengkapnya tergambar dalam grafik berikut ini :

Gambar 2. 114
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2023

Gambar 2. 115
Peta Jaringan Trayek Kabupaten Batang



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Gambar 2. 116
Koridor Pelayanan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Kabupaten Batang

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
I	Yang Berpusat di Batang			
1	Batang-Wonotunggal-Bandar-Blado PP	Bus 16 Seat	35	5
2	Batang-Tulis-Subah-Banyuputih-Limpung PP	Bus 16 Seat	93	68
3	Batang-Wonotunggal-Bandar PP	Bus 12 Seat	48	37
4	Batang-Tulis-Botolambat-Sigayam-Simpar-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	15	10
5	Batang-Kandeman-Ujungnegoro PP	Bus 12 Seat	15	14
6	Batang-Sambong-Lawangaji-Botolambat-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	10	0
7	Batang - Kalisari - Karanganyar - Pesaren - Sidorejo - Pandansari PP	Bus 12 Seat	10	0
II	Yang Berpusat di Limpung			
1	Limpung — Sukorejo — Lobang — Kalisari PP	Bus 12 seat	8	0

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
2	Limpung — Tersono — Timbang — Pelen PP	Bus 12 seat	55	18
3	Limpung — Kalangsono — Timbang — Pelen PP	Bus 12 seat	15	3
4	Limpung — Sojomerto — Reban PP	Bus 12 seat	45	23
5	Limpung — Sojomerto — Bawang PP	Bus 12 seat	10	5
6	Limpung — Kalisalak — Sidomulyo — Salam — Kluwih — Bandar PP	Bus 16 seat	12	0
7	Limpung — Kalisalak — Dlimas — Petamanan — Subah PP.	Bus 12 seai	10	0
8	Limpung — Banyuputih — Kedawung - Mangunsari (Celong) PP	Bus 12 seat	15	0
9	Limpung — Sidomulyo — Plaosan — Keniten — Wonosobo — Reban PP	Bus 12 seat	8	0
III	Yang Berpusat di Bawang			
1	Bawang-Sangubanyu-Tersono PP	Bus 12 Seat	10	0
2	Bawang - Getas - Banteng - Gondo - Rejosari Timur - Tersono PP	Bus 12 Seat	16	4
IV	Yang Berpusat di Subah			
1	Subah — Gondang — Kemiri — Kedawung PP.	Bus 12 Seat	8	0
	Subah — Keborangan — Menjangan — Karang Tengah — Kalisalak — Limpung PP	Bus 12 Seat	8	0
V	Yang berpusat di Bandar.			
1	Bandar - Binangun - Wonodadi - Tombo PP	Bus 12 Seat	7	0
2	Bandar - Pesalakan - Pasar Manis PP	Bus 12 Seat	9	0
3	Bandar - Kembanglangit - Gerlang PP	Bus 16 Seat	12	0
4	Bandar - Beji - Kenconorejo - Roban PP	Bus 12 Seat	12	1
VI	Yang berpusat di Blado.			

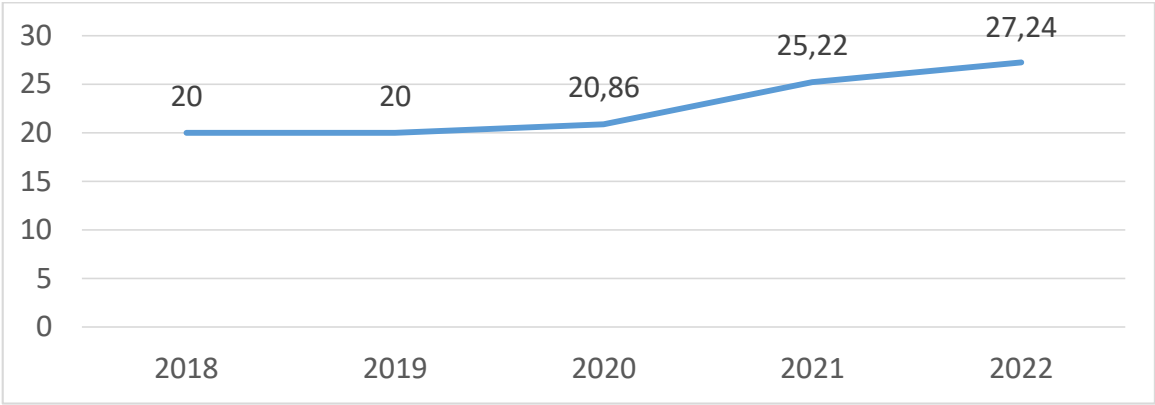
No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
1	Pagilaran - Blado - Reban - Bawang PP	Bus 12 Seat	22	0
2	Blado - Siguci - Salam - Subah PP	Bus 12 Seat	15	3
VII	Yang berpusat di Plelen			
1	Plelen - Sawangan - Ketanggan - Celong PP	Bus 12 Seat	17	0
	Angkutan SK Bersama Kota Pekalongan			
	Batang — Pekalongan PP	Bus 12 seat	80	31
	Batang — Warungasem — Pekalongan PP	Bus 12 seat	25	0
	Pasir Kencana — Jl. Seruni — TPI Batang PP	Bus 12 seat	20	0
	Bandar — Warungasem — Pekalongan PP	Bus 12 seat	24	15
	Angkutan SK Bersama Kabupaten Kendal			
	Weleri — Kalikuto — Gringsing — Pancuran — Krengseng — Pancuran — Plelen PP	Bus 12/16 seat	12	0
	Weleri — Kalikuto — Gringsing — Lebo — Krengseng — Siklayu PP	Bus 12/16 seat	8	0
	"Weleri — Kalikuto — Gringsing — Pancuran — Plelen — Sentul — Surodadi— Timbang —	Bus 12/16 seat	27	7
	Sembung — Banyuputih — Limpung PP"	Bus 12/16 seat	3	0
	Sukorejo — Plantungan — Sangubanyu — Wirosari — Bawang PP	Bus 12/16 seat	5	1
	Sukorejo — Plantungan — Sangubanyu — Wirosari — Bawang — Limpung PP	Bus 12/16 seat	8	0
	"Bawang — Sangubanyu — Sumurbanger — Plosowangi — Pujut — Tersono — Pujut—	Bus 12/16 seat	6	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2023

3) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan

Sedangkan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten diantaranya melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum. Pemasangan rambu-rambu dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 20 persen pada tahun 2018 hingga menjadi 27,24 persen pada tahun 2022. Namun demikian, kedepan masih perlu ditingkatkan, karena meskipun terus meningkat namun capaian tersebut masih di bawah 50%, terlebih ini berkaitan dengan keselamatan jalan.

Gambar 2. 117
Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Batang



Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2022

Tabel 2. 51
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang di Kabupaten Batang Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang (titik)	35.832	38.732	40.093	58.341	58.691
2.	Tambahan LPJU Terpasang	1.700	2.900	1.360	8.714	350
3.	Prosentase fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang	37,72%	40,77%	42,20%	61,41%	61,78%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2023

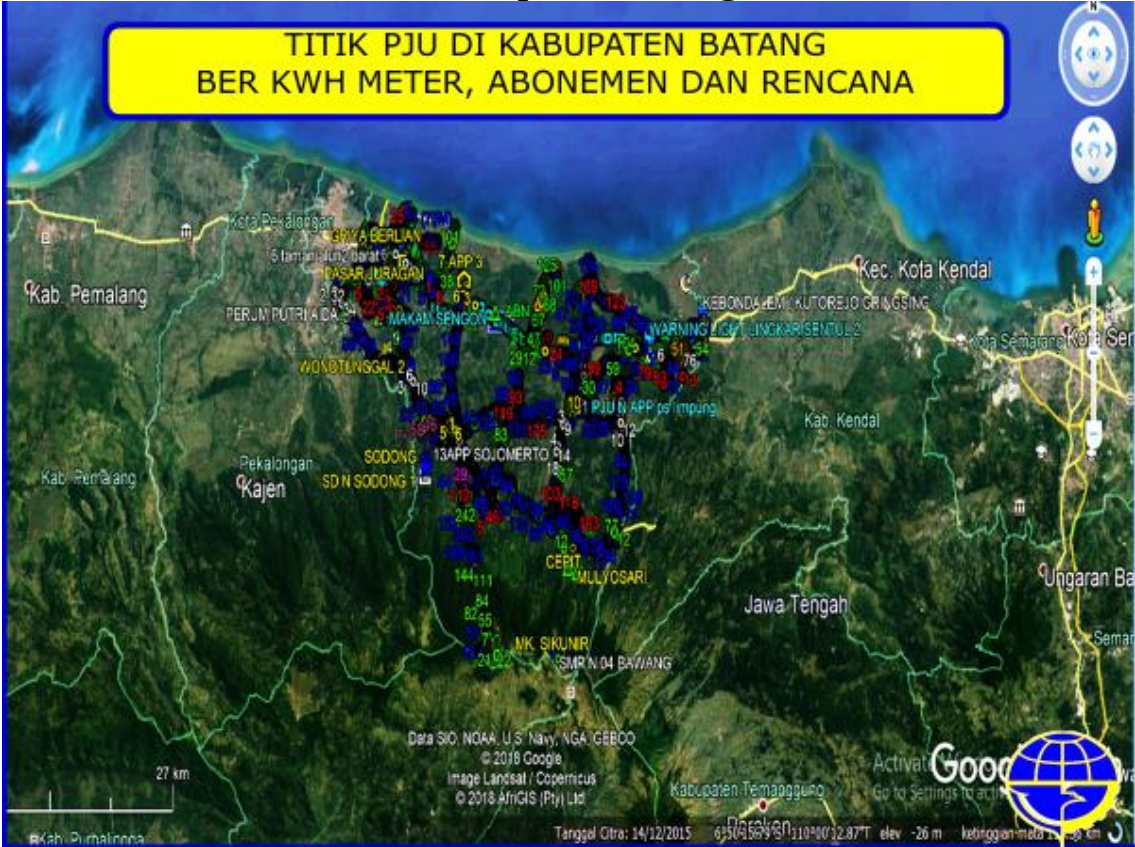
Meskipun jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, namun jumlah tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing ruas jalan.

Tabel 2. 52
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Berdasar Ruas Jalan di Kabupaten Batang

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kebutuhan PJU (Titik)	Ada Terpasang	Selisih Kurang	Tambah Titik 2023	%
1.	JALAN NASIONAL	52.839	2.043	776	1.267	40	62,01%
2.	JALAN PROVINSI	87.555	1.752	598	1.154	20	34,13%
3.	JALAN KABUPATEN	521.181	10.424	2.144	8.280	150	79,43%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2023

Gambar 2. 118
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang di Kabupaten Batang



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

Gambar 2. 119
Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Provisinsi



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

Gambar 2. 120
Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Nasional



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

Jumlah uji kir angkutan umum berfluktuasi naik pada periode lima tahun terakhir, yaitu sebanyak 10.321 unit pada tahun 2018 kemudian menurun terus hingga tahun 2022 menjadi 8.042.

Tabel 2. 53
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022

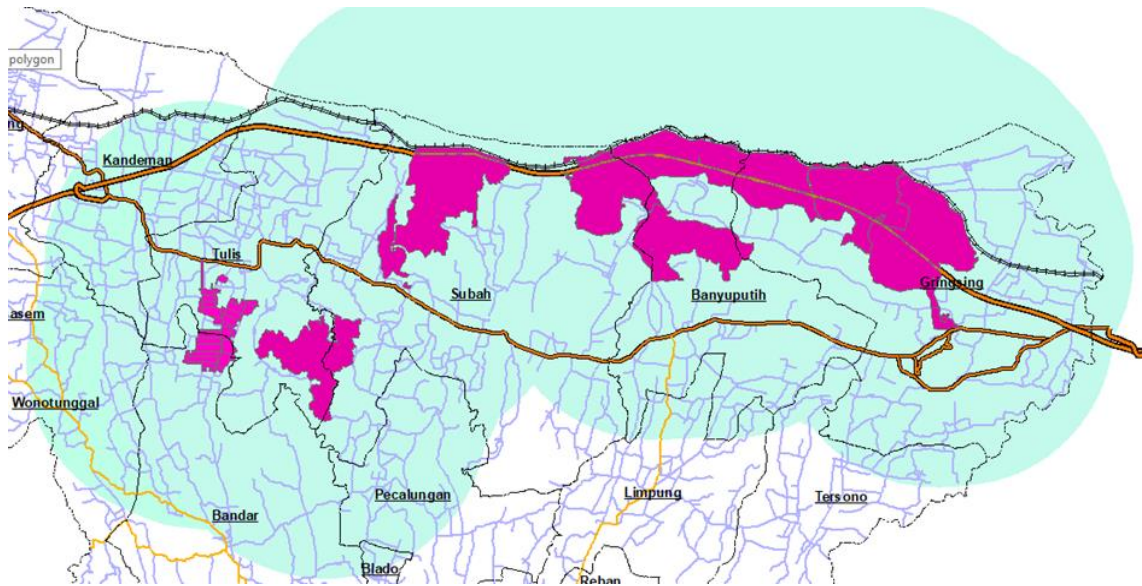
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	unit	10.321	10.306	10.318	7.941	8.042

Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2023

9.3 Aksesibilitas menuju Kawasan Industri Terpadu Batang

Kabupaten Batang memiliki dua kawasan industri yang sedang dalam proses pembangunan, yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan luas 4300 Ha di Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Subah dan Tulis serta Batang Industrial Park dengan luas 285 Ha di Kecamatan Tulis dan Bandar.

Gambar 2. 121
Peta Jaringan Jalan Lokasi Kawasan Industri



Sumber: Jaringan Jalan RTRW Kab Batang 2019-2039

Dari peta lokasi kawasan industri (ungu) yang kemudian dibuat radius sejauh 5 Km, didapatkan deliniasi kawasan penyangga (biru muda). Beberapa jalan desa sekitar kawasan industri yang perlu diperhatikan guna mendukung mobilitas pekerja yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan industri. Jalan ini diharapkan dapat menjadi jalan yang bisa

diakses dari dan menuju kawasan industri dengan berjalan kaki atau bersepeda, jalan desa tersebut antara lain:

- Desa Plelen, Kecamatan Gringsing
- Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing
- Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing
- Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih
- Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah
- Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah
- Desa Kuripan, Kecamatan Subah
- Desa Sembojo, Kecamatan Tulis
- Desa Posong, Kecamatan Tulis
- Desa Wonosegoro, Kecamatan Tulis

Kawasan industri KITB memiliki aksesibilitas yang baik, karena mempunyai Exit Toll dan juga membangun jalan akses langsung dari pantura menuju KITB dengan jalan standar industri yang lebar di Desa Plelen Gringsing, selain itu KITB terhubung dengan jalan kabupaten, diantaranya :

- Jalan Plelen – Kedawung, dengan panjang 11,6 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Gringsing yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja.
- Jalan Banyuputih – Kedawung, dengan panjang 7,35 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Banyuputih yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja.
- Jalan Kedawung – Mangunsari, merupakan jalan kabupaten yang melewati Kawasan Industri untuk menghubungkan Dukuh Mangunsari dan Pantai Celong.
- Jalan Kalimanggis – Kedawung Pos, dengan panjang 5,5 Km dan lebar 3 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Subah yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas.
- Jalan Subah – Kedawung, dengan panjang 10,2 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Subah yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja.
- Jalan Gondang – Kemiri dengan panjang 4 Km dan lebar 3 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Subah yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja, khususnya Jalan Subah – Gondang kemudian Gondang - Kemiri.

- Jalan Sengon – Roban, dengan panjang 5,7 Km dan lebar 3 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 2 KITB.
- Jalan Clapar – Kebumen, dengan panjang 3,5 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 3 KITB.
- Jalan Pucungkerep – Cluwuk, dengan panjang 6 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 3 KITB.
- Jalan Kaliboyo – Pecalungan, dengan panjang 12,5 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 3 KITB.

Pada Kawasan industri BIP, akses utamanya dengan membuat akses baru dengan standar jalan industri yang menghubungkan jalan pantura dan kawasan BIP dengan jarak sekitar 1,8 Km. Selain itu kawasan BIP juga terhubung oleh jalan kabupaten yaitu:

- Jalan Bandar – Tulis, dengan panjang 10 Km dan lebar 4 m. Jalan ini membelah kawasan industri BIP, sehingga diprediksi memiliki mobilitas yang padat karena menghubungkan pantura Tulis dan kecamatan bandar, karena jalan masuk dari pantura Tulis dan dari Kecamatan Bandar.
- Jalan Tulis – Batiombo, dengan panjang 4,3 Km dan lebar 4 m. Jalan ini menghubungkan pantura tulis dari arah barat (Kecamatan Batang dan Kandeman).
- Jalan Cempereng – Botolambat, dengan panjang 5 Km dan lebar 4 m. Jalan ini menghubungkan pantura Kandeman dengan Kawasan BIP yang diprediksi menjadi salah satu alternatif jalan yang bisa dilalui oleh pekerja.
- Jalan Batiombo – Wonosegoro, dengan panjang 1,05 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan yang menghubungkan 2 jalan alternatif masuk kedalam kawasan BIP dan merupakan jalan melewati kawasan permukiman yang diprediksi ramai karena dekat dengan kawasan industri.

Dari daftar jalan kabupaten tersebut, dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang padat dimasa yang akan datang.

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Batang melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik, ditempuh melalui upaya peningkatan jumlah jaringan komunikasi, membangun

sarana komunikasi dua arah melalui *website* serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Jumlah jaringan komunikasi terus meningkat dalam periode tahun 2018-2022, yaitu sebanyak 110 pada tahun 2018, meningkat menjadi sebanyak 130 jaringan pada tahun 2022. Persentase perangkat daerah yang memiliki website aktif juga meningkat dari tahun 2018 sebesar 85% menjadi 100% pada tahun 2022. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan terus dilakukan terhadap 41 kelompok pada masing-masing kecamatan pada tahun 2018 hingga tahun 2020, dan ada peningkatan jumlah signifikan hingga tahun 2022 menjadi 78 kelompok. Kondisi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Kabupaten Batang juga semakin baik, dapat dilihat dari skor pemeringkatan e Government yang terus meningkat dari 7 pada tahun 2018 menjadi 3,24 pada tahun 2022.

Tabel 2. 54
Indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	
1	Jumlah jaringan komunikasi	titik	110	115	120	130	130
2	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	85	100	100	100	100
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Kelompok	41	41	41	78	78
4	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	skor	7	3,29	3,29	3,6	3,24

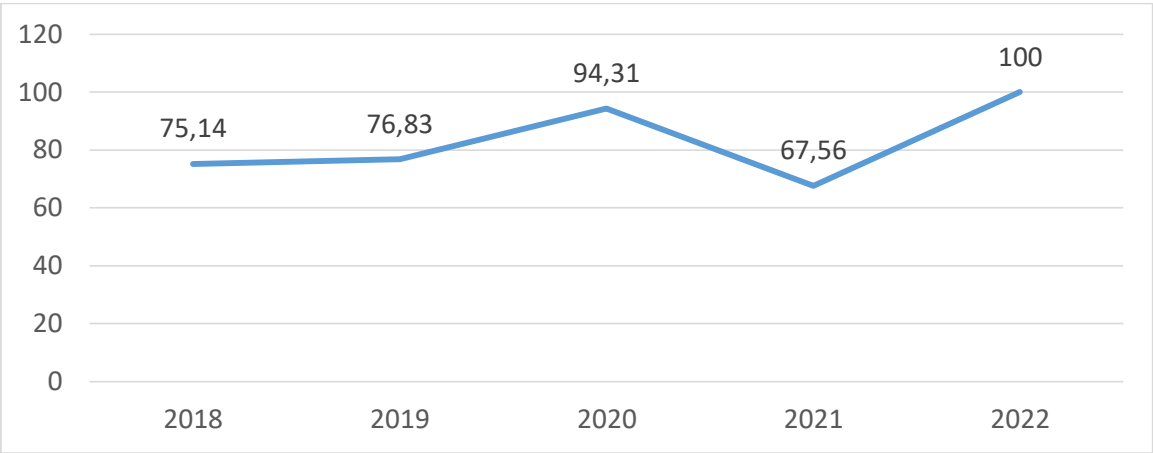
Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2023

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari capaian indikator koperasi aktif, koperasi sehat serta pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 15 unit dengan anggota 7.465 orang, Koperasi Pertanian 15 unit dengan anggota 146 orang, Koperasi Serba Usaha (KSU) 45 unit dengan anggota 5.946 orang, Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) 38 unit dengan anggota 19.826 orang dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 43 unit dengan anggota 7.826 orang.

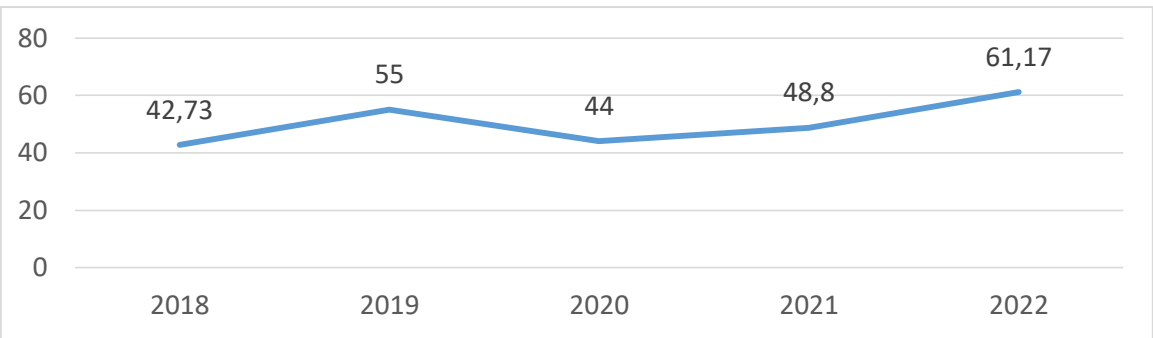
Gambar 2. 122
Prosentase Koperasi Aktif Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas, Persentase koperasi aktif Kabupaten Batang tahun dalam periode tahun 2018-2022 berfluktuasi cenderung meningkat, yaitu sebesar 75,14 persen pada tahun 2018 menjadi 100 persen pada tahun 2022.

Gambar 2. 123
Prosentase Koperasi Sehat terhadap KSP Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

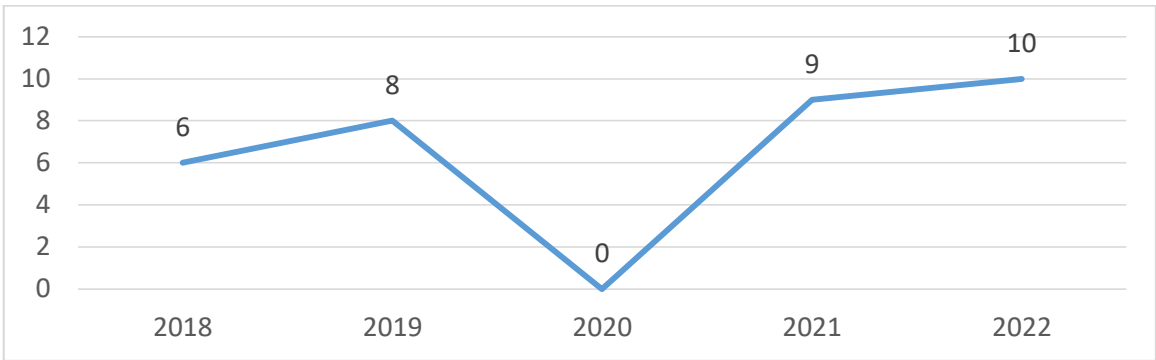


Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas, Persentase koperasi sehat terhadap jumlah KSP di Kabupaten Batang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2018-2022. Capaian tahun 2018 sebesar 42,73 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 61,17 persen.

Salah satu program unggulan Bupati Batang adalah *One Village One Produt* (OVOP), melalui program unggulan tersebut diharapkan pada akhir periode RPJMD masing-masing desa di Kabupaten Batang sudah memiliki minimal satu produk unggulan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Batang.

Gambar 2. 124
Jumlah Produk OVOP Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

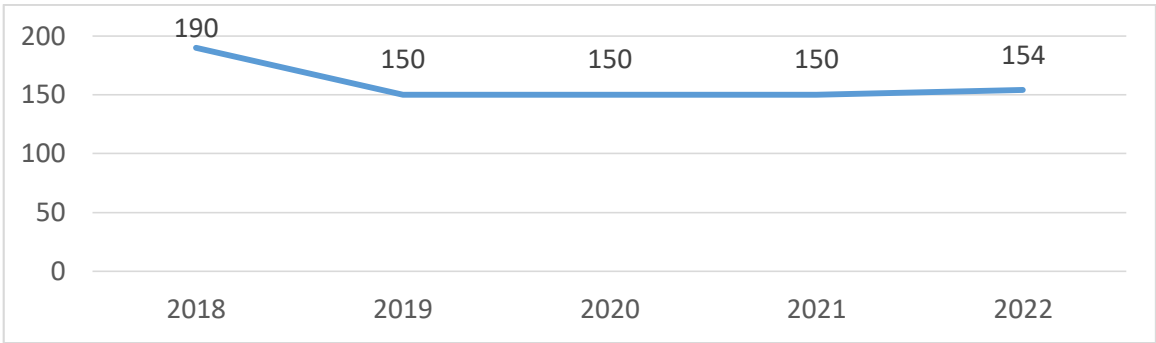


Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas, Jumlah produk OVOP Kabupaten Batang pada periode tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, dari 6 produk pada tahun 2018 menjadi 8 produk pada tahun 2019, di tahun 2020 menurun menjadi 0 produk. Hal tersebut mengindikasikan masih dibutuhkan upaya keras untuk bisa mencapai hasil sesuai yang ditargetkan karena progres peningkatan yang masih sangat lambat. Kemudian terus meningkat pasca covid hingga tahun 2022 sebanyak 10 produk.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi bonus demografi di Kabupaten Batang adalah melalui perluasan dan penciptaan lapangan kerja baru, diantaranya dengan menciptakan wirausaha baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Gambar 2. 125
Jumlah Wirausaha baru Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2023

Jumlah wirausaha baru di Kabupaten Batang dalam periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sebanyak 190 wirausaha baru pada tahun 2018, dan mengalami menurun hingga sebanyak 150 wirausaha baru di tahun 2021 dan kemudian

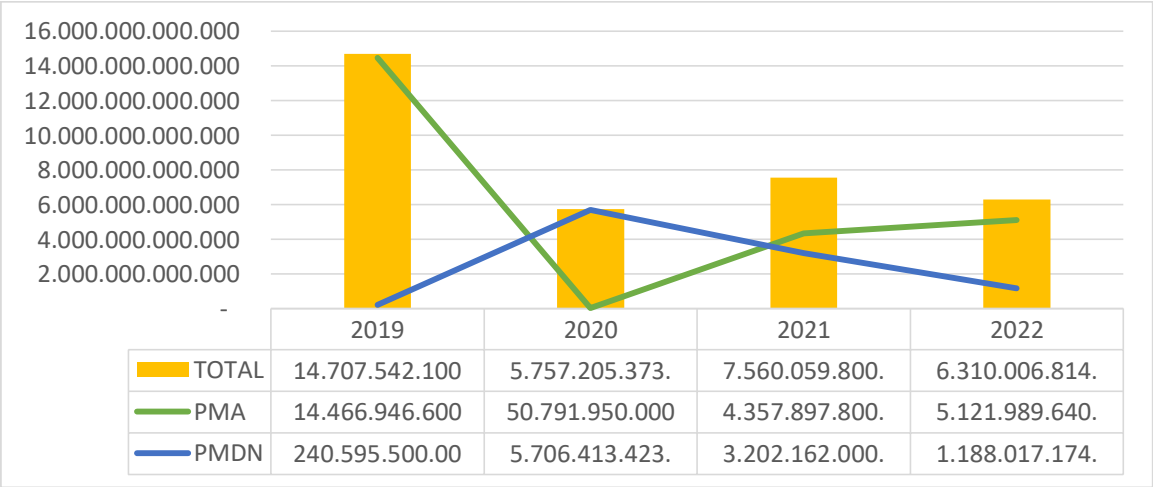
meningkat menjadi 154 wirausaha baru di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dalam fasilitasi permodalan, kerjasama dengan kementerian hukum dan HAM dalam rangka pemberian izin Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di desa-desa secara online melalui Dana Desa. Namun pada tahun 2019 dan 2020 jumlah wirausaha baru mengalami penurunan menjadi sebesar 150 wirausaha baru yang disebabkan karena menurunnya minat masyarakat serta daya beli masyarakat yang menurun sehingga beberapa wirausaha baru tidak dapat bertahan. Pada tahun 2021 jumlah wirausaha baru mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid 19.

12. Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian jumlah realisasi investasi di Kabupaten Batang, jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang serta jumlah penyerapan tenaga kerja.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Batang dalam periode tahun 2019-2022 cenderung berfluktuasi. Dimana total investasi yang masuk di Kabupaten Batang tahun 2019 sebanyak 14.707,54 M kemudian menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 5.757,20 M dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 7.560,0 M kemudian menurun menjadi 6.310 M di tahun 2022. Pada tahun 2020 realisasi investasi di Kabupaten Batang mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19.

Gambar 2. 126
Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Batang
Tahun 2019-2022



Sumber: DPMPSTP Kabupaten Batang Tahun 2023

Realisasi investasi di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 realisasi investasi dalam negeri di Kabupaten Batang mencapai Rp. 240.595.500.000. Realisasi investasi terbesar berada di Kecamatan Subah dengan nilai investasi mencapai Rp. 121.706.000.000. Jika dirinci menurut sektor dan sub sektor, realisasi investasi terbesar berada pada sektor tersier dengan sub sektor perdagangan dan reparasi dengan realisasi investasi mencapai Rp. 22.350.000.000. Sedangkan penanaman modal asing mencapai Rp. 14.466.946.600.000 dengan nilai investasi tertinggi berada di Kecamatan Kandeman yaitu sebesar Rp. 14.344.057.610.000. Menurut sektor dan sub sektor, realisasi tertinggi investasi modal asing di Kabupaten Batang pada tahun 2019 berada pada sektor tersier dengan sub sektor listrik, air, dan gas dengan nilai investasi mencapai Rp. 14.344.057.600.000.

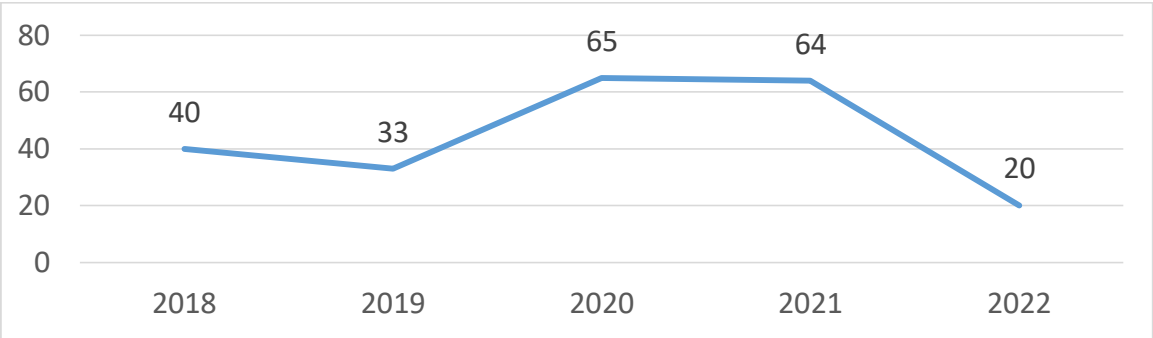
Pada tahun 2020, penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Batang mencapai Rp. 5.706.413.423.067 dengan realisasi investasi terbesar berada di Kecamatan Tulis dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.598.400.000.000. Sektor tersier dengan sub sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran menjadi sub sektor dengan penanaman modal dalam negeri tertinggi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 4.876.340.000.000. Sedangkan penanaman modal asing hanya berada di satu kecamatan yaitu Kecamatan Kandeman dengan realisasi investasi sebesar Rp. 50.791.950.000 pada sektor sekunder dengan sub sektor industri tekstil.

Pada tahun 2021, penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan menjadi Rp. 3.202.162.000.000 dengan investasi terbesar berada di Kecamatan Warungasem dengan nilai investasi Rp. 1.844.954.700.000. Menurut sektor dan sub sektor, realisasi investasi terbesar berada pada sektor tersier dengan sub sektor transportasi, gudang, dan komunikasi dengan realisasi investasi mencapai Rp. 1.836.083.700.000. Sedangkan untuk penanaman modal asing mencapai Rp. 4.357.897.800.000 dengan nilai investasi terbesar berada di Kecamatan Kandeman dengan realisasi investasi mencapai Rp. 3.553.757.560.000. Jika dirinci menurut sektor dan sub sektor, sektor tersier dengan sub sektor listrik, gas, dan air menjadi sub sektor dengan penanaman modal

asing terbesar di Kabupaten Batang pada tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.236.043.930.000.

Pada tahun 2022, penanaman modal dalam negeri menurun kembali menjadi sebesar Rp. 1.188.017.174.244 sedangkan pada Penanaman modal Asing realisasi di Tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 menjadi Rp. 5.121.989.640.716.

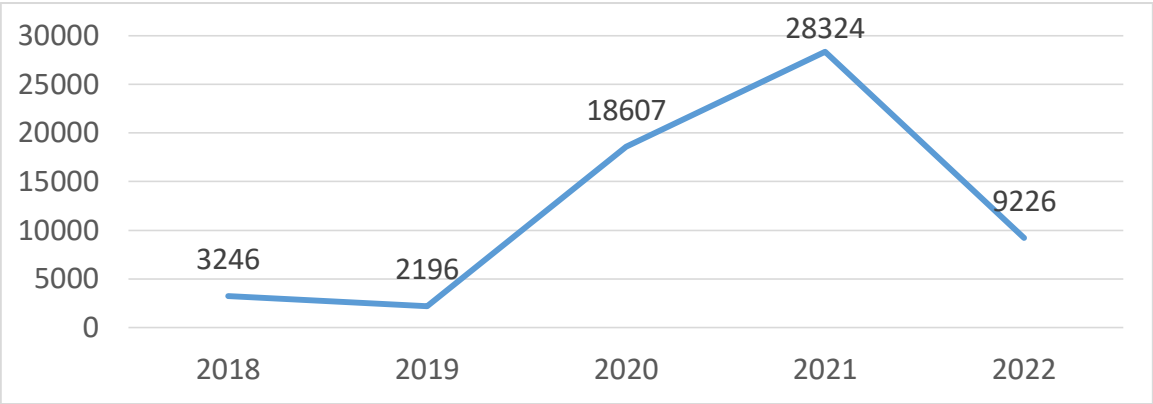
Gambar 2. 127
Jumlah Perusahaan Baru yang Berinvestasi di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Batang Tahun 2023

Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi, jumlah ijin usaha yang diterbitkan juga meningkat di tahun 2021.

Gambar 2. 128
Jumlah Ijin Usaha yang Diterbitkan Tahun 2018-2022



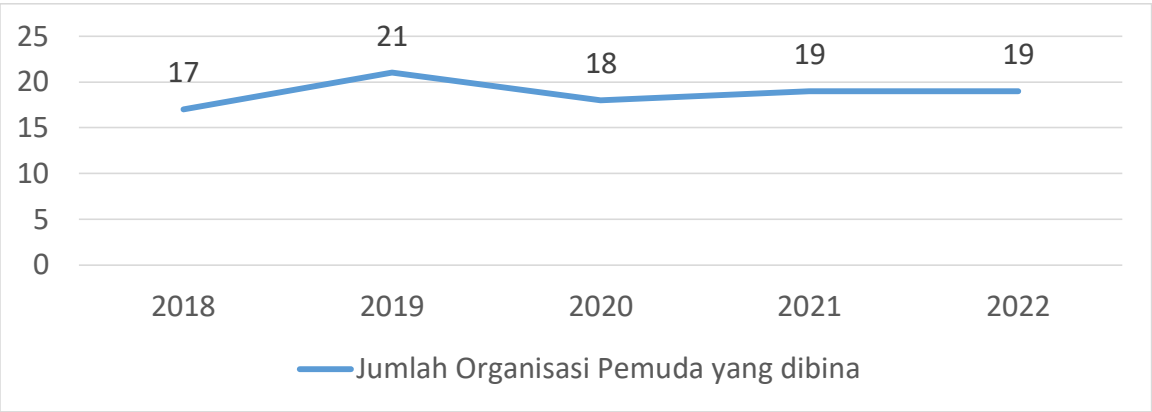
Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2023

Jumlah ijin usaha yang diterbitkan dalam periode 2018-2021 cenderung meningkat hingga sebanyak 28.324 ijin di tahun 2021 namun menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 9.226 ijin. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat kegiatan bantuan umkm sehingga banyak umkm yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.400.000/umkm.

13. **Kepemudaan dan Olah Raga**

Capaian kinerja bidang kepemudaan pada 2018-2022 dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dan persentase pemuda berwirausaha di Kabupaten Batang. Peran aktif kepemudaan sangat menunjang keberhasilan pembangunan. Terkait hal tersebut, salah satu program unggulan Kabupaten Batang adalah 1000 pemuda berwirausaha dan 10.000 lapangan usaha baru, membutuhkan peran aktif pemuda dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Melalui peran serta pemuda dalam kewirausahaan diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru untuk menjawab tantangan bonus demografi di Kabupaten Batang.

Gambar 2. 129
Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina di Kabupaten Batang



Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, Jumlah organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi di Kabupaten Batang fluktuatif dari tahun 2018-2022, yaitu sebanyak 17 organisasi pada tahun 2018 terus meningkat menjadi 21 organisasi pada tahun 2019, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 18 organisasi, dan kembali meningkat hingga tahun 2022 menjadi 19 organisasi.

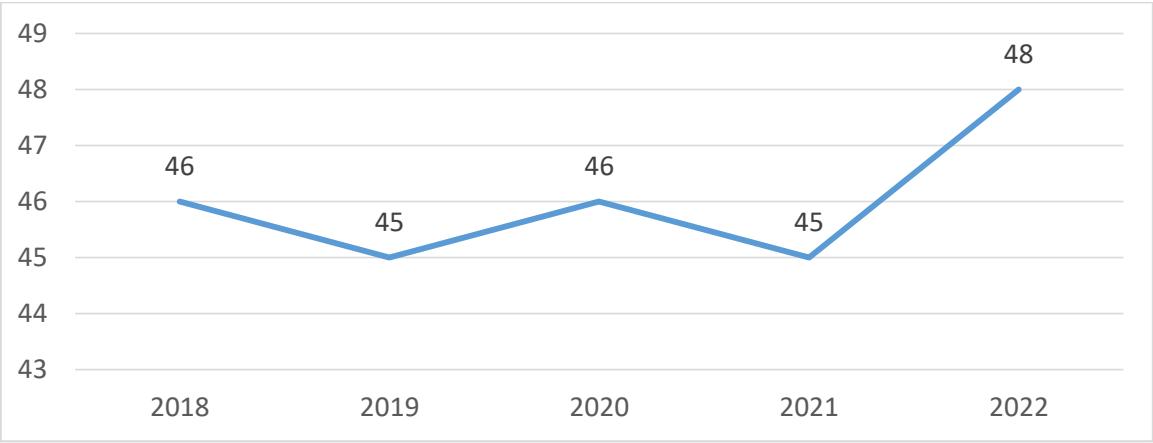
Tabel 2. 55
Persentase pemuda berwirausaha (%)
di Kabupaten Batang

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemuda berwirausaha	%	19	25	32	39	45

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2023

Dari tabel diatas, Peningkatan keterlibatan pemuda dalam kewirausahaan melalui program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda mulai dilaksanakan tahun 2018. Persentase pemuda berwirausaha terus meningkat pada tiga tahun terakhir, dari 19 persen di tahun 2018 menjadi 45 persen di tahun 2022.

Gambar 2. 130
Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina di Kabupaten Batang

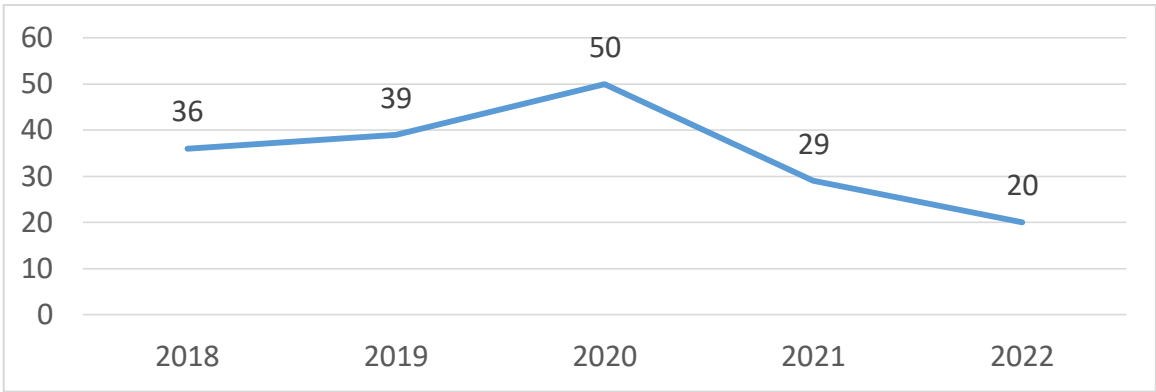


Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2023

Sedangkan kinerja bidang olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi olahraga yang dibina serta jumlah kejuaraan dalam bidang olahraga yang diraih di tingkat provinsi. Jumlah organisasi olahraga yang dibina berfluktuasi naik dari tahun 2018-2022, yaitu sebanyak 46 organisasi pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 48 organisasi pada tahun 2022.

Jumlah kejuaraan yang diikuti di tingkat provinsi juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022, dari 36 kejuaraan di tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50 kejuaraan di tahun 2020, karena upaya melalui pembinaan atlet serta pengiriman atlet pada cabang olahraga unggulan, namun demikian mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 29 kejuaraan dikarenakan minimnya event kegiatan sebagai dampak pandemi Covid19.

Gambar 2. 131
Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga Kabupaten Batang di tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2023

Tabel 2. 56
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Atlet Kabupaten Batang Tahun 2022

No	Cabang Olahraga	Medali	Jumlah	Keterangan
1	Panjat tebing	Rekor Dunia kecepatan	1	Kejuaraan IFSC di Chamonix, Prancis
2	Panjat tebing	Rekor Dunia kecepatan	1	Kejuaraan IFSC di Seoul Korea Selatan
3	Panjat tebing	Rekor Dunia kecepatan	1	Kejuaraan IFSC di Salt Lake City AS
4	Panjat Tebing	Rekor Dunia kecepatan	1	Kejuaran World Game di Birmingham
5	POPDA	Emas	4	
6	POPDA	Perak	2	
7	POPDA	Perunggu	5	
8	NPC	Emas	1	
9	NPC	Perak	2	
10	NPC	Perunggu	4	
11	Pra Porprov	Emas	20	
Jumlah Medali			42	

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2023

Pada tahun 2022 atlet Kabupaten Batang memperoleh total 42 medali dari berbagai cabang olahraga yang diikuti baik pada level provinsi, nasional, maupun internasional. Salah satu prestasi terbaik yang diperoleh adalah prestasi pada kejuaraan dunia panjat tebing 2022 yang diadakan berturut turut di 4 (empat) negara dengan medali rekor dunia kecepatan.

Pada POPDA juga meraih 11 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu, kemudian pada Kompetensi NPC meraih 7 medali dengan 1 medali emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sedangkan pada Pra Poprov juga meraih 20 medali emas dalam kejuaraan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) terus mendorong prestasi olahraga sebagaimana disosialisasikannya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan. Upaya yang dilakukan untuk mendorong prestasi olahraga antara lain dengan tersedianya prasarana dan sarana olah raga di Kabupaten Batang seperti gelanggang atau balai remaja, lapangan olahraga, dan kolam renang.

Tabel 2. 57
Jumlah Gelanggang dan Lapangan Olahraga Kabupaten Batang hingga Tahun 2022

No	Kecamatan	Gelang-gang	Lapangan Olahraga	Lap. Sepak-bola	Lap. Basket	Lap. Volley	Lap. Bulu Tangkis	Kolam Renang	Jmlh
1	WONOTUNGGAL	1	-	7	-	2	1	-	11
2	BANDAR	-	18	18	4	14	11	4	69
3	BLADO	-	9	11	-	15	7	2	44
4	REBAN	-	15	12	-	19	30	1	77
5	BAWANG	-	25	20	3	10	3	1	62
6	TERSONO	-	27	20	5	30	21	-	103
7	GRINGSING	-	15	15	5	15	7	2	59
8	LIMPUNG	-	-	12	1	34	34	2	83
9	SUBAH	-	-	13	3	27	24	-	67
10	TULIS	-	15	10	-	8	5	-	38
11	BATANG	-	7	1	8	18	12	4	50
12	WARUNGASEM	-	-	8	2	20	16	-	46
13	KANDEMAN	1	12	12	5	32	5	-	67
14	PECALUNGAN	-	-	5	1	20	15	-	41
15	BANYUPUTIH	-	11	11	-	10	8	2	42
	Kabupaten	2	154	175	37	274	199	18	859

Sumber : Disparpora Kab. Batang, 2023

Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang secara rutin menggelar *multi event* kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang diselenggarakan setiap tahun. Pengembangan wisata olahraga juga terus dilakukan, antara lain olahraga paralayang yang berlokasi di Desa Pagilaran Kecamatan Blado dan *mountain bike* yang berlokasi di Desa Kembanglangit Kecamatan Blado. Cabang olahraga

andalan Kabupaten Batang adalah panjat tebing, prestasi tertinggi yang pernah diperoleh dari cabang olahraga ini adalah mencetak rekor dunia kecepatan di kejuaraan dunia World Cup International Sport Climbing (IFSC) di Salt Lake, Amerika Serikat, Kejuaraan IFSC di Chamonix, Perancis, Kejuaraan IFSC di Seoul Korea Selatan, serta Kejuaraan World Game di Birmingham yang diraih oleh atlet panjat tebing Kiromal Katibin. Program peningkatan Kapasitas daya saing olahraga menjadi program utama peningkatan prestasi olahraga daerah. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui organisasi kepemudaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) secara aktif melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang. Dalam hal jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan tercatat sebanyak 48 pelatih dengan 9 pelatih sertifikasi nasional yang terdiri dari cabang olahraga Tenis Meja, Taekwondo, Atletik, Dayung, Renang, Bulutangkis, Senam, Sepakbola, Pencak Silat, Karate, Panjat Tebing, Bridge, Anggar, Kempo, Sepatu Roda, Bola Basket, Tinju, dan Balap Sepeda.

14. Statistik

Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan *relevan* diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Hal ini sudah menjadi amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274 dimana, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi (*data based planning*) yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Capaian kinerja urusan Statistik sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 yaitu persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pada periode lima tahun terakhir telah mempertahankan nilai sempurna. Capaian tahun 2018 hingga tahun 2022 tetap di angka 100%. walaupun begitu, terdapat beberapa data yang bukan menjadi wali data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, karena baru terbentuk pada tahun 2017 sehingga penghitungan mulai dilakukan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 - 2022 ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan hanya mengacu pada wali data yang disediakan pada dinas tersebut, yang artinya masih terdapat data/informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah belum semuanya terpenuhi. Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa data khususnya data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Batang pada beberapa tahun ini tidak dilakukan penghitungan.

Tabel 2. 58
Indikator kinerja urusan Statistik Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2023

15. Persandian

Tugas persandian daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan tersebut adalah dengan mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Selama periode 2018-2022 semua perangkat daerah telah mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian dengan menggunakan fasilitas *Virtual Private Network* (VPN) untuk akses server perencanaan dan penganggaran/penatausahaan keuangan.

Tabel 2. 59
Indikator kinerja urusan Persandian Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penyediaan alat studio dan komunikasi	%	100	100	100	100	100

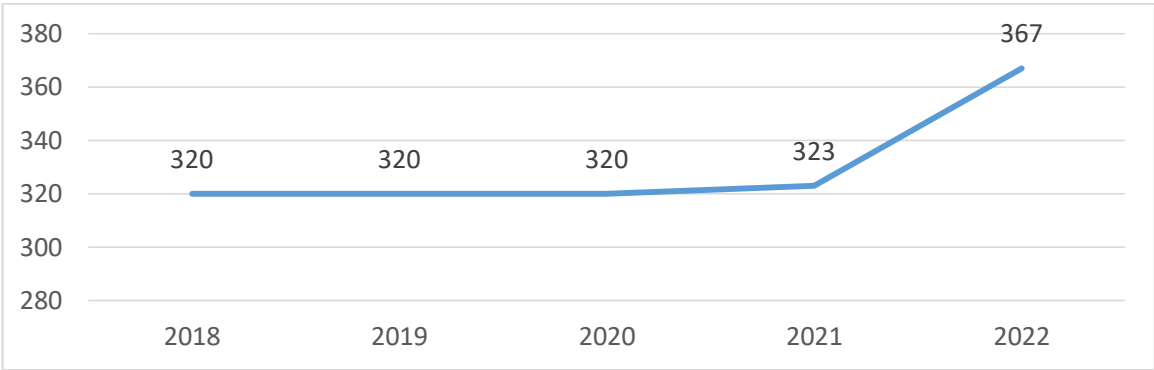
Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2023

16. Kebudayaan

Kondisi layanan urusan Kebudayaan di Kabupaten Batang antara lain dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya di

Kabupaten Batang. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2018 hingga 2020 jumlah situs dan cagar budaya sebanyak 320 situs kemudian meningkat menjadi 323 situs di tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 367 situs di tahun 2022.

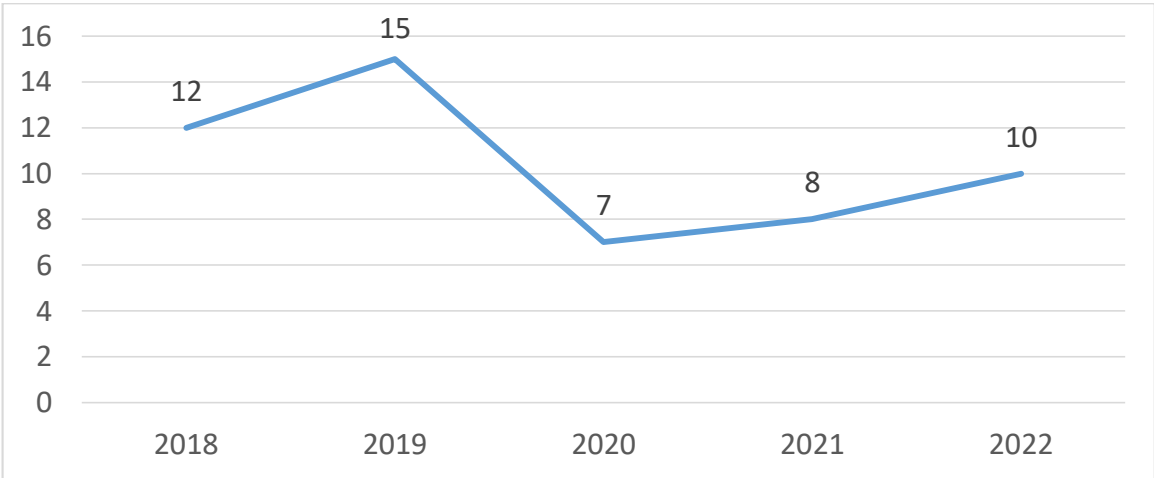
Gambar 2. 132
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2018-2022



Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2023

Selain pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, pembangunan budaya juga direalisasikan melalui penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya. Jumlah festival dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada periode tahun 2018-2022 cenderung menurun. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya sebanyak 18 kali. Tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 12-15 kali kemudian menurun akibat adanya pandemi *Covid 19* menjadi 7 kali di tahun 2020 dan meningkat kembali hingga tahun 2022 sebanyak 10 kali di tahun tersebut.

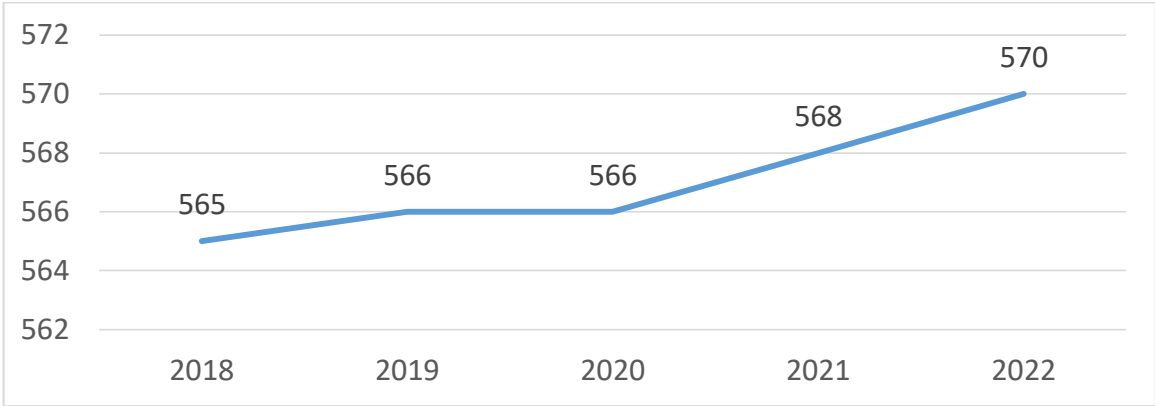
Gambar 2. 133
Jumlah festival dan peristiwa budaya yang diselenggarakan



Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2023

Pembangunan budaya juga direalisasikan melalui pembinaan grup-grup kesenian di Kabupaten Batang. Hal tersebut sebagai upaya pelestarian budaya melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Selama kurun waktu 2018-2022 jumlah grup kesenian di Kabupaten Batang meningkat, tahun 2018 berjumlah 565 grup, meningkat menjadi 566 grup di tahun 2019 dan 2020 dan meningkat kembali hingga tahun 2022 menjadi 570 grup. Semuanya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Batang.

Gambar 2. 134
Jumlah grup kesenian yang dibina (grup) Tahun 2018-2022

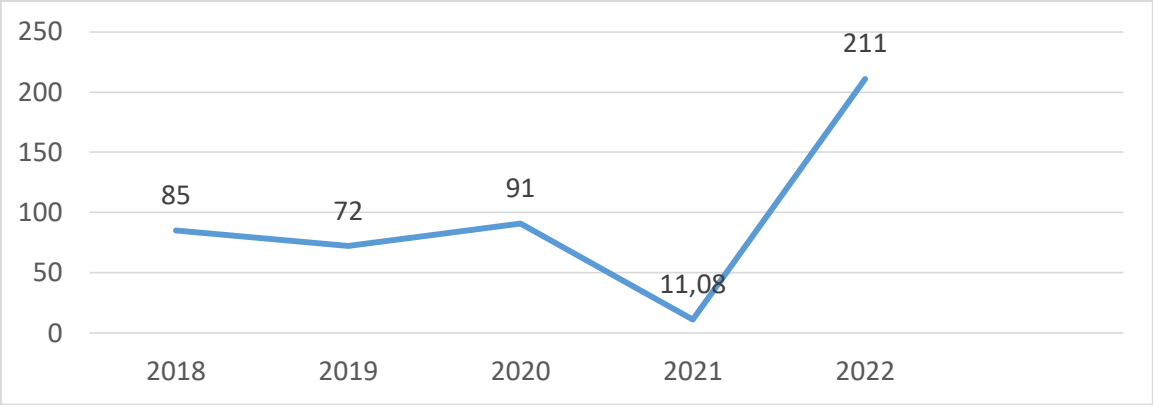


Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2023

17. Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan dilihat dari jumlah pengunjung pada periode lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi menurun. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Batang 1 unit, dengan peningkatan signifikan pengunjung tahun 2022 sebesar 211 persen atau sebanyak 63.424 pengunjung dari tahun 2021 sebanyak 11,08 persen saja peningkatannya. Dengan demikian, kedepan capain tersebut masih harus ditingkatkan lagi melalui penambahan dan pemeliharaan buku.

Gambar 2. 135
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (%)



Sumber: Disperpuska & Arsip Kabupaten Batang Tahun 2023

Untuk meningkatkan kinerja urusan perpustakaan, upaya lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM dalam bidang perpustakaan. Kualitas SDM dilihat dari jumlah pustakawan dan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Pada periode 2018-2021 jumlah pustakawan sebanyak 2 orang sedangkan di tahun 2022 sebanyak 566 orang , sementara jumlah tenaga teknis berkurang dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 27 orang pada tahun 2018-2019 menjadi 23 orang pada tahun 2021. Kemudian ditahun 2022 sebanyak 1123 orang. Sedangkan untuk penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batang belum memiliki penilai yang bersertifikat. Peningkatan jumlah pustakawan dan tenaga teknis di perpustakaan Kabupaten Batang disebabkan karena telah dilakukan perhitungan ulang di tahun 2022 oada berbagai jenis perpustakaan dari perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA).

Tabel 2. 60
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	6	7	8	8	8
1	Pustakawan	Orang	2	2	2	2	566
2	Tenaga teknis	Orang	27	27	23	23	1123

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2023

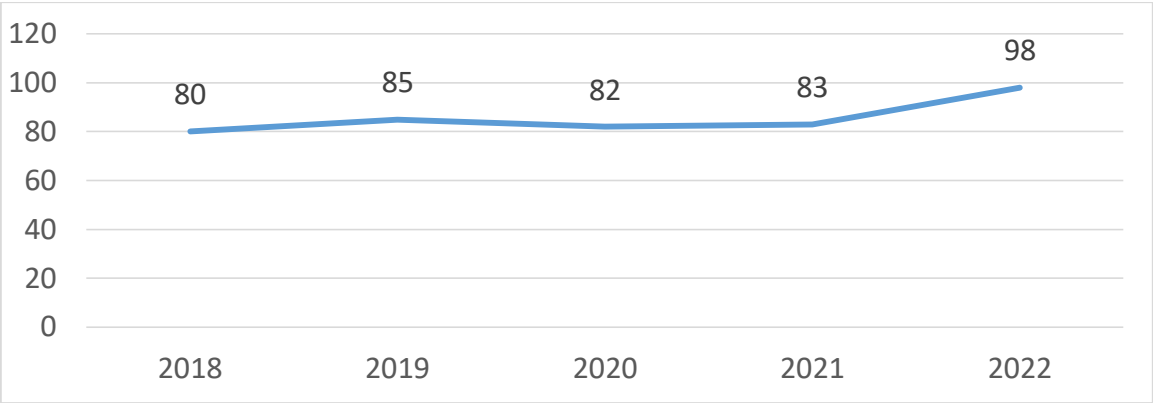
Untuk mendorong indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca akan dilakukan melalui peningkatan layanan perpustakaan dan optimalisasi taman baca masyarakat.

18. Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai sumber informasi yang akurat, sebagai alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, juga sebagai bukti kinerja organisasi dan aparaturnya, bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga evaluasi kinerja dalam suatu perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan melalui pengelolaan arsip secara baku serta penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna.

Kinerja kearsipan dilihat dari pengelolaan arsip secara baku dalam periode 2018-2022 cenderung meningkat, dari tahun 2018 sebesar 80 persen meningkat menjadi 98 persen di tahun 2022.

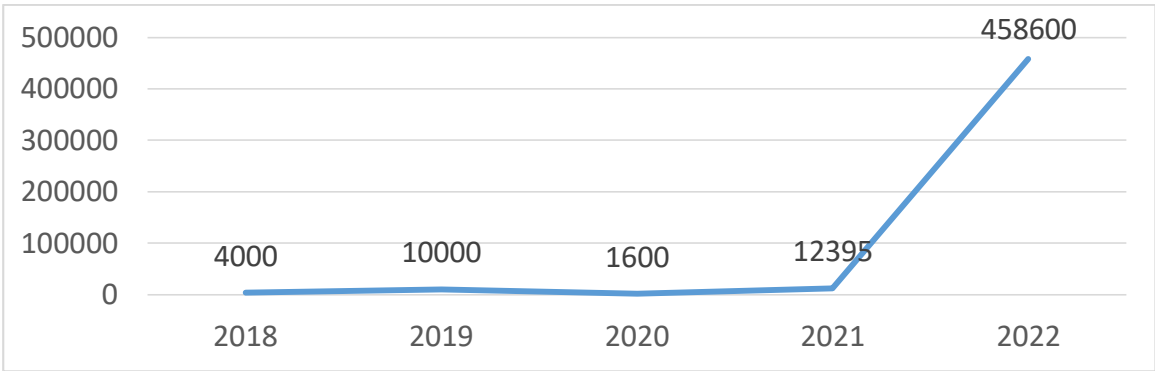
Gambar 2. 136
Pengelolaan arsip secara baku (%) Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022



Sumber: Disperpuska & Arsip Kabupaten Batang Tahun 2023

Sedangkan penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna fluktuatif, dari tahun 2018 sebanyak 4000 arsip/dokumen meningkat menjadi 10.000 arsip/dokumen yang dilestarikan/diselamatkan pada tahun 2019. Namun tahun 2020 menurun menjadi 1.600 arsip, kemudian meningkat lagi hingga tahun 2022 menjadi 458600 arsip/dokumen. Peningkatan ini didukung dengan adanya kesadaran pengelolaan arsip di setiap perangkat daerah.

Gambar 2. 137
Penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Disperpuska & Arsip Kabupaten Batang Tahun 2023

C. Urusan Pilihan

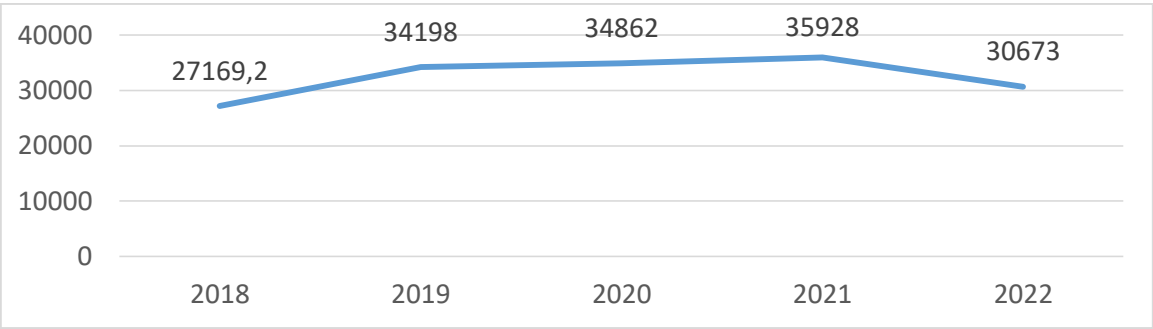
1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Batang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) yang memiliki Panjang garis pantai Kabupaten Batang 38,75 km dan lebar 4 mil yang ditunjang oleh iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada Bulan

Oktober-April dan musim kemarau pada Bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau), dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air).

Jumlah produksi perikanan tangkap pada periode tahun 2018-2022 cenderung menurun, tahun 2018 sebesar 27169,25 ton 2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 34.198 ton dan mencapai 34.862 ton pada tahun 2020 kemudian menurun menjadi 30.673 ton di tahun 2022. Penerapan regulasi pelarangan alat tangkap cantrang menyebabkan penurunan secara signifikan pada produksi Tahun 2014-2016, kemudian ada toleransi perpanjangan penggunaan alat tangkap pada Tahun 2017 dapat meningkatkan produksi sampai dengan tahun 2019 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Tidak adanya lagi peraturan yang melarang alat tangkap cantrang beroperasi di perairan laut Jawa serta meningkatnya jumlah kapal nelayan yang melakukan pelelangan ikan di TPI di wilayah Batang menyebabkan semakin meningkatnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 34.198 ton, tahun 2020 sebesar 34.862 ton dan tahun 2021 meningkat menjadi 35.928 ton.

Gambar 2. 138
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Batang Tahun 2018-2022

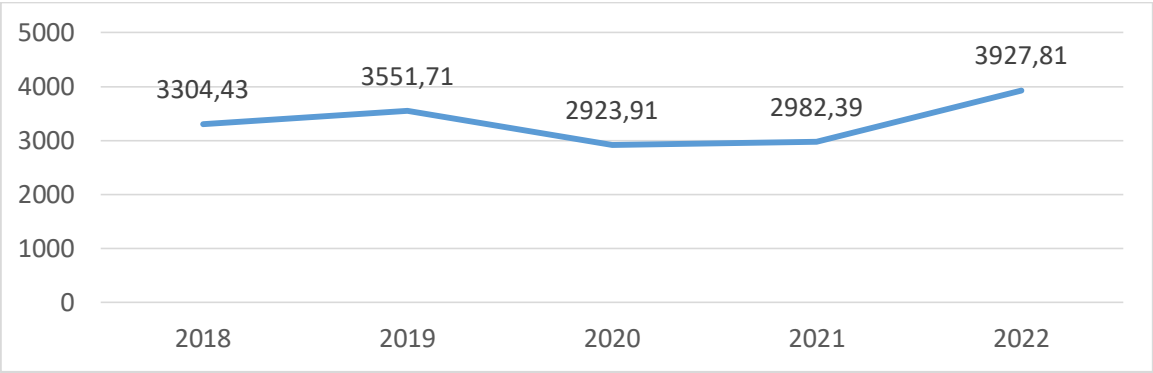


Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2023

Untuk produksi perikanan budidaya dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 3304,43 ton meningkat menjadi 3551,71 ton pada tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan budidaya tersebut disebabkan karena pembudidaya masih bersifat tradisional, kemudian mulai tahun 2017-2019 karena pengadaan demplot-demplot budidaya sehingga meningkatkan produksi. Namun adanya pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi aktivitas usaha budidaya

sehingga mengakibatkan penurunan produksi perikanan budidaya menjadi 2.923,91 ton pada tahun 2020. Tahun 2021 dengan mulai pulihnya keadaan dampak pandemi Covid-19 sedikit mempengaruhi produksi perikanan budidaya, ini terlihat dengan peningkatan produksi menjadi 2.982,39 ton dan meningkat kembali menjadi 3.927,81 ton di tahun 2022.

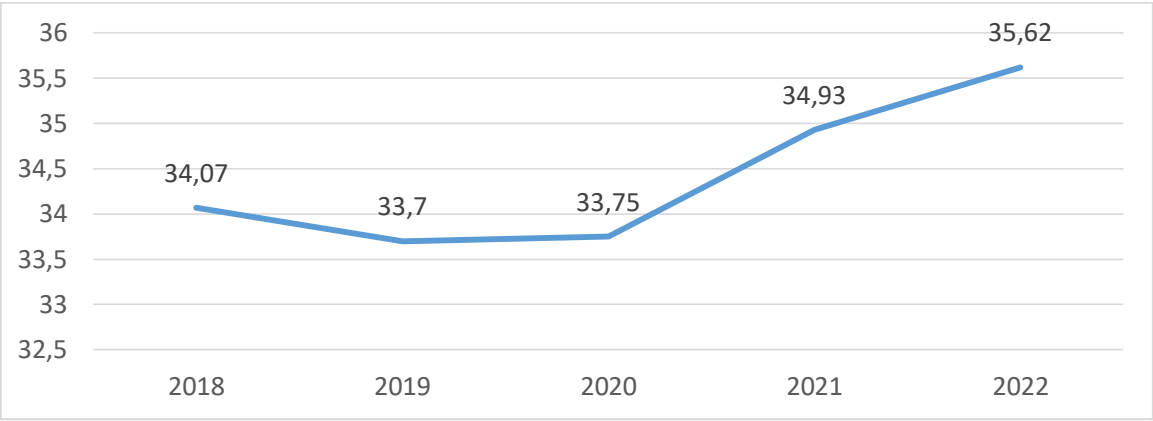
Gambar 2. 139
Produksi perikanan Budidaya (ton) Kabupaten Batang



Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2023

Konsumsi ikan juga cenderung naik pada periode 2018-2022, dimana pada tahun 2018 sebesar 34,07 kg/kapita/th menjadi 35,62 kg/kapita/th pada tahun 2022. Namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi sebesar 33,75 kg/kapita/th karena produksi ikan laut yang tersedia di pasar menurun.

Gambar 2. 140
Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th) Kabupaten Batang



Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2023

2. Pariwisata

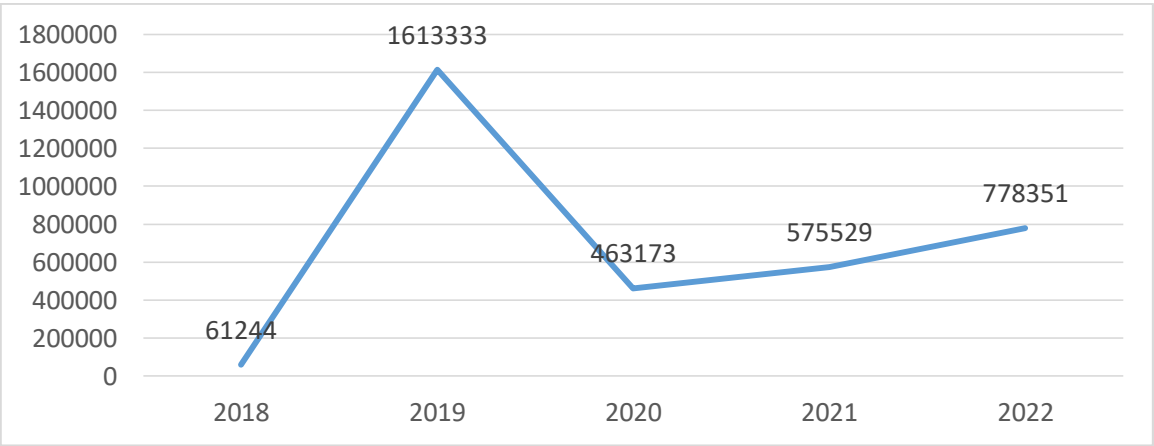
Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Batang mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Batang yang cukup besar baik wisata pantai, wisata pegunungan, wisata religi dan wisata budaya. Sektor Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi pendapatan

daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa (Pokdarwis).

Beberapa tempat wisata yang ada di kabupaten Batang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, antara lain kolam renang Bandar, THR Kramat, pantai Ujungnegoro, pantai Sigandu, pantai Celong, pantai Jodo, kebun teh Pagilaran, pemandian air panas Sangubanyu serta desa wisata Mentosari dan Pandansari.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan pariwisata Batang diantaranya promosi melalui media sosial, televisi, dan media cetak; kalender event; mengikuti pameran pariwisata dan ekonomi kreatif serta kerjasama dengan stakeholder pariwisata (PHRI, BWI, ASPI), cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.612.333 orang. Namun, tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang mengalami penurunan menjadi sebesar 463.173 orang. Penurunan terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga selama beberapa bulan destinasi wisata ditutup dan baru dibuka kembali pada awal Juli dengan penerapan protokol kesehatan. Hingga tahun 2022 dengan berangsur pulihnya kondisi akibat dampak Pandemi Covid-19 kunjungan wisata berangsur merangkak naik menjadi 778.351 orang.

Gambar 2. 141
Kunjungan Wisata Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



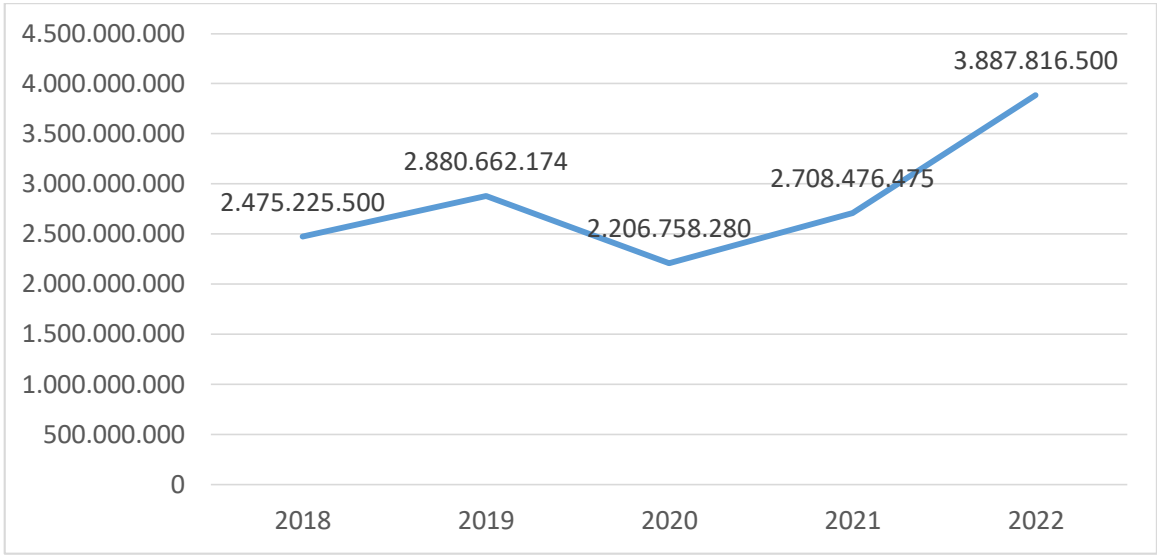
Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang, 2023

Sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang, kontribusi sektor pariwisata juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 sebesar Rp 2.475.225.500 terus meningkat menjadi Rp 2.880.662.174,- pada tahun 2019. Namun tahun 2020 PAD sektor pariwisata mengalami penurunan

menjadi sebesar Rp 2.206.758.280,- yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, dengan berangsur membaiknya kondisi akibat dampak Pandemi Covid-19 hingga tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.887816.500, diantara tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Pantai Sigandu masih menjadi favorit bagi masyarakat dalam berwisata. Jumlah pengunjung pantai Sigandu pada tahun 2022 sebesar 486.894 pengunjung dengan menyumbang PAD sebesar Rp 2.312.785.750. Pantai Ujung Negro sebanyak 96.714 pengunjung dengan PAD Rp. 459.393.500, Kolam renang Bandar sebanyak 54.814 pengunjung dengan PAD Rp 260.366.500, THR Keramat sebanyak 61.177 pengunjung dengan PAD sebesar Rp 596.475.250, Agrowisata Pagilaran sebanyak 39.900 pengunjung dengan menyumbang PAD sebesar Rp 66.333.750.

Kontribusi sektor pariwisata didukung oleh upaya pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata, peningkatan akses jalan wisata serta fasilitas pendukungnya.

Gambar 2. 142
PAD sektor pariwisata Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



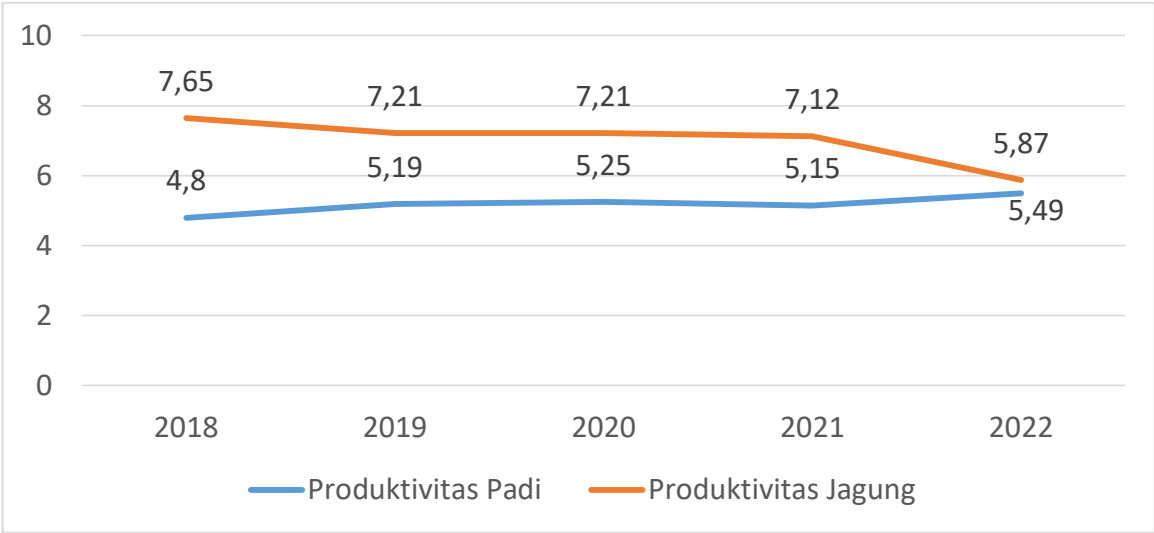
Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang, 2023

3. Pertanian

Di sektor pertanian, konsep hilirisasi sebagai kebijakan pengembangan pertanian melalui konsep agro industri terus dikembangkan guna menopang ketahanan kebutuhan pangan daerah. Pada tanggal 30 Juni 2023, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki meresmikan lumbung pangan di Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing. Lumbung pangan diresmikan pada tiga lokasi yakni Desa Sidorejo

Kecamatan Gringsing, Desa Tersono Kecamatan Tersono dan Desa Wonobodro Kecamatan Blado. Tujuan adanya lumbung pangan adalah untuk menopang ketahanan kebutuhan pangan di Kabupaten Batang. Luasan lahan padi di Desa Sidorejo sebesar 150 Hektar dari total di Kecamatan Gringsing yang mempunyai luas 1.275 Hektar.

Gambar 2. 143
Produktivitas Padi sawah dan Jagung (ton/ha) Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022



Sumber: Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2023

Produktivitas padi sawah per hektar dalam periode tahun 2018-2022 berfluktuasi meningkat, yaitu sebanyak 4,8 ton/ha pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,49 ton/ha pada tahun 2022. Sedangkan pada jagung, produktivitas jagung dari tahun 2018 sebesar 7,65 ton/ha terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 5,87 ton/ha. Menurunnya produktivitas pada jagung dikarenakan walaupun produksi jagung tahun 2022 cenderung meningkat namun pada produktivitas jagung menurun dipengaruhi oleh adanya puso ataupun bencana. Puso dan area panen terdampak bencana dalam perhitungan luas panen tetap menjadi pembagi pada perhitungan produktivitas sehingga disaat produksi naik belum tentu akan menaikkan produktivitas tanaman. Dalam hal ini berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi dan jagung terus dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, dilaksanakannya *Standard Operational Procedure Good Agricultural Practice* (SOP GAP), adanya bantuan alat mesin pertanian pra panen yaitu berupa Hand Sprayer, pompa air, cultivator, Hand Sprayer elektrik. Selain itu ada juga rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan besar untuk tanaman pangan, irigasi perpompaan untuk tanaman menengah, dan juga embung. Bantuan

Pupuk dan benih maupun biopestisida juga tidak lupa ikut andil dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi maupun jagung dan juga banyaknya bantuan benih jagung dan padi dari pemerintah.

Tabel 2. 61
Data Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022

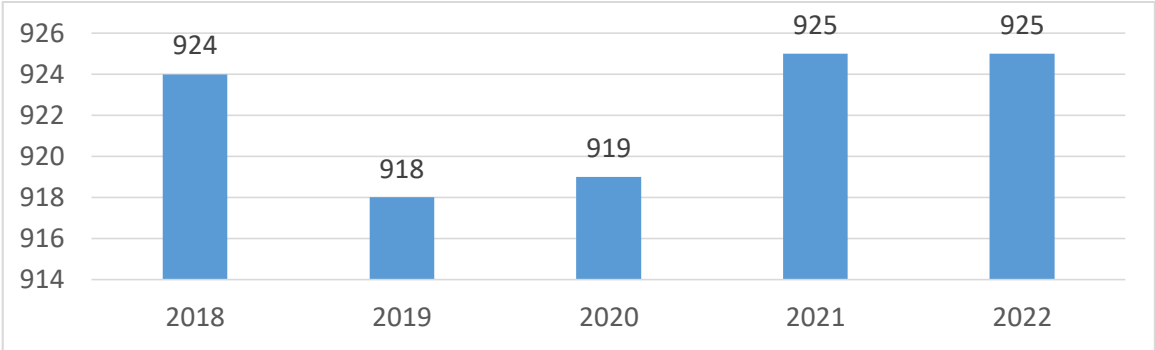
Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
TANAMAN PANGAN						
Padi	210.545	216.343	208.497	185.681	313.073	M2
Jagung	76.713	77.783	79.950	77.047	137.852	M2
Kedelai	1.132	1.382	33	57	72,5	M2
Kacang Tanah	570	635	473	191	125,5	Ton
Ubi Kayu	15.629	18.900	27.310	31	31	Ton
Ubi Jalar	5.830	9.720	9.675	22.639	22.639	Ton
Kacang Hijau	8	1	6	31	31	Ton
HORTIKULTURA						
Bawang Merah	4.989	3.214	3.682	8.580	7834	Kw
Bawang Daun	40.643	46.622	58.145	23.874	35755	Kw
Cabai Besar	29.496	27.851	24.571	12.862	5.313	Kw
Kentang	273.748	295.271	357.470	79.175	3.718	Kw
Kubis	32.014	51.720	18.675	9.037	7.994	Kw
durian	-	44.820	28.038	29.378	32.557	Kw
Mangga	56.168	44.405	69.593	55.477	37.579	Kw
nangka	107.542	103345	150.318	68.184	70.795	Kw
Pisang	191.795	168162	208.305	161.944	239.026	Kw
PERKEBUNAN						
Teh	1.784.106	1.489.244	1.493.803	1.498.694	1.445.493	Kg
Kakao	416.595	350.171	264.128	194.980	183.129	Kg
Kopi	748.650	764.459	789.182	811.296	701.473	Kg
Kapuk	214.427	120.743	106.834	80.565	54.388	Kg
Cengkeh	366.981	546.338	761.822	294.788	338.687	Kg

Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
Kelapa	1.552.571	1.068.619	581.497	10.119.906	990.206	Kg

Sumber : Dispaperta Kabupaten Batang 2023

Produksi tanaman pangan terbagi menjadi 3 jenis tanaman utama yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jenis tanaman pangan masih didominasi oleh komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Pada jenis tanaman hortikultura, meskipun mengalami penurunan, pisang masih menjadi komoditas dengan produksi tertinggi. Sementara pada jenis tanaman perkebunan, produksi tertinggi masih didominasi oleh 3 komoditas utama yaitu teh, kelapa, dan kopi. Capaian panen komoditas tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan cenderung fluktuatif dari tahun 2018-2022, hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya luas lahan dan luas panen dari masing masing komoditas.

Gambar 2. 144
Jumlah Kelompok Tani Binaan Kabupaten Batang



Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2023

Dalam meningkatkan kemandirian petani, pembentukan kelompok tani binaan sangat diperlukan agar mampu meningkatkan taraf hidup petani. Faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah kelompok tani binaan dipengaruhi oleh kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani binaan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian petani, penerapan inovasi dan menganalisa usaha tani yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup petani. Jumlah kelompok tani binaan, di tahun 2017 sebanyak 887 kelompok, meningkat menjadi 924 kelompok di tahun 2018, Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 918 kelompok ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang peran penting kelompok tani, sehingga

belum semua petani membentuk kelompok tani, dan mengalami kenaikan kembali sampai tahun 2022 menjadi 925 kelompok.

Selain itu di Kabupaten Batang terdapat Koperasi Komoditas Pertanian yaitu 1) Koperasi Pemasaran Tani Maju Jaya Batang (komoditas Edamame, Bawang Merah, Bawang Putih, Jahe Emprit, Jeruk Lemon), 2) Koperasi Pemasaran Pusaka Tani Sejahtera (komoditas Jagung, Kedelai, Padi, Ubi Jalar) , dan 3) Koperasi Pemasaran Kebun Berkah Makmur (komoditas Kakao, Nilam, Sereh Wangi)

Tabel 2. 62
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK	%	21,22	20,71	20,36	20,36	20,52
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB	%	16,8	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang, 2023

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK terus mengalami penurunan hingga tahun 2021, dimana pada tahun 2018 sebesar 23.09 persen terus menurun sampai dengan tahun 2021 menjadi 20,36 persen. Kemudian meningkat menjadi 20,52 persen di tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi, menurunnya luas lahan pertanian, pergeseran perilaku petani dan lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha lainnya. Dalam hal ini lapangan usaha lainnya yang berkontribusi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sedangkan kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB cenderung tetap. Adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri menyebabkan kontribusi sektor pertanian cenderung turun meskipun mungkin secara nilai naik.

Di sektor peternakan, produksi hasil peternakan khususnya daging dan telur cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel 2.63 sebagai berikut :

Tabel 2. 63
Produksi Peternakan Tahun 2018-2022

NO	INDIKAT OR	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Produksi Hasil Ternak							
1	- Daging	kg	11.016.000	11.591.450	12.807.003	12.893.125	17.099.906
2	- Telur	kg	8.792.644	11.922.803	14.585.205	14.585.205	14.089.530
3	- Susu	Lt	86.300	87.000	120.412	122.845	129.467
Konsumsi Protein							
1	- Daging	gr/kapit a/hr	6,57	6,91	7,63	7,83	10,41
2	- Telur	gr/kapit a/hr	3,73	5,05	6,17	6,78	6,10
3	- Susu	Lt/kapit a/hr	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

Sumber: Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Batang Tahun 2023

Produksi daging terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 11.016.000 kg menjadi sebesar 17.099.906 kg pada tahun 2022. Produksi telur juga terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 8.792.644 kg menjadi sebesar 14.089.530 kg pada tahun 2022. Sedangkan produksi susu cenderung meningkat, dari sebesar 86.300 liter pada tahun 2018 menjadi sebesar 129.467 liter pada tahun 2022. Peningkatan produksi daging dan telur diantaranya disebabkan karena kenaikan populasi hasil program upsus siwab, bantuan ternak dan bertambahnya jumlah peternak dan usahanya. Sedangkan untuk produksi susu juga mengalami kenaikan yang disebabkan karena penambahan produk susu kambing.

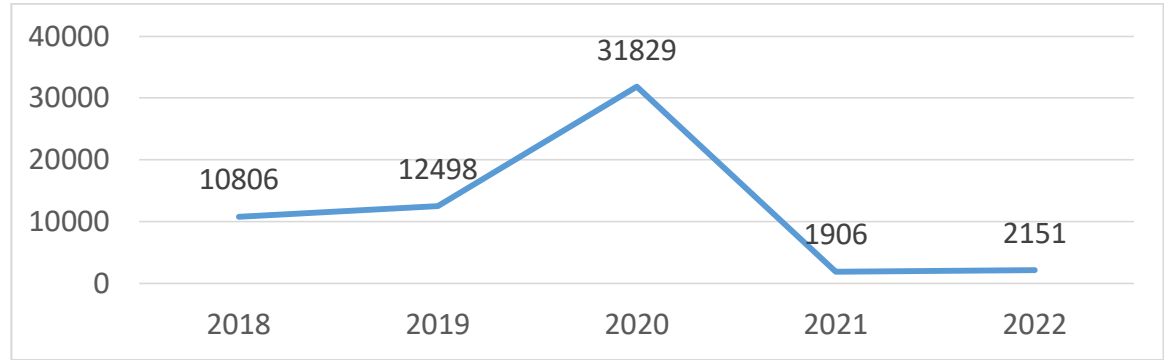
Untuk konsumsi protein berupa konsumsi gr/kapita/hari daging dan telur cenderung berfluktuasi. Konsumsi daging pada tahun 2018 sebesar 6,57 gr/kapita/hari meningkat menjadi 10,41 gr/kapita/hr di tahun 2022. Demikian juga dengan konsumsi telur, pada tahun 2018 sebesar 3,73 gr/kapita/hari menjadi 6,10 gr/kapita/hr pada tahun 2022. Sedangkan

konsumsi susu lt/kapita/hari periode empat tahun terakhir masih stagnan di angka 0,01 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 0,02 lt/Kapita/hari.

4. Perdagangan

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2017- 2021 dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Jumlah Izin Usaha Perdagangan (SIUP), revitalisasi pasar rakyat, Jumlah penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Batang, Ekspor Bersih Perdagangan serta Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK.

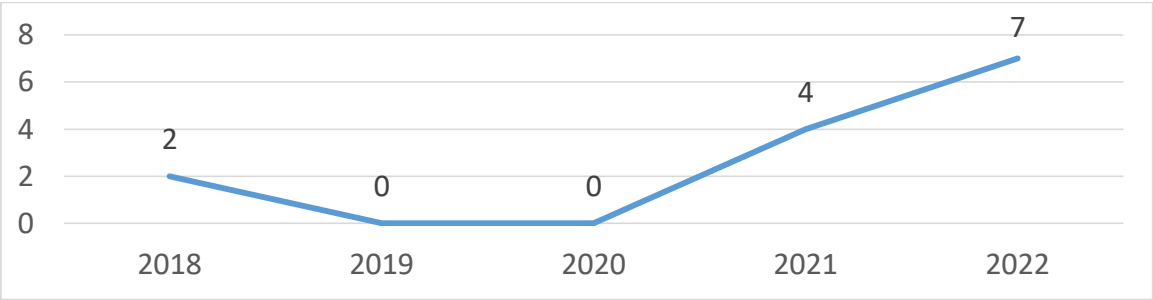
Gambar 2. 145
Jumlah Usaha Perdagangan Kecil Yang Memiliki SIUP
di Kabupaten Batang, Tahun 2016 - 2020 (unit)



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2023

Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki masyarakat meningkat jumlahnya dari tahun 2018-2020. Kemudian pada tahun 2021 dilakukan pendataan ulang oleh DPMPTSP menjadi sebanyak 1906 UMK yang meningkat kembali di tahun 2022 sebanyak 2151 UMK. Pendataan dan pendaftaran SIUP dilakukan melalui aplikasi oss.go.id.

Gambar 2. 146
Revitalisasi pasar rakyat Kabupaten Batang

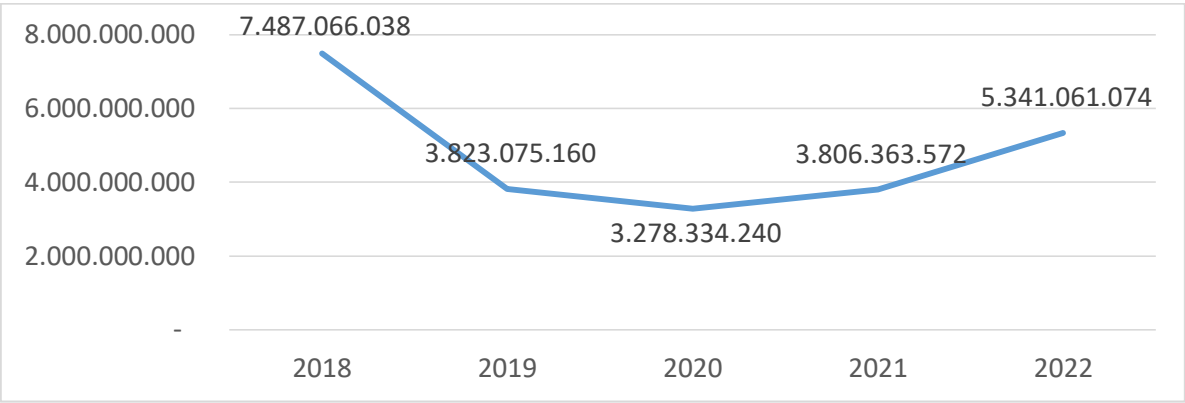


Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2023

Sedangkan revitalisasi pasar rakyat mengalami penurunan dalam periode 2018-2022, dari 2 pasar di tahun 2018 menjadi 0 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 terjadi 4 revitalisasi pasar dan meningkat menjadi 7 pasar yang direvitalisasi di Kabupaten Batang.

Terkait pusat aktivitas belanja online masyarakat Batang yang ada di Facebook, terdapat sekitar 70an usaha, jumlah ini masih berkembang lagi, karena pada wilayah kecamatan mempunyai beberapa komunitas pedagang online.

Gambar 2. 147
Jumlah penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2018-2022

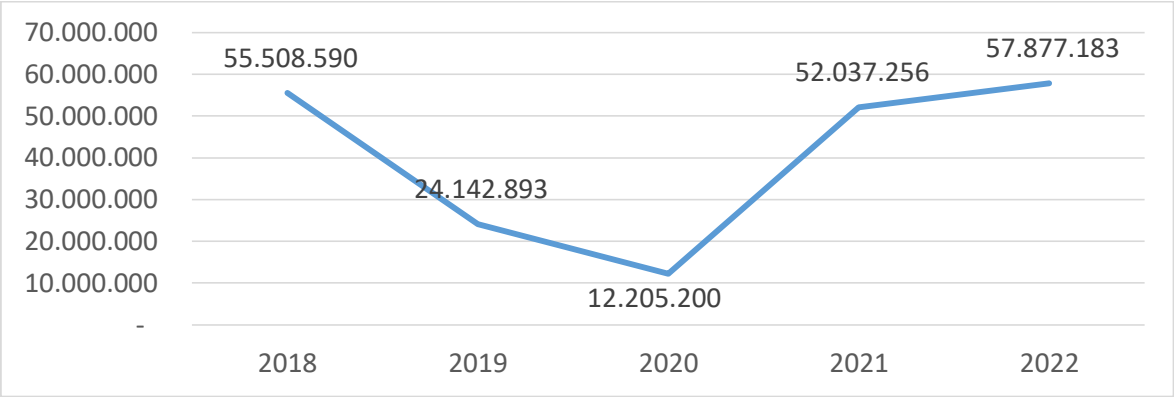


Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2023

Terlihat dalam tabel penerimaamn retribusi daerah oleh Disperindagkop, untuk jumlah penerimaan retribusi daerah dalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 sebesar Rp 7.487.066.038,00, namun hingga tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 3.278.334.240 dan kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 5.341.061.074.

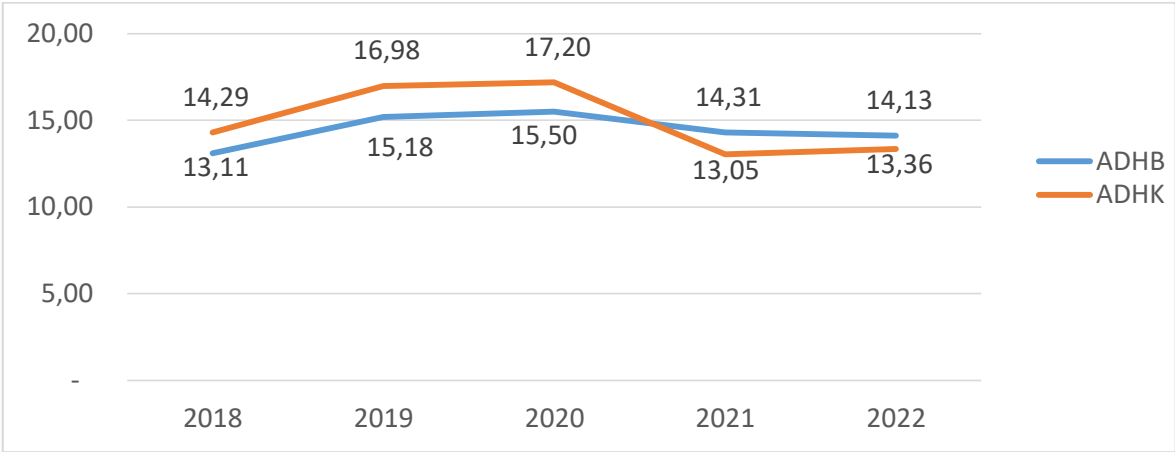
Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, tahun 2018 ekspor bersih Kabupaten Batang mencapai US\$ 55.508.590,25. Dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi US\$ 24.142.893 dan US\$ 12.205.200 di tahun 2020. Hingga tahun 2022 nilai ekspor bersih Kabupaten Batang kembali mengalami kenaikan menjadi US\$ 57.877.183.

Gambar 2. 148
Ekspor Bersih Perdagangan (US \$) Kabupaten Batang



Sumber: Disperindag Kabupaten Batang 2023

Gambar 2. 149
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK



Sumber: Disperindag Kabupaten Batang 2023

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB baik ADHB maupun ADHK fluktuatif dalam periode 2018-2022. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2018 sebesar 13,11 persen terus meningkat menjadi 14,13 persen di tahun 2022. Demikian juga dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK tahun 2018 sebesar 14,29 persen dan terus menurun menjadi 13,36 persen di tahun 2022. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan tersebut disebabkan dampak pandemi *Covid-19* yang berimplikasi pada menurunnya permintaan, serta terganggunya distribusi karena pembatasan aktivitas sosial.

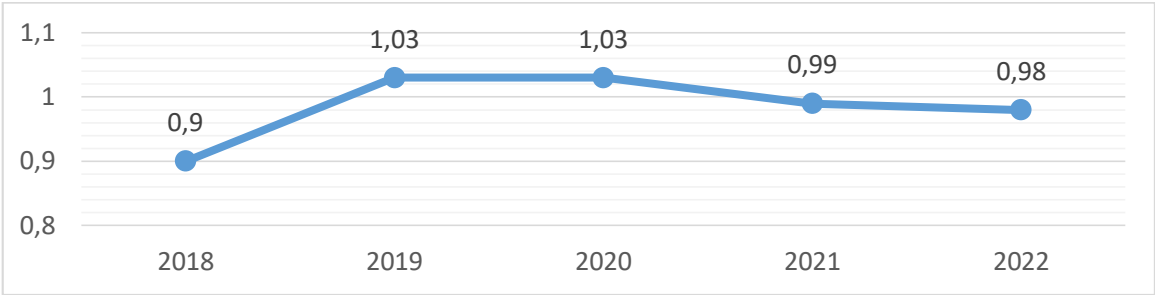
5. Perindustrian

Tabel 2. 64
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Batang Tahun 2016-2020

Kelompok Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
	2022	2022
A. Hasil Pertanian dan Kehutanan	8.163	23.112
B. Industri Aneka	320	1.823
C. Logam, Mesin dan Kimia	742	1.590

Sumber : Disnaker, 2021

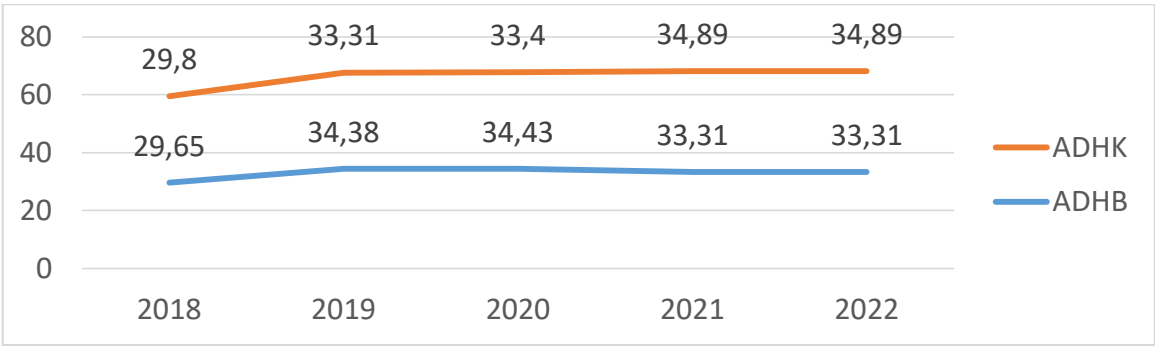
Gambar 2. 150
Pertumbuhan Industri Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2023

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kabupaten Batang pada tahun 2018-2022 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Urusan Perindustrian. Pertumbuhan industri di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir, pada tahun 2018 sebesar 0.90 persen menjadi 0,98 persen pada tahun 2022 yang didominasi oleh kelompok industri hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 8.163 unit usaha dan 23.112 tenaga kerja. Pertumbuhan Industri ini tak akan mempengaruhi kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (ADHB) dan (ADHK) seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Gambar 2. 151
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2023

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir, yaitu sebesar 39,65 persen pada tahun 2018 menjadi 33,31 persen pada tahun 2022. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHK berfluktuasi meningkat dalam periode tahun 2018-2022 yaitu dari sebesar 29,80 persen pada tahun 2018 menjadi 34,89 persen pada tahun 2022.

6. Transmigrasi

Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan". Tujuan resmi program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain luar pulau Jawa. Perkembangan pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Batang ke daerah transmigran selama tahun 2018-2022 fluktuatif, dari tahun 2018 sebanyak 4 KK, mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 5 KK. Tahun 2020 - 2022 capaian sebesar 0 karena transmigrasi ditiadakan secara nasional. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi.

Tabel 2. 65
Jumlah KK yang mengikuti Transmigrasi
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	8
1	Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi	KK	4	5	0	0	0

Sumber: Disnaker Kabupaten Batang, 2023

c. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2. 66
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan
Tahun 2018- 2022

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	6	7	8		
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	97	100	100	100	100
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	97	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	6	7	8		
3	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	87	90	90	90	100

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Batang, 2023

Kinerja fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2018- 2022 relatif baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD maupun ke dalam APBD terus mengalami peningkatan, dari 97 persen di tahun 2018 menjadi sebesar 100 persen di tahun 2022. Disamping itu juga peran serta masyarakat yang relatif tinggi dalam pelaksanaan musrenbang, dimana tingkat kehadirannya dalam periode lima tahun terakhir terus meningkat, dari sebesar 87 persen di tahun 2018 menjadi 100 persen di tahun 2022.

2. Keuangan

Tabel 2. 67
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2018- 2022

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan PAD	%	8,07	6,00	4,70	25,302	-6,77
2	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	00	0
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	85,53	82,05	85,4	95,2	91,03
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	84,68	77,26	75,84	90,7	84,30

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2022

Kinerja fungsi Penunjang Keuangan selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Fungsi Penunjang Keuangan dimana persentase peningkatan PAD selama rentang tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif hingga mencapai minus 6,77 ditahun 2022. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 selain itu adanya pelimpahan kewenangan pajak daerah yang dilimpahkan ke Provinsi, objek pajak yang berkurang, serta terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya.

Pada indikator persentase belanja pendidikan guna memenuhi *mandatory spending* sebesar 20 persen realisasi tahun 2022 sebesar 91,03 persen

sedangkan pada indikator persentase belanja kesehatan guna memenuhi *mandatory spending* sebesar 10 persen realisasi tahun 2022 sebesar 84,30 persen.

3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memiliki peran penting ialah sumber daya aparturnya. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan komitmen dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang siap menjadi abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan. dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 2. 68
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018- 2022

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase akurasi data kepegawaian	%	100	100	92,37	95	90
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	85	85	90	55	162,50
3	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim	PNS	4	4	0	6	4

Sumber: BKD Kabupaten Batang, 2023

Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari capaian persentase akurasi data kepegawaian, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, serta persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Persentase akurasi data kepegawaian relatif stabil pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 100% persen, kemudian menurun menjadi 90 persen di tahun 2022.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dalam periode lima tahun terakhir fluktuatif, dari 85 persen di tahun 2018 menjadi 162,50 persen di tahun 2022. Capaian tahun 2022 melebihi dari

100 persen dikarenakan jumlah ASN yang mengikuti diklat melebihi dari target yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

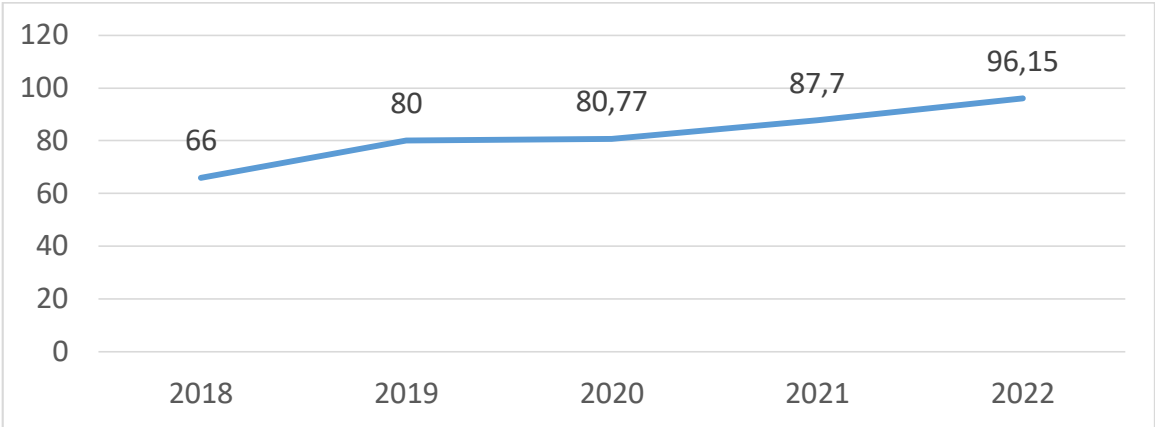
4. Penelitian dan pengembangan

Pada pasal 209 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan penelitian dan pengembangan. Dalam pasal 373, pasal 374 dan pasal 388 disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembinaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Badan Perencana dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sebagai fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Kinerja fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2018-2022 realisasinya cenderung naik. Hal ini dapat diketahui dari capaian indikator yang ada berupa persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase OPD inovatif dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan capaiannya tetap dalam periode tahun 2018-2022, disebabkan sulitnya penghitungan pemanfaatan hasil kelitbangan di masyarakat sehingga penghitungan baru pada lingkup Perangkat Daerah saja.

Persentase OPD inovatif terus meningkat selama periode 2018-2022, dari sebesar 66 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 96,15 persen pada tahun 2022. Fasilitasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembangkan inovasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 2. 152
Persentase OPD Inovatif Kabupaten Batang Tahun 2018-2022



Sumber: BapelitbangKabupaten Batang Tahun 2023

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, terutama tuntutan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu adanya dorongan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan inovasi sebagai acuan/*roadmap* sistem inovasi daerah.

Tabel 2. 69
Realisasi Capaian IID (Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2021

TAHUN	PERINGKAT	NILAI	KETERANGAN
2019	127	650	Tingkat Nasional / Inovatif
2020	58	2.952	Tingkat Nasional / Sangat Inovatif
2021	127	46,84	Tingkat Nasional / Inovatif

Sumber Bidang Litbang Bapelitbang, 2021

Catatan: pada tahun 2021 mekanisme penilaian diubah dengan mengutamakan kematangan inovasi bukan jumlah/kuantitas inovasi daerah. Kematangan inovasi diperoleh dari data dukung tiap inovasi daerah baik berupa regulasi, dokumentasi dan manfaat inovasi daerah

5. Pengawasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelesaian LHP sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2018 sebesar 100 persen penyelesaian tindak lanjut LHP, kemudian pada tahun 2022 hanya 90 persen penyelesaian tindak lanjut LHP. Diharapkan capaian ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Meningkatnya kinerja

pengawasan juga ditunjukkan oleh predikat WTP atas laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir dengan semua temuan dari BPK-RI sudah ditindaklanjuti dengan baik.

Tabel 2. 70
Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut LHP	%	100	80	100	91,69	90,00
2	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Temuan BPK-RI yang sudah ditindak lanjuti	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang, 2023

6. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) perumusan kebijakan teknis dan administratif oleh Perangkat Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; 3) pembinaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah; 5) pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2018-2022 secara keseluruhan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Sekretariat Daerah yang selengkapny diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 71
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PD yang melakukan KAD	%	68,25	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan KUR	UMKM	25	25	35	20	0
3	Penguatan komunikasi informasi kepada organisasi pemerintah daerah	%	20	20	24,73	25	25
4	Kerjasama dalam penyebarluasan berita melalui media massa cetak, elektronik, dan online	%	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang telah memiliki SPP dan SOP	%	75	85	85	85,14	100
6	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	75,03	76,29	75,33	76,71	75,06

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 2023

7. Sekretariat Dewan

Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Batang selama kurun waktu dilihat dari Prosentase SDM yang mengikuti bintek/ Sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se Indonesia tahun 2018-2022 secara umum sudah baik meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 27,3 persen karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, namun terdapat perbaikan di tahun 2022 menjadi 100 persen. Demikian juga persentase anggota DPR yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas lembaga DPRD juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya *refocusing* anggaran, dari tahun 2018 dengan angka 100% turun menjadi 60% pada 2020 namun naik kembali di tahun 2021 menjadi 97,78% dan meningkat kembali menjadi 100 persen di tahun 2022. Indikator banyaknya promperda mengalami fluktuasi selama 5 tahun. Kondisi Penurunan indikator ini disebabkan oleh berapa jumlah OPD untuk mengajukan Raperda. Dalam perjalanannya, raperda tersebut melalui beberapa proses dan tahapan yang pada akhirnya raperda hanya sampai dengan draft raperda, namun harapannya adalah menjadi perda.

Kinerja Penunjang Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 72
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase SDM yang mengikuti bintek / Sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se Indonesia	%	100	100	27,3	90,91	100
2	Prosentase anggota DPRD yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	100	100	60	97,78	100
3	Banyaknya Promperda	Perda	3	13	11	8	4

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, 2023

2.1.5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

1. Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan

Tabel 2. 73
Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2018-2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	81,58	81,61	82,05	82,05	82,98
		Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	37,03	45,65	45,65	56,21	56,21

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	81,56	93,55	93,55	95,00	95,00
		Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	35,6	46,77	46,77	75	75
2	Pendidikan dasar	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	100	100	100	107,31	107,31
		Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	94,89	95,58	95,58	97,91	97,91
		Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	97,41	97,52	97,52	97,68	97,68
		Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	81,1	81,62	81,62	81,92	81,92
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	95,1	95,84	95,84	98,97	98,97
		Prosentase Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	72,17	78,3	78,3	85,50	95,00

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Prosentase Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik	87,19	81,4	81,4	86	86
		Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	100	94,32	94,32	100	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	99,8	99,86	99,86	100	100
		Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	38,09	40	40	56,52	56,52

2. Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan

Tabel 2. 74

Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan tahun 2018-2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	92,65	93,39	96,43	93,64	94,83

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
		antenatal sesuai standar					
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	98,19	99,16	99,49	99,60	99,78
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	99,23	99,39	99,39	99,30	99,36
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	81,99	88,32	72,58	80,01	92,51
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	97,58	100,00	31,92	47,79	98,81
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	55,08	67,25	58,94	62,04	81,34
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	62,82	73,02	41,41	64,09	90,81
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53,10	48,08	41,04	34,76	55,59

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,48	85,09	93,26	94,70	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	100,00	96,03	82,11	90,61
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	55,69	64,93	45,32	38,88	93,39
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	85,42	92,17	78,68	103,58	100

3. Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berikut capaian kinerja SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2018-2022. Untuk lengkapnya tersaji sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 75
Capaian Spm Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
			%	%	%	%	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	NA	NA	86,31	83,13	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	NA	NA	84,92	85,69	100
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	NA	NA	100	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	NA	NA	100	0	0

4. Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman dan ketertiban umum

Capaian kinerja SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021 dan 2022 rata rata mencapai 100 persen. Untuk lengkapnya tersaji sebagaimana pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 76
Capaian Spm Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO	JENIS LAYANAN SPM	Indikator	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
			%	%	%	%	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	NA	NA	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN SPM	Indikator	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		perda dan perkada Kabupaten/Kota					
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	NA	NA	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	NA	NA	3,99	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	NA	NA	9,42	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	NA	NA	100	100	100

SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencakup 2 (dua) layanan, yaitu:

- a) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (capaian sudah 100% pada tahun 2022)
- b) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (capaian 80,48% pada Tahun 2022)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target 100% pada SPM Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah belum memadainya jumlah pos/unit damkar di Kabupaten Batang. Jumlah pos/unit damkar yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat Kabupaten Batang di bidang Damkar sebanyak 5 pos/unit, sedangkan saat ini baru tersedia 3 pos/unit yang berada di 1) Kantor Damkar Kabupaten Batang, 2) Kantor Kecamatan Bandar, dan 3) Kantor Kecamatan Limpung.

5. Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial

Berikut capaian kinerja SPM bidang Sosial pada tahun 2018-2022. Untuk lengkapnya tersaji sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 77
Capaian SPM Urusan Sosial dari Tahun 2017-2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	NA	NA	3,14	25,14	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	NA	NA	1,03	58,33	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	NA	NA	86,39	0	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	NA	NA	21,7	85	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	NA	NA	100	100	100

2.2 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Batang diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2022, dari 570 indikator program pembangunan daerah, sebanyak 369 indikator (64,74 persen) berstatus sangat tinggi; 60 indikator (10,53 persen) berstatus tinggi; 18 indikator (3,16 persen) berstatus sedang; 8 indikator (1,40 persen) berstatus rendah; dan 115 indikator (20,18 persen) berstatus sangat rendah.

Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 78
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan
Kabupaten Batang Terhadap Target RPJMD Tahun 2018-2022

No	Status Pencapaian Indikator	Tahun 2022	
		Jumlah Indikator	Persentase
1.	Sangat Tinggi	369	64,74
2.	Tinggi	60	10,53
3.	Sedang	18	3,16
4.	Rendah	8	1,40
5.	Sangat Rendah	115	20,18
Jumlah		570	100

Dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	ST
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	T
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang	S
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah	R
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	SR

Tabel 2. 79
Rata- Rata Realisasi Capaian Kinerja terhadap RKPD dan RPJMD
Tahun 2022

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	
	Realisasi terhadap RPJMD	Tingkat capaian
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
Pendidikan	94,61	Sangat Tinggi
Kesehatan	510,17	Sangat Tinggi
Dinkes	75,26	Tinggi
RSUD Batang	401,09	Sangat Tinggi
RSUD Limpung	1054,17	Sangat Tinggi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94,13	Sangat Tinggi
Perumahan dan Permukiman	175,80	Sangat Tinggi
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	83,27	Tinggi
- Satpol PP	87,57	Tinggi
- BPBD	78,96	Tinggi
Sosial	114,62	Sangat Tinggi
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja	235,46	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	74,55	Sedang
Pangan	93,25	Sangat Tinggi
Pertanahan	170,30	Sangat Tinggi
Lingkungan Hidup	98,49	Sangat Tinggi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,29	Tinggi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89,98	Tinggi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	221,60	Sangat Tinggi

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	
	Realisasi terhadap RPJMD	Tingkat capaian
Perhubungan	63,89	Rendah
Komunikasi dan Informatika	100,25	Sangat Tinggi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	77,13	Tinggi
Penanaman Modal	559,98	Sangat Tinggi
Kepemudaan dan Olahraga	96,99	Sangat Tinggi
Statistik	33,33	Sangat Rendah
Persandian	100,00	Sangat Tinggi
Kebudayaan	79,68	Tinggi
Kearsipan	293,39	Sangat Tinggi
Perpustakaan	72,28	Sedang
Urusan Pilihan		
Transmigrasi	0	Sangat Rendah
Kelautan dan Perikanan	81,47	Tinggi
Pertanian	99,62	Sangat Tinggi
- Dispaperta	72,84	Sedang
- Dislutkannak	126,41	Sangat Tinggi
Pariwisata	148,68	Sangat Tinggi
Perindustrian	116,41	Sangat Tinggi
Perdagangan	112,69	Sangat Tinggi
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
Perencanaan	75,38	Tinggi
Keuangan	97,00	Sangat Tinggi
Penelitian dan Pengembangan	101,64	Sangat Tinggi
Pendidikan dan Pelatihan	61,58	Rendah
Kepegawaian	110,48	Sangat Tinggi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
Sekretariat Daerah	72,69	Sedang
Sekretariat DPRD	87,50	Tinggi
Unsur Pengawasan		
Pengawasan	105,92	Sangat Tinggi
Unsur Pemerintahan Umum		

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	
	Realisasi terhadap RPJMD	Tingkat capaian
Kesatuan Bangsa dan Politik	102,22	Sangat Tinggi
Kewilayahan		
Kecamatan Batang	92,86	Sangat Tinggi
Kecamatan Warungasem	97,29	Sangat Tinggi
Kecamatan Pecalungan	87,43	Tinggi
Kecamatan Wonotunggal	100,00	Sangat Tinggi
Kecamatan Bandar	85,71	Tinggi
Kecamatan Tersono	98,57	Sangat Tinggi
Kecamatan Blado	94,14	Sangat Tinggi
Kecamatan Tulis	91,14	Sangat Tinggi
Kecamatan Banyuputih	95,71	Sangat Tinggi
Kecamatan Kandeman	100,00	Sangat Tinggi
Kecamatan Limpung	100,00	Sangat Tinggi
Kecamatan Subah	42,86	Sangat Rendah
Kecamatan Reban	98,57	Sangat Tinggi
Kecamatan Bawang	93,57	Sangat Tinggi
Kecamatan Gringsing	95,00	Sangat Tinggi

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**a. Urusan Pendidikan****Tabel 2. 80 Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Pengampu
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengelolaan Pendidikan							
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03	12,13	12,14	93,17	ST	Disdikbud
Angka Lulusan SD/Sederajat	%	100	100	100,00	100,00	ST	Disdikbud
Angka Lulusan SMP/Sederajat	%	100	100	100,00	100,00	ST	Disdikbud
Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	100,00	98,97	98,97	98,97	ST	Disdikbud
Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Disdikbud
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	%	82,00	82,3	82,30	100,37	ST	Disdikbud
Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	%	105,00	107,31	107,31	102,20	ST	Disdikbud
Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	%	96,00	97,68	97,68	101,75	ST	Disdikbud
Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	%	96,50	97,91	97,91	101,46	ST	Disdikbud
Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	%	81,50	81,92	81,92	100,52	ST	Disdikbud
Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	%	0,01	0,020	0,02	200,00	ST	Disdikbud
Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	%	0,05	0,059	0,06	118,00	ST	Disdikbud
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,86	6,88	6,90	100,58	ST	Disdikbud
Prosentase jumlah satuan pendidikan anak	%	70,00	75	75,00	107,14	ST	Disdikbud

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Pengampu
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan							
Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	%	90,00	95	95,00	105,56	ST	Disdikbud
Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	%	60,00	56,21	56,21	93,68	ST	Disdikbud
Prosentase Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	%	90,00	85,5	85,50	95,00	ST	Disdikbud
Prosentase Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan,	%	90,00	86	86,00	95,56	ST	Disdikbud

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Pengampu
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik							
Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	%	90,00	100	100,00	111,11	ST	Disdikbud
Prosentase Program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	%	45,00	56,52	56,52	125,60	ST	Disdikbud
Rata-Rata Nilai Ujian SD/Sedrajat	%	7,50	0	0,00	0,00	SR	Disdikbud
Rata-Rata Nilai Ujian SMP/Sederajat	%	7,25	0	0,00	0,00	SR	Disdikbud
Jumlah Kegiatan manajemen pelayanan pendidikan yang diselenggarakan melibatkan kerjasama dan peran serta masyarakat	Kegiatan	9,00	10	10,00	111,11	ST	Disdikbud
Program Pengembangan Kurikulum							
Prosentase Sekolah menerapkan pengembangan kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan		100	100	100,00	100,00	ST	Disdikbud
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan							
Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	90,67	90,11	90,11	99,38	ST	Disdikbud
Prosentase Guru yang	%	93,33	91,25	91,25	97,77	ST	Disdikbud

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Pengampu
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi							
Prosentase Guru Non PNS yang mendapatkan penghasilan melebihi UMK	%	75,00	67,51	67,51	90,01	ST	Disdikbud
Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru	0	8,00	0	0,00	0,00	SR	Disdikbud
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					94,61		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan pendidikan sebesar 94,61 dengan predikat sangat tinggi yang terdiri dari 28 indikator kinerja program diantaranya 25 indikator berstatus sangat tinggi dan 3 indikator berstatus sangat rendah. Capaian sangat rendah disebabkan oleh indikator rata rata nilai ujian SD, SMP hingga uji kompetensi guru yang mana sudah ditiadakannya ujian bagi murid sekolah hingga uji kompetensi guru.

b. Urusan Kesehatan**Tabel 2. 81 Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kesehatan							
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1.000 kelahiran hidup	15,10	10,94	10,91	72,28	S	Bidang kesmas
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	12,00	10,11	9,51	79,22	T	Bidang kesmas
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	86,28	273,43	105,62	122,42	ST	Bidang kesmas
Angka Kematian kasar pasien setelah perawatan di RS (Gross Death Rate/GDR)	Per 1.000 pasien keluar	25,45		0,00	0,00	SR	
Angka Kematian pasien yg meninggal >48 jam setelah perawatan di RS (Net Death Rate/NDR)	Per 1.000 pasien keluar	13,00		0,00	0,00	SR	
Angka Kematian pasien yg meninggal >48 jam setelah perawatan di RS (Net Death Rate/NDR)	Per 1.000 pasien keluar	13,00		0,00	0,00	SR	
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	42,00	3,12	45,42	108,15	ST	Bidang P2P
Angka Kesakitan Malaria	Per 1.000 penduduk	0,01	0	0,00	36,63	SR	Bidang P2P
Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +	%	89,50	84,4	84,35	94,25	ST	Bidang P2P

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKP		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Penemuan Kasus Kusta Baru	Per 100.000 penduduk	8,00	3,63	4,15	51,89	R	Bidang P2P
Angka usia Harapan Hidup	Th	75,00	74,74	74,79	99,72	ST	Semua Bidang
cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas	%	1,50	1,17	0,58	38,99	SR	Bidang Yankes
Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas	%	75,00	63,95	63,79	85,06	T	Bidang Yankes
Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB	Per 100.000 penduduk	109,00	87,88	140,17	128,60	ST	Bidang P2P
Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100,00	94,96	100,00	100,00	ST	UPTD IFK
Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100,00	100	9,09	9,09	SR	UPTD IFK
Ketersediaan Jenis obat esensial	%	100,00	80	87,74	87,74	T	UPTD IFK
Ketersediaan Jenis obat generik	%	100,00	74	73,03	73,03	S	UPTD IFK
Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100,00	100	0,00	0,00	SR	UPTD IFK
Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100,00	100	0,00	0,00	SR	UPTD IFK
Ketersediaan Jumlah obat esensial	%	100,00	100	72,04	72,04	S	UPTD IFK
Ketersediaan Jumlah obat generik	%	100,00	78	66,16	66,16	S	UPTD IFK
Masyarakat miskin yang mempunyai	%	100	100	91,59	91,59	ST	Bidang Yankes

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKP		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
jaminan pelayanan kesehatan							
Persentase Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	%	8,00	10,77	11,18	139,77	ST	Bidang Kesmas
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	80,01	92,51	92,51	ST	Bidang Kesmas
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	47,79	98,81	98,81	ST	Bidang Kesmas
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	99,3	99,36	99,36	ST	Bidang Kesmas
Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	5,00	5,24	4,90	98,05	ST	Bidang Kesmas
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	99,6	99,78	99,78	ST	Bidang Kesmas
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	100,00	93,63	94,83	94,83	ST	Bidang Kesmas
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	103,58	100,00	100,00	ST	Bidang P2P
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	82,11	90,61	90,61	ST	Bidang P2P
Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100,00	38,88	93,39	93,39	ST	Bidang P2P

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
mendapatkan pelayanan TB sesuai standar							
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	34,76	55,59	55,59	R	Bidang P2P
Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	94,7	100,00	100,00	ST	Bidang P2P
Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bidang Yankes
Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	70,00	57,9	60,52	86,46	T	Bidang Kesmas
Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan	%	82,00	70,49	75,28	91,80	ST	Bidang Kesmas
Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	62,04	81,34	81,34	T	Bidang P2P
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	64,09	90,81	90,81	ST	Bidang Kesmas
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0	0,16	0,21	0,20	126,14	ST	Bidang Kesmas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							
Presentase tenaga kesehatan yang berijin			98,97	99,02	98,54	ST	Bidang Yankes

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman							
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	61,00	71,73	72,69	119,16	ST	Bidang Yankes
Presentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan			67,1	71,78	68,10	S	Bidang Kesmas
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							
Cakupan Desa Sisga Aktif Strata Mandiri	%	16,10	8,06	15,32	95,17	ST	Bidang Kesmas
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					75,26		
Predikat Kinerja					Tinggi		
Urusan Kesehatan							
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Peningkatan Cakupan Kunjungan Rawat Inap	%	3,00	-4,97	26,42	880,67	ST	RSUD Batang
Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan	%	10,00	-9,51	52,86	528,60	ST	RSUD Batang
Kepuasan Pelanggan di Rawat Jalan	%	95,00	98,6	87,99	92,62	ST	RSUD Batang
Kepuasan Pelanggan di Rawat Inap	%	95,50	98,57	97,88	102,49	ST	RSUD Batang
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					401,09		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		
Urusan Kesehatan							
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Peningkatan Cakupan Kunjungan Rawat Inap	%	3,00	2,51	71,12	2370,67	ST	RSUD LIMPUNG
Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan	%	10,00	-16,76	107,67	1076,70	ST	RSUD LIMPUNG
Kepuasan Pelanggan di Rawat Jalan	%	95,00	98	367,90	387,26	ST	RSUD Limpung
Kepuasan Pelanggan di Rawat Inap	%	95,50	90	364,84	382,03	ST	RSUD Limpung
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					1054,17		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kesehatan sebesar **212,43 dengan** predikat sangat tinggi yang terdiri dari Dinas Kesehatan dengan rata rata capaian sebesar 75,26 (tinggi), RSUD Batang dengan rata rata capaian sebesar 401,09 (sangat tinggi), dan RSUD Limpung dengan rata rata capaian sebesar 1054,17 (sangat tinggi).

Urusan Kesehatan di Kabupaten Batang diampu oleh 3 SKPD yang terdiri dari 53 indikator dengan dengan 33 indikator berstatus sangat tinggi, 5 indikator berstatus tinggi, 5 indikator berstatus sedang, 2 indikator berstatus rendah, dan 8 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian sangat rendah pada urusan kesehatan ini disebabkan karena belum optimalnya penanganan kasus balita gizi buruk, hipertensi, hingga malaria dan tingkat ketersediaan obat dan perbekalan masih cukup rendah.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 82
Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							
Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku (irigasi, domestik, industri)	%	8,33	0	0,00	0,00	SR	PSDA Provinsi
Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	75,25	57,44	62,12	82,55	T	DPUPR, Bidang Pengairan
Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku (irigasi, domestik, industri)	%	8,33	0	0,00	0,00	SR	PSDA Provinsi
Program Penataan Bangunan Gedung							
Persentase Gedung negara kondisi baik	%	75	77	88,65	118,20	ST	DPUPR, Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan
Program Penyelenggaraan Jalan							
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	85,16	79,41	85,57	100,48	ST	DPUPR, Bidang Praarana Jalan dan Jembatan
Persentase panjang talud dalam kondisi baik	%	41,98	0	41,00	97,67	ST	DPUPR, Bidang Praarana Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Rasio alat berat terhadap panjang jalan	%	61,67	30,47	30,97	50,22	R	DPUPR, Bidang Praarana Jalan dan Jembatan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	72,73	72,15	72,15	S	DPUPR, Bidang Penataan Ruang
Rasio dokumen rencana rinci tata ruang yang sudah tersusun dan tersosialisasikan	%	13,00	7	13,00	100,00	ST	DPUPR, Bidang Penataan Ruang
Rasio dokumen dan koordinasi dilapangan terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan	%	19,50	44	64,00	328,21	ST	DPUPR, Bidang Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							
Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	29,23	0,75	25,13	85,97	T	DPUPR, Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					94,13		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan PUPR sebesar 94,13 (sangat tinggi) yang terdiri dari 11 indikator dengan status ketercapaian antara lain 5 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, 1 indikator terstatus sedang, 1 indikator berstatus rendah dan 2 indikator berstatus sangat rendah. Indikator dengan status capaian rendah dan sangat rendah ini disebabkan karena beberapa indikator sudah menjadi kewenangan

dari Provinsi seperti pengelolaan air baku serta indikator rasio alat berat terhadap panjang jalan, hal ini disebabkan karena ketersediaan jumlah alat berat sangat minim sedangkan alat berat milik DPUPR digunakan dipekerjaan jalan Desa dan Pekerjaan pemeliharaan di UPTD DPUPR.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2. 83 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW III 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW II 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	TW III 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
Program Pengembangan Perumahan							
Persentase rumah layak huni	%	78,00	78,62	316,46	405,72	ST	DPR KP, bidang perumahan
Persentase rumah sehat	%	100,00	78,62	316,46	316,46	ST	DPR KP, bidang perumahan
Persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak	%	80,00	61,24	257,81	322,26	ST	DPR KP, bidang permukiman
Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan perumahan	%	77,00	80,48	322,72	419,12	ST	DPRKP, bidang permukiman
Terkendalinya pembangunan perumahan	%	100,00		0,00	0,00	SR	DPRKP, bidang perumahan
Persentase penambahan perumahan formal	%	10,00	8,31	35,01	350,10	ST	DPRKP, bidang perumahan
Tersedianya data base perumahan	Buku	1	1	0,00	0,00	SR	DPRKP, bidang perumahan
Program Kawasan Permukiman							
Tersusunnya Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman	Naskah	1	0	0,00	0,00	SR	
Lingkungan Pemukiman bebas kumuh	%		0	0,00	0,00	SR	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW III 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW II 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	TW III 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Sistem Penyediaan Air Minum							
Cakupan layanan akses air minum perumahan	%	84,00	84,12	339,61	404,30	ST	DPRKP, bidang permukiman
Jumlah rumah tangga pengguna air minum/air bersih di perdesaaan	%	0	0	0,00	0,00	SR	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah							
Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan perumahan	%	77,00	80,48	322,72	419,12	ST	DPRKP, bidang permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh							
Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	%	100,00	62,78	265,63	265,63	ST	DPRKP, bidang perumahan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)							
Persentase makam dalam kondisi baik	%	18,00	10	0,00	0,00	SR	
Persentase taman dalam kondisi baik	%	100,00	65	261,77	261,77	ST	
Taman dan RTH yang terbangun, tertata dan terpelihara	Per 1.000	0	0	0,00	0,00	SR	
Areal pemakaman yang terkelola/tertata	%	90	0	0,00	0,00	SR	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							
Drainase lingkungan di 9 kel. dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	0	0	0,00	0,00	SR	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					175,80		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber: DPRKP Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tahun 2022, rata-rata tingkat capaian

kinerja urusan PRKP sebesar 175,80 (sangat tinggi) yang terdiri dari 18 indikator dengan status ketercapaian antara lain 9 indikator berstatus sangat tinggi dan 9 indikator berstatus sangat rendah. Indikator dengan status capaian sangat rendah ini disebabkan karena indikator Terkendalinya pembangunan perumahan, Tersedianya data base perumahan, Jumlah rumah tangga pengguna air minum/air bersih di perdesaaan, Persentase makam dalam kondisi baik, Taman dan RTH yang terbangun, tertata dan terpelihara, dan Areal pemakaman yang terkelola/tertata dan Drainase lingkungan di 9 kel. dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat kegiatannya tidak dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga capaian hingga TW IV Tahun 2022 sebesar 0%.

e. Urusan Sosial

Tabel 2. 84 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
Program Pemberdayaan Sosial							
Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	70	90,34	90,34	129,06	ST	
Jumah Rumah tangga miskin yang di validasi program penanggulangan kemiskinan	Rumah Tangga	489.943	158.678	506.574	103,39	ST	
Rumah Tangga Miskin yang mengikuti program penanggulangan kemiskinan	%	50	81	70,12	140,24	ST	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan							
Jumlah warga negara migran yang Berhasil Diberikan Perlindungan	Orang	4	0	0,00	0,00	SR	

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
Program Rehabilitasi Sosial							
Jumlah PMKS yang di rehabilitasi	Orang	70	23	77,00	110,00	ST	
Jumlah PMKS yang diberdayakan	Orang	35	73	95,00	271,43	ST	
PMKS yang berhasil direhabilitasi	%	70	23,96	65,00	92,86	ST	
PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	%	70	70	90,00	128,57	ST	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial							
Rumah Tangga Miskin yang Mengikuti Program Penanggulangan Kemiskinan				70,12	140,24	ST	
Program Penanganan Bencana							
Jumlah Korban Bencana Alam Yang diberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar	orang	200	32	90,00	45,00	SR	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan							
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	100	100	100,00	100,00	ST	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					114,62		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sosial tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan sosial sebesar 114,62 (sangat tinggi) yang terdiri dari 11 indikator dengan status ketercapaian

antara lain 9 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus sangat rendah. Indikator dengan status capaian sangat rendah ini disebabkan karena minimnya warga Negara migran yang meminta perlindungan kepada pemerintah Kabupaten Batang dan indikator Jumlah Korban Bencana Alam Yang diberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 85 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

[illegible]

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penanggulangan Bencana							
Persentase ketersediaan peta Resiko bencana	%	100	100	100,00	100,00	ST	BPBD
Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan DALA (damage, losses)	Orang	30	0	30,00	100,00	ST	BPBD
Persentase Masyarakat dan Relawan PB yang terlatih	%	45	0	34,08	75,74	T	BPBD
Persentase penanganan bencana	%	100	100	100,00	100,00	ST	BPBD
Rasio peningkatan kemampuan kebencanaan di daerah rawan bencana	%	15	3	4,48	29,85	SR	BPBD
Rasio peningkatan kemampuan Relawan Penanggulangan bencana	%	72	100	49,06	68,14	S	BPBD
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					78,96		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Data Satpol PP, BPBD Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan trantibum sebesar 83,26 (tinggi). Urusan trantibum di Kabupaten Batang diampu oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Satpol PP dengan rata rata tingkat capaiannya sebesar 87,57 (tinggi) dan BPBD dengan rata rata tingkat capaian kinerjanya sebesar 78,96 (sedang). Jumlah indikator dalam urusan trantibum sebanyak 11 indikator kinerja dengan status ketercapaian antara lain 8 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sedang, dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator sangat rendah ini diampu oleh BPBD dengan

indikator Rasio peningkatan kemampuan kebencanaan di daerah rawan bencana dengan capaian 29,85 pada Triwulan IV Tahun 2022.

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tabel 2. 86 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja							
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	421.900	416,576	1.733.375,00	410,85	ST	DSINAKER
Rasio Penduduk yang Bekerja	%	610.170	93,07	94,14	0,02	SR	DSINAKER
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,14	70,93	283,80	410,47	ST	DSINAKER
Program Penempatan Tenaga Kerja							
Pencari Kerja yang ditempatkan	%	30,89	46,61	44,88	145,28	ST	DSINAKER
Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,63	93,08	373,49	386,52	ST	DSINAKER
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,23	6,93	6,64	205,57	ST	DSINAKER
Program Hubungan Industrial							
Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per 1000 Tahun		4	2	13,00	325,00	ST	DSINAKER
Keselamatan dan perlindungan	%	3	1	-	0,00	SR	DSINAKER (Sudah menjadi kewenangan Propinsi)
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					235,46		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Tenaga Kerja tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan tenaga kerja sebesar 235,46 (sangat tinggi) yang terdiri dari 8 indikator dalam 3 program dengan 6 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator dengan status sangat rendah berada pada indikator keselamatan dan perlindungan dalam program hubungan industrial yang disebabkan karena sudah menjadi kewenangan provinsi.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2. 87 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan							
Terwujudnya kesetaraan gender dan anak			0	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
Peningkatan cakupan wanita yang memperoleh sosialisasi PUG	Orang	150	0,00	48,00	32,00	SR	DP3AP2KB
Peningkatan cakupan lembaga/instansi dalam kegiatan pengarusutamaan gender	Lembaga	8	7,00	8,00	100,00	ST	DP3AP2KB
peningkatan wanita yang mendapatkan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Orang	80	0,00	40,00	50,00	SR	DP3AP2KB
peningkatan wanita yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Orang	76	85,00	40,00	52,63	R	DP3AP2KB
Program Perlindungan Perempuan							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan persentase penanganan pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	%	95	95	95,00	100,00	ST	DP3AP2KB
peningkatan cakupan masyarakat yang terlibat dalam gerakan sayang ibu dan bayi	Orang	110	0,00	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
persentase perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	%	94,00	80	100,00	106,38	ST	DP3AP2KB
tingkat perempuan yang mendapatkan Pendidikan kualitas hidup perempuan	Orang	75,00	0,00	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
persentasi Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	40,00	5,81	92,57	231,43	ST	DP3AP2KB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga							
persentase profesionalisme bagi Tim Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100,00	86,67	100,00	100,00	ST	DP3AP2KB
Peningkatan cakupan kelompok wanita di Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi tentang UUPTPO	Kecamatan	15	10,00	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)							
Kecamatan ramah Anak	%	80,00	40,00	86,67	108,34	ST	DP3AP2KB
Pembentukan Kelembagaan Forum Anak (Kecamatan)	%	80,00	66,00	190,00	237,50	ST	DP3AP2KB
Peningkatan cakupan lembaga/ instansi dalam kegiatan pengarusutamaan gender	lembaga	8		0,00	0,00	SR	DP3AP2KB

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					74,55		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Data DP3APKB Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebesar 74,55 (tinggi) yang terdiri dari 15 indikator dalam 4 program dengan 7 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus rendah, dan 7 indikator berstatus sangat rendah. Garis besar ketercapaian indikator dengan status sangat rendah dikarenakan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah ataupun swasta serta rendahnya perempuan yang mendapatkan peningkatan kualitas hidup.

c. Pangan

Tabel 2. 88 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pangan							
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Cadangan Pangan Daerah	%	12	3,5	13,90	115,83	ST	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
Jumlah gapoktan pelaksana usaha pangan masyarakat	%	0,079	0,075	0,01	12,66	SR	
Jumlah ketersediaan Energi							
a. Energi	Kal	2700	2847	2620,00	97,04	ST	
b. Protein	G	82	85,55	81,17	98,99	ST	
Jumlah produktivitas tanaman pangan							
a. Padi	Ton/Ha	4,82	5,15	5,49	113,90	ST	
b. Jagung	Ton/Ha	6,6	7,11	5,87	88,94	T	
Skor Pola Pangan Harapan	%	89,10	88,4	93,30	104,71	ST	
Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	%	100	100	100,00	100,00	ST	
Program Penanganan Kerawanan Pangan							
Rasio Desa Mandiri Pangan	%	0,14	0,14	0,15	107,14	ST	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					93,25		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pangan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pangan sebesar 93,25 (sangattinggi) yang terdiri dari 9 indikator dalam 3 program dengan 7 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indiaktor berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian sangat rendah dikarenakan masih rendahnya jumlah gapoktan pelaksana usaha pangan masyarakat di Kabupaten Batang.

d. Pertanian

Tabel 2. 89 Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pertanahan							
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan							
Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100,00	65	65,65	65,65	S	DPRKP
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					43,19		
Predikat Kinerja					Sangat Rendah		

Sumber :DPRKP Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanahan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanahan sebesar 43,19 (sangat rendah) yang terdiri dari 1 program dengan 1 indikator berstatus sedang.

e. Lingkungan Hidup

Tabel 2. 90 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Lingkungan Hidup							
Program Perencanaan Lingkungan Hidup							
Tingkat kewanaman dan kenyamanan lingkungan di wilayah hutan kota dan TPA	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	%	90,00	90	90,00	100,00	ST	
Uji Sampel Kualitas Air Sungai	%	90,00	90	90,00	100,00	ST	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)							
Penyediaan bibit tanaman	Bibit	40	40	35,00	87,50	T	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)							
Tingkat kesadaran masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan	%			100,00	100,00	ST	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							
Tingkat kesadaran masyarakat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	%			100,00	100,00	ST	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							
Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%			98,00	100,00	ST	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							
Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	%			100,00	100,00	ST	
Program Pengelolaan Persampahan							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase penanganan sampah (Kab)	%	45,00	45	44,50	98,89	ST	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					98,49		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup sebesar 98,49 (sangat tinggi) yang terdiri dari 9 indikator dalam 8 program dengan 8 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2. 91 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Program Pendaftaran Penduduk							
Persentase ketersediaan data kependudukan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Disdukcipil
Program Pencatatan Sipil							
Kepemilikan KTP	%	95,00	99,82	98,50	103,68	ST	Disdukcipil
Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	%	90	92,97	91,64	101,82	ST	Disdukcipil
Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Disdukcipil
Program Pengelolaan Informasi							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Kependudukan							
Pemanfaatan data kependudukan	%	35	25	30,43	86,94	T	Disdukcapil
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					87,29		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 87,29 (tinggi) yang terdiri dari 5 indikator dalam 3 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi. Ketercapaian indikator pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil didukung dengan adanya peningkatan pelayanan hingga di tingkat kecamatan guna memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2. 92 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Program Penataan Desa							
persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	%	20	20	15,00	87,50	T	
Program Administrasi Pemerintahan Desa							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKP		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pembangunan wilayahnya	%	100	88	90,10	89,05	T	
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	80	97,60	88,80	T	
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	85	100,00	92,50	ST	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							
Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	%	100	85	100,00	92,50	ST	
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	81	65	80,00	89,51	T	
Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	100	80	95,00	87,50	T	
Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan	%	100	95	100,00	97,50	ST	
Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya	%	100	70	100,00	85,00	T	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					89,98		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 89,98 (tinggi) yang terdiri dari 9 indikator dalam 3 program dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi dan 6 indikator berstatus tinggi.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2. 93 Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Program Pengendalian Penduduk							
Tingkat jumlah dan jenis data dan informasi tentang program Kependudukan, KB dan Perlindungan perempuan dan anak	Data	15000	4255	12500,00	83,33	T	DP3AP2KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)							
Persentase peran serta PPKBD dalam program KB dan keluarga sejahtera	%	92,89	86,96	90,00	96,89	ST	DP3AP2KB
Peningkatan jumlah PUS yang mendapatkan penyuluh kesehatan bagi ibu, bayi dan anak	Orang	50	50,00	100,00	200,00	ST	DP3AP2KB
Tingkat Pelayanan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Paket	6500	8371,00	15513,00	238,66	ST	DP3AP2KB
Peningkatan peserta KB Pria	Orang	28	9,00	10,00	35,71	SR	DP3AP2KB
Cakupan pelayanan KIE melalui berbagai media KIE	Kecamatan	15	15	15,00	100,00	ST	DP3AP2KB
	Baliho		0,00	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
	Media Cetak	5	4,00	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
	Pameran	1	0,00	1,00	100,00	ST	DP3AP2KB
Ratio Penyuluh KB/Petugas	%	85	53,23	50,81	59,77	R	DP3AP2KB

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan							
Peningkatan PUS dari Keluarga Miskin yang memperoleh pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB	Akseptor	500	735,00	15513,00	3102,60	ST	DP3AP2KB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							
Persentase peran serta PPKBD dalam program KB dan keluarga sejahtera	%	92,89	86,96	90,00	95,25	ST	DP3AP2KB
Peningkatan kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas dan pemasaran produk	Kelompok	25	51,00	11,00	124,00	ST	DP3AP2KB
Tingkat jumlah dan jenis data dan informasi tentang program Kependudukan, KB dan Perlindungan perempuan dan anak	Data	15.000,00	10.500	6.000,00	55,00	R	DP3AP2KB
Peningkatan jumlah PUS yang mendapatkan penyuluh kesehatan bagi ibu, bayi dan anak	Orang	50	50,00	50,00	100,00	ST	DP3AP2KB
Peningkatan remaja yang terlayani pada kegiatan KRR	Remaja	270	160,00	350,00	94,44	ST	DP3AP2KB
Peningkatan cakupan anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi bahaya narkoba dan PMS	Anak	90	75,00	100,00	111,11	ST	DP3AP2KB

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak bagi kelompok BKB	KKA	7500	0,00	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
	Kelompok	150	10,00	125,00	83,33	T	DP3AP2KB
Peningkatan tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas layanan	Orang	100	0,00	95,00	95,00	ST	DP3AP2KB
Terpilihnya kelompok Terbaik I, II, III, dan IV untuk masing-masing lomba	Paket	4	0,00	0,00	0,00	SR	DP3AP2KB
Peningkatan jumlah kader integrasi BKB-Posyandu-PADU yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas layanan	Kader	100	0,00	100,00	100,00	ST	DP3AP2KB
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					221,60		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data DP3AP2KB Kabupaten Batang, 2022

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 221,60 (sangat tinggi) yang terdiri dari 22 indikator dalam 3 program dengan 13 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, 2 indikator berstatus rendah, dan 5 indikator berstatus sangat rendah. Indikator dengan status sangat rendah dikarenakan rendahnya peminat pada KB Pria, Cakupan Pelayanan KIE melalui media Baliho dan media cetak tidak dilaksanakan, Tingkat jumlah dan jenis data dan informasi tentang program Kependudukan, KB dan Perlindungan

perempuan dan anak terealisasi hanya setengah dari target tahun 2022.

i. Perhubungan

Gambaran kinerja urusan Perhubungan dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 94 Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Perhubungan							
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)							
Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah korban jiwa)	%	6	3,8	5,22	87,00	T	Dinas Perhubungan
Persentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Batang	%		47	89,35	54,00	R	Dinas Perhubungan
Persentase sarana dalam kondisi baik	%		53	60,26	59,00	R	Dinas Perhubungan
Tingkat cakupan pelayanan perhubungan			0	0,00	0,00	SR	Dinas Perhubungan
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	0	10.290.210	9.099.169	9.340.733	90,77	ST	Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	0	10.290.210	7.896.635	8.582.034,00	83,40	T	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan	%	10,00	9,5	9,77	97,70	ST	Dinas Perhubungan
Pembangunan peningkatan infrastruktur	%	100,00	82	91,49	91,49	ST	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat cakupan pelayanan perhubungan				100			Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Kapal	Unit	545	0	0,00	0,00	SR	Dinas Perhubungan
Pembangunan pelabuhan dan akses jalan	Buah	6	0	0,00	0,00	SR	Dinas Perhubungan
Rasio ijin trayek	%	84,00	96,1	97,68	116,29	ST	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Perkeretaapian							
Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah kendaraan yang terlibat kejadian)	%	6	3,8	5,22	87,00	T	Dinas Perhubungan
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					63,89		
Predikat Kinerja					Rendah		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perhubungan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perhubungan sebesar 63,89 (rendah) yang terdiri dari 12 indikator dalam 3 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi, 3 indikator berstatus tinggi, 2 indikator berstatus rendah, dan 3 indikator berstatus sangat rendah. Indikator dengan status sangat rendah dikarenakan sudah bukan menjadi kewenangan kabupaten seperti uji petik kapal maupun pembangunan pelabuhan. Sedangkan pada indikator Persentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Batang masih berstatus rendah karena masih rendahnya kesadaran SDM Kabupaten Batang untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor.

j. **Komunikasi dan Informasi**

**Tabel 2. 95 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi
Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
Program Informasi Dan Komunikasi Publik							
Persentase SDM bidang komunikasi yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	%	100	100	100,00	100,00	ST	BIDANG IKP
Persentase Peningkatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	%	100,00	90	100,00	100,00	ST	BIDANG IKP
Persentase Peningkatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100,00	100,00	ST	BIDANG IKP
Program Aplikasi Informatika							
Jumlah jaringan komunikasi	Unit	130	125	130,00	100,00	ST	BIDANG SPBE
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Kel	41	78	68,00	165,85	ST	BIDANG IKP
Persentase Smart Village	%	15	12,1	15,00	102,46	ST	BIDANG SPBE
Persentase Peningkatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	BIDANG IKP
Persentase Peningkatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	BIDANG IKP
Jumlah sistem unggulan dalam Smart City	Paket	5	6	5,00	100,00	ST	BIDANG SPBE

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Peningkatan alat dan komunikasi studio	%	100	90	100,00	100,00	ST	BIDANG IKP
persentase pemenuhan sarpras TIK dan jaringan kominfo di kab Batang	%	100	125	130,00	130,00	ST	BIDANG SPBE
Persentase Peningkatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	%	100,00	100	5,00	5,00	SR	BIDANG IKP
Persentase Peningkatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	%	100,00	90	100,00	100,00	ST	BIDANG IKP
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					100,25		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika sebesar 100,25 (sangat tinggi) yang terdiri dari 13 indikator dalam 2 program dengan 12 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian sangat rendah ini terdapat pada indikator Persentase Peningkatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi hanya sebesar 5% yang disebabkan karena minimnya tenaga IT di Diskominfo Kab Batang.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2. 96 Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Koperasi dan UKM							
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi							
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Orang	50	33,76	72,00	144,00	ST	
Pembinaan, pengawasan koperasi berprestasi	Orang	900	53,33	115,00	12,78	SR	
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Orang	240	77,08	115,00	47,92	SR	
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi		200	75,00	6,00	3,00	SR	
Pengembangan Koperasi pertanian	Orang	540		0,00	0,00	SR	
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi							
Penilaian kesehatan KSP/USP	Orang	540	84,44	115,00	21,30	SR	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian							
Bimbingan teknis kelembagaan Koperasi	Orang	900	53,33	140,00	15,56	SR	
Sosialisasi prinsip-2 perkoperasian	Orang	930	53,33	23,00	2,47	SR	
Bimbingan teknis Akuntansi Koperasi	Orang	150	53,33	50,00	33,33	SR	
Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi	Orang	120	66,67	79,00	65,83	S	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Fasilitasi pengembangan UKM	Unit	50	0	105,00	210,00	ST	
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Orang	50	160	105,00	210,00	ST	
Pengembangan Klaster Bisnis (OVOP)	klaster	1	8	1,00	100,00	ST	
Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga	Kali	4	0	5,00	125,00	ST	
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Kali	3	66,67	3,00	100,00	ST	
Penyusunan Kebijakan UMKM	Kali	1	1	1,00	100,00	ST	
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan Permodalan	Orang	100	75	100,00	100,00	ST	
Sosialisasi Kebijakan tentang UKM	Kali	15	66,67	2,00	13,33	SR	
Memfasilitasi Peningkatan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan menengah	Orang	100	150	28,00	28,00	SR	
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	50	280	105,00	210,00	ST	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					77,13		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Disperindagkop dan UKM, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar 77,13 (tinggi) yang terdiri dari 20 indikator dalam 4 program dengan 9 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sedang, dan 10 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan rendahnya anggaran yang dialokasi pada kegiatan untuk mendukung capaian indikator tersebut.

1. Penanaman Modal

Tabel 2. 97 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Penanaman Modal							
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
Jumlah realisasi nilai investasi	Milyar	290	91.831,93	5.878,82	2027,18	ST	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal							
Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang	Unit	100	250	20,00	20,00	SR	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal							
Jumlah izin usaha yang diterbitkan	Buah	3000	28.324	9226,00	307,53	ST	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							
Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	10000	6.467	29186,00	291,86	ST	DISNAKER
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal							
persentase pemanfaatan data dan sistem informasi Penanaman Modal dan Perijinan	%	30	45	46,00	153,33	ST	DPMPTSP
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					559,98		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : DPMPTSP Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penanaman

Modal sebesar 454,71 (sangat tinggi) yang terdiri dari 5 indikator dalam 5 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan rendahnya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang. Sedangkan ketercapaian status sangat tinggi pada jumlah realisasi investasi yang menyentuh angka 1906 % dari target dikarenakan adanya dukungan KITB yang menyebabkan tingginya realisasi investasi di Kabupaten Batang.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2. 98 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							
Meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda dalam berwirausaha	%	45	39	85,00	188,89	ST	Disparpora
Peningkatan dan pengembangan keserasian kepemudaan di Kabupaten Batang	Bulan	12	12	12,00	100,00	ST	Disparpora
Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Bulan	12	12	12,00	100,00	ST	Disparpora
Persentase Pemuda Berwirausaha	%	45,00	39	45,00	100,00	ST	Disparpora
Peningkatan peranan pemuda dalam kewirausahaan	Bulan	12		12,00	100,00	ST	Disparpora
Penigkatan peranan pemuda dalam pencegahan penggunaan narkoba	Bulan	12		12,00	100,00	ST	Disparpora
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba	Bulan	12		12,00	100,00	ST	Disparpora

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan peran pemuda dalam sosialisasi dan promosi anti penyalahgunaan narkoba	Bulan	12		9,00	75,00	S	Disparpora
Peningkatan peranan pemuda dalam pemberantasan narkoba	Bulan	12	12	12,00	100,00	ST	Disparpora
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan							
Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	medali	30	30	30,00	100,00	ST	Disparpora
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga prestasi	Bulan	12	12	12,00	100,00	ST	Disparpora
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan							
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan Pramuka	Bulan	12	12	12,00	-	SR	Disparpora
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					96,99		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar 96,99 (sangat tinggi) yang terdiri dari 12 indikator dalam 3 program dengan 10 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sedang, dan 1 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan tidak ada realisasi hingga Triwulan IV tahun 2022 pada indikator Peningkatan pengetahuan dan kemampuan Pramuka.

n. Statistik**Tabel 2. 99 Kinerja Urusan Statistik Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Statistik	0	0					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
Persentase Peningkatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	BIDANG STATISTIK
Persentase Peningkatan Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB dan IHK	%	100,00	BPS	0,00	0,00	SR	BPS
Persentase Peningkatan Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Distribusi Pendapatan	%	100,00	BPS	0,00	0,00	SR	BPS
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					33,33		
Predikat Kinerja					Sangat Rendah		

Sumber : Diskominfo Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Statistik tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Statistik sebesar 33,33 (sangat rendah) yang terdiri dari 3 indikator dalam 1 program dengan 1 indikator berstatus sedang dan 2 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan

kegiatan pendukung dalam indikator Persentase Peningkatan Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB dan IHK, Persentase Peningkatan Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Distribusi Pendapatan dialihkan menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik.

o. Persandian

Tabel 2. 100 Kinerja Urusan Persandian Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Persandian							
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							
Persentase Keberhasilan Pengiriman dan Penerimaan dokumen elektronik melalui VPN	%	100,00	100	100,00	100,00	R	BIDANG SPBE
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					100,00		
Predikat Kinerja					Rendah		

Sumber : Diskominfo Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Persandian tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Persandian sebesar 100,00 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan status tinggi.

p. Kebudayaan

Beberapa kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Batang sampai Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 101 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Pengampu
			2021	2022			
1	2	3	5	6	7	8	9
Urusan Kebudayaan	0	0					
Program Pengembangan Kebudayaan							
Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Keg	13	8	5,00	38,46	SR	Disdikbud
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	320	323	323,00	100,94	ST	Disdikbud
Program Pengembangan Kesenian Tradisional							
Jumlah grup kesenian yang dibina	per 10.000	570	568	568,00	99,65	ST	Disdikbud
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					79,68		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kebudayaan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kebudayaan sebesar 79,68 (tinggi) yang terdiri dari 3 indikator dalam 2 program dengan 2 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan masih dibatasinya kegiatan yang mengakibatkan kerumunan seperti adanya festival seni budaya ataupun peristiwa budaya di Kabupaten Batang.

q. Perpustakaan

Tabel 2. 102 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Perpustakaan							
Program Pembinaan Perpustakaan							
Peningkatan koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah	Buku	53.275	53.275	40.438	75,90	T	Disperpuska
Peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	185.000	19.937	63.424	34,28	SR	Disperpuska
Peningkatan Perpustakaan Desa	Unit	45	48	48,00	106,67	ST	Disperpuska
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					72,28		
Predikat Kinerja					Sedang		

Sumber : Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perpustakaan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perpustakaan sebesar 72,28 (sedang) yang terdiri dari 3 indikator dalam 1 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator bestatus tinggi, dan 1 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan bergesernya minat baca masyarakat terhadap buku fisik ke buku digital namun didukung dengan adanya layanan mobil keliling dan perpustakaan digital (*eperpus* dan *i-batang*).

r. Kearsipan

Tabel 2. 103 Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kearsipan							
Program Pengelolaan Arsip							
Pengelolaan Arsip secara Baku	%	85,00	83	98,00	115,29	ST	Disperpuska
Pelaksanaan Pemeliharaan sistem administrasi	%	85,00	0	100,00	117,65	ST	Disperpuska
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	5,00	0	44,44	888,80	ST	Disperpuska
Terlaksana Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan	Lokasi	75,00	0	60,00	80,00	T	Disperpuska
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip							
Penyelamatan arsip atau dokumen yang mempunyai nilai guna	Dokumen	3,5	12,395	16,05	458,57	ST	Disperpuska
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	Paket	1	1	1,00	100,00	ST	Disperpuska
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					293,39		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kearsipan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kearsipan sebesar 293,39 (sangat tinggi) yang terdiri dari 6 indikator dalam 2 program dengan 5 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 Indikator berstatus tinggi. Ketercapaian ini didukung karena tingginya antusias Perangkat Daerah untuk mengolah arsip secara baku, adanya teknologi untuk mempermudah pemeliharaan system administrasi, serta antusias pejabat fungsional kearsipan dalam mengikuti bimtek pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh *stakeholders*.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Transmigrasi							
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi							
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	KK	5	14	-	0,00	SR	DSINAKER
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					0,00		
Predikat Kinerja					Sangat Rendah		

Sumber : Data Dinas Ketenagakerjaan Kab Batang, 2022

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Transmigrasi sebesar 0,00 (sangat rendah) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan 1 indikator berstatus sangat rendah yang dikarenakan indikator Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi yang terkendala pencapaiannya karena danya pandemi COVID 19 sehingga kegiatan yang mendukung urusan ini ditiadakan secara nasional.

b. Kelautan dan Perikanan**Tabel 2. 104 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung-jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kelautan dan Perikanan	0	0,00					
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							
Prosentase jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari sebelumnya	%	3,00	0,02	2,11	70,33	S	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							
Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap	%	10,00	0,03	8,5	85,00	T	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan							
Prosentase bertambahnya sarpras pada kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	%	5,00	3,00	4,75	95,00	ST	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan							
Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan pada masyarakat	%	25,00	20,00	18,00	72,00	S	
Cakupan kelompok usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	20,00	15,00	17,00	85,00	T	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					81,47		
Predikat Kinerja					Sedang		

Sumber: Dinas kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang,

2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan sebesar 81,47 (tinggi) yang terdiri dari 5 indikator dalam 4 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, dan 2 berstatus sedang.

c. Pertanian

Tabel 2. 105 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pertanian							
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							
Jumlah SL-GHP dan SL GAP (kali)	0	100	100	100,00	100,00	ST	
Persentase Data publikasi informasi harga pasar	%	100	100	100,00	100,00	ST	
Persentase dokumen SOP kebun GAP hortikultura,	%	0,60	0,6	0,60	100,00	ST	
Persentase temu usaha	%	100	100	100,00	100,00	ST	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian							
jumlah Produktifitas Tanaman Pangan Jagung	Ton/ Ha	6,6	7,11	5,87	88,94	T	
Jumlah Produktifitas Tananaman Pangan Padi	Ton/ Ha	4,82	5,15	5,49	113,90	ST	
Persentase Jumlah demplot tanaman hortikultura ramah lingkungan	%	100	100	0,00	0,00	SR	
Persentase pembuatan screen house/ green house	%	100,00	100	0,00	0,00	SR	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
Capaian Penguatan perlindungan terhadap OPT pangan	%	95	100	100,00	105,26	ST	
Capaian Penguatan perlindungan terhadap OPT perkebunan	%	80					
Program Penyuluhan Pertanian							
Cakupan kelompok tani dinilai sesuai klasifikasi (Pemula/Lanjut/Madya/Utama)	Klp	0,90	0,99	1,00	111,11	ST	

[illegible]

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							
Cakupan akseptor	Ekor	8.500,00	9.992,00	8.500	100,00	ST	
Prosentase peningkatan konsumsi protein hewani pada masyarakat							
- Daging	%	1,50	0,67	2,37	158,00	ST	
- Telur	%	2,00	0,10	3,02	151,00	ST	
- Susu	%	0,10	0,02	0,19	190,00	ST	
Cakupan produksi hasil ternak							
-Daging	Kg	10.600.000	12.893.125,00	17.099.906	161,32	ST	
-Telur	Kg	9.100.000	14.585.205,00	14.089.530	154,83	ST	
-Susu	Lt	130.000,00	122.845,00	129.467	99,59	ST	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian							
Cakupan rehabilitasi prasarana bidang peternakan dan kesehatan hewan	Unit	2,00	1,00	2,00	100,00	ST	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
Cakupan wilayah pengawasan dan pengendalian	Desa / Kelurahan	15,00	15,00	15,00	100,00	ST	
Cakupan ternak yang terobati	Tahun	1.600,00	2.200,00	1730,00	108,13	ST	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kegiatan	250,00	75,00	245,00	98,00	ST	
Program Perizinan Usaha Pertanian							
persentase usaha dibidang peternakan yang memiliki izin	Kegiatan	5,00	2,00	4,80	96,00	ST	

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja (Dislutkannak)					126,41		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		
Rata Rata Urusan Pertanian					99,12		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Dispaperta Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanian tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanian sebesar 72,81 (sedang) yang terdiri dari 34 indikator dalam 9 program yang diampu oleh 2 perangkat daerah yakni Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan. Dari 34 indikator tersebut terdiri dari 26 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, dan 6 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah pada indikator Persentase Jumlah demplot tanaman hortikultura ramah lingkungan dan Persentase pembuatan screen house/ green house dikarenakan tidak adanya kegiatan yang menunjang pembuatan screen house.

d. Pariwisata

Tabel 2. 106 Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pariwisata							
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
Peningkatan jumlah wisatawan	Orang	620.000	575.529	778.351	125,54	ST	Disparpora
Obyek Wisata yang ditangani	Objek	9,00	10	10,00	111,11	ST	Disparpora
Persentase Pokdarwis	%	0,25	0,25	0,60	240,00	ST	Disparpora

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKP		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Prosentase Wira usaha baru yang mengikuti pelatihan	%	70,00	75	154,00	220,00	ST	
Cakupan bina kelompok pengrajin	KUB	300	72,3	310,00	103,33	ST	
Cakupan wira usaha baru yang membentuk KUB	KUB	383	116,25	310,00	80,94	T	
Prosentase Pertumbuhan Industri.	%	0,90	0,99	0,99	110,00	ST	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota							
Prosentase Wirausaha baru yang mendapat fasilitasi perijinan	IKM	120	125	88,00	73,33	S	
Prosentase Wira usaha baru yang mengikuti pelatihan	%	70,00	75	154,00	220,00	ST	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional							
Jumlah IKM	Jml	10750	25,00	780,00	7,26	SR	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					116,41		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber: Disperindagkop & UKM, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perindustrian tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perindustrian sebesar 116,41 (sangat tinggi) yang terdiri dari 8 indikator dalam 3 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sedang, dan 1 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan Jumlah IKM di Kabupaten Batang tidak meningkat signifikan sesuai target yang ditentukan.

f. Perdagangan

Tabel 2. 108 Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Perdagangan							
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan							
Persentase perusahaan yang memiliki izin	%	100	74	87,00	87,00	T	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							
Revitalisasi Pasar Rakyat	%	4	8	9,00	225,00	ST	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							
Data base kuota setiap jenis barang dan jasa	jenis	50	90	52,00	104,00	ST	
Program Pengembangan Ekspor							
Cakupan jumlah nilai ekspor bersih	US \$	56.742.353	52.037.355	58.237.400	102,63	ST	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							
Peningkatan Pelayanan UTTP	UTTP	9500	7308	3086,00	32,48	SR	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							
Prosentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD	%	4	3,1	5,00	125,00	ST	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					112,69		
Predikat Kinerja					Sangat tinggi		

Sumber : Disperindagkop & UKM, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perdagangan sebesar 112,69 (sangat tinggi) yang terdiri dari 6 indikator dalam 6 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 1 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan pada pelayanan UTTP ini memiliki SDM dan peralatan minim jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha sehingga banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan tera ulang timbangan.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Perencanaan

Tabel 2. 109 Kinerja Fungsi Urusan Perencanaan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Perencanaan							
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
Persentase kesesuaian program RKPDP dengan RPJMD	%	99,00	100	100,00	101,01	ST	Bidang PPEPD
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bidang PPEPD
Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	92,00	95	100,00	108,70	ST	Bidang PPEPD
Nilai rata-rata capaian kinerja RKPDP	%	100		0,00	0,00	SR	Bidang PPEPD
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	%	1	1	1,00	100,00	ST	Bidang IPW
Jumlah pusat pertumbuhan baru	%	2	1	2,00	100,00	ST	Bidang IPW
Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA yang dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan	%	0	0	3,00	0,00	SR	
Persentase rata-rata pencapaian program pembangunan daerah RPJMD Bidang Ekonomi	%	90,00	89	90,00	100,00	ST	Bidang Perekonomian dan SDA

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase rata-rata pencapaian program pembangunan daerah RPJMD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	%	89,00	87	89,00	100,00	ST	Bidang PPM
Jumlah kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Negara / Swasta	0	14	0	1,00	7,14	SR	
Persentase ketersediaan data/informasi yang dipublikasi	%	89,00	100	100,00	112,36	ST	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					75,38		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Data Bapelitbang Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perencanaan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perencanaan sebesar 75,38 (tinggi) yang terdiri dari 11 indikator dalam 2 program dengan 8 indikator berstatus sangat tinggi dan 3 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Negara/Swasta hanya sedikit di tahun 2022.

b. Keuangan

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	7	8	9
Urusan Keuangan							
Program Pengelolaan Keuangan Daerah							
Persentase OPD dengan sistem komputerisasi	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bidang Anggaran

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	7	8	9
pengelolaan SIMDA Keuangan							
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							
Persentase terdokumentasinya aset milik pemerintah kabupaten Batang baik dari persebaran, status dan/kepemilikan serta kondisinya	%	90,00	85	90,00	100,00	ST	Bidang Aset
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							
Persentase peningkatan mutu pelayanan pendapatan	%	90,00	85	90,00	100,00	ST	Bidang Administrasi PAD
Persentase peningkatan PAD	%	10,00	19,14	8,80	88,00	T	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					97,00		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : BPKPAD, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Keuangan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Keuangan sebesar 97,00 (sangat tinggi) yang terdiri dari 4 indikator dalam 3 program dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

c. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Tabel 2. 110 Kinerja Fungsi Urusan Kepegawaian Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kepegawaian							
Program Kepegawaian Daerah							
Prosentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	%	100	100	100,00	100,00	ST	BKD
Jumlah Pejabat yang mengikuti tes kompetensi	Orang	150	231	600,00	400,00	ST	BKD
Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	100	100	100,00	100,00	ST	BKD
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	100	100	100,00	100,00	ST	BKD
Persentase pembentukan pansel dalam setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	%	90	100	0,00	0,00	SR	BKD
Prosentase akurasi data kepegawaian	%	100	96,185	90,00	90,00	T	BKD
Persentase peserta pembekalan workshop purna tugas	%	100	100	100,00	100,00	ST	BKD
Persentase tertibnya arsip data kepegawaian	%	100	95,185	90,00	90,00	T	BKD
Jumlah taruna STTD yang lolos seleksi	Orang	42	18	6,00	14,29	SR	BKD
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					110,48		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Kab Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepegawaian tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepegawaian sebesar 110,48 (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 9 indikator dalam 1 program dengan 5 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, dan 2 berstatus sangat rendah. Ketercapaian pada indikator berstatus sangat rendah ini salah satunya pada indikator Persentase pembentukan panel dalam setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang disebabkan apabila Pelaksanaan Seleksi JPT pada masa Pj Bupati harus melalui prosedur Ijin Mendagri, sehingga hal ini membutuhkan waktu lebih lama, pada indikator Jumlah taruna STTD yang lolos seleksi yang disebabkan Jumlah Taruna yang lolos seleksi menyesuaikan kuota formasi yang tersedia.

d. Pendidikan Pelatihan

Tabel 2. 111 Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pendidikan dan Pelatihan							
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia							
Persentase Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	100	55,155	162,50	162,50	ST	BKD
Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	Orang	170	318	41,00	24,12	SR	BKD
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	0	2	2,00	100,00	ST	BKD
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	14	20	0,00	0,00	SR	BKD
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	20	26	2,00	10,00	SR	BKD

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	Orang	70	90	71,00	101,43	ST	BKD
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	200	818	66,00	33,00	SR	BKD
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					61,58		
Predikat Kinerja					Rendah		

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Kab Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 61,58 (rendah) yang terdiri dari 7 indikator dalam 1 program dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi dan 4 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan peserta pelatihan prajabatan menyesuaikan jumlah Formasi CPNS yang ditentukan Menpan dan anggaran di tahun berjalan.

e. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 112 Kinerja Fungsi Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Penelitian dan Pengembangan							
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah							
Persentase OPD yang mampu menyusun	%	0	100	100,00	100,00	ST	Bidang PPEPD

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Renstra dengan baik dan benar							
Persentase kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti stakeholder terkait	%	75,00	58,82	77,78	103,70	ST	Bidang Litbang
Persentase OPD inovatif	%	95,00	86,54	96,15	101,21	ST	Bidang Litbang
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					101,64		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Data Bapelitbang Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar 101,64 (sangat tinggi) yang terdiri dari 3 indikator dalam 1 program yang berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya minat Perangkat Daerah terhadap inovasi.

f. Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW III 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW III 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	TW III 2022			
1	2	3	4	5	6	7	15
Program Perekonomian Dan Pembangunan							
persentase koordinasi pengendalian pembangunan	%	100,00	83,33	100,00	100,00	ST	Bag. Adpem
persentase peningkatan dan pengembangan sistem informasi pengendalian pembangunan	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bag. Adpem

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW III 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW III 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	TW III 2022			
1	2	3	4	5	6	7	15
persentase lelang melalui e-procurement	%	100,00	128,00	77,00	77,00	T	Bag. PBJ
peningkatan kualitas SDM dan setoran deviden	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bag Perekonomian dan SDA
Persentase OPD Teknis yang menangani DBHCHT	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bag Perekonomian dan SDA
persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	%	100,00	0	0,00	0,00	SR	Bag Perekonomian dan SDA
Persentase Pelatihan Kewirausahaan	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bag Perekonomian dan SDA
persentase keikutsertaan pameran promosi investasi	%	100,00	0	0,00	0,00	SR	Bag Perekonomian dan SDA
Tersedianya data dan informasi pendukung pengembangan sistem Pendukung UMKM	UMKM	25	20	0,00	0,00	SR	Bag Perekonomian dan SDA
Tersedianya data dan informasi kondisi investasi dan tatacara berinvestasi di Kab. Batang	perda/ perbup	1	3	3,00	300,00	ST	Bag Perekonomian dan SDA
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat							
Persentase penyelenggaraan pelayanan dan kemudahan bagi kehidupan beragama	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	BAG. KESRA
Persentase perencanaan,	%	100,00	92,27	91,80	91,80	ST	BAG KESRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW III 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW III 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	TW III 2022			
1	2	3	4	5	6	7	15
pelaksanaan dan evaluasi hibah serta bantuan sosial							
Persentase fasilitasi pencairan tunjangan kesejahteraan guru Madin dan TPQ	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	BAG. KESRA
Persentase produk hukum yang tersusun	%	90,00	96,55	82,94	92,16	ST	BAGIAN HUKUM
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	%	100,00		0,00	0,00	SR	
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	%	100,00		0,00	0,00	SR	
Terselenggaranya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Keg	1		0,00	0,00	SR	
Tingkat kerjasama antar daerah yang berjalan baik	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bag Pemerintahan
Tersusunnya Raperbup bidang ketatalaksanaan	%	100,00		0,00	0,00	SR	
Persentase pilar batas daerah yang terawat	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bag Pemerintahan
Terfasilitasinya penyelenggaraan PATEN, Rakor Pemerintahan, HUT RI, HUT Kab. Batang, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	Bag Pemerintahan
Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW III 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW III 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	TW III 2022			
1	2	3	4	5	6	7	15
Persentase penyelenggaraan senam pagi	%	0		0,00	0,00	SR	
Persentase penyelenggaraan peringatan hari besar nasional per Tahun	%	100,00		0,00	0,00	SR	
persentase capaian kinerja kegiatan dalam pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	%	85,00	86,00	88,75	104,41	ST	BAGIAN UMUM
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	87,00	85,14	85,27	98,01	ST	BAGIAN ORGANISASI
Persentase pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditangani	%	100,00	0	0,00	0,00	SR	-
Persentase OPD yang telah memiliki SPP dan SOP	%	90,00	100	100,00	111,11	ST	BAGIAN ORGANISASI
Peningkatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	inovasi	15	16	15,00	100,00	ST	BAGIAN ORGANISASI
Persentase lembaga yang miskin struktur dan kaya fungsi	%	75,00	95	91,00	121,33	ST	BAGIAN ORGANISASI
Penyusunan Roadmap Redormasi Birokrasi Tahun 2017- 2022 dan dokumen renstra SETDA	Dokumen	1	2	2,00	200,00	ST	BAGIAN ORGANISASI
Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	kegiatan	100	100	171,00	171,00	ST	BAGIAN PROKOMPI M
Jumlah Kegiatan Forkompinda	%	100,00		0,00	0,00	SR	BAGIAN ORGANISASI
Tersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi	%	100,00	50	50,00	50,00	SR	

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW III 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW III 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	TW III 2022			
1	2	3	4	5	6	7	15
Jabatan OPD di Kabupaten Batang							
Jumlah OPD yang sudah membentuk KBK dan GKM	%	100,00	100	100,00	100,00	ST	BAGIAN ORGANISASI
Persentase penguatan komunikasi, informasi kepada OPD	%	100,00		0,00	0,00	SR	
Persentase terpeliharanya kerjasama dengan media massa	%	100,00		0,00	0,00	SR	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					72,69		
Predikat Kinerja					Sedang		

Sumber : Data Sekretariat Daerah Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah sebesar 72,69 (Sedang) yang terdiri dari 36 indikator dalam 3 program dengan 21 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 14 berstatus sangat rendah. Ketercapaian status sangat rendah disebabkan beberapa tugas dan fungsi sudah beralih ke perangkat daerah seperti persentase keikutsertaan pameran promosi investasi, Tersedianya data dan informasi pendukung pengembangan sistem Pendukung UMKM yang sudah menjadi kewenangan Disperindagkop dan UKM dan Persentase pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditangani yang sudah menjadi kewenangan Diskominfo. Sedangkan untuk indikator Persentase perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hibah serta bantuan sosial, Persentase fasilitasi pencairan tunjangan kesejahteraan guru Madin dan TPQ masih dalam proses verifikasi hingga TW III. Untuk indikator Persentase produk hukum yang tersusun disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu faktor eksternal : dengan adanya UU 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU dan berkenaan dg SE Mendagri Nomor 188/5082/OTDA tgl 1 Oktober 2020 hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan kepala Daerah (raperda) serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (raperkada), antara lain: jangka waktu terbitnya persetujuan dari Mendagri tidak dapat ditentukan waktunya. Serta Faktor internal: keterbatasan jumlah JF Perancang peraturan perundang-undangan. Dan untuk indikator yang masih berstatus Sangat rendah lainnya disebabkan karena kegiatan pendukung indikator tersebut sudah tidak dianggarkan di tahun 2022.

g. Sekretariat DPRD

Tabel 2. 113 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Sekretariat DPRD							
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD							
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	97,78	100,00	100,00	ST	Sekretariat DPRD
Prosentase SDM yang mengikuti bintek / Sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se Indonesia	%	100	90,91	100,00	100,00	ST	Sekretariat DPRD
Persentase Perda yang ditetapkan	%	100	8,00	50,00	50,00	SR	Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya informasi seputar kegiatan DPRD	%	100	100	100,00	100,00	ST	Sekretariat DPRD
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					87,50		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD sebesar 87,50 (Tinggi) yang terdiri dari 4 indikator dalam 1 program dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan DPRD tidak mengusulkan Raperda inisiatif begitupun eksekutif juga tidak mengusulkan Raperda.

h. Pengawasan

Tabel 2. 114 Kinerja Pengawasan Kabupaten Batang Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pengawasan							
Program Penyelenggaraan Pengawasan							
Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	67,06	100	100,00	149,12	ST	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Prosentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	%	100,00	100	90,00	90,00	T	Inspektorat
Rasio Dokumen rencana rinci tata ruang yang sudah tersusun dan tersosialisasikan (inspektorat)	%	0	100	0,00	0,00	SR	
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					105,92		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Inspektorat, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pengawasan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pengawasan sebesar 105,92 (sangat tinggi) yang terdiri dari 3 indikator dalam 2 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan sudah bukan menjadi kewenangan inspektorat serta dalam peningkatan profesionalisme melalui diklat terkendala karena jumlah peserta diklat yang diselenggarakan instansi Pembina sangat terbatas.

E. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Batang

Tabel 2. 115 Kinerja Kecamatan Batang Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Batang
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	75	90,00	90,00	T	Kecamatan Batang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Batang
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Batang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Batang
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Batang
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Batang

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
tentang keuangan desa							
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					92,86		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang sebesar 92,86 (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 2 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi.

b. Kecamatan Warungasem

Tabel 2. 116 Kinerja Kecamatan Warungasem Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Warungasem
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	90	100,00	100,00	ST	Kec Warungasem
Program Pemberdayaan							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Warungasem
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kec Warungasem
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kec Warungasem
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	96,00	96,00	ST	Kec Warungasem
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kec Warungasem
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					97,29		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Warungasem, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem sebesar

97,29 (sangat tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 7 indikator berstatus sangat tinggi.

c. Kecamatan Wonotunggal

Tabel 2. 117 Kinerja Kecamatan Wonotunggal Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Wonotunggal
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	90	100,00	100,00	ST	Kecamatan Wonotunggal
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Wonotunggal
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	85	100,00	100,00	ST	Kecamatan Wonotunggal

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penang-gung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	90	100,00	100,00	ST	Kecamatan Wonotunggal
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	95	100,00	100,00	ST	Kecamatan Wonotunggal
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Wonotunggal
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					100		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Wonotunggal, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 7 indikator tersebut berstatus sangat tinggi.

d. Kecamatan Bandar**Tabel 2. 118 Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Bandar
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Bandar
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Bandar
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	105	100,00	100,00	ST	Kec Bandar
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Bandar

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	0,00	0,00	SR	Kec Bandar
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Bandar
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					85,71		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Kecamatan Bandar, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar sebesar 85,71 (tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 6 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator sangat rendah ini disebabkan karena program tersebut tidak dianggarkan dalam DPA namun adanya kegiatan non formal (Tingkat Desa dan Kecamatan) yang dapat dimanfaatkan untuk penyampaian informasi.

e. Kecamatan Reban

Tabel 2. 119 Kinerja Kecamatan Reban Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Reban
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Reban
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Reban
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Reban
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Reban

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Reban
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Reban
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					98,57		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Bandar, 2022

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban sebesar 98,57 (sangat tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 6 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

f. Kecamatan Blado

Tabel 2. 120 Kinerja Kecamatan Blado Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kecamatan Blado
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	90	100,00	100,00	ST	Kecamatan Blado
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	89,00	89,00	T	Kecamatan Blado
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Blado
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Blado
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Blado
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Kandeman
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	75	100,00	100,00	ST	Kecamatan Kandeman
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	75	100,00	100,00	ST	Kecamatan Kandeman
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	75	100,00	100,00	ST	Kecamatan Kandeman
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkatkan pemahaman tentang keuangan desa	%	100	75	100,00	100,00	ST	Kecamatan Kandeman
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					100,00		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Kecamatan Kandeman, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 7 indikator berstatus sangat tinggi.

h. Kecamatan Tulis**Tabel 2. 122 Kinerja Kecamatan Tulis Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	82	85,00	85,00	T	Kecamatan Tulis
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	85	85,00	85,00	T	Kecamatan Tulis
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	95	95,00	95,00	ST	Kecamatan Tulis
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	88	88,00	88,00	T	Kecamatan Tulis
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	98	95,00	95,00	ST	Kecamatan Tulis
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Tulis

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	92	90,00	90,00	T	Kecamatan Tulis
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					91,14		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Tulis, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis sebesar 91,14 (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 3 indikator berstatus tinggi dan 4 indikator berstatus Tinggi.

i. Kecamatan Subah

Tabel 2. 123 Kinerja Kecamatan Subah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100		0,00	0,00	SR	Kecamatan Subah

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Subah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Subah
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100		0,00	0,00	SR	Kecamatan Subah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100		0,00	0,00	SR	Kecamatan Subah
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100		0,00	0,00	SR	Kecamatan Subah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	0	100,00	100,00	ST	Kecamatan Subah
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					42,86		
Predikat Kinerja					Sangat Rendah		

Sumber : Kecamatan Subah, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah sebesar 42,86 (sangat

rendah) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 2 indikator berstatus sangat tinggi dan 5 indikator berstatus sangat rendah yang disebabkan karena kegiatan yang mendukung indikator tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2022.

j. Kecamatan Pecalungan

Tabel 2. 124 Kinerja Kecamatan Pecalungan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	98,96	96,55	96,55	ST	Kec. Pecalungan
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	98,38	98,00	98,00	ST	Kec. Pecalungan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	98,96	96,55	96,55	ST	Kec. Pecalungan
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100		75,00	75,00	S	Kec. Pecalungan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase konflik sosial tertangani	%	100		75,00	75,00	S	Kec. Pecalungan
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100		100,00	100,00	ST	Kec. Pecalungan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100		80,00	80,00	T	Kec. Pecalungan
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					87,43		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber : Kecamatan Pecalungan, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan sebesar 87,43 (Tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 2 indikator berstatus sedang.

k. Kecamatan Banyuputih

Tabel 2. 125 Kinerja Kecamatan Banyuputih Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Banyuputih

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Banyuputih
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Banyuputih
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kecamatan Banyuputih
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100		90,00	90,00	T	Kecamatan Banyuputih
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100		85,00	85,00	T	Kecamatan Banyuputih
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparat desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100		100,00	100,00	ST	Kecamatan Banyuputih
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					95,71		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Banyuputih, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih sebesar 95,71 (sangat tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 5 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus tinggi.

1. Kecamatan Gringsing

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec. Gringsing
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec. Gringsing
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec. Gringsing
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kec. Gringsing
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	90,00	90,00	T	Kec. Gringsing
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	90,00	90,00	T	Kec. Gringsing
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	100	90,00	90,00	T	Kec. Gringsing
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					95,00		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Gringsing, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing sebesar 95,00 (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi dan 3 indikator berstatus Tinggi.

m. Kecamatan Bawang**Tabel 2. 126 Kinerja Kecamatan Bawang Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Bawang
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Bawang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Bawang
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Bawang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Bawang

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	75,00	75,00	S	Kecamatan Bawang
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	100	90,00	90,00	T	Kecamatan Bawang
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					93,57		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber : Kecamatan Bawang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bawang tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bawang sebesar 93,57 (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, dan 1 indikator berstatus sedang.

n. Kecamatan Tersono**Tabel 2. 127 Kinerja Kecamatan Tersono Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Tersono
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	80	100,00	100,00	ST	Kec Tersono
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Tersono
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Tersono
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kec Tersono
Persentase masyarakat paham wawasan kebangsaan	%	100	100	95,00	95,00	ST	Kec Tersono
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							
Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kec Tersono
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					98,57		
Predikat Kinerja					Sanagt Tinggi		

Sumber : Kecamatan Tersono, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tersono tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tersono sebesar 98,57 (sangat tinggi) yang terdiri dari 7 indikator dalam 5 program dengan 7 indikator berstatus tinggi.

o. Kecamatan Limpung

Tabel 2. 128 Kinerja Kecamatan Limpung Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Kewilayahan-Kecamatan							
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitas PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Limpung
Jumlah persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Limpung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
Jumlah persentase pelatihan dan fasilitasi PKK tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Limpung
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum							
Presentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Limpung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	100,00	100,00	ST	Kecamatan Limpung

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (2022)	Realisasi capaian RKPD		Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d 2022 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d 2022	OPD Penanggung jawab
			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase masyarakat penerima pendidikan politik	%	100	100,00	100,00	100,00	ST	Bidang Poldagri dan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
Jumlah konflik sosial tertangani	%	100	100,00	100,00	100,00	ST	Bidang Poldagri dan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya							
Jumlah konflik sosial tertangani	%	100	100,00	100,00	100,00	ST	Bidang Ideologi, Wasbang & Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik							
Jumlah demo tertangani	%	100	100,00	100,00	100,00	ST	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja					102,22		
Predikat Kinerja					Sedang		

Sumber : Bakesbangpol, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesbangpol tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesbangpol sebesar 102,22 (sangat tinggi) yang terdiri dari 5 indikator dalam 5 program dengan 5 indikator tersebut berstatus tinggi.

2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Per Urusan Tahun 2022

Tabel 2. 130
Capaian IKU Per Urusan Kabupaten Batang Tahun 2022

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Pendidikan							Disdikbud
1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	99,40	100,00	100,60	Sangat Tinggi	
2	Angka Rata-rata lama sekolah	Thn	6,86	6,90	100,58	Sangat Tinggi	
3	Angka Partisipasi Kasar						
	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	%	105,00	107,60	102,48	Sangat Tinggi	
	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	%	96,00	97,96	102,04	Sangat Tinggi	
4	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk						
	a. Jenjang SD/Sederajat	%	46,35	67,40	145,42	Sangat Tinggi	
	b. Jenjang SMP/Sederajat	%	18,49	26,22	141,81	Sangat Tinggi	
5	Angka Partisipasi Murni						
	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	%	96,50	96,50	100,00	Sangat Tinggi	
	Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	%	81,25	88,39	108,79	Sangat Tinggi	
6	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	per 1000	82,00	82,98	101,20	Sangat Tinggi	
7	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	90,67	92,81	102,36	Sangat Tinggi	
Kesehatan							Dinkes
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	86,28	105,62	77,58	Tinggi	
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,00	9,51	120,75	Sangat Tinggi	
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1.000 KH	15,10	10,91	127,75	Sangat Tinggi	
4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,16	0,20	125,00	Sangat Tinggi	
5	Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB	Per 100.000 pend	109,00	140,17	71,40	Sedang	
6	Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +	%	89,50	84,35	94,25	Sangat Tinggi	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							DPUPR
1	Persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	75,25	62,12	82,55	Tinggi	

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
2	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	85,16	100,48	117,99	Sangat Tinggi	
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	%	100,00	72,15	72,15	Sedang	
4	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	22,80	25,42	111,49	Sangat Tinggi	
Perumahan dan Kawasan Pemukiman							DPRKP
1	Cakupan layanan akses air minum perumahan	%	84,00	86,49	102,96	Sangat Tinggi	
2	Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan perumahan	%	76,00	80,77	106,28	Sangat Tinggi	
3	Persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak	%	80,00	66,09	82,61	Tinggi	
4	Persentase rumah layak huni	%	80,00	79,95	99,94	Sangat Tinggi	
5	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	%	100,00	75,99	75,99	Tinggi	
6	Persentase penambahan perumahan formal	%	10,00	9,12	91,20	Sangat Tinggi	
7	Persentase rumah sehat	%	100,00	79,95	79,95	Tinggi	
Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat							Satpol PP
	Rasio Jumlah Satuan Linmas per 10.000	per 10.000	83,00	78,64	94,75	Sangat Tinggi	Satpol PP
	Rasio Poskamling per desa/kelurahan	per Desa	7,00	7,23	103,29	Sangat Tinggi	Satpol PP
	Persentase Daerah Rawan Bencana	%	19,00	15,73	82,77	Tinggi	BPBD
	Persentase ketersediaan peta Resiko bencana	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
Sosial							Dinsos
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil	%	80,00	100,00	125,00	Sangat Tinggi	
	Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	80,00	90,34	112,93	Sangat Tinggi	
	Persentase Santunan Kematian yang diberikan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
	Jumlah PMKS yang diberdayakan	per 1000	4,35	0,59	13,56	Sangat Rendah	
Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Tenaga Kerja							Disnaker
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	421900,00	456305,00	108,15	Sangat Tinggi	
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,14	74,90	108,33	Sangat Tinggi	

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,23	6,64	205,57	Sangat Tinggi	
4	Tingkat Kesempatan kerja	%	96,63	93,36	96,62	Sangat Tinggi	
5	Rasio daya serap tenaga kerja	%	90,00	85,15	94,61	Sangat Tinggi	
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	2,86	8,96	313,29	Sangat Tinggi	
7	Rasio ketergantungan	%	28,89	47,71	165,14	Sangat Tinggi	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							DP3AP2KB
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,50	1,92	76,84	Tinggi	
2	persentasi Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	40,00	32,81	82,02	Tinggi	
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	206326,0 0	174095,00	84,38	Tinggi	
5	Kecamatan ramah Anak	%	80,00	86,67	108,33	Sangat Tinggi	
6	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	40,00	15,56	38,89	Sangat Rendah	
Pangan							Dispaperta
1	Ketersediaan pangan utama						
	- Beras	Ton	110219,0 0	79617,00	72,24	Sedang	
	- Jagung	Ton	38410,00	50828,00	132,33	Sangat Tinggi	
2	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	Cadangan Pangan Daerah	%	12,00	13,90	115,83	Sangat Tinggi	
4	Ketersediaan energi dan protein per kapita						
	a. Energi	Kal	2700,00	2620,00	97,04	Sangat Tinggi	
	b. Protein	G	82,00	81,17	98,99	Sangat Tinggi	
5	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,10	93,30	104,71	Sangat Tinggi	
Pertanahan							DPRKP
1	Persentase pemohon sertifikat yang terlayani	%	100,00	65,65	65,65	Sedang	
2	Proda (Program Daerah)	%	60,00	307,00	511,67	Sangat Tinggi	
Lingkungan Hidup							DLH
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	22,80	22,80	100,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase penanganan sampah (Kab)	%	45,00	44,50	98,89	Sangat Tinggi	

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
3	Pemantauan status mutu air	%	0,10	0,10	100,00	Sangat Tinggi	
4	Indeks kualitas lingkungan hidup (KLH)	Indeks	69,00	68,59	99,41	Sangat Tinggi	
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							Disdukcapil
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	95,00	97,58	102,72	Sangat Tinggi	
2	Rasio bayi ber-akta kelahiran	%	90,00	95,63	106,26	Sangat Tinggi	
3	Rasio pasangan berakta nikah	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	Rasio Akta Kematian	%	85,00	81,00	95,29	Sangat Tinggi	
5	kepemilikan KTP	%	95,00	99,21	104,43	Sangat Tinggi	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							Dispermades
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PKK Aktif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	Posyandu Aktif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	81,00	81,00	100,00	Sangat Tinggi	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							DP3AP2KB
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,00	0,91	45,32	Sangat Rendah	
2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Orang	115121,00	67037,00	58,23	Rendah	
3	Rata-rata jumlah Jiwa per kepala keluarga	Jiwa	4,04	3,00	74,33	Sedang	
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	%	3,01	0,27	8,97	Sangat Rendah	
5	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	%	95,00	72,85	76,69	Tinggi	
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,30	8,93	86,67	Tinggi	
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	95,00	73,50	77,37	Tinggi	
Pehubungan							Dishub
1	Rasio ijin trayek	%	84,00	81,83	97,42	Sangat Tinggi	
2	Pemasangan Rambu-rambu	%	28,20	27,24	96,60	Sangat Tinggi	
3	Pemasangan penerangan jalan umum	%	100,00	91,73	91,73	Sangat Tinggi	
Komunikasi dan Informatika							Diskominfo

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
1	Jumlah jaringan komunikasi	titik	130,00	130,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Klmpk	41,00	78,00	190,24	Sangat Tinggi	
4	Persentase Smart Village	%	3,45	3,26	94,49	Sangat Tinggi	
5	Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment)	skor	3,30	3,24	98,18	Sangat Tinggi	
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah							Disperindag kop dan UKM
1	Prosentase Koperasi Aktif	%	94,00	100,00	106,38	Sangat Tinggi	
2	Prosentase Koperasi Sehat terhadap KSP	%	60,00	61,17	101,95	Sangat Tinggi	
3	Jumlah Produk OVOP	komoditi	11,00	10,00	90,91	Sangat Tinggi	
4	Jumlah usaha mikro kecil	Unit	101,73	79,00	77,66	Tinggi	
5	Jumlah Wirausaha baru	Unit	150,00	154,00	102,67	Sangat Tinggi	
Penanaman Modal							DPMPTSP
1	Jumlah realisasi nilai investasi	Rp/ Milyar	290,00	5878,82	2027,18	Sangat Tinggi	
2	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang	Unit	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	2000,00	29186,00	1459,30	Sangat Tinggi	
4	Jumlah realisasi nilai investasi	Milyar Rp	290,00	5878,82	2027,18	Sangat Tinggi	
Pemuda dan Olahraga							Disparpora a
1	Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga di tingkat Provinsi Jawa Tengah	kali	30,00	20,00	66,67	Sedang	
2	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	buah	20,00	19,00	95,00	Sangat Tinggi	
3	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	buah	48,00	48,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	Persentase pemuda berwirausaha	%	45,00	44,00	97,78	Sangat Tinggi	
Statistik							Diskominfo
1	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
Persandian							Diskominfo
1	Persentase Peningkatan alat dan komunikasi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
Kebudayaan							Disdikbud

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
2	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	kali	13,00	10,00	76,92	Tinggi	
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	unit	320,00	367,00	114,69	Sangat Tinggi	
4	Jumlah grup kesenian yang dibina	per 10.000 P	570,00	570,00	100,00	Sangat Tinggi	
Kearsipan							Disperpusk a
1	Pengelolaan Arsip secara Baku	%	85,00	82,00	96,47	Sangat Tinggi	
2	Penyelamatan arsip atau dokumen yang mempunyai nilai guna	Dok	3500,00	3410,00	97,43	Sangat Tinggi	
Perpustakaan							Disperpusk a
1	Presentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	95,00	211,00	222,11	Sangat Tinggi	
2	Jumlah perpustakaan	Unit	15,00	48,00	320,00	Sangat Tinggi	
Fokus Urusan Pilihan							
Perikanan dan Kelautan							Dislutkann ak
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	37365,00	30673,00	82,09	Tinggi	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5141,34	3927,81	76,40	Tinggi	
3	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/Kapita/Tahun	36,59	35,62	97,35	Sangat Tinggi	
4	Produksi Hasil Ternak						
	- Daging	Kg	1060000,00	17099906,00	161,32	Sangat Tinggi	
	- Telur	Kg	9100000,00	14089530,00	154,83	Sangat Tinggi	
	- Susu	Lt	90000,00	129467,00	143,85	Sangat Tinggi	
5	Konsumsi Protein						
	- Daging	gr/kapita/hari	7,60	10,41	136,97	Sangat Tinggi	
	- Telur	gr/kapita/hari	4,70	6,10	129,79	Sangat Tinggi	
	- Susu	Lt/kapita/hari	0,02	0,02	100,00	Sangat Tinggi	
Pertanian							Dispaperta
1	Jumlah produktivitas tanaman pangan Padi	Ton/Ha	4,82	5,49	113,90	Sangat Tinggi	
2	Produksi Padi	Ton	192287,92	172378,00	89,65	Tinggi	
3	Jumlah produktivitas	Ton/Ha	6,60	5,87	88,94	Tinggi	

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
	tanaman pangan Jagung						
4	Produksi Jagung	Ton	45187,95	81143,00	179,57	Sangat Tinggi	
5	Jumlah Kelompok Tani Binaan	Kelompok	905,00	925,00	102,21	Sangat Tinggi	
6	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB	%	24,73	20,52	82,98	Tinggi	
7	Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB	%	16,20	0,00	0,00	Sangat Rendah	
8	Kontribusi Sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB ADHK	%	13,49	0,00	0,00	Sangat Rendah	
Pariwisata							Disparpora a
1	Peningkatan jumlah wisatawan	Orang	620000,0 0	818137,00	131,96	Sangat Tinggi	
2	Obyek Wisata yang ditangani	Unit	8,00	10,00	125,00	Sangat Tinggi	
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	Rp (000.00 0)	2.100,00	3.887.816. 500	185.134.119	Sangat Tinggi	
Perdagangan							Disperindag kop dan UKM
1	Revitalisasi Pasar Rakyat	pasar	1,00	7,00	700,00	Sangat Tinggi	
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	3.100.00 0.000,00	5.341.061. 074,00	172,29	Sangat Tinggi	
3	Cakupan jumlah nilai ekspor bersih	USD	5674235 3,00	57877183, 00	102,00	Sangat Tinggi	
4	Kontribusi sektor Perdagangan (ADHB)	%	12,40	14,13	113,95	Sangat Tinggi	
5	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB	%	14,12	13,36	94,62	Sangat Tinggi	
Perindustrian							Disperindag kop dan UKM
1	Prosentase Pertumbuhan Industri.	%	0,90	0,98	108,89	Sangat Tinggi	
2	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB	%	30,63	33,31	108,75	Sangat Tinggi	
3	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	%	31,66	34,89	110,20	Sangat Tinggi	
Transmigrasi							Disnaker
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi	KK	5,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
Fokus Urusan Penunjang							

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
Perencanaan							Bapelitbang
1	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase kesesuaian perencanaan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
Keuangan							BPKPAD
1	Persentase peningkatan PAD	%	10,00	-6,77	-67,70	Sangat Rendah	
2	Peningkatan kemampuan OPD dalam penyusunan pendapatan dan anggaran belanja	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
Kepegawaian							BKD
1	Prosentase akurasi data kepegawaian	%	100,00	90,00	90,00	Tinggi	
2	Prosentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	100,00	162,50	162,50	Sangat Tinggi	
4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	91,54	70,50	77,02	Tinggi	
Penelitian dan Pengembangan							Bapelitbang
1	Persentase OPD Inovatif	%	90,00	96,15			
Sekretariat Daerah							Sekretariat Daerah
1	Persentase PD yang melakukan KAD	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan KUR	UMKM	25,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
3	Kerjasama dalam penyebaran berita melalui media massa cetak, elektronik, dan online	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	Persentase OPD yang telah memiliki SPP dan SOP	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
5	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	90,32	85,27	94,41	Sangat Tinggi	
Sekretariat DPRD							Setwan
1	Prosentase SDM yang mengikuti bintek / Sosialisasi barang dan iasa dan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Tingkat capaian	Status capaian	Perangkat Daerah
			2022	2022			
	asosiasi Sekwan se Indonesia						
2	Prosentase anggota DPRD yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	Banyaknya Promperda	Perda	8,00	4,00	50,00	Sangat Rendah	
Pengawasan							Inspektorat
1	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut LHP	%	100,00	90,00	90,00	Tinggi	
2	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	Blm Audit	0,00	Sangat Rendah	
3	Temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	Penyelesaian Laporan Reviu	LHR	8,00	8,00	100,00	Sangat Tinggi	
5	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	80,00	75,06	93,83	Sangat Tinggi	
6	Skor LAKIP/LKJiP	Skor	70,11	66,30	94,57	Sangat Tinggi	

Sumber : Evaluasi Renja PD Triwulan IV Tahun 2022

Berdasarkan capaian IKU Perangkat Daerah diatas tahun 2022, terdapat 159 indikator dalam IKU Perangkat Daerah yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Dari 159 indikator tersebut terdapat 121 indikator berstatus Sangat Tinggi, 21 indikator berstatus tinggi, 5 indikator berstatus sedang, 1 indikator berstatus rendah, dan 11 indikator berstatus Sangat Rendah. Ketercapaian sangat rendah dan rendah ini terdapat di urusan sosial dengan 1 indikator, Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 1 indikator, urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebanyak 3 indikator, urusan pertanian sebanyak 2 indikator, urusan transmigrasi sebanyak 1 indikator, urusan keuangan sebanyak 1 indikator, urusan sekretariat daerah sebanyak 1 indikator, urusan sekretariat DPRD sebanyak 1 indikator, dan sebanyak 1 indikator juga dalam urusan pengawasan.

2.4 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Mendasari Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam Pasal 163 ayat (2)-(3) berbunyi Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. Permasalahan ini dapat bersumber dari hasil kajian review capaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan maupun dari isu isu berkembang nasional dan/atau provinsi.

Permasalahan pokok penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang dikelompokkan berdasarkan pembagian urusan yaitu permasalahan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan pilihan dan permasalahan urusan penunjang. Secara rinci permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:a.

a. Permasalahan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam peran meningkatkan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

- a) Rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah;
- b) Rendahnya angka capaian Rata-Rata Lama Sekolah akibat dari rendahnya minat masyarakat melanjutkan sekolah;
- c) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana minimal pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair, khususnya sekolah

SD/MI dan SMP/MTs yang belum semuanya dalam kondisi baik;

- d) Belum optimalnya akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan satuan Pendidikan Non Formal; minimal terakreditasi B;
- e) Belum semua guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi.

2. Urusan Kesehatan

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

- a) Tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) yang dikarenakan penyakit penyerta tidak menular seperti jantung, hipertensi dan TB;
- b) Belum optimalnya skrining pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, TB, DM;
- c) Belum optimalnya penanganan gizi buruk;
- d) Masih adanya kasus *Stunting*;
- e) Belum optimalnya sarana dan prasarana bidang kesehatan;
- f) Belum semua desa bebas ODF;
- g) Belum optimalnya skrining kesehatan bagi warga Negara usia 15-59 tahun;
- h) Belum optimalnya pelayanan terhadap Ibu Bersalin maupun Ibu Hamil akibat masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Masih adanya luasan irigasi dalam kondisi rusak;
- b) Masih adanya total panjang drainase dalam kondisi rusak/rusak parah;

- c) Belum optimalnya kondisi jalan yang merupakan akses utama perekonomian masyarakat;
- d) Rendahnya rasio alat berat terhadap panjang jalan;
- e) Belum optimalnya perwujudan rencana tata ruang.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam masyarakat, terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang aman dan sehat sangat diperlukan. Namun dalam upaya pemenuhannya masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya upaya pemenuhan rumah layak huni dan rumah sehat;
- b) Belum optimalnya upaya pemenuhan infrastruktur lingkungan perumahan dan sanitasi yang layak;
- c) Belum seluruhnya kebutuhan akses air minum dan sanitasi terpenuhi;
- d) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
- e) Belum optimalnya penanganan taman dalam kondisi baik.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a) Terbatasnya jumlah SDM Linmas untuk mendukung upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- c) Angka penyakit masyarakat yang masih relatif tinggi.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan permasalahan yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a) Belum optimalnya penanganan PMKS;
- b) Masih sedikitnya panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial;

- c) Masih rendahnya bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.

b. Permasalahan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan sektor tenaga kerja menjadi sangat penting guna menjawab bagaimana tantangan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga. Dengan begitu, beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dari sektor tenaga kerja yaitu:

- a) Meningkatnya angka pengangguran terbuka Kabupaten Batang;
- b) Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Batang dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Batang;
- c) Jumlah lowongan kerja mampu memenuhi kebutuhan pada jumlah angkatan kerja;
- d) Banyaknya perusahaan yang belum memahami K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam pelaksanaan pembangunan dengan perspektif gender masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya perwujudan kesetaraan gender dan anak;
- b) Belum optimalnya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

3. Urusan Pangan

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam urusan pangan yaitu Rendahnya informasi ketersediaan pasokan, harga, dan akses pangan.

4. Urusan Pertanahan

Berdasarkan data capaian kinerja urusan Pertanahan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan;
- b) Masih rendahnya lahan yang bersertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data capaian kinerja Lingkungan Hidup, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan masih belum baik, ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih berada pada kategori cukup;
- b) Belum optimalnya penanganan persampahan di Kabupaten Batang;
- c) Masih rendahnya tutupan lahan di Kabupaten Batang, sehingga mempengaruhi Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan online dalam pembuatan dokumen kependudukan;
- b) Belum maksimalnya pemanfaatan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya peran PKK di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Masih kurang aktifnya pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan;
- c) Belum optimalnya peran tenaga pendamping desa dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:

- a) Menurunnya PUS yang menjadi peserta KB aktif;
- b) *Unmetneed* KB yang masih relatif tinggi;
- c) Menurunnya angka partisipasi KB (akseptor KB) di Kabupaten Batang;
- d) Belum optimalnya akses dan pelayanan KB di Kabupaten Batang.

9. Urusan Perhubungan

Berdasarkan data capaian kinerja Perhubungan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, khususnya rambu-rambu dan penerangan jalan umum;
- b) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perhubungan.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data capaian kinerja Komunikasi dan Informatika, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja Pemerintah;
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
- c) Belum optimalnya tata kelola dan layanan SPBE;
- d) Belum optimalnya sarana dan prasarana TIK.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data capaian kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan dan UMKM;
- b) Masih rendahnya persentase koperasi sehat;

- c) Masih banyaknya UMKM dan wirausaha baru yang tidak dapat bertahan karena terkendala permodalan;
- d) Menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak *Covid-19* terhadap produk UMKM.

12. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan data capaian kinerja Penanaman Modal, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:.

- a) Menurunnya nilai realisasi investasi;
- b) Belum optimalnya penyediaan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data capaian kinerja kepemudaan dan Olahraga, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan prestasi pemuda dan atlet dalam keolahragaan;
- b) Rendahnya pemuda berwirausaha;
- c) Rendahnya sertifikasi pelaku ekonomi kreatif.

14. Urusan Statistik

Berdasarkan data capaian kinerja urusan statistik, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah dan juga BPS dalam pengelolaan data statistik.

15. Urusan Persandian

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pengelola TIK terhadap keamanan informasi;
- b) Rendahnya nilai indeks keamanan informasi (KAMI).

16. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Belum optimalnya pembangunan budaya pasca pandemi *Covid-19* di Kabupaten Batang.

17. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan data capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Penurunan pengunjung perpustakaan;
- b) Pergeseran minat baca buku fisik ke buku digital.

18. Urusan Kearsipan

Berdasarkan data capaian kinerja Kearsipan, pada urusan kearsipan ini tidak ada permasalahan yang dominan.

c. Permasalahan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Perhitungan produksi perikanan hanya dapat dihitung setelah satu tahun berjalan;
- b) Belum optimalnya binaan kelompok usaha kelautan dan perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Pariwisata, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Lambannya peningkatan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Batang;
- b) Masih adanya destinasi wisata yang belum bekerjasama dengan Disparpora Kabupaten Batang;
- c) Belum optimalnya kapasitas Pokdarwis serta kelembagaannya.

3. Urusan Pertanian

Pembangunan urusan pertanian diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dan produktivitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Adanya gap persepsi SOP Tanaman;
- b) Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani;
- c) Harga komoditas pertanian yang cenderung fluktuatif;
- d) Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi terhadap petani.

4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung kelancaran perekonomian yang mana saling berkaitan dan menunjang dengan sektor lain. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum semua perusahaan memiliki izin;
- b) Nilai ekspor rendah akibat pandemi;
- c) Rendahnya kontribusi pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD Kabupaten Batang.

5. Urusan Perindustrian

Sebagai salah satu sektor yang menjadi penopang dalam struktur ekonomi di Kabupaten Batang, urusan perindustrian masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Menurunnya pertumbuhan industri di Kabupaten Batang;
- b) Belum optimalnya wirausaha baru yang tergabung dalam kelompok.

6. Urusan Ket transmigrasian

Permasalahan dalam transmigrasi karena adanya pandemi yang mengakibatkan kegiatan transmigrasi ditiadakan secara nasional.

d. Permasalahan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Berdasarkan data capaian kinerja Perencanaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan salah satu kendalanya adalah dimana tidak semua Organisasi Perangkat Daerah telah memahami mekanisme dan manfaat perencanaan;
- b) Dinamika perubahan regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang cepat.

2. Keuangan

Berdasarkan data capaian kinerja Keuangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Kurang kolaborasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait persyaratan pelayanan pajak;
- b) Masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya;
- c) Belum optimalnya kepengurusan aset milik daerah (status kepemilikan, kondisi, dan persebaran aset).

3. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan data capaian kinerja Penelitian dan Pengembangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

- a) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- b) Kurangnya pengintegrasian data dari Organisasi Perangkat Daerah agar dapat diakses dengan mudah dan cepat;
- c) Belum adanya ekosistem inovasi;
- d) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kelitbangan daerah.

4. Kepegawaian

Berdasarkan data dan capaian kinerja kepegawaian, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

- a) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian;
- b) Rendahnya tertib arsip data kepegawaian

5. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan data dan capaian kinerja kepegawaian, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

- a) Rendahnya ASN yang mengikuti diklat

6. Sekretariat Daerah

Berdasarkan data capaian kinerja sekretariat daerah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b) Belum optimalnya penguatan komunikasi informasi kepada organisasi pemerintah daerah;
- c) Belum optimalnya implementasi manajemen kinerja.

7. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

8. Pengawasan

Berdasarkan data capaian kinerja Pengawasan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Rendahnya transisi digitalisasi data pengawasan di Kabupaten Batang.
- b) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Batang;
- c) Belum optimalnya tindak lanjut penyelesaian LHP.

e. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan data capaian kinerja kewilayahan, secara umum masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu jumlah usulan banyak yang belum terakomodir dengan baik hal ini dikarenakan usulan tidak termasuk dalam prioritas pembangunan daerah.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional serta isu strategis dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Batang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing daerah serta penyiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi KITB

Daya saing semakin mencuat seiring berkembangnya inovasi dan kebijakan dalam pengelolaan daerah. Dalam memenuhi komponen daya saing setiap daerah perlu bersaing dan “berkompetisi” dengan daerah lain guna meningkatkan daya tawar daerah. Daya saing sendiri digambarkan sebagai produktivitas dan kemampuan daerah terhadap wilayah lainnya. Beberapa faktor utama daya saing terdiri dari infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kelembagaan daerah dalam hal ini pemerintah yang bergerak sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaannya.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Batang sudah mencakup diatas 75% dalam kondisi baik. Pembangunan manusia Kabupaten Batang yang direpresentasikan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tren yang selalu meningkat. Terlihat dari tahun 2018 IPM Kabupaten Batang capaiannya sebesar 67,86 dan terus meningkat sampai tahun 2022 mencapai sebesar 69,45.

Walaupun menjadi indikator yang tidak terdampak langsung adanya pandemi Covid 19, namun IPM Kabupaten Batang masih pada level Sedang hingga tahun 2022. IPM dibentuk oleh 3 komponen yakni tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita. Pada komponen pendidikan yaitu (1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan capaian sebesar 0,02 dari tahun 2021 menjadi 6,90 tahun di 2022, dan (2) Harapan Lama

Sekolah (HLS) meningkat pada capaian maupun pertumbuhan menjadi 12,14 di tahun 2022 dari angka 12,13 di tahun 2021. Permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja komponen pendidikan dalam IPM adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang akan berdampak pada masalah tenaga kerja serta rendahnya kualitas masyarakat usia produktif terutama adanya bonus demografi di Kabupaten Batang yang berpotensi pada peningkatan pengangguran dan ketidakseimbangan pada kualitas dan kualifikasi SDM.

Angka pada komponen harapan hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami peningkatan pada capaian tahun 2021. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan usia harapan hidup diantaranya adalah masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita. Komponen lain yaitu Pengeluaran per kapita Disesuaikan yang dihitung berdasarkan rata rata tingkat konsumsi rumah tangga yang masih diangka 9972 ribu/orang. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Batang dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing masih belum optimal. Upaya penguatan lintas sektoral diharapkan mampu menjadi pengungkit guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Batang.

2. Penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi sektor unggulan daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung fluktuatif pada kisaran 4,9 – 5,3 persen. Namun akibat dari pandemi *Covid-19*, pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Batang mengalami kontraksi sebesar minus 1,29 persen. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang sudah mengalami peningkatan kembali yaitu pada angka 4,88 persen.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah utamanya pada sektor lapangan usaha industri pengolahan, adalah melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, penyediaan tenaga kerja yang terampil serta meningkatkan pengembangan kawasan industri yang didukung fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku. Untuk kedepannya dengan menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengoptimalan beberapa sektor unggul diharapkan mampu meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Batang secara berkelanjutan.

Dengan adanya penciptaan nilai tambah pada sektor unggulan diharapkan mampu berpengaruh positif pada pengentasan kemiskinan hingga penganggulangan pengangguran di Kabupaten Batang. Hal ini selaras dengan mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (*zero*) persen pada tahun 2024. Mandat kebijakan ini harus dipantau dengan baik mengingat tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat kompleks terutama yang menjadi akar permasalahan kemiskinan yaitu kelompok masyarakat usia tidak produktif, tanpa keahlian dan pendidikan cenderung rendah yang akan memunculkan pengangguran tanpa keahlian

3. Peningkatan Infrastruktur berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh

Infrastruktur menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama sejak dimulainya era kepemimpinan Presiden Jokowi. Infrastruktur sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan karena ia mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur yang diwujudkan harus berkesinambungan, ramah lingkungan, lestari, dan ikut

mengurangi pemanasan global (*global warming*) dengan mendukung konsep *Green Infrastructure*. Konsep *Green Infrastructure* diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan termasuk sampah, banjir rob, abrasi serta kawasan kumuh. Dalam sudut pandang ekonomi, kontribusi infrastruktur dalam pembangunan sebagai sarana prasarana guna mempermudah aksesibilitas yang diharapkan mendorong pemerataan pembangunan dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur ini juga harus berbasis lingkungan berkelanjutan. Pemerataan infrastruktur dapat direpresentasikan melalui indikator indeks infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan profesionalisme birokrasi

Perihal terkait tata kelola pemerintahan yang perlu mendapat perhatian antara lain belum optimalnya pelayanan publik serta belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan adalah kemandirian fiskal daerah. Melalui optimalisasi teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penerapan prinsip reformasi birokrasi.

5. Penguatan Kondusivitas Wilayah dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Selaras dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum serentak di tahun 2024, adanya upaya dukungan sinergitas baik di tingkat pemerintah daerah hingga di seluruh unsur masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kondusivitas wilayah guna pelaksanaan pemilu yang aman dan damai.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Indonesia tahun 2020 sempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 Ekonomi Indonesia mulai tumbuh sebesar 3,69 persen (y-o-y), lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 diperkirakan menguat hingga kisaran 5,3 hingga 5,9 persen. Hal ini merujuk pada sumber pertumbuhan yang didorong dari sisi pengeluaran yakni konsumsi, investasi, serta ekspor. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,3 persen per tahun.

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen dari tahun sebelumnya dengan kontribusi terbesar dari sektor transportasi dan Pergudangan sebesar 73,03 persen yang kemudian disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum dengan kontribusi sebesar 16,99 persen.

Perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 5,97 pada tahun 2022 capaian ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 4,88 persen. Sektor penyumbang perekonomian Kabupaten Batang terbesar yakni sektor industri pengolahan dengan menyumbang sekitar 32 persen dari seluruh total PDRB Kabupaten Batang Tahun 2022. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dua tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten

Batang optimis di tahun 2023 hingga tahun 2024 menargetkan ekonomi tumbuh dikisaran 4,9-5,10 persen. Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2022, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2024 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang guna mendukung kebijakan Kabupaten Batang tahun 2024 yang difokuskan melalui arah kebijakan **“Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah”**.

3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tumbuh hingga 5,97 persen di tahun 2022. Selama periode tahun 2018-2022 struktur perekonomian Kabupaten Batang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 5.445.934,39 juta rupiah atau sekitar 32,60%; selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 3.016.331,06 juta rupiah atau sekitar 18,05%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2.308.457,86 juta rupiah atau sekitar 13,81% dari PDRB yang kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 1.160.652,38 juta rupiah atau sekitar 6,95% dan yang terakhir dari sektor Jasa Pendidikan sebesar 867.162,11 juta rupiah atau sekitar 5,19%.

Struktur ekonomi Kabupaten Batang dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa komponen pengeluaran pada tahun 2020 yang menunjukkan peningkatan terhadap kontribusi PDRB adalah konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 70,07 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 26,72%. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) yaitu 77,90 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Kabupaten Batang, perekonomian Kabupaten Batang tahun 2020 sempat berkontraksi hingga 1,29 persen. Namun mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 hingga 4,88 persen dan terus meningkat kembali di tahun 2022 mencapai angka 5,97 persen. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 kondisi perekonomian Kabupaten Batang diperkirakan mulai membaik melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak guna mengurangi dampak pandemi Covid-19 di tahun 2022, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2023 di proyeksikan pada kisaran 4,97-5,0 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Guna memproyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan indentifikasi tantangan, peluang, dan arah kebijakan dalam mewujudkan proyeksi tersebut. Tantangan ekonomi di Kabupaten Batang diantaranya :

- Peningkatan investasi, yang didorong untuk selalu tumbuh. Penguatan kelembagaan hingga prosedur investasi yang efisien akan mampu mendorong investor masuk untuk menanamkan modal di Kabupaten Batang;
- Kualitas Sumber Daya Manusia, secara kuantitas, penduduk Kabupaten Batang sudah cukup potensial untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Namun dalam sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Batang belum cukup unggul untuk bersaing dengan tenaga kerja global. Hal ini didasari oleh capaian rata-rata lama sekolah serta pendidikan penduduk terakhir ditamatkan yang masih didominasi pada tamatan SD-SMP.
- Ketersediaan Bahan Baku Industri, dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Batang seharusnya daerah mampu dalam menyediakan/men-supply dalam jumlah yang banyak untuk menjamin kelangsungan produksi di kawasan industri.

Melihat adanya tantangan ekonomi di Kabupaten Batang, dalam sisi lain pasti terdapat peluang yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Batang, antara lain :

- Investasi yang akan terus tumbuh mengingat adanya kawasan industri di Kabupaten Batang yakni KIT dan BIP
- Potensi Pariwisata yang cukup banyak di Kabupaten Batang, dari adanya wisata gunung hingga pantai. Dampak pariwisata terhadap perekonomian mampu memberi efek penggandaan (*multiplier effect*).
- Penguatan industri dan potensi lokal, pengembangan industri lokal serta potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal Kabupaten Batang.
- Kemudahan dalam perijinan perusahaan serta kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Pemanfaatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah

Memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi daerah, dalam upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19, serta untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6 persen, pada tahun 2023 dilakukan strategi menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi, melalui :

- a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif
- b) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura)
- c) Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenities wisata
- d) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan

pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian

- e) Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat
- f) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah
- g) Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi
- h) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif
- i) pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 dan 2024 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2024

NO	Indikator	Target Rancangan Awal RKPd 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,7-6,2
2.	Inflasi (persen)	2,3-3,3
3.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	22,3
4.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	2000
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	5,6
6.	Kemiskinan (persen)	8,34-7,90

Sumber: Bapelitbang Kab. Batang, 2022

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum kinerja pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Batang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung-jawaban

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2024 didasarkan atas penghitungan pertumbuhan PDRB dan potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

- a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2024, didasarkan atas *baseline* tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan mempertimbangkan potensi Pajak dan retribusi di daerah. Variabel PDRB penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Pajak Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 diproyeksikan meningkat dari tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 136.775.000.000
- b) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proyeksi Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh secara signifikan. Beberapa pos retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain perubahan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dan penyesuaian model atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya reklasifikasi dalam UU HKPD pajak daerah dari 16 menjadi 14 serta meresionalisasi retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis layanan. Sehingga pada tahun 2024 retribusi daerah Kabupaten Batang diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp 21.200.663.500.

- c) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari BUMD yang ada di Kabupaten Batang, yaitu dari Perumda Aneka Usaha, Bapera dan PDAM Sendang Kamulyan. Proyeksi ini didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi cukup signifikan. Sehingga pada tahun 2024 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 15.783.027.000,00.
- d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2020-2022. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan RSUD Pemerintah

Kabupaten Batang dan Puskesmas, namun demikian sesuai regulasi pendapatan ini selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp. 136.892.399.738,00.

2) **Pendapatan Transfer**

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2023. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan tahun 2020-2022 :

Tabel 3. 2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
tahun 2020-2022

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	225.961.233.297,00	322.789.372.917,64	300.965.373.375,01
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	64.745.526.225,00	108.435.863.155,00	129.078.191.268,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	14.750.084.769,00	16.163.677.602,00	22.354.240.158,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.231.847.500,00	12.766.436.070,00	13.058.044.717,00
01.01.04	Lain-lain PAD	133.233.774.803,00	185.423.396.090,64	136.474.897.232,01
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.427.023.283.000,00	1.419.276.630.191,00	1.444.829.519.507,00
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.022.963.218.000,00	1.068.002.486.995,00	1.096.299.986.931,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	23.806.603.000,00	62.161.899.343,00	41.909.578.554,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.764.707.000,00	3.558.815.529,00	4.189.088.638,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	753.352.485.000,00	737.685.667.000,00	734.763.251.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	236.039.423.000,00	264.596.105.123,00	315.438.068.739,00
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	279.903.722.000,00	221.954.156.235,00	208.032.695.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)	86.872.377.000,00	26.237.653.000,00	7.839.277.000,00
1.2.2.4	Pendapatan Dana Desa	193.031.345.000,00	195.716.503.235,00	200.193.418.000,00
01.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.156.343.000,00	129.319.986.961,00	144.638.152.000,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.899.343.000,00	120.623.411.961,00	133.251.678.000,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	15.257.000.000,00	8.696.575.000,00	11.386.474.000,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	75.452.200.000,00	79.756.577.886,00	1.020.475.000,00
01.03.01	Pendapatan Hibah		2.937.773.000,00	1.002.000.000,00
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat		-	-
01.03.03	Pendapatan Lainnya	75.452.200.000,00	76.818.804.886,00	18.475.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.728.436.716.297,00	1.821.822.580.994,64	1.750.957.035.202,01

Sumber : BPKPAD Kab Batang, 2023

Tabel 3. 3
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2024

Uraian	TAHUN	
	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	309.151.566.392	310.651.090.238
Pajak Daerah	126.235.000.000	136.775.000.000
Retribusi Daerah	25.707.500.000	21.200.663.500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.186.086.292	15.783.027.000
Lain-lain PAD yang Sah	144.022.980.100	136.892.399.738
PENDAPATAN TRANSFER	1.411.546.233.184	1.473.630.735.600
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.280.867.890.184	1.326.386.644.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.678.343.000	147.244.091.600
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.484.000.000	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.484.000.000	0
Jumlah Pendapatan	1.802.181.799.576	1.784.281.825.838

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 antara lain :

- Optimalisasi berbagai Pungutan Pendapatan Asli Daerah
- Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;

- Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah
- Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan

B. Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi dengan rincian :

1. Belanja Pegawai

Guna memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk di dalamnya adalah proyeksi kenaikan jumlah ASN di Kabupaten Batang, maka belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam penambahan dan pemenuhan gaji ASN baru. Belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 751.421.698.636,00.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja Barang Jasa diasumsikan naik menjadi Rp 820.162.057.760. Belanja ini dianggarkan untuk barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3. Belanja Hibah

Pada pos belanja ini terjadi perubahan yang fluktuatif. pelaksanaan pilkada dan pilkades dimasukkan pada komponen

belanja ini. Belanja hibah untuk pelaksanaan pilkada dialokasi pada tahun 2023 dan 2024, sehingga pada tahun tersebut terdapat kenaikan belanja hibah yang signifikan dibandingkan pada tahun 2022. Pada tahun 2024 belanja hibah di proyeksikan sebesar Rp. 88.767.831.553.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin. Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 10.965.650.000.

b. Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan menurun dari tahun 2023 terhadap tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 114.973.134.208. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tahun 2024 di proyeksikan sama dengan tahun 2023 yaitu dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer pada tahun 2024 diproyeksikan sama dengan tahun 2023 menjadi sebesar Rp 42.082.654.076.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Tahun 2020-2022

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*)
1	2	4	5	
2	BELANJA			
02.01	BELANJA OPERASI	1.290.480.931.062,86	1.241.149.542.241,00	1.267.645.675.943,00
02.01.01	Belanja Pegawai	794.106.734.677,70	736.685.014.763,00	728.689.787.535,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	376.653.648.986,16	409.192.008.978,00	440.412.460.908,00
02.01.03	Belanja Bunga			
02.01.04	Belanja Subsidi			
02.01.05	Belanja Hibah	97.983.074.702,00	78.252.243.500,00	85.009.607.500,00
02.01.06	Bantuan Sosial	20.927.763.433,00	17.020.275.000,00	13.533.820.000,00
02.01.07	Bantuan Keuangan	809.709.264,00		
02.02	BELANJA MODAL	200.693.829.740,00	196.084.228.826,00	183.195.271.255,00
02.02.01	Belanja Tanah	4.925.000.000,00		49.000.000,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	53.636.090.890,00	53.059.021.980,00	33.491.783.408,00
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	62.741.290.918,00	75.262.560.658,00	58.779.585.910,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.312.221.920,00	49.573.496.821,00	89.951.704.275,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.061.498.600,00	18.189.149.367,00	923.197.662,00
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	41.017.727.412,00	-	-
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	37.545.517.000,00	3.103.136.850,00	4.170.055.600,00
2,4	BELANJA TRANSFER	313.445.003.000,00	340.088.223.959,00	346.902.433.685,00
	Belanja Bagi Hasil	313.445.003.000,00	9.923.621.000,00	9.576.624.904,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	313.445.003.000,00	9.923.621.000,00	9.576.624.904,00
	Belanja Bantuan Keuangan	-	330.164.602.959,00	337.325.808.781,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	330.164.602.959,00	337.325.808.781,00
	Jumlah Belanja	1.842.165.280.802,86	1.780.425.131.876,00	1.801.913.436.483,00
	Surplus/Defisit	-113.728.564.505,86	-41.397.449.118,64	- 50.956.401.280,99

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Tabel 3. 5
Proyeksi Belanja Tahun 2023-2024

Uraian	TAHUN	
	2023	2024
BELANJA		
BELANJA OPERASI	1.355.215.685.843	1.671.308.237.949
Belanja Pegawai	779.531.954.209	751.412.698.636
Belanja Barang dan Jasa	451.191.172.431	820.162.057.760
Belanja Hibah	109.182.398.000	88.767.831.553
Belanja Bantuan Sosial	15.310.161.203	10.965.650.000
BELANJA MODAL	148.133.003.258	114.973.134.208
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.892.933.868	150.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.380.927.045	23.054.812.425
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.958.756.995	39.901.229.858
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.719.935.350	51.279.067.696
Belanja Modal Aset Lainnya	180.450.000	588.024.229
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000	10.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	10.000.000.000
BELANJA TRANSFER	341.078.257.407	42.082.654.076
Belanja Bagi Hasil	9.594.487.907	13.959.954.076
Belanja Bantuan Keuangan	331.483.769.500	28.122.700.000
JUMLAH BELANJA	1.851.926.946.508	1.838.364.026.233

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2023 diolah

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 antara lain :

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),
- Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan
- Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;

- Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui, bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Batang tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Pada tabel berikut dicantumkan hasil realisasi pembiayaan tahun 2019-2021 dan proyeksi dan Belanja Kabupaten Batang tahun 2023-2024

Tabel 3. 6
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.205.398.405,86	179.664.217.216,13	215.751.265.851,77
6,2	PENGELUARAN			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.885.024.541,00	13.668.882.296,00	20.342.000.000,00
	Pembiayaan Netto	104.320.373.864,86	165.995.334.920,13	195.409.265.851,77
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	174.895.334.920,13	203.262.054.761,77	144.452.864.570,78

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Tabel 3. 7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024

Uraian	TAHUN	
	2023	2024
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.745.146.932	61.582.200.395
Penerimaan Pinjaman Daerah	21.000.000.000	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	82.745.146.932	61.582.200.395
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	7.500.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	21.000.000.000	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.000.000.000	7.500.000.000
Pembiayaan Netto	49.745.146.932	54.082.200.395

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mempedomani amanat pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 secara khusus amanat pembangunan Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 khususnya amanat pembangunan RKP Tahun 2024, serta amanat pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Visi Misi RPJPD 2005-2025

Visi Kabupaten Batang yang dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah selama tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut

“Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan”.

Penjelasan makna visi diatas perlu diberikan untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Batang diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Sejahtera diartikan aman, sentosa dan makmur. Masyarakat Batang yang sejahtera identik dengan masyarakat yang dapat menikmati ketenangan dalam berperikehidupan, dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan dapat menikmati hasilnya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Maju diartikan bergerak/berjalan kedepan, tampil kemuka, meningkat, menjadi lebih baik dari sebelumnya, bergerak menuju

peradaban yang tinggi. Batang yang maju menunjukkan progress mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh tingkat intelektualitas/rasionalitas yang semakin baik, termasuk semakin banyak menerapkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berusaha, dan pemerintahan.

Mantap diartikan teguh, tidak berubah, tidak goyah, stabil, tidak ada gangguan, teguh hati, kukuh, kuat. Batang yang mantap diharapkan mampu untuk teguh pada nilai dan prinsip berbasis pada moral, etika, dan religi; sehingga akan dapat membantu dalam menciptakan kondisi lokal yang stabil dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Mandiri diartikan dalam keadaan berdiri sendiri, dapat mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Batang yang mandiri tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada masyarakat yang mampu mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk kemajuan daerah, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek networking.

Berbasis potensi unggulan diartikan sebagai berdasarkan pada karakteristik lokal (kekuatan) yang lebih tinggi, lebih utama, lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain sehingga lebih besar peluang keberhasilannya. Batang yang berbasis potensi unggulan menunjukkan suatu daerah beserta masyarakatnya yang membangun berdasarkan pada kekuatan lokal sebagai modal dasar, kekuatan lokal Batang antara lain terletak pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Dalam rangka mengemban pencapaian visi oleh segenap stakeholders, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif,
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi,
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis pada profesionalisme, kapasitas, kapabilitas, dan jejaring,

4. Peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang pengembangan kawasan berbasis pada kemampuan dan potensi lokal,
5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang sejahtera, tenteram, tertib, aman, demokratis, dan kondusif,
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

Arah, Tahapan dan Prioritas Pelaksanaan RPJMD IV (2022-2026)

Pelaksanaan RPJMD IV (2022-2026) akan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan, didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup.

- 1) Pada misi pertama,

Diharapkan terjadi kondisi mantapnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang dalam perikehidupan bermasyarakat dan pemerintahan yang semakin dinamis dan harmonis.

- 2) Pada misi kedua,

Diharapkan terjadi kondisi perekonomian Kabupaten Batang yang mantap dan tumbuh secara positif, mantapnya kontribusi dan daya saing sektor unggulan daerah (perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata), mantapnya kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, mantapnya kerjasama dan investasi bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis.

- 3) Pada misi ketiga,

Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan semakin mantap, makin mantapnya kinerja kelembagaan pemerintah, makin mantapnya profesionalisme aparatur daerah, makin mantapnya kemampuan keuangan daerah, makin majunya kerjasama bagi kemajuan daerah, dan makin mantapnya kualitas pelayanan publik.

4) Pada misi keempat,

Diharapkan terjadi kondisi mantapnya kualitas dan kuantitas serta pemerataan prasarana dan sarana pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan peningkatan kualitas pelayanan publik, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akibat dukungan prasarana dan sarana yang memadai, dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi yang mendukung kemajuan daerah.

5) Pada misi kelima,

Diharapkan terjadi kondisi sosial dan budaya masyarakat dengan kesejahteraan yang mantap, terciptanya iklim demokrasi yang mantap didukung dengan konsisten kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat, dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

6) Pada misi keenam

Diharapkan terjadi kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari sehingga menurunkan jumlah kejadian bencana alam, dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 tahap ke empat dan isu strategis aktual. Selanjutnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023-2026. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren capaian 5 tahun terakhir dengan diasumsikan kondisi perekonomian telah mulai pulih, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut :

- I. **Tujuan I** : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Melalui tujuan pertama ini, Pemerintah Kabupaten Batang, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup dan kehidupan sekurangnya dari aspek: a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sektor unggulan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Batang, dan menurunkan kesenjangan antar kelompok pengeluaran. d. Peningkatan harmoni kehidupan, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan didukung oleh penyediaan dan pemerataan infrastruktur.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Daya Saing Daerah, serta dijabarkan dalam sasaran :

- a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, dengan indikator sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengeluaran Perkapita.
- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan penganggura, dengan indikator sasaran Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran terbuka.
- d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi, dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur.

- e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

II. **Tujuan II** : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi serta mendorong reformasi birokrasi pada semua level pemerintahan yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat secara dinamis, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance*, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

III. **Tujuan III** : Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan (*resilience*) serta untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, yang dilator belakangi dalam periode 4 (empat) tahun terakhir ini Kabupaten Batang termasuk daerah dengan resiko bencana tinggi. Tujuan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Batang yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, tanpa ada konflik sosial maupun agama bahkan konflik SARA, serta terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini, diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan Indeks Rasa Aman, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah.

- b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Demokrasi.
- c. Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang, dengan indikator sasaran Angka kriminalitas.

Perwujudan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten telah ditentukan target dalam empat tahun kedepan. Sebagai landasan implementasi RKPD tahun 2024, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan diwujudkan tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan		PDRB per Kapita (ADHK)	juta Rp	22,3	PDRB th n / jumlah penduduk th n
			Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,507	Nilai IDSD
		1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70,04	rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	91,98	Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,93	peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik dilihat dari 3 komponen, keterwakilan di parlemen; pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan
	2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,7-6,20	{(PDRB th n – PDRB th (n-1)) : PDRB th (n-1)} *100
			Tingkat Pengeluaran Per kapita	(Rp. 000/tahun)	9,803	(Pengeluaran dikurangi pengeluaran minimal) dibagi (pengeluaran maksimal dikurang pengeluaran minimal)
	3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka		Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	persen	21,6	Persentase pendapatan penduduk 40% terendah terhadap total pendapatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	Formulasi Perhitungan			
		kemiskinan dan pengangguran	Persentase Penduduk Miskin	persen	8,34-7,90	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang dibagi jumlah penduduk Kab. Batang			
			Tingkat Pengangguran terbuka	persen	5,6	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja			
		4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi	Indeks Infrastruktur	indeks	197,04	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int			
						Indeks infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses tehadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah			
		5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	65,04	IKLH Kabupaten = IKLH =(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)			
2	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel					Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	68,66	IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IKA = indeks Kualitas air IKU = indeks Kualitas udara
									IKL = Indeks Kualitas Lahan
						Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen :			
						1. Manajemen Perubahan; 2.Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3.Penataan dan Penguatan Organisasi; 4.Penataan Tatalaksana; 5.Penataan Sistem Manajemen SDM; 6. Penguatan Akuntabilitas; 7.Pengiatan Pengawasan; 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	Formulasi Perhitungan
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	skor	70,5	(30% perencanaan kinerja + 25% pengukuran kinerja + 15% pelaporan kinerja + 10% evaluasi internal + 20% capaian kinerja)
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	Level 3	Penilaian secara kualitatif melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	79	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,45	Kualitatif, melalui survey kepada masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
3	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	155	Perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability, kapasitas (capacity)
			Indeks Rasa Aman	indeks	4,2	Survei/kuisisioner kepada masyarakat
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,81	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisisioner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah
		Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Indeks Demokrasi	indeks	72	Kualitatif, melalui kuisisioner
		Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	Angka kriminalitas	persen	0,015	Jumlah kasus kriminalitas dibagi jumlah penduduk

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

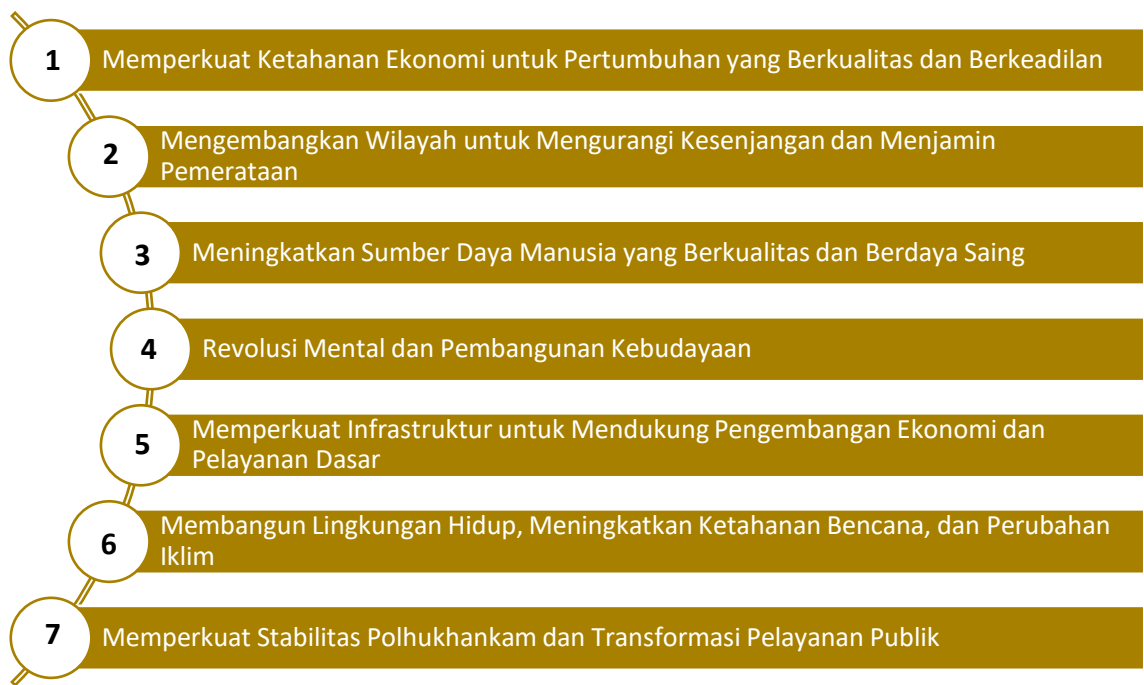
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2024 ini merupakan pedoman perumusan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan

di tingkat nasional yang mengacu pada dokumen jangka menengah yakni RPJMN Tahun 2019 – 2024. Keberhasilan pembangunan diukur dari tingkat pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun berjalan.

Dengan mendasari Visi Misi Presiden Indonesia, penyusunan RPJMN Tahun 2019 – 2024 ini diterjemahkan dalam 7 Agenda Pembangunan Yakni :

Gambar 4. 1
Tujuh Agenda Pembangunan



Tema RKP Tahun 2024 yakni **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 arah kebijakan yang ditetapkan yakni :

Gambar 4. 2
Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber : RKP Tahun 2024

Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut ditetapkan **Prioritas Nasional** Tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar 4. 3
Sumber Rancangan RKP Tahun 2024



Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 %
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 – 5,7 %
4. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377 (nilai)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99 – 74,02
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) SEBESAR 27,27 %
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107 – 110
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105 – 108

4.2.1.1 Dukungan Daerah Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas pembangunan Kabupaten Batang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta Prioritas Nasional tahun 2024 yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2024 sebagaimana Prioritas Nasional Tahun 2024 yang telah tertera dalam narasi diatas. Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional diatas, adapun

program daerah yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkadilan	PP.3 Peningkatan Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio Desa mandiri Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun
			Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
			Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian
			Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian
	PP.4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, perikanan, dan kelautan		Persentase validitas data Pertanian
			Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap
			Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan
	PP.5 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik
		Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru
		Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga
	PP.6 Peningkatan niai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase jumlah Industri dalam SIINas
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan
		Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI
	PP.7 Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP.2 Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	persentase transmigran yang berhasil ditempatkan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target
			Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target
			Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	PP.1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang valid
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana
	PP.2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)
	PP.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar /Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita
	PP.4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)
			Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4
	PP.5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Penghargaan yang diterima
	PP.6 Pengentasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru
		Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani
	PP.7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)
			Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti
			Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target
			Persentase lelang melalui e-procurement
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP.1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud
		Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan
	PP.2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/ sanggar kesenian yang difasilitasi
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa
	PP.4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar	PP.1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak
			Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA dalam kondisi baik

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
	PP.2 Infrastruktur Ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
	PP.3 Infrastruktur Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang
	PP.5 Transformasi Digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP.1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik

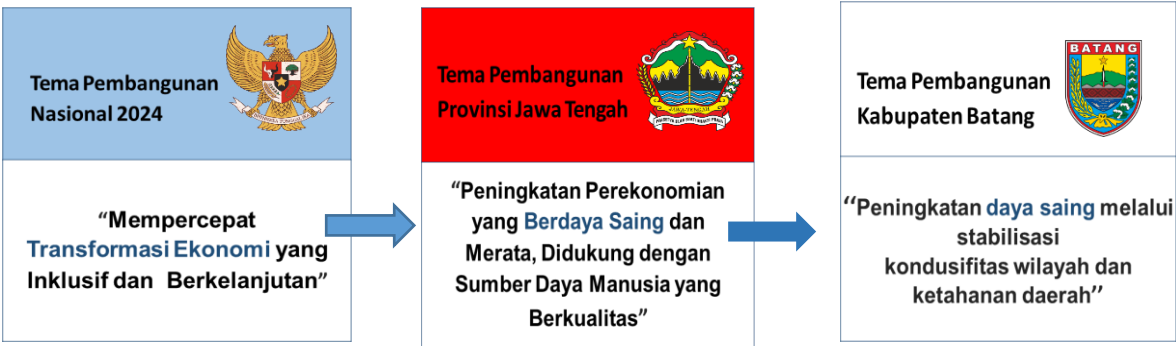
Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten
	PP.2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)
			Persentase Jumlah Desa/ Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)
	PP.3 Pembangunan Rendah Karbon	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP.1 Konsolidasi Demokrasi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah
	PP.3 Penegakan Hukum Nasional	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan
	PP.4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu
			Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi
			Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan
			Persentase kUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan
			Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD
			Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD
			Persentase penyerapan aspirasi masyarakat
			Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD
			Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD
			Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
			yang dilaksanakan dengan baik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan
			Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level SPIP
			Persentase kapabilitas APIP
		Program Penataan Desa	persentase budaya desa yang dilestarikan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu
			Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu
			Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan,

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
			pemnfaatan dan kondisinya
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD
		Program Administrasi Umum	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
			Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah
			Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi
	PP.5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Gambar 4. 4
Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Batang Tahun 2024



4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

RKPD Tahun 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah meliputi:

- a. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
- b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
- c. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”**, dengan prioritas dan fokus pembangunan yang diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

- 1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
- 2. Angka Kemiskinan sebesar 9,44 – 8,52 persen;
- 3. Rasio Gini sebesar 0,372;
- 4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
- 5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
- 6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
- 7. Nilai Tukar Petani sebesar 105,45;
- 8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
- 9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
- 10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
- 11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
- 12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;

- 13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
- 14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

a) Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 178 yang menyatakan bahwa pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prinsip pembangunan serta ketersediaan kapastitas riil anggaran. Dalam memberikan usulan pikir, anggota dewan menangkap aspirasi dari masyarakat melalui beberapa kegiatan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Batang. Adapun garis besar pokok pikiran DPRD Kabupaten Batang tahun 2024 yang dikelompokkan menjadi beberapa sub unsur yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Pokok- Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

No.	Saran dan Pendapat Berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD	Keterangan
1	Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi Masyarakat	- Pengadaan Sarana prasarana teknologi informasi (CCTV, Komputer, Laptop, dll) - Pelatihan Penggunaan prasarana teknologi informasi
2	Peningkatan Potensi Wisata Daerah	- Pengembangan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan pariwisata berbasiskan kemasyarakatan; - Menyediakan pelayanan jasa kepada operator pariwisata seperti : pelayanan makanan, transportasi, akomodasi dan panduan berwisata;
3	Pembangunan Konektivitas Pusat-Pusat Ekonomi	- Pembangunan dan perbaikan jalan utama dan jalan lingkungan serta bangunan pendukungnya secara menyeluruh sampai pedesaan; - Pembuatan dan perbaikan jembatan;
4	Pemantapan Pelayanan Publik	Pemeliharaan/pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang

No.	Saran dan Pendapat Berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD	Keterangan
		menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Batang;
5	Penanggulangan pengangguran	- Pemberian pelatihan keterampilan dan managerial kepada masyarakat, lembaga masyarakat, wirausaha mikro, industri kecil dan tenaga kerja mandiri; - Pemberdayaan ekonomi pemuda;
6	Penanggulangan Kemiskinan	- Pemberian bantuan modal; - Pelaksanaan kegiatan padat karya; - Pemberian bantuan sosial;
7	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pembangunan/pemeliharaan/pengadaan sarana prasarana pendidikan guna peningkatan pelayanan kependidikan;
8	Peningkatan Layanan Kesehatan	- Peningkatan keterjangkauan fasilitas kesehatan oleh seluruh masyarakat; - Pemeliharaan dan pengadaan sarpras kesehatan;
9	Penanggulangan Bencana Banjir, Rob dan bencana alam lainnya	- Normalisasi sungai dan drainase di wilayah perkotaan; - Optimalisasi sarana prasarana persampahan;
10	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa	- Pemberdayaan Bumdes; - Pemberian bantuan usaha untuk petani dan peternak; - Pengadaan prasarana penerangan; - Penataan area pemukiman dan persawahan; - Pembuatan perbaikan dan normaslisasi saluran air/drainase dan plengsengan saluran, talud dan tebing; - Pengadaan prasarana air bersih; - Pemberian bantuan kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); - Pembangunan sarana dan prasarana pertanian untuk irigasi dan bendungan.

b) Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

Dengan menyongsong tema pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024 diarahkan pada **“Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah”** dengan fokus sebagai berikut :

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
 - a) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :
 - a) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
 - c) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
 - a) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
 - b) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
 - c) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - d) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - e) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
 - a) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

- b) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - c) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui;
 - a) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
 - b) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - c) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.
- f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :
 - a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
 - c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - d) Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat;
 - e) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan;
 - f) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - g) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, difokuskan melalui peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.
- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
 - a) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - b) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, *job market* serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - a) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - b) Penyediaan Rumah Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - c) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - d) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
 - e) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
 - a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah;
 - b) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;

- e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
- f) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - b) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat interaksi dan pusat perekonomian dan fungsi lainnya;
 - c) Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis, pengendalian banjir dan kerusakan wilayah pesisir;
 - d) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :
 - a) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - b) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai *Research Based Policy*;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
 - a) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - b) Peningkatan layanan dan inovasi administrasi kependudukan;
 - c) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - d) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - e) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
 - f) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;

- g) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
 - a) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
 - b) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh2 agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
 - c) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

Arah kebijakan dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024 yaitu :

1. PDRB Per Kapita (ADHK) sebesar 22,3
2. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,507
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,04
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,98
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 63,93
6. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,70-6,20
7. Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan sebesar 9,803 ribu rupiah per tahun
8. Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) sebesar 21,6
9. Persentase Penduduk Miskin sebesar 8,34-7,90
10. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,6
11. Indeks Infrastruktur sebesar 197,04
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,04
13. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,66
14. Nilai SAKIP Skor 70,5

15. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar Level 3
16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79
17. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,45
18. Indeks Risiko Bencana (IRBI) sebesar 155
19. Indeks Rasa Aman sebesar 4,2
20. Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,81
21. Indeks Demokrasi sebesar 72
22. Angka Kriminalitas sebesar 0,015 persen

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini ditetapkan untuk Penguatan Kolaborasi dalam pemenuhan pelayanan dasar serta pengurangan beban pengeluaran pada masyarakat miskin, Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi, Pengendalian Penduduk, Penguatan sistem kesehatan masyarakat (pemenuhan layanan dasar, penurunan stunting dan ODF) serta upaya promotif dan preventif (GERMAS, PHBS), Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, serta Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

2. Penciptaan nilai tambah sektor unggulan serta penguatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mendorong iklim investasi masuk ke Kabupaten Batang, Pengembangan Kawasan Industri yang berkualitas, Pengendalian inflasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat Kabupaten Batang.

3. Mewujudkan Pembangunan berbasis *Green Infrastructure*

Prioritas ini ditetapkan untuk Pembangunan infrastruktur di wilayah strategis, pengembangan konektivitas wilayah, Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau, Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh, Peningkatan kualitas permukiman padat, serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis.

4. Mewujudkan *Agile Government*

Prioritas ini ditetapkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan dan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, serta peningkatan kualitas data informasi.

5. **Meningkatnya kondusivitas wilayah**

Prioritas ini ditetapkan untuk menjaga kondusivitas wilayah menuju pemilu serentak di tahun 2024, Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini, serta Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan.

Gambar 4. 5
Prioritas Pembangun Tahun 2024 dalam menjawab Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Tahun 2024



Tabel 4. 4
Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD	
							Target	Rp		
1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan								349.015.351.012		
		PDRB per Kapita (ADHK)				juta Rp	22,3			
		Indeks Daya Saing Daerah				indeks	3,507			
	1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas							192.948.859.630		
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			indeks	70,04			
			IPG			indeks	91,98			
			IDG			indeks	63,93			
				Program Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan			1.212.000.000	Disdikbud	
						Angka Partisipasi Sekolah	%	100		
						Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	12,24	920.524.000	Dinkes
					Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,16	501.767.579	Disperpuska
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	100	82.461.229.048	Dinkes
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	0	Dinkes

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Batang)	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Batang)	%	100	69.705.449.200	RSUD Batang
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Limpung)	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limpung)	%	100	0	RSUD Limpung
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	82	715.355.800	Dinkes
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Limpung)	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	100	18.732.200.395	RSUD Limpung
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	90	200.000.000	Disdikbud
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	2.750.000.000	Disdikbud
					Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	100	412.716.000	DP3Ap2KB
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,84	7.550.747.158	DP3Ap2KB
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,36		
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	72	1.357.470.450	Disnaker

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibangun	%	32	2.045.000.000	Disparpora
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan	medali	40	4.188.000.000	Disparpora
				Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	3,2	115.000.000	DP3AP2KB
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak	%	100	0	DP3AP2KB
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	21,43	0	DP3AP2KB
					Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	0	DP3AP2KB
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak	%	80	50.000.000	DP3AP2KB

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	31.400.000	DP3AP2KB
2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah									25.763.707.822	
			Pertumbuhan Ekonomi				%	5,7-6,20		
			Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan				(Rp.000/tahun)	9.803		
				Program Pengembangan sektor Unggulan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis	%	100	25.600.000	Disperindagkop
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	40	87.200.000	DPMPTSP
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	100	49.000.000	DPMPTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	%	100	766.009.107	DPMPTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	7,5	408.800.000	DPMPTSP
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	0,0078	7.624.500.000	Disperindagkop
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	84	0	Disperindagkop
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	36,36	2.668.819.680	Disperindagkop

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan	USD	59.034.726	77.250.000	Disperindagkop
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75	100.000.000	Disperindagkop
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	17	3.553.729.506	Disparpora
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	35	21.000.000	Disparpora
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	0,0103	475.576.129	Dispaperta
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	100	2.341.450.000	Dispaperta
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	75	38.750.000	disperindagkop
					Prorgram Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	37.510.000	Dispaperta
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,5	229.710.000	Dispaperta
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	12,5	3.000.000	Dispaperta
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	125.000.000	Dislutkannak

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	100	10.000.000	Dislutkannak
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	100	130.000.600	Dislutkannak
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan	%	20	195.198.000	Disparpora
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	96	1.649.000.000	Dislutkannak
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	93	310.000.000	Dislutkannak
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	96	30.000.000	Dislutkannak
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	100	4.647.340.100	Dinsos
				Program penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	10	129.640.400	Disperindagkop
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	90	0	Disperindagkop
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta dengan predikat baik	%	90	0	Disperindagkop
					Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM terstandarisasi	%	15	29.624.300	Disperindagkop
3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran									39.834.058.014	

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
			Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)				%	21,6		
				Program Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	46,03	30.263.140.500	Dispermades
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif Kecamatan Batang	%	90	2.874.718.750	Kecamatan Batang
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Wonotunggal	%	90	5.000.000	Kecamatan Wonotunggal
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Bandar	%	90	5.000.000	Kecamatan Bandar
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Blado	%	90	5.000.000	Kecamatan Blado
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Bawang	%	90	5.000.000	Kecamatan Bawang
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Kandeman	%	90	4.975.000	Kecamatan Kandeman
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Tulis	%	90	25.000.000	Kecamatan Tulis
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Subah	%	90	34.000.000	Kecamatan Subah

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Pecalungan	%	90	10.000.000	Kecamatan Pecalungan
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Tersono	%	90	25.000.000	Kecamatan Tersono
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Limpung	%	90	5.000.000	Kecamatan Limpung
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Banyuputih	%	90	5.000.000	Kecamatan Banyuputih
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Gringsing	%	90	30.000.000	Kecamatan Gringsing
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Warungasem	%	90	5.500.000	Kecamatan Warungasem
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Reban	%	90	5.000.000	Kecamatan Reban
			Tingkat Pengangguran terbuka				%	5,6		
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	36	258.404.399	Disnaker
					Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	14,6	210.479.665	Disnaker
			Persentase Penduduk Miskin				%	8,34-7,90		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	63	4.030.000.000	DPRKP
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	100	200.000.000	DPRKP
					Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	540.014.400	Dinsos
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	219.976.300	Dinsos
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1.055.481.800	Bapelitbang
						persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	90,5		
						persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	90,5		
						persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	90,5		
				4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi					88.295.883.046	
			Indeks Infrastruktur				indeks	197,04		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
				Program penyediaan dan pemerataan infrastruktur pro pembangunan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	60,5	42.321.091.124	DPUPR
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	100	8.824.760.000	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		%	64,41	4.089.363.936	DPUPR
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	52,4	2.076.000.000	DPUPR
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	87	5.977.039.050	Dishub
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4,25	6.372.439.436	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				7.086.188.600	DPRKP
						Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	100		
						Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	6.394.910.400	DPUPR

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	81	4.654.090.500	DPRKP
					Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	56,04	500.000.000	DPUPR
5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan									2.172.842.500	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				indeks	65,04		
				Program tata kelola Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	60	383.403.200	DLH
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				200.704.900	DLH
						Indeks Kualitas Air	indeks	50		
						Indeks Kualitas Udara	indeks	80		
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	70	1.526.172.000	DLH
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	60	62.562.400	DLH
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	100	0	DLH
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	100	0	DLH
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel									372.077.064.902	
			Indeks Reformasi Birokrasi				indeks	68,66		
6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah									367.603.682.202	
			Nilai SAKIP				skor	70,5		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)				indeks	level 3		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				indeks	79		
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	100	2.624.756.140	Inspektorat
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.133.667.655	Bapelitbang
						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	-	
						Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	100	-	
						persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	100		
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	indeks	22,4	51.503.350	Disperpuska
					Program Perekonomian Dan Pembangunan				562.551.800	
						Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	15		Bagian Perekonomian

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
						Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	100		Bagian Perekonomian
						Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	96		Bagian Adpem
						Persentase lelang melalui e-procurement	%	100		Bagian PBJ
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				589.804.750	Bag. Kesra
						Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	100		Bagian Pemerintahan
						Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	100		Bagian Pemerintahan
						Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100		Bagian Kesra
						Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	95		Bagian Hukum
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	55	125.000.000	Bapelitbang
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				346.476.200	Inspektorat
						Level SPIP	level	3		
						Persentase kapabilitas APIP	%	70		
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	2,03	3.195.025.300	BPKPAD
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah				357.339.034.857	BPKPAD

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
						Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu		
						Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu		
						Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	90		BPKPAD
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	100	1.635.862.150	BPKPAD
		7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)							4.473.382.700	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				indeks	85,45		
				Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	85	488.326.000	Disdukcapil
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	97,4	433.318.000	Disdukcapil
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	327.137.950	Diskominfo
					Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	70	1.055.000.000	Diskominfo
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	69	1.244.244.000	Diskominfo
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub	%	100	925.356.750	BKD

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
							Target	Rp	
					koordinador diklat yang mencapai target				
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif								29.289.149.900	
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)				indeks	155		
		Indeks Rasa Aman				indeks	4,2		
8. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana								2.282.051.100	
		Indeks Ketahanan Daerah				indeks	0,81		
			Program Peningkatan Ketahanan Daerah dan Perlindungan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	623.075.100	Dinsos
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	1.658.976.000	satpol PP
9. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat								19.668.424.600	
		Indeks Demokrasi				indeks	72		
			Program Penguatan Budaya dan Peningkatan Iklim Demokrasi	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan	%	100	430.000.000	Disdikbud
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	80	375.000.000	Disdikbud
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	95	1.000.096.600	Kesbangpol
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	100	16.578.664.000	Kesbangpol
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	100	30.000.000	Kesbangpol
			Program Peningkatan kondusifitas wilayah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	100	206.000.000	Kesbang
				Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase penurunan konflik sosial	%	100	1.048.664.000	Kesbang

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PD
								Target	Rp	
					Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
	10.Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang								7.338.674.200	
			Angka kriminalitas				%	0,015		
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	7.338.674.200	satpol PP

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Adapun berikut Kebijakan Sektorial Kabupaten Batang dalam mendukung ketercapaian tujuan sasaran Kabupaten Batang

a) Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu

1. Bidang Pendidikan;

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan layanan pendidikan anak usia dini
- 2) Peningkatan layanan pendidikan dasar
- 3) Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan
- 4) Perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan
- 5) Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
- 6) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola pelayanan pendidikan
- 7) Menyalurkan anak tidak sekolah melalui pendidikan non formal di PKBM/SKB (Program Kesetaraan)
- 8) Pendataan Anak Tidak Sekolah melalui Pemerintah Desa

2. Bidang Kesehatan;

Beberapa strategi dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan antara lain :

- 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 2) Pelayanan kesehatan balita;

- 3) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 4) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 5) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 6) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 7) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 8) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - 9) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - 10) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
 - 11) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 12) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 13) Skrining Kesehatan warga usia 15-59 Tahun;
 - 14) Rehab puskesmas;
 - 15) Pemenuhan Sarana Prasaranan Kesehatan.
- 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6. Bidang Sosial.

Berikut Tabel program pemenuhan SPM di Kabupaten Batang Tahun 2024 :

Tabel 4. 5
Program Pelayanan Dasar dalam pemenuhan SPM Kabupaten Batang Tahun 2024

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PD PENANGGUNG JAWAB
			2024		
			Target	Rp0	
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN					
Program Pengelolaan Pendidikan				1.212.000.000	Disdikbud
	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	100		
	persentase capaian SPM Pendidikan	%	100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualitas S1/D4	%	100	2.750.000.000	Disdikbud

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PD PENANGGUNG JAWAB
			2024		
			Target	Rp0	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	100	82.461.229.048	Dinkes
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	100	18.732.200.395	RSUD Limpung
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				7.086.188.600	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	100		
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	6.394.910.400	DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak pemerintah	%	100	500.000.000	DPRKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	7.338.674.200	satpol PP
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	1.658.976.000	satpol PP
Program Penanggulangan Bencana				1.445.264.000	BPBD
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani	%	100		
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PD PENANGGUNG JAWAB
			2024		
			Target	Rp0	
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	540.014.400	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	219.976.300	Dinsos
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	100	4.647.340.100	Dinsos
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	623.075.100	Dinsos

b) Arah Kebijakan Stunting Kabupaten Batang Tahun 2024

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi wasting pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana memberikan amanat kepada BKKBN sebagai *leading sector* dalam penanggulangan stunting maka memberi konsekuensi kepada urusan pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Batang untuk turut serta terlibat dalam penanganan stunting, sehingga program kegiatan tahun 2024 diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung penurunan stunting di Kabupaten Batang. Dalam kebijakan penurunan stunting tak lepas dari peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa dan kelurahan.

Program dan kegiatan tersebut diantaranya adalah peningkatan pengetahuan ibu hamil, calon ibu hamil dan remaja putri tentang gizi, perilaku hidup sehat dan kesehatan reproduksi, pemberian ASI eksklusif dan MP ASI, optimalisasi pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi serta penguatan posyandu. Intervensi lain yang dilakukan untuk penurunan stunting ini adalah pelaksanaan orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) bagi tenaga kesehatan, pembentukan konselor ASI, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Penguatan surveilans gizi dan e-PPGBM, pengadaan antropometri kit, pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil kekurangan

energi kronis (Bumil KEK) dn balita kurus serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri.

Konvergensi Percepatan Penurunan stunting di Kabupaten Batang juga telah dilaksanakan melalui kolaborasi *Pentahelix* dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, akademisi dan media. Keterlibatan swasta dalam perecepatan penurunan stunting Kabupaten Batang diantaranya melalui CSR (dalam bentuk pemberian makanan tambahan dan sembako kepada keluarga yang memiliki balita Stunting); Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), melalui pemberian makanan tambahan untuk 18 anak stunting selama 3 bulan; serta dukungan perusahaan untuk edukasi pemenuhan gizi bagi karyawan perempuan guna pencegahan stunting. Sementara keterlibatan akademisi diwujudkan melalui keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam upaya penurunan stunting diantaranya penempatan KKN Tematik di Desa lokus stunting dan lokus Kemiskinan Ekstrim. Sedangkan peran media dalam percepatan penurunan stunting adalah sebagai sumber informasi untuk para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru dalam upaya pencegahan stunting. Informasi terbaru yang disajikan dapat digunakan sebagai sumber rujukan, untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan stunting yang telah dilaksanakan.

Tabel 4. 6
Strategi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024

Permasalahan	Strategi	Aktivitas	PD
Belum optimalnya layanan intervensi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan stunting	pemenuhan 29 indikator esensial sesuai Perpres 72/2021	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri	Dinkes
		layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) untuk Remaja putri	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada Calon pengantin /calon ibu	Dinkes
		Pemberian bantuan tunai bersyarat untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos

Permasalahan	Strategi	Aktivitas	PD
		pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah kepada calon Pasangan Usia Subur (PUS)	DP3AP2KB
		Pemberian bantuan pangan nontunai untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos
		Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu	Dinsos
		Pemberian tambahan asupan gizi untuk Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet kepada ibu hamil	Dinkes
		Peningkatan pelayanan keluarga berencana	DP3AP2KB
		Pemenuhan asupan gizi balita melalui optimaliasasi pemberian (ASI) eksklusif dan MP ASI	Dinkes
		Pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk untuk Anak balita gizi buruk	Dinkes
		tambahan asupan gizi untuk anak balita dengan status gizi kurang	Dinkes, Dispermades
		Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita	Dinkes
		penuntasan BABS	Dinkes, DPUPR
		Peningkatan penerapan PHBS	Dinkes
		promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri kepada Keluarga berisiko stunting	Dislitkannak
		Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	DP3AP2KB
		Pelaksanaan pendampingan kepada Keluarga berisiko stunting	DP3AP2KB

Permasalahan	Strategi	Aktivitas	PD
		Pemanfaatan sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi Keluarga berisiko stunting	Dispaperta
		Peningkatan akses air minum layak	DPUPR
		Peningkatan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	DPUPR
		Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tentang kesehatan dan gizi kepada Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinsos
		Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta	Dinsos
Kapasitas KPM yang belum merata serta belum optimalnya peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan kapasitas KPM dan peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan Kapasitas KPM	Dispermades
		Peningkatan dukungan DD dan Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tk Desa	Dispermades
		kebijakan pemberian dukungan operasional bagi KPM dan kader Posyandu	Dispermades
belum optimalnya Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tk Kabupaten	Bapelitbang
		Perbaikan Manajemen Data	Bapelitbang
		Pelaksanaan Rembug Stunting	DP3AP2KB
belum teridentifikasinya akar masalah penyebab stunting	Audit Kasus Stunting	Audit Kasus Stunting	DP3AP2KB

Upaya penanganan stunting juga diwujudkan melalui inovasi-inovasi penurunan stunting diantaranya ; **JAHE CANTING** (Remaja hebat cegah stunting) merupakan upaya meningkatkan kesehatan

remaja melalui posyandu Remaja; serta inovasi **D'Basinem** (Desa Binaan Asi Thok Nem wulan), yang merupakan upaya membangun paradigma masyarakat utk saling memotivasi dalam menu gizi seimbang melalui Edukasi Asi eksklusif, sekaligus media monev kesadaran memberi Asi eksklusif kepada masyarakat, **seminggu sekali makan bersama ditempat posyandu** (sesuai waktu & tempat kesepakatan warga), **memasak menu gizi seimbang untuk giat makan bersama balita, giat makan bersama balita sambil bermain dan Brain storming (Diskusi)** dengan melibatkan unsur: Muspika, Petugas Gizi Puskesmas, Petugas Promkes Puskesmas, Bidan desa, Kades & perangkat, PKK & Kader, RT & RW, Ibu menyusui, Ibu yg mempunyai anak balita.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, program dan kegiatan dalam rangka penurunan persentase stunting difokuskan di Desa lokus stunting tahun 2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 441/169/2022 tanggal 26 April 2022, berdasarkan jumlah keluarga beresiko stunting, prevalensi stunting, jumlah balita stunting dan cakupan layanan yang dilakukan, pada 25 Desa sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Daftar Desa/Kelurahan Prioritas Stunting Kabupaten Batang
Tahun 2024

NO	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	KANDEMAN	KANDEMAN	Depok
2	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Selokarto
3	BAWANG	BAWANG	Sidoharjo
4	BATANG	BATANG III	Kauman
5	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Pretek
6	BLADO	BLADO I	Wonobodro
7	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Gemuh
8	BAWANG	BAWANG	Jambangan
9	BAWANG	BAWANG	Deles
10	KANDEMAN	KANDEMAN	Karanganom
11	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Pecalungan
12	BATANG	BATANG III	Cepokokuning
13	BAWANG	BAWANG	Bawang
14	BAWANG	BAWANG	Surjo
15	BANDAR	BANDAR I	Wonomerto
16	LIMPUNG	LIMPUNG	Tembok
17	BATANG	BATANG III	Rowobelang
18	KANDEMAN	KANDEMAN	Botolambat

NO	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
19	KANDEMAN	KANDEMAN	Cempereng
20	WARUNGASEM	WARUNGASEM	Menguneng
21	BATANG	BATANG III	Watesalit
22	BAWANG	BAWANG	Sangubanyu
23	REBAN	REBAN	Mojotengah
24	BLADO	BLADO II	Keputon

c) Arah kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Batang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan diharapkan mampu memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak sehingga mampu meningkatkan peran anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.

Tingginya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap berbagai kesepakatan internasional untuk melakukan perlindungan terhadap anak perlu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 4. 8
Strategi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Aktivitas	PD
Meningkatnya kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual	Pencegahan, penanganan, pendampingan, pemberian bantuan, dan pemberian perlindungan terhadap anak	pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial	DP3AP2KB, Dinkes, RSUD
		Pemberian pendampingan antara lain dalam pemberian psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan	DP3AP2KB
		pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu	DINSOS
		Kolaborasi dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak	DP3AP2KB, Dispermades
		Edukasi dan promosi terkait kesadaran tentang kekerasan seksual dan memotivasi masyarakat untuk bertindak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.	DP3AP2KB, Disdikbud
Belum optimalnya dukungan regulasi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Penyusunan PerBup tentang Komite aksi daerah penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;	DP3AP2KB
		Penyusunan Perbup tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	DP3AP2KB
Belum optimalnya dukungan Dunia Usaha dalam menunjang program dan Kegiatan Pemenuhan Hak anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak anak	Peningkatan kerjasama dengan Dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Dinkes
		Pelatihan Konvensi Hak Anak pada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan Dunia Usaha	DP3AP2KB
		Penyediaan Data Pilah Gender dan Anak	DP3AP2KB

Permasalahan	Strategi	Aktivitas	PD
Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil
		Kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		Kerjasama dengan lembaga masyarakat dan PT dalam upaya percepatan kepemilikan akte kelahiran anak	Disdukcapil
Belum semua Sekolah Ramah Anak	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah dasar menuju ramah anak	Disdikbud
		pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah menengah pertama menuju ramah anak	Disdikbud

Disamping memaksimalkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah juga diwajibkan responsif terhadap isu perempuan. Hal ini menjadi amanat dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDG’s) guna pencapaian target di tahun 2030. Pembangunan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Selain itu, pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan perempuan , kesejahateraan, dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi terhadap perempuan.

Berikut pemetaan permasalahan serta strategi dalam rangka pemenuhan kesetaraan gender di Kabupaten Batang Tahun 2024 :

Tabel 4. 9
Strategi Pengarustamaan Gender Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Aktivitas	PD
Belum optimalnya anggaran responsif gender pada tiap OPD	Penguatan peran tim teknis Pokja PUG untuk mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender pada OPD	Penyusunan RAD PUG (rekom hasil evaluasi PUG dari inspektorat)	Bapelitbang
		Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender kepada OPD (rekom hasil evaluasi PUG dari inspektorat)	DP3AP2KB

Permasalahan	Strategi	Aktivitas	PD
		Penyusunan profil gender dan penyediaan data pilah gender	DP3AP2KB
Masih adanya kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	meningkatkan peran perempuan dan kaum rentan dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui analisis GAP dan GBS	Bapelitbang, BPKPAD, Inspektorat
Adanya stereotip gender, marginalisasi perempuan, sub ordinary dan double burden	Mengatasi stereotip gender, marginalisasi perempuan, sub ordinary dan double burden	Sosialisai, edukasi serta meningkatkan pendidikan dan keahlian SDM perempuan	DP3AP2KB, Disnaker

d) **Arah Kebijakan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Batang Tahun 2024**

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan pertama *Sustainable Developments Goals (SDGs)* yang harus dicapai pada tahun 2030. Selaras dengan hal itu, sesuai amanat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengintruksikan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

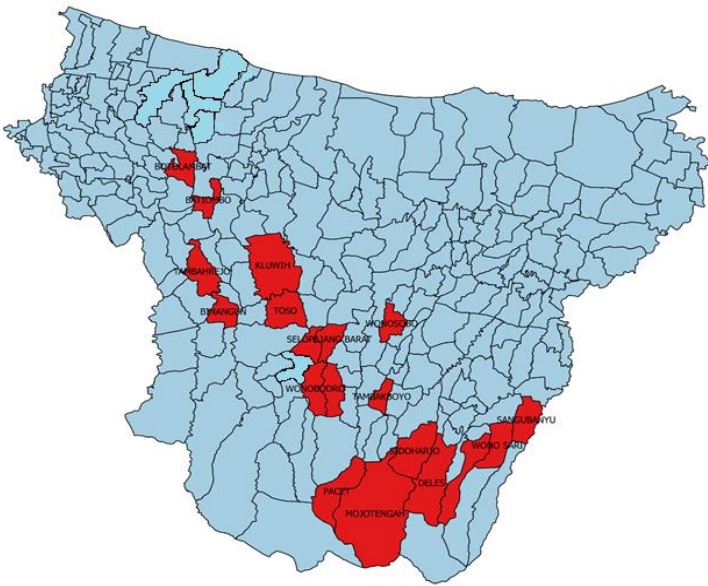
Berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 di Kabupaten Batang terdapat 4 desa yang telah terbebas dari kemiskinan ekstrem prioritas 1 sehingga Lokus Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Batang tahun 2024 terletak pada 21 desa dalam 5 Kecamatan yang dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 10
Lokus Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Batang
Tahun 2024

KEMISKINAN EKSTREM			
NO		KECAMATAN	DESA
1	1	BAWANG	SIDOHARJO
	2	BAWANG	DELES
	3	BAWANG	JAMBANGAN

KEMISKINAN EKSTREM			
NO		KECAMATAN	DESA
2	4	BAWANG	WONO SARI
	5	BAWANG	SANGUBANYU
	6	BANDAR	TOSO
	7	BANDAR	KLUWIH
	8	BANDAR	BINANGUN
	9	BANDAR	BATIOMBO
	10	BANDAR	TAMBAHREJO
	11	REBAN	PACET
	12	REBAN	TAMBAKBOYO
	13	REBAN	WONOSOBO
3	14	REBAN	ADINUSO
	15	REBAN	MOJOTENGAH
	16	BLADO	WONOBODRO
	17	BLADO	SELOPAJANG BARAT
	18	BLADO	BESANI
	19	BLADO	COKRO
5	20	KANDEMAN	BOTOLAMBAT
	21	KANDEMAN	JURAGAN

Gambar 2. 153
Peta Lokus Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Batang
Tahun 2024



Sumber : Bapelitbang, 2022

Selaras dengan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kab. Batang Tahun 2023-2026, determinan kemiskinan di Kabupaten Batang antara lain :

a. Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan kinerja Bidang Ketenagakerjaan yang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Meningkatnya angka pengangguran terbuka dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknyapekerja yang di PHK;
- b) Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Batang dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Batang;
- c) Minimnya lowongan kerja yang tersedia serta jumlah pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan dampak Pandemi Covid-19;
- d) Menurunnya jumlah wisatawan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang menerapkan pembatasan sosial di masyarakat;
- e) Perlu mengintensifkan promosi, sosialisasi mengenai pariwisata di Kabupaten Batang;
- f) Masih adanya destinasi wisata yang belum bekerjasama dengan Disparpora Kabupaten Batang;
- g) Belum optimalnya kapasitas Pokdarwis sertakelembagaannya.
- h) Menurunnya jumlah wisatawan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang menerapkan pembatasan sosial di masyarakat;
- i) Perlu mengintensifkan promosi, sosialisasi mengenai pariwisata di Kabupaten Batang;
- j) Masih adanya destinasi wisata yang belum bekerjasama dengan Disparpora Kabupaten Batang;
- k) Belum optimalnya kapasitas Pokdarwis serta kelembagaannya.
- l) Belum semua perusahaan memiliki izin;
- m) Nilai ekspor rendah akibat pandemi;
- n) Rendahnya kontribusi pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD Kabupaten Batang.
- o) Menurunnya pertumbuhan industri di Kabupaten Batang;
- p) Belum optimalnya wirausaha baru yang tergabung dalam kelompok

b. Bidang Pendidikan

Berdasarkan kinerja Bidang Pendidikan yang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya Angka Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan 13,03 Tahun dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah;
- b) Belum optimalnya Angka Melanjutkan dari SD ke SMP dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah;
- c) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana minimal pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair, khususnya sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang belum semuanya dalam kondisi baik;
- d) Belum optimalnya akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan satuan Pendidikan Non Formal; minimal terakreditasi B;
- e) Belum semua guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi.

c. Bidang Kesehatan

Berdasarkan kinerja Bidang Kesehatan yang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) yang dikarenakan penyakit penyerta tidak menular seperti jantung, hipertensi dan TB;
- b) Belum optimalnya penanganan gizi buruk;
- c) Meningkatnya kasus stunting dikarenakan masih adanya kasus gizi buruk di Kabupaten Batang serta rendahnya pengetahuan masyarakat terkait penanggulangan stunting;
- d) Belum optimalnya sarana dan prasarana bidang kesehatan;

d. Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan kinerja Bidang Infrastruktur Dasar yang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Masih adanya luasan irigasi dalam kondisi rusak;
- b) Masih adanya jalan kondisi rusak/rusak parah;
- c) Masih adanya total panjang drainase dalam kondisi rusak/rusak parah;
- d) Belum optimalnya kondisi jalan yang merupakan akses utama perekonomian masyarakat;

- e) Belum optimalnya perwujudan rencana tata ruang.
- f) Belum optimalnya upaya pemenuhan rumah layak huni dan rumahsehat;
- g) Belum optimalnya upaya pemenuhan infrastruktur lingkungan perumahan dan sanitasi yang layak;
- h) Belum seluruhnya kebutuhan akses air minum dan sanitasi terpenuhi;
- i) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
- j) Belum optimalnya penanganan taman dalam kondisi baik

e. Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan kinerja Bidang Ketahanan Pangan yang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Rendahnya informasi ketersediaan pasokan, harga, dan akses pangan;
- b) Rendahnya cadangan pangan daerah
- c) Rendahnya informasi ketersediaan pasokan, harga, dan akses pangan;
- d) Rendahnya cadangan pangan daerah.
- e) Rendahnya informasi ketersediaan pasokan, harga, dan akses pangan;
- f) Rendahnya cadangan pangan daerah.

f. Bidang Sosial

Berdasarkan kinerja Bidang Sosial yang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya penanganan PMKS
- b) Belum optimalnya monitoring PKK baik ke desa binaan maupun desa non binaan
- c) Belum optimalnya pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

Mendasari permasalahan diatas, adapun prioritas Kabupaten Batang dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada :

1. Penyediaan akses kebutuhan dasar (basic needs access) untuk penduduk miskin baik di perdesaan maupun perkotaan terutama untuk petani, butuh, nelayan, disabilitas, pelaku usaha mikro dan kecil serta kelompok rentan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi beban pengeluaran,

seperti penyediaan rumah layak huni (Penanganan RTLH), jamban, akses air bersih, penyediaan jaringan listrik murah, pemenuhan akses dan sarana pendidikan dasar dan kesehatan serta bantuan sosial untuk fakis miskin dan anak terlantar.

2. Penguatan keberlanjutan ekonomi masyarakat (*sustainable livelihood*) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin secara individu maupun kelompok dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan melalui penumbuhan dan peningkatan kewirausahaan, pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan kemitraan.
3. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program secara horizontal maupun vertical melalui verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial (DTKS), penguatan peran puskesmas dan pemanfaatan DTKS dalam pengambilan kebijakan terkait kesejahteraan sosial
4. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja.

e) Kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Batang

Dalam mengamalkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Batang sebagai dasar serta upaya untuk memenuhi tata Kelola pengelolaan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Tindak Lanjut dari Perbup tersebut akan dibentuk Forum Satu Data Indonesia yang terdiri dari :

- b. Pembina SDI yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang;
- c. Koordinator SDI yaitu Bapelitbang Kabupaten Batang;
- d. Walidata SDI yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang; dan
- e. Produsen Data yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Batang.

Gambar 4. 6 Forum Satu Data Indonesia



Forum Satu Data di Kabupaten Batang rencananya dilakukan dua kali dalam setahun. Selain Forum SDI, Kabupaten Batang juga telah melaksanakan kegiatan Forum tematik SDI dan kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan perangkat daerah sebagai produsen data bersama BPS dan Diskominfo Kabupaten Batang. Kegiatan pembinaan yang berupa visitasi tersebut dalam rangka untuk mewujudkan tata Kelola data statistik sektoral di Kabupaten Batang yang sesuai dengan 4 prinsip SDI melalui media online yaitu *Open Data* (data.batangkab.go.id) serta sistem informasi statistik sektoral (*sitika*) kabupaten batang (sitika.batangkab.go.id) dan Geoportal (geoportal.batangkab.go.id) data spasial yang juga merupakan data sektoral sudah dapat didesiminasikan dan sudah terintegrasi dengan tingkat provinsi dan pusat pada portal SDI (data.go.id).

f) Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Batang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Batang yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

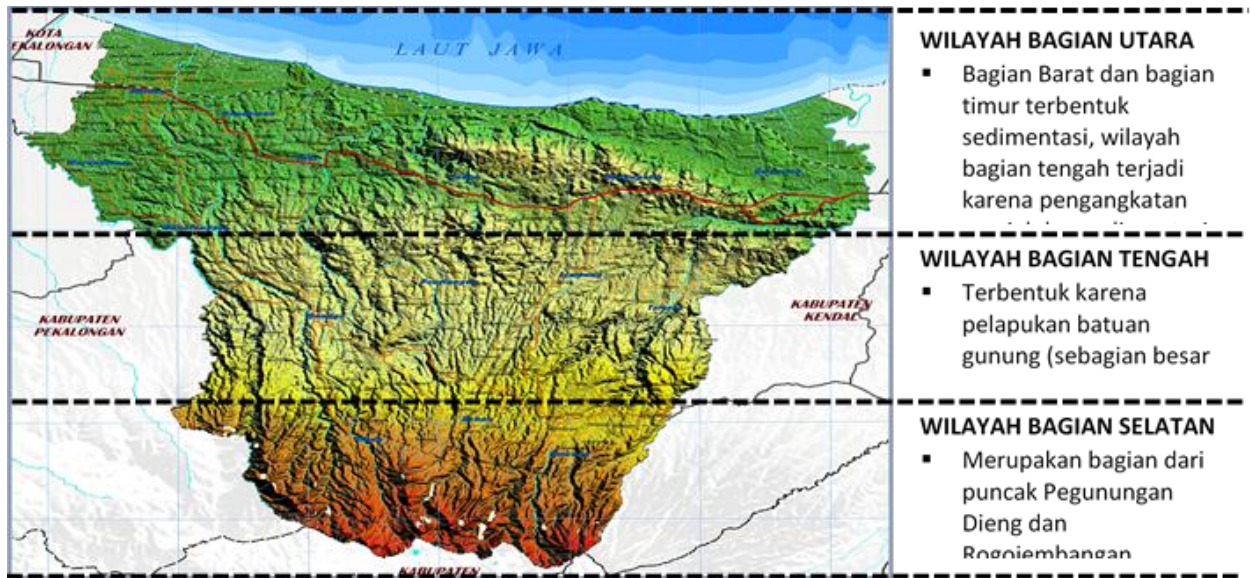
Memperhatikan kondisi fisiografis dan kemampuan lahan, maka rencana kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi :

- a. Wilayah Kabupaten Batang bagian selatan yang meliputi Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Reban dan

Kecamatan Blado diarahkan untuk pengembangan kawasan yang mendukung fungsi konservasi dan pengembangan destinasi wisata alam; dengan strategi meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan peruntukan lindung, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan peruntukan lindung dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata alam.

- b. Wilayah Kabupaten Batang bagian tengah yang meliputi Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Wonotunggal dan Warungasem diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian dan agrobisnis sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus ketahanan pangan daerah; dengan strategi menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- c. Wilayah Kabupaten bagian utara yang meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kecamatan Subah, Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing diarahkan untuk pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan kemampuan lahan sehingga dapat mendorong perwujudan kawasan industri dan industri kreatif dalam rangka peningkatan iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja; dengan strategi mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara, mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal di setiap kecamatan dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.

Gambar 4. 7
Kabupaten Batang Berdasarkan Kondisi Fisiografis dan Kemampuan Lahan



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2019

1) Strategi Pengembangan struktur ruang

Dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah, diperlukan pengembangan sistem perkotaan dan pengembangan jaringan infrastruktur wilayah dan prasarana pendukung yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan hierarki pengembangan sarana wilayah antar Pusat Kegiatan baik Pusat Kegiatan Wilayah yang melayani kegiatan skala wilayah, Pusat Kegiatan Lokal yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani kegiatan antar desa (PKW, PKL, PPK, PPL).

Adapun pengembangan jaringan prasarana dimaksud berupa jaringan prasarana transportasi meliputi pengembangan : sistem jaringan transportasi, jaringan jalan; angkutan umum aglomerasi perkotaan; integrasi antar moda transportasi; jaringan rel kereta api; pelabuhan; terminal; jaringan prasarana energi; dan jaringan prasarana sumber daya air.

2) Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah
dilaksanakan melalui :

2.1 Pengembangan sistem perkotaan

Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Batang direncanakan mengikuti konsep dan skenario perkembangan wilayah

Kabupaten Batang, yaitu perkembangan Batang bagian utara yang didukung oleh jalur pantura yang melewati Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Banyuputih dan Gringsing dengan arah perkembangan ke luar wilayah Kabupaten Batang yaitu Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan (Petanglong). Arah perkembangan Batang bagian tengah yang dilalui oleh jalur menuju ke Kabupaten Purbalingga, serta perkembangan Kabupaten Batang bagian selatan yang dilewati oleh jalur yang menuju ke Purbalingga, Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan.

Skenario perkembangan perkotaan didukung dengan penetapan Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani kegiatan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Batang sebagai pusat kabupaten dan Kecamatan Limpung sebagai pusat perdagangan jasa wilayah timur selatan.

Untuk mendukung rencana pengembangan sistem perkotaan dan pengembangan sarana wilayah ditetapkan pembagian Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang meliputi :

- a. SWP Batang dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Batang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa; pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; perikanan; industri perikanan; dan pariwisata yang meliputi:
 1. Kecamatan Batang;
 2. Kecamatan Kandeman;
 3. Kecamatan Warungasem.
- b. SWP Bandar dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Bandar mempunyai fungsi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, agroindustri; perdagangan dan jasa, perikanan darat, kehutanan; dan pariwisata yang meliputi:
 1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Pecalungan;
 3. Kecamatan Bandar;
 4. Kecamatan Blado.
- c. SWP Subah dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Subah mempunyai fungsi pengembangan

industri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pertambangan, perikanan, perdagangan dan jasa, transit perjalanan; kehutanan, dan pariwisata yang meliputi:

1. Kecamatan Subah;
2. Kecamatan Tulis.

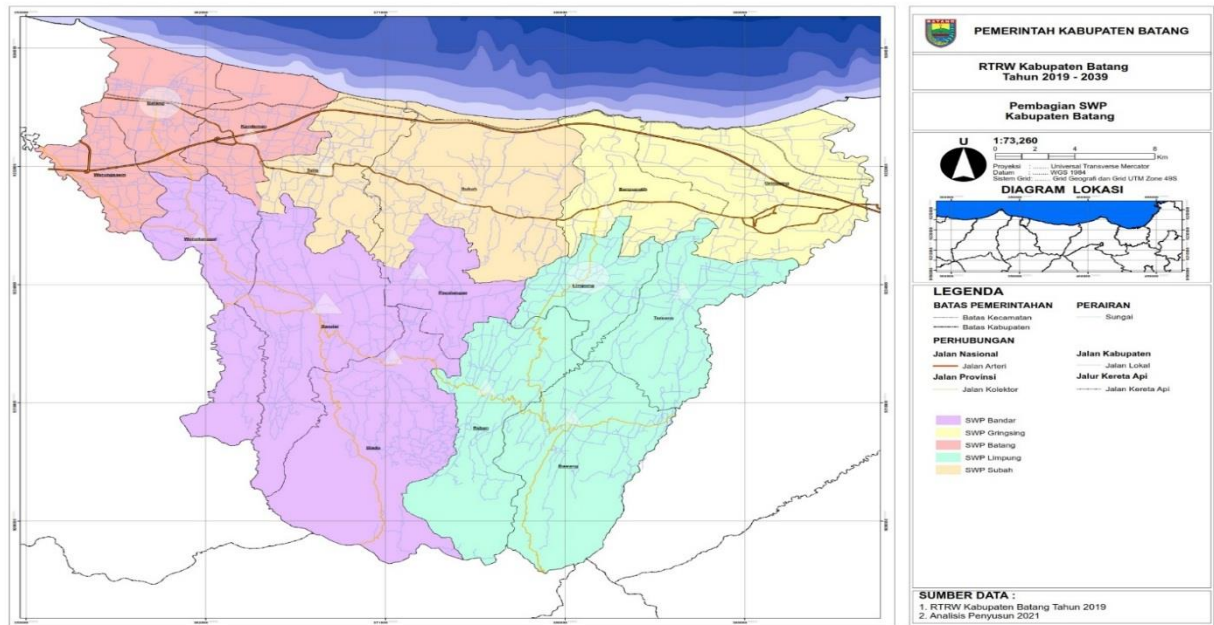
- d. SWP Gringsing dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gringsing mempunyai fungsi pengembangan industri, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pertambangan, perikanan, perdagangan dan jasa, transit perjalanan, kehutanan, dan pariwisata yang meliputi:

1. Kecamatan Gringsing;
2. Kecamatan Banyuputih.

- e. SWP Limpung dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Limpung mempunyai fungsi pengembangan perdagangan dan jasa, agroindustri, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pertambangan, perikanan darat; kehutanan, dan pariwisata yang meliputi meliputi:

1. Kecamatan Limpung;
2. Kecamatan Tersono;
3. Kecamatan Reban;
4. Kecamatan Bawang.

Gambar 4. 8
Peta Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Batang



Sumber : RTRW Kabupaten Batang tahun 2019

2.2 Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, meliputi :

- a. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat meliputi pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan jalan yang akan dikembangkan meliputi jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa dan jalan khusus (termasuk pengembangan jalan akses baru menuju Kawasan Industri Terpadu Batang dan Batang Industrial Park), terminal barang dan penumpang, jembatan timbang dan angkutan umum massal. Sistem jaringan kereta api meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api dan stasiun penumpang dan barang,
- b. Pengembangan sistem jaringan transportasi laut meliputi pembangunan/pengembangan pelabuhan umum, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri dan alur pelayaran.

2.3 Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, irigasi dan air baku industri, meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan dan pelestarian sumber air permukaan dan cekungan air tanah (CAT) untuk

pemenuhan kepentingan masyarakat, kebutuhan irigasi dan air baku industri, terdiri dari pelestarian sungai, mata air dan cekungan air tanah, pembangunan dan pengembangan waduk dan embung.

- b. Pembangunan dan pengembangan prasarana sumber daya air yang terdiri dari sistem irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai, jaringan air baku dan jaringan air bersih.

2.4 Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan kapasitas trafik data dan keterjangkauan layanan telekomunikasi, meliputi :

- a. Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap terdiri dari pembangunan saluran serat optik dan pengembangan jaringan serat optik.
- b. Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak terdiri peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan seluler nirkabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

2.5 Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan, meliputi pengembangan dan pembangunan TPA sampah Batang wilayah timur, pengembangan dan pengelolaan TPS 3R, TPST, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga.

2.6 Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan cakupan layanan kebutuhan air minum masyarakat dan komersil, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan mulai dari unit air baku, unit produksi, uni distribusi dan layanan serta pengembangan sistem jaringan baik skala kabupaten (Perumdam) maupun skala wilayah Petanglong (PDAB dan Perumdam).

2.7 Pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah industri dan domestik, meliputi pengembangan dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri, instalasi pengolahan air limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan dan perdesaan.

2.8 Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk meningkatkan cakupan layanan kegiatan

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan yang dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan di kawasan peruntukan industri.

- 2.9 Pengembangan sistem jaringan drainase meliputi pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan dan daerah rawan banjir, drainase jalan, normalisasi sungai dan pembangunan fasilitas resapan/kolam tampung air.
- 2.10 Pengembangan sistem proteksi kebakaran meliputi pengembangan pos kebakaran dan penyediaan hidran air di masing-masing perkotaan kecamatan dan tempat strategis.
- 2.11 Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi ruang evakuasi bencana yang terdiri dari lokasi evakuasi dan tempat relokasi, pengembangan jalur evakuasi bencana berdasarkan dokumen KRB.

3) Strategi Perwujudan Kawasan Lindung dan Budaya

3.1 Kawasan Lindung

Rencana perwujudan kawasan lindung dilakukan melalui strategi :

- a) Strategi untuk mewujudkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
- b) Strategi untuk mewujudkan kawasan perlindungan setempat meliputi pengelolaan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar embung atau waduk dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (RTH publik dan privat).
- c) Strategi untuk mewujudkan kawasan konservasi meliputi pelestarian kawasan suaka alam Peson I, Peson II dan Ulolanang.
- d) Strategi untuk mewujudkan kawasan cagar budaya meliputi pelestarian dan pengelolaan kawasan kota pusaka dan peninggalan bersejarah.
- e) Strategi untuk mewujudkan kawasan rawan bencana meliputi penanganan kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, puting beliung, gelombang pasang dan abrasi,

gempa bumi dan letusan gunung api, kebakaran, kekeringan dan gerakan tanah.

- f) Strategi untuk mewujudkan kawasan lindung geologi meliputi pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan air tanah pada kawasan imbuhan mata air dan sempadan mata air.
- g) Strategi untuk mewujudkan kawasan ekosistem mangrove meliputi pengelolaan kawasan pantai berhutan mangrove.

b. Kawasan Budidaya

Rencana perwujudan kawasan budidaya dilakukan melalui strategi:

- a) Strategi untuk mewujudkan kawasan hutan produksi meliputi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.
- b) Strategi untuk mewujudkan kawasan hutan rakyat meliputi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan rakyat.
- c) Strategi untuk mewujudkan kawasan peretanian meliputi perlindungan dan pemanfaatan kawasan tanaman pangan (KP2B), pengembangan dan pemanfaatan kawasan hortikultura, pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.
- d) Strategi untuk mewujudkan kawasan perikanan meliputi peningkatan produksi kawasan perikanan tangkap di wilayah pesisir dan laut, kawasan perikanan budidaya tambak dan air tawar, peningkatan dan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan.
- e) Strategi untuk mewujudkan kawasan pertambangan dan energi meliputi pengendalian kawasan pertambangan mineral logam dan batuan, pemanfaatan kawasan panas bumi dan optimalisasi kawasan pembangkitan tenaga listrik (PLTU, PLTP, PLTS, PLTMH).
- f) Strategi untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan industri (KITB, BIP dan kawasan industri Kenconorejo) serta pengembangan kawasan peruntukan industri dan IKM.
- g) Strategi untuk mewujudkan kawasan pariwisata meliputi pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata alam,

kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata buatan serta pariwisata unggulan yang terdiri dari pengembangan wisata pantai Sigandu, wisata alam Bukit Sikuping, wisata budaya Silurah.

- h) Strategi untuk mewujudkan kawasan permukiman meliputi peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
- i) Strategi untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pemantapan kawasan Kodim, Polres dan Pos TNI AL.

4) Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada fungsi kawasan yang berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan bagi kepentingan kabupaten, meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari :
 - a) Koridor perkotaan Batang-Kandeman
 - b) Kawasan Pelabuhan Batang
 - c) Kawasan wisata pantai Sigandu-Ujungnegoro
 - d) Kawasan wisata alam Pagilaran
 - e) Kawasan Industri KITB, BIP, Kenconorejo
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu PLTU Jawa Tengah.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu pendukung kawasan dataran tinggi yang berbatasan dengan kawasan Dieng.

5) Penanganan Pesisir Tahun 2024

Mengacu pada RTRW 2019 - 2039 Kabupaten Batang, kebijakan pesisir diarahkan pada :

- a) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut
 - Pembangunan pelabuhan
 - Penetapan alur pelayaran yaitu pelayaran keluar masuk pelabuhan pengumpul
 - Pengembangan prasarana dan sarana keamanan transportasi laut
- b) Sistem pengamanan pantai

- Pemasangan geotekstil
 - Pembangunan penahan ombak
 - Penanaman mangrove dan cemara serta tanaman penahan gelombang
- c) Perwujudan sistem evakuasi bencana
- Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan
 - jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi (di Kecamatan Pesisir)
 - Pembangunan tanggul penahan abrasi
 - Penghijauan tepi pantai
- d) Arahkan perlindungan kawasan perlindungan setempat : Sempadan pantai
- Penetapan batas sempadan pantai
 - Pengelolaan kawasan tanah timbul
 - Penetapan batas kawasan pasang surut
 - Penghijauan
- e) Kawasan ekosistem mangrove
- Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan ekosistem mangrove
 - Penetapan larangan untuk melakukan berbagai aktivitas di kawasan mangrove
 - Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
- f) Kawasan strategis Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu – Ujungnegoro

Titik Titik Abrasi dan Akresi Kabupaten Batang

Pendekatan menggunakan metode penginderaan jauh dengan membandingkan garis pantai hasil digitasi peta citra *Google Earth* tahun 2009 dan 2020. Yang dibagi pada menjadi 12 spot lokasi untuk memudahkan dalam identifikasi.

Gambar 2. 154
Titik Abrasi dan Akresi Kabupaten Batang



Sumber : *Google Earth*, 2020

	Garis Pantai Tahun 2009		Indikasi Abrasi
	Garis Pantai Tahun 2020		Indikasi Akresi

Keterangan Lokasi

1. Perbatasan Pekalongan Batang
 Abrasi sejauh 54 meter sepanjang 1,8 Km, rata-rata berkurang sejauh 4,8 meter per tahun
 2. Pelabuhan Batang
 - Reklamasi untuk pelabuhan sejauh 180 meter,
 - sebelah kiri pelabuhan abrasi 25 meter sejauh 1km, rata rata berkurang sejauh 2,2 meter per tahun
 - Sebelah kanan pelabuhan abrasi sejauh 75 meter sejauh 600 meter, rata rata berkurang sejauh 6,8 meter per tahun
 - Abrasi beresiko membahayakan permukiman
 3. Desa Depok, Kandeman
 - Pantai berkurang sejauh 25 meter sepanjang 1,8 Km
 - Rata rata berkurang sejauh 2,2 meter pertahun
 - Abrasi beresiko mengganggu sektor pariwisata
 4. PLTU Batang
 Pantai berkurang untuk keperluan PLTU sejauh kurang lebih 30 meter sepanjang 2,4 Km
 5. Desa Kedungsegog, Kandeman
 - Sedimentasi sejauh 25 meter sepanjang 150 meter
 - Rata rata bertambah sejauh 2,2 meter per tahun
- Desa Sengon, Subah
- Abrasi sejauh 23 meter sepanjang 500 meter
 - Rata-rata berkurang sejauh 2 meter per tahun
- Beresiko membahayakan permukiman nelayan.

6. Desa Gondang, Subah
Abrasi sejauh 33 meter sepanjang 1,2 Km dengan rata rata berkurang sejauh 3 meter per tahun.
7. Desa Kedawung, Banyuputih
Reklamasi sejauh 45 meter sepanjang 800 meter
8. Desa Kedawung, Banyuputih
Permukiman Pantai cenderung stabil dari abrasi, ada bagian kecil yang sedikit berkurang sejauh 10 meter, sepanjang 20 meter. Rata rata berkurang sejauh 0,9 meter per tahun.
9. Desa Ketanggan, Banyuputih
Permukiman Pantai ada beberapa bagian daratan yang sedikit berkurang sejauh kurang lebih 5 meter sepanjang 250 meter. Rata rata berkurang sejauh 0,5 meter pertahun. Potensi abrasi kecil karena pantai karang/batuan, berkurangnya luas daratan kemungkinan dari kenaikan level air laut.
10. Desa Sidorejo, Gringsing
Pantai pasir yang bertambah luas menuju laut sejauh 17 meter sepanjang 600 meter. Rata rata bertambah sejauh 1,5 meter pertahun.
11. Desa Sidorejo, Gringsing
Muara sungai dengan endapan yang bertambah luas menuju laut sejauh 27 meter sepanjang 600 meter. Rata-rata bertambah sejauh 2,4 meter pertahun
12. Desa Yosorejo, Gringsing Perbatasan Batang-Kendal
Abrasi sejauh 7 meter sepanjang 800 meter. Rata rata berkurang sejauh 0,6 meter pertahun.

Rehabilitasi Kawasan Pesisir

Usulan Program/Kegiatan Penanganan dan Pengembangan Kawasan Pesisir

1. **Sekolah Pantai**
Lokasi : Kedung Segog
2. **Penanaman Vegetasi**
Lokasi Sepanjang Pantai di 16 Desa
3. **Penanganan banjir dan Rob dengan pembangunan Tanggul (Break Water)**
Lokasi Pesisir Batang Barat, Pantai Sigandu-Ujungnegero
4. **Pembuatan Jetty**

Lokasi : Muara Kalisono Ujungnegoro

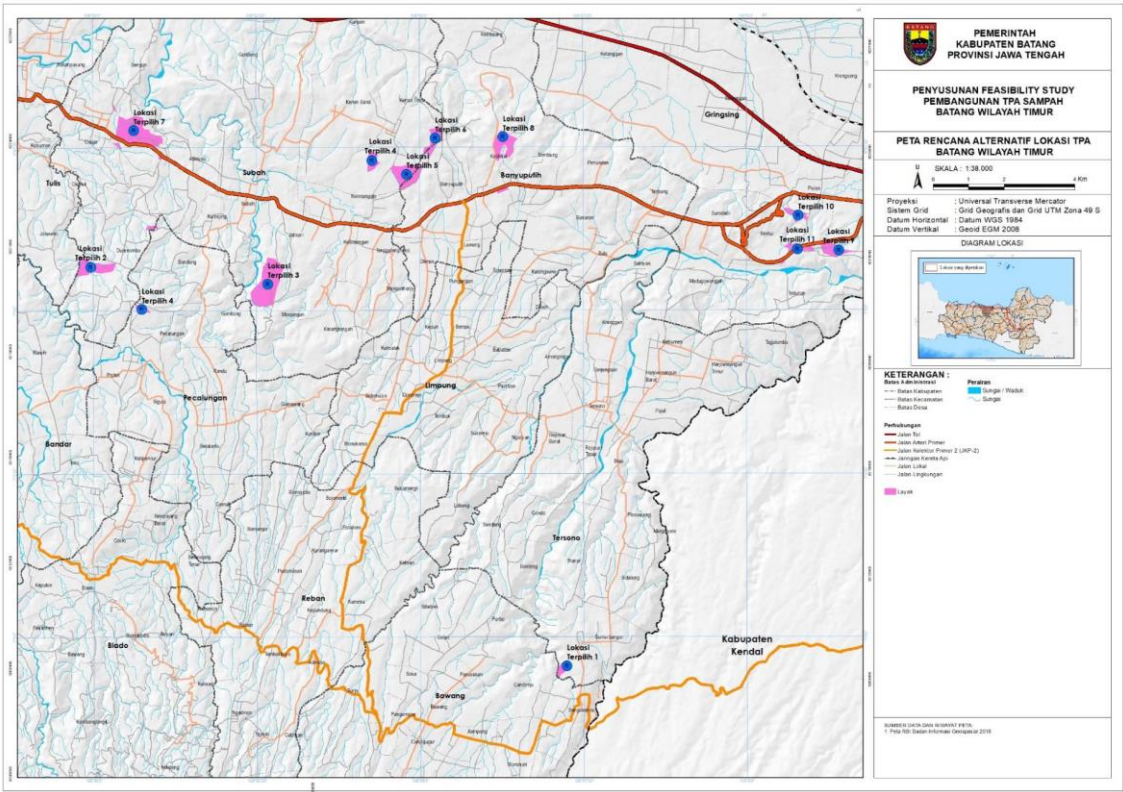
6) Penanganan Persampahan

Mendasari kondisi sampah yang telah menggunung serta *overloud*, TPA Randukuning Kabupaten Batang, perlu dilakukan upaya guna menangani sampah di Kabupaten Batang yang kian melonjak. Sesuai dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Batang, Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah dilaksanakan guna meningkatkan cakupan layanan persampahan yang meliputi pengembangan dan pembangunan TPA sampah Batang wilayah timur, pengembangan dan pengelolaan TPS 3R, TPST, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Berikut Rencana Penanganan Persampahan di Kabupaten Batang Tahun 2024 antara lain

- 1. Masterplan Persampahan
- 2. Tindak Lanjut FS TPA Batang Timur (Lokasi Desa Sangubanyu)
- 3. Peningkatan Jumlah TPS

Gambar 4. 9
FS TPA Batang Timur Tahun 2021



Gambar 4. 10
Lokasi Pemilihan TPA

Kecamatan	Desa	Lokasi Terpilih	Status Lahan	Luas (Ha)
Bawang	Sangubanyu	Lokasi Terpilih 1	Lahan Pemkab Batang	8,06404054
Subah	Durenombo	Lokasi Terpilih 2	Lahan Perhutani	31,97724093
	Jatisari	Lokasi Terpilih 3	Lahan Perhutani	75,35029263
	Kemiri Timur	Lokasi Terpilih 4	Lahan Perhutani	13,1244941
	Kemiri Timur	Lokasi Terpilih 5	Lahan Perhutani	40,43603811
	Kemiri Timur	Lokasi Terpilih 6	Lahan Perhutani	21,17812629
	Sengon	Lokasi Terpilih 7	Lahan Perhutani	74,13390603
Banyuputih	Kalibalik	Lokasi Terpilih 8	Lahan Perhutani	20,91017919
Gringsing	Kutosari	Lokasi Terpilih 9	Lahan Perhutani	23,72529024
	Plelen	Lokasi Terpilih 10	Lokasi Bekas Lahan Pertambangan	11,58892293
	Sentul	Lokasi Terpilih 11	Lokasi Bekas Lahan Pertambangan	11,27339391

Sumber : FS TPA Batang Timur, 2021

g) **Penataan Kota Batang**

Perkotaan Batang masuk dalam bagian kawasan Strategis Kabupaten dalam RTRW Kab Batang yaitu **Kawasan strategis Koridor Batang Kandeman**. Tujuan Penataan Kota Batang ini guna menciptakan kota yang berkelanjutan, fungsional, estetis, dan berwawasan lingkungan. Prinsip Pembangunan Penataan Kota Batang antara lain 1) Mengutamakan pejalan kaki dan transportasi publik; 2) Menerapkan prinsip desain yang ramah lingkungan; 3) Menerapkan prinsip desain yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, dan 4) Memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Fokus Lokasi Penataan yakni :

- Penataan Koridor Jalan Jenderal Sudirman
- Penataan Ruang Terbuka Alun Alun Batang
- Penataan koridor Jalan Yos Sudarso

Target pelaksanaan Rencana Penataan Kota Batang :

Tahun 2023 → Penyusunan Rencana Gambar Desain Lokasi Penataan

Tahun 2024 → Penyusunan DED Lokasi Penataan **serta** Penyusunan Dokumen Pengembangan Kawasan strategis Koridor Batang Kandeman.

Gambar 4. 11 Rencana Penataan Kota Batang

Sumber : Bidang IPW Bapelitbang, 2023

h) Arah Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan identifikasi lokasi-lokasi kawasan kumuh yang disusun oleh masing-masing daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Penanganan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi wewenang. Kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, kawasan kumuh dengan luas 10-15 hektar ditangani oleh Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 Ha ditangani oleh Pemerintah Pusat.

Keputusan Bupati Batang mengenai kawasan kumuh tertuang dalam SK Bupati Batang Nomor 050/509/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batang dengan total luas kumuh sebesar 118,67 ha. Berdasarkan hasil Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2021 dan 2022 dengan mempertimbangkan perhitungan kolaborasi penanganan kumuh (APBD II, APBD I, APBN, dan pihak lainnya) bersama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah dihitung capaian penanganan kawasan kumuh tingkat Kabupaten sebesar 20,94 ha dengan luas kumuh awal 95,58 ha. Terdapat 3 desa/kelurahan di Kabupaten Batang yang telah mencapai luas kumuh 0 ha. Sehingga total luasan kumuh Kabupaten Batang tahun 2023

adalah sebesar 74,64 ha meliputi 11 desa/ kelurahan dalam 2 kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Lokus Kawasan Kumuh Kabupaten Batang

No.		Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh (ha)
1.	1.	Batang	Denasri Wetan	0,49
	2.	Batang	Karangasem Selatan	2,28
	3.	Batang	Karangasem Utara	2,87
	4.	Batang	Kasepuhan	21,19
	5.	Batang	Kauman	9,47
	6.	Batang	Klidang Lor	0,87
	7.	Batang	Proyonanggan Selatan	10,99
	8.	Batang	Proyonanggan Tengah	4,21
	9.	Batang	Proyonanggan Utara	3,11
	10.	Batang	Watesalit	15,78
2.	11.	Kandeman	Depok	3,38
		Total		74,64

Sumber : BA Kesepakatan Penanganan Kawasan Kumuh

Luasan kawasan kumuh dapat bertambah jika dilakukan pendataan ulang (*update baseline survey*).

Dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Batang sedang berupaya untuk mengikuti program Dana Alokasi Khusus Integrasi (DAK Integrasi) atau yang saat ini bernama Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK TPPKT) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mencakup pengintegrasian komponen rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung oleh sarana prasarana seperti air minum, sanitasi (ari limbah dan sampah), jalan, dan drainase lingkungan. serta sarana prasarana proteksi kebakaran. Terdapat 4 (empat) macam menu dalam penanganan kumuh meliputi :

1. Peremajaan yaitu menata ulang permukiman secara total/ menyeluruh (konsolidasi total);
2. Pemugaran yaitu menata ulang permukiman secara sebagian (konsolidasi sebagian);
3. Relokasi yaitu pemindahan permukiman kumuh dari lokasi yang tidak sesuai RDTR/ permukiman yang terdapat pada kawasan rawan bencana;

4. Pembangunan permukiman baru yaitu pembangunan baru permukiman melalui kelompok/ komunitas masyarakat untuk mengurangi *backlog*.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program ini diantaranya yaitu dokumen dan data dukung yang mempresentasikan usulan program dan kesiapan program untuk dilaksanakan seperti kesiapan lahan melalui dokumen *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP), adanya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Selain itu, urgensi lokasi dan juga kesepakatan masyarakat juga menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan program DAK TPPKT.

i) Arah Kebijakan *Open Defecation Free* (ODF)

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS/Open defecation) termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. BABS/Open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak – semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengamanatkan ODF 100% untuk 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2023 yakni Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.

Mendasari capaian ODF di Kabupaten Batang Tahun 2023 pada Triwulan I, jumlah desa yang sudah ODF di Kabupaten Batang sebanyak 90 desa atau sekitar 36 persen, sehingga terdapat 158 desa yang belum ODF atau sekitar 64 persen, diperlukan komitmen dan upaya strategis guna mencapai target 100% ODF. Berikut upaya yang dilakukan untuk melanjutkan kegiatan ODF antara lain :

- Sosialisasi Perda KTR
- Pengaktifan Germas
- Penguatan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- Pengadaan Jamban Sehat
- Pembangunan IPAL Komunal

- Tangki Septik Komunal
- Pembangunan MCK ++
- DAK Sanitasi
- DAK Air Minum
- Hibah Air Limbah Setempat
- Stimulan jamban

j) Arah Kebijakan yang mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Batang

Ketahanan pangan di Kabupaten Batang melibatkan kerjasama dari berbagai lintas sektoral. Ketahanan pangan ditujukan untuk mengantisipasi kerawanan dan krisis pangan di daerah karena suatu kondisi serta untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Kebijakan ketahanan pangan ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Batang.

Selain dukungan dari terbitnya Perbup tersebut, beberapa kebijakan spesifik yang mendukung ketahanan pangan daerah antara lain :

1. *Food Loss dan Food Waste*

Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang untuk menurunkan angka Food Loss dan Food Waste dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang kepada masyarakat untuk meningkatkan praktik penanganan pangan yang baik (*good handling practices*) dengan selalu menghabiskan makanan yang dimakan atau makan sesuai porsi yang dibutuhkan. Penurunan angka food loss dan food waste menjadi hal yang penting dilakukan karena syarat tercapainya ketahanan pangan suatu daerah adalah adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan gizi bagi penduduk. Bahan pangan yang dapat diproduksi di dalam daerah diupayakan tetap menjadi pilar utama dalam penyediaan pangan daerah

2. *Konsep Lumbung Pangan*

Lumbung Pangan ditujukan untuk menopang ketahanan Kebutuhan Pangan daerah. Terdapat 4 lumbung pangan yang telah diresmikan di Kabupaten Batang antara lain

- a. Pengadaan Th 2021: Desa Pejambon (kec warungasem)
- b. Pengadaan Th.2022 : desa wonobodro kec. Blado
- c. Pengadaan Th 2022 : desa sidorejo kec. Gringsing
- d. Pengadaan 2022 : desa tersono kec. Tersono

k) Arah Kebijakan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Batang diarahkan kepada pengembangan kawasan yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan industri. Diharapkan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan industri dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, mendorong kemandirian daerah dalam kemampuan keuangan dan kesejahteraan masyarakat serta tetap mempertahankan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Kawasan industri di Kabupaten Batang yang telah berdiri dan sedang dikembangkan yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang berada di Kecamatan Banyuputih dan Gringsing, dan Batang Industrial Park (BIP) yang berada di Kecamatan Tulis. Di samping itu masih ada rencana pengembangan kawasan industri baru yang juga berlokasi di Kecamatan Tulis.

Berdasarkan tinjauan lokasi kawasan industri di Kabupaten Batang memiliki akses yang baik dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang serta dengan adanya jalan tol Trans Jawa. Akses melalui jalan non-tol juga tersedia khususnya menuju lokasi tapak yaitu jalan raya Pantura. Hal ini juga mendorong bertumbuhnya kawasan penyangga di sekitar kawasan industri, terutama sektor perumahan dan penyediaan barang jasa yang membutuhkan infrastruktur pendukung kawasan. Kebutuhan *supply chain* (semisal penyediaan kardus untuk bungkus produk tertentu) dalam kawasan juga berpotensi untuk dikerjakan oleh investor lokal sehingga dapat meningkatkan usaha UMKM. Keberadaan kawasan industri akan membutuhkan kurang lebih 300 ribu tenaga kerja dan secara demografi mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat di sektor agraris menuju sektor industri. Untuk itu diperlukan pelatihan agar siap untuk dipekerjakan. Isu lingkungan juga tetap menjadi

perhatian utama agar keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang dapat dipertahankan kualitasnya.

a. Strategi pengembangan kawasan industri

Upaya dan strategi dalam mencapai tujuan sasaran pengembangan kawasan industri :

1. Mengarahkan pengembangan kawasan penyangga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP) dalam bentuk pengembangan infrastruktur pendukung :
 - Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui pertigaan Banyuputih tembus ke arah jalan kabupaten Kedawung-KITB, penyediaan kawasan permukiman dan penyediaan barang jasa dengan panjang 25 km dan lebar 12 m.
 - Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui jalan pantura Tulis menuju BIP dengan panjang sekitar 4 km dan lebar 12 m.
 - Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Limpung untuk mendukung KITB.
 - Penyediaan transportasi massal.
 - Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Tulis, Bandar, Kandeman untuk mendukung BIP.
 - Pembangunan dan penyediaan sistem jaringan air minum di Kecamatan Banyuputih.
 - Mendorong peran serta BUMD dalam kerjasama investasi di dalam kawasan industri.
2. Pemberdayaan UMKM untuk mendukung *supply chain* di kawasan industri dan kebutuhan barang jasa di kawasan penyangga.
 - Pembangunan dan pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) di dalam KITB yang terdiri dari pembangunan rest area, pusat UMKM, ruko, hotel, pergudangan dan perkantoran.
 - Inisiasi penyediaan kebutuhan dasar seperti katering, laundry, kos, kontrakan dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha desa dengan profesional.

- Kemudahan permodalan dan pelatihan UMKM.
- 3. Percepatan kesiapan penyediaan tenaga kerja
 - Pengadaan data base tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.
 - Pembangunan gedung BLK beserta sarana prasarana pendukung di Kecamatan Batang.
- 4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
 - Mengembangkan sarana prasarana pendukung pengukuran kualitas air dan udara di seluruh sungai dan kawasan industri di Kabupaten Batang.
 - Mendorong komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
 - Memperbanyak tutupan lahan terutama lahan kritis di kawasan lindung di Batang bagian selatan.
 - Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Gringsing.

b. Kebijakan pengembangan kawasan industri

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kawasan industri maka disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Penyusunan regulasi terkait retribusi dan pajak daerah di kawasan industri.
2. Penyusunan master plan kawasan penyangga.
3. Penyusunan RDTR kecamatan Gringsing, Banyuputih, Kandeman dan Batang.
4. Kerjasama BUMD dengan pelaku industri.
5. Pengembangan UMKM.
6. Penguatan kapasitas SDM tenaga kerja.
7. Pemantapan tata kelola lingkungan.

Terkait dengan pengembangan jaringan transportasi laut berupa rencana peningkatan pelabuhan Batang menjadi pelabuhan pengumpan regional dan pembangunan pelabuhan KITB untuk melayani alur distribusi barang jasa

4.3 Inovasi Kabupaten Batang

Pada tahun 2022 ini, terdapat 56 (lima puluh enam) inovasi daerah yang dilaksanakan oleh semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Jumlah Inovasi Daerah Tahun 2022

Kategori	Jumlah
Inovasi dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar	29 Inovasi
Inovasi dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	15 Inovasi
Inovasi dalam Urusan Pilihan	4 Inovasi
Inovasi dalam Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawas Urusan Pemerintahan	6 Inovasi
TOTAL	54 Inovasi

Sumber: Bapelitbang Kab. Batang

A. Inovasi dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Inovasi dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial.

1. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kewirausahaan (Disdikbud Kabupaten Batang)

Dilaksanakan pada Sekolah Dasar di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung konten lokal Kabupaten Batang, yakni dengan menerbitkan Buku Paket Pendidikan Dasar Kewirausahaan.

Gambar 4. 12
Gambar Penyelenggaran Diksar Kewirausahaan



2. Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal (Disdikbud Kabupaten Batang)

Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal dimaksudkan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya dengan memperkaya satuan pendidikan melalui muatan pendidikan yang

terkait potensi Daerah di bidang seni dan budaya, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, lingkungan hidup, agama dan budi pekerti atau bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Gambar 4. 13 Gambar Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal



3. Sistem Informasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi



Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Batang mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp. 600.000.000,00. Dalam rangka tertib administrasi dan

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses bantuan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menginovasikan pembuatan sistem informasi yaitu <https://bandikmenti.batangkab.go.id/>

Adapun tujuan dari sistem ini adalah Memudahkan user dalam melakukan pendaftaran beasiswa tanpa perlu datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

4. PIPI BAKPAO (Dinkes Kabupaten Batang)

“PIPI BAKPAO’ yaitu pijat-pijat buat anak tanpa obat, Terapi bayi antara lain pijat keluhan batuk pilek, bayi tumbuh gigi, bayi sembelit, bayi prematur, bayi diare. Pelayanan pijat bayi disini dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu oleh tenaga kesehatan khususnya bidan yang telah memiliki ketrampilan tentang pijat dan telah mengikuti pelatihan tentang “Natural Basic Terapi “.

Tujuan inovasi ini adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam mengatasi keluhan yang dialami bayi dengan terapi tradisional yaitu pijat bayi sehingga dapat mengurangi penggunaan obat, (2) Membina tumbuh kembang bayi melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, serta emosional yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu dengan bayi, ibu dengan petugas dan lingkungan, (3) Mencegah Stunting karena dengan pijat dapat memperlancar aliran darah, meningkatkan metabolisme dan meningkatkan nafsu makan. Sasaran PIPI BAKPAO adalah Bayi dengan batuk pilek, Bayi tumbuh gigi, Bayi konstipasi, Bayi prematur, dan Bayi diare

Inovasi ini merupakan wujud kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dengan Puskesmas Blado 1. Untuk inovasi ini sendiri anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.000.000. Inovasi ini dilakukan pada bulan Juni 2022 di Puskesmas Blado 1 dengan capaian 5 balita. Kendala inovasi ini adalah kurangnya promosi sehingga belum banyak orang yang tahu. Untuk hal itu diperlukan adanya solusi berupa promosi yang dapat dilakukan melalui social media maupun dalam pertemuan dan lintas sektor.

5. D’Basinem (Desa Binaan Asi Thok nem Wulan) / (Dinkes Kabupaten Batang)

Inovasi D’Basinem dicetuskan oleh Puskesmas Subah yang bertujuan untuk menjadi edukasi ASI eksklusif, sebagai media money kesadaran memberi ASI eksklusif kepada masyarakat, dan membangun paradigm masyarakat untuk saling memotivasi dalam menu gizi seimbang. Adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi ini adalah muspika, petugas gizi puskesmas, petugas promkes

puskesmas, bidan desa, kades dan perangkat, PKK dan kader, RT dan RW, ibu menyusui serta ibu yang mempunyai anak balita.

Untuk pelaksanaannya biasanya dilakukan saat posyandu, seminggu sekali makan bersama di tempat posyandu atau sesuai waktu dan tempat kesepakatan warga, memasak menu gizi seimbang untuk giat makan bersama balita, giat makan bersama balita sambil bermain, serta *brain storming* (diskusi). Inovasi ini sendiri masih taraf uji coba dan *support* kegiatan saja. Untuk kendala yang dihadapi biasanya waktu karena tidak semua warga memiliki waktu luang, Biaya karena perkapita masing-masing warga berbeda sehingga ada yang iuran dan ada yang tidak serta adanya ibu-ibu yang kurang telaten dalam memotivasi balita untuk makan dengan menu gizi seimbang sesuai usia. Puskesmas Subah itu sendiri sudah menyiapkan upaya-upaya untuk menghadapi kendala yang ada. Upaya atau solusi yang mereka ciptakan berupa adanya kontrak dan komitmen bersama dengan warga yang terlibat, biaya dengan dana jimpitan RT dan donator, serta KIE (Penyuluhan, motivasi, dan *trial error*).

6. Aplikasi My RSUD Batang (RSUD Batang)

MyRSUD Batang dibangun untuk masyarakat guna memudahkan dalam mendaftar klinik rawat jalan dan mendapatkan hak-hak informasi tentang pelayanan kesehatan yang telah diterima tanpa perlu datang dan menanyakan di Rumah Sakit. Dengan aplikasi My RSUD Batang ini, selain untuk mendaftar klinik rawat jalan online (sipentol), pelanggan juga dapat membuat akun pribadi yang didalamnya berisi informasi-informasi penting tentang pelayanan kesehatan yang telah didapatkan di RSUD Batang.

7. Si Emping (RSUD Limpung)

Mulai Maret 2022, pasien yang akan berobat di RSUD Limpung dapat melakukan pendaftaran / registrasi pasien melalui Mobile JKN atau aplikasi Si Emping RSUD Limpung. Dengan adanya bridging system antrean online, sangat memudahkan pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Selain mengurangi penumpukan antrean pasien, ia juga melihat langsung bagaimana proses pelayanan berjalan dengan lancar, dikarenakan setiap jenjang pelayanan pasien sudah

terintegrasi dari layanan poliklinik sampai dengan pelayanan di farmasi.

8. Batang Smart Spasial Sistem (BS3) / (DPUPR Kabupaten Batang)

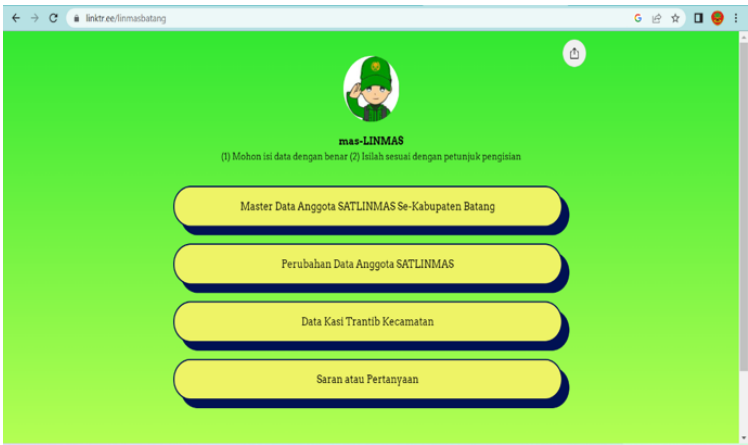
Inovasi BS3 ini bertujuan : (1) Menginformasikan Penataan dan pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Batang kepada masyarakat dan pemerintah lainya; (2) Menyediakan informasi yang lengkap tentang profil dan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; (3) Mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk mendapatkan segala informasi mengenai data-data peta tata ruang dan wilayah; dan (4) Mempermudah pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Batang.

Sistem Batang Smart Spasial Sistem (BS3) dibuat oleh DPUPR dan diakses oleh masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang. Pengembangan sistem aplikasi BS3 udah 3 kali yaitu melalui WEB, Android atau HP.

9. mas-LINMAS (Satpol PP Kabupaten Batang)

Mas-LINMAS berperan sebagai media pengumpulan data anggota Satlinmas dari 15 Kecamatan di Kabupaten Batang. Dengan menerapkan unsur 2M yaitu (Mudah & Murah), mas-LINMAS dijalankan dengan konsep yang mudah diakses, mudah dijalankan, mudah dibagikan dan gratis. Tidak ada lagi biaya kurir dalam proses pengiriman data, maupun pengurangan penggunaan kertas sekali pakai. Untuk mengakses mas-LINMAS bisa diakses melalui linktr.ee/linmasbatang menggunakan PC atau ponsel.

Gambar 4. 14 Mas LINMAS



Pada tanggal 5 Agustus 2022 mas-LINMAS dikenalkan melalui sosialisasi kepada Kepala Seksi Trantib Kecamatan dan Perwakilan Desa/Kelurahan, dan resmi dirilis pada tanggal 8 Agustus 2022 melalui Surat Edaran Bupati Batang. Sampai saat ini mas-LINMAS sudah berkontribusi menjadi media pengumpulan data satlinmas baik pembaruan anggota baru maupun perubahan data anggota satlinmas yang mengundurkan diri atau hal lain yang menyebabkan anggota tersebut tidak aktif dengan total 330 kali akses perubahan. Aplikasi mas-LINMAS dinilai merupakan pelopor aplikasi pengumpulan data satlinmas pada skala Nasional, dan diharapkan kedepannya bisa dijalankan maksimal dengan senantiasa terus dikembangkan.

10. LAPOR-PP (Satpol PP Kabupaten Batang)



Gambar 4. 15 Lapor PP

LAPOR-PP yang merupakan singkatan dari Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ke Polisi Pamong Praja, adalah layanan langsung yang dihadirkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang melalui Whatsapp Chat untuk menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat sebagai bentuk quick time service kepada masyarakat.

Bentuk aduan yang diterima adalah Pelanggaran Perda atau Perkada seperti:

- Adanya pemasangan reklame yang mengganggu masyarakat dan melanggar Perda; PGOT; orang dalam gangguan jiwa; pedagang kaki lima yang melanggar perda, dan lain sebagainya.
- Aktivitas masyarakat yang menyebabkan kegaduhan di lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya.

LAPOR-PP mulai disosialisasikan kepada Kepala Seksi Trantib Kecamatan pada tanggal 5 Agustus 2022 dan diharapkan bisa menjadi sarana layanan masyarakat yang benar-benar digunakan sesuai fungsi dan tujuannya. Seluruh bentuk laporan yang masuk melalui chat LAPOR-PP akan dihitung sebagai bentuk rekapan jumlah laporan resmi yang masuk, dan secara realtime akan difilter berdasarkan skala prioritas tindak lanjut.

11. Tanggul Non Permanen Penahan Banjir Rob (BPBD Kabupaten Batang)

Pembangunan tanggul non permanen dilaksanakan di Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang pada bulan Juni 2022. Tujuan inovasi pembuatan tanggul non permanen adalah menanggulangi banjir rob di wilayah pemukiman warga RT 1 dan RT 2 RW 4 Desa Denasri Kulon dan agar persawahan serta tambak dapat produktif kembali. Manfaat ini sudah dirasakan masyarakat di pemukiman, yaitu rob yang terjadi tidak sebesar sebelum adanya tanggul ini. Sedangkan persawahan dan tambak belum bisa ditanami, masih menunggu keringnya rob. Pembiayaan inovasi berasal dari anggaran dana desa dan bantuan logistik dari BPBD Kab. Batang yang dikerjakan oleh warga Denasri Kulon secara kerja bakti.



Gambar 4. 16
Pembangunan Tanggul non permanen

12. PUSKESOS SEDULUR (Dinsos)

Puskesmas (pusat kesejahteraan sosial) Sedulur dibuka pada tahun 2022, puskesmas menangani berbagai pelayanan sosial (pembuatan kartu PIP, kartu KIS, KTP, dll) satu atap/tempat yang diberikan oleh dinas sosial terhadap masyarakat. Hingga saat ini telah melayani sebanyak 4675 orang dengan berbagai pelayanan (pembuatan KTP, Kartu KIS, Kartu PIP, dll).

B. Inovasi dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Inovasi dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar adalah inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib non pelayanan dasar yaitu: Disnaker, DP3AP2KB, DLH, Disdukcapil, Dispermades, Dispaperta, Dishub, Diskominfo, DPMPTSP, dan Disperpuska.

1. STRATEGI DIGITALISASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL MELALUI PENGEMBANGAN SERVICE POINT UNTUK PELUANG INVESTASI PADA KAWASAN INDUSTRI



Gambar 4. 17 Pelaunchingan Service Point

Tujuan inovasi ini adalah terwujudnya Digitalisasi Pelayanan Penanaman Modal Melalui Pengembangan Service Point untuk Peluang Investasi Pada Kawasan Industri Di Kabupaten Batang. Inovasi ini dilaksanakan dengan membentuk

Service Point di Kantor Kecamatan terdekat dengan Kawasan Industri (Kecamatan Gringsing, Banyuputih dan Limpung). Inovasi ini memiliki manfaat antara lain:

- 1) peningkatan pelayanan pada Service Point,
- 2) pemanfaatan service point untuk penanganan permasalahan di Kawasan industri dan pelaku usaha di wilayah layanan service point,
- 3) Terfasilitasinya kegiatan usaha kemitraan Kawasan Industri dengan pelaku usaha UMKM dan masyarakat.

Pada tanggal 2 November 2022 telah dilaunching Service Point di Kecamatan Gringsing oleh ibu Pj. Bupati Batang, adapun pelayanan Service Poit di Kecamatan Gringsing meliputi :

- a) OSS – RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach)
- b) SIPUAS (Sistem Informasi Perizinan Usaha dan Investasi)
- c) SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)

dari dilaunching sampai dengan tanggal 9 November service point telah melayani 8 perizinan.

2. DIGITALISASI DASHBOARD ANALYTICS

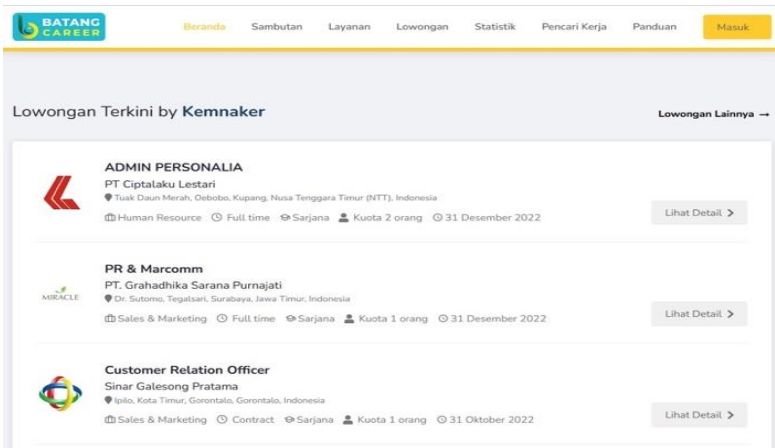


Gambar 4. 18 Digitalisasi Dashboard Analytics

Dashboard Analitics merupakan Sistem Informasi Elektronik yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, verifikasi dan validasi serta

pengolahan data dengan cara melakukan integrasi antar sistem elektronik, menyajikan data dan informasi serta analisisnya dalam rangka menunjang pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi Pembangunan Daerah. Melalui sistem ini, seluruh data terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang akan tersaji dengan lengkap yang dapat diakses pada alamat <https://dashboard-analytics.batangkab.go.id>.

3. **BATANG CAREER (Disnaker dan Diskominfo)**



Gambar 4. 19 Tampilan Batang Career

Pemerintah Kabupaten Batang memberikan layanan informasi kerja bagi para pencari kerja di wilayah Kabupaten Batang melalui layanan Batang Karir yang dapat diakses pada alamat

<https://karir.batangkab.go.id>. Tujuan dibangun Sistem Informasi Database dan Profiling Pencari Kerja Berbasis Website (Batang Career) adalah untuk memudahkan para pencari kerja menemukan lowongan pekerjaan yang tersedia, pendataan pencari kerja di Kabupaten Batang, dan memudahkan penyedia kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Aplikasi Batang Career (karir.batangkab.go.id) merupakan aplikasi berbasis infrastruktur teknologi modern yang bertujuan untuk memberikan informasi database potensi SDM di Kabupaten Batang dan mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja dari dunia kerja secara efektif dan efisien. Layanan di dalam aplikasi Batang Career meliputi Database System, Profilling System, Training System, Job Connecting System, Recruitment System, dan Job Seeker Tracking System. Talent yang telah terdaftar juga bisa membuat CV Online, dan melakukan Test Psikologi Online.

Dalam melaksanakan pengembangan sistem informasi pasar kerja berbasis website (Batang Career) tentunya membutuhkan bantuan

dari beberapa pihak terkait, diantaranya adalah PT. Undip Citra CiptaPrima sebagai penyedia jasa konsultasi pembuatan website, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Perwakilan dari BKK dan LPK Kab. Batang, dan Bagian Hukum Sekda sebagai mitra kerja sama dalam pembuatan peraturan Bupati tentang Layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui Sistem Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Batang.

4. **Layanan Desa Mandiri**

Layanan Desa Mandiri merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan dokumen (surat pengantar dan surat keterangan) baik dilakukan secara mandiri (online) maupun dengan cara datang langsung, menggunakan tanda tangan elektronik. Layanan ini nantinya akan digunakan oleh masyarakat di seluruh Desa dan Kelurahan se Kabupaten Batang dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Harapannya, dengan sistem ini masyarakat akan semakin cepat dan mudah dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Desa tanpa harus hadir langsung ke kantor desa, tetapi cukup hanya dengan menggunakan media internet yang dapat diakses 24 jam melalui platform terbaru ini.

Gambar 4. 20 Tampilan Layanan Desa Mandiri



5. **SMS REMINDER UJI KIR (Dishub)**

Memberitahukan kepada Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tentang waktu uji berkala. Unsur yang terlibat dalam inovasi ini

adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji, Tim Ahli Teknologi Informatika.

6. Orang Tua Asuh Anak Stunting / DP3AP2KB

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Batang. Pihak yang terlibat dalam Bapak Asuh Anak Stunting yaitu Forkopimda dan perusahaan swasta yang menaruh perhatian pada isu stunting seperti PT. BPI, Bank Jateng, PT.BAPERA, UPZ dan PUDAM Sendang Kamulyan.

7. DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) / DP3AP2KB

Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) diluncurkan pada 27 Juli 2022 sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu.

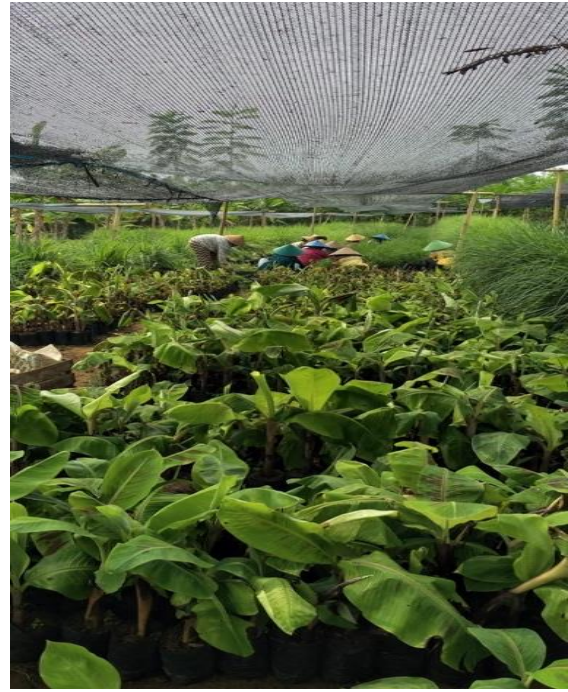
8. Rembug Stunting FORKOPIMDA dan Tim Percepatan Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Batang (DP3AP2KB)

Secara resmi dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2022 di Aula Bupati serta dihadiri oleh FORKOMPIMDA. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari sinergi berbagai lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Batang.



9. TANDUK GEBYAR (Dispaperta)

Inovasi ini merupakan Penumbuhan Produsen (Penangkar) dan Produsen untuk Komoditas Pisang Tanduk Gebyar dan Melati. Inovasi tanduk gebyar bertujuan untuk (1) melestarikan varietas Pisang Tanduk Gebyar dan varietas Melati Emprit Bandar Arum, dimana Kabupaten Batang mempunyai Icon varietas unggulan Pisang Tanduk Gebyar dan melati. Pohon selain



Gambar 4. 21 Tanduk Gebyar

itu pohon induk asli varietas tersebut asli dari Kabupaten Batang, (2) Penangkar baru untuk komoditas varietas Pisang Tanduk Gebyar dan varietas Melati Emprit Bandar Arum,tersebut dapat terdaftar atau teregistrasi di BPSB dan sebagai produsen dan pengedar Benih.

Capaian inovasi saat ini : (1) Tahapan target produksi pisang gebyar 50.000 benih pisang tanduk gebyar, Melati 40.000 batang benih, (2) capaian untuk komoditas Pisang tanduk gebyar sampai saat ini, sudah ada 1 (sebagai produsen dan pengedar), sedangkan untuk Melati sudah ada 2 (sebagai produsen dan pengedar), (3) Petani milenial sudah bergerak untuk budidaya pisang tanduk, (4) Tahun 2022 dalam tahapan proses pengajuan di e catalog untuk pengadaan benih bibit pisang gebyar dan Melati Emprit Bandar Arum.

10. SIPUAS (DPMPTSP dan Diskominfo)



Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menggunakan teknologi informasi juga telah dilaksanakan pada layanan perizinan diluar layanan

Online Single Submission (OSS) dengan menerapkan tanda tangan elektronik (TTE) pada perizinan dibidang praktik kesehatan dan lain

sebagainya. Layanan ini dapat digunakan masyarakat untuk memproses perizinan secara mandiri misalnya izin praktik perawat, izin praktik bidan, izin praktik apoteker dan lain sebagainya melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Usaha dan Investasi (SiPUAS) yang merupakan layanan terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat pada alamat <https://sipuas.batangkab.go.id/>.

Tujuan inovasi ini adalah mempermudah masyarakat dalam mendapatkan izin selain di OSS RBA. Capaian izin yang sudah dikeluarkan lewat aplikasi sampai dengan 9 November 2022 sebanyak 1.055 izin.

11. Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis (SiMARDi 7.0) / Disperpuska

Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola arsip yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informatika yang sesuai dengan prinsip dan kaidah yang berlaku. Simardi dapat mengatasi masalah peningkatan volume arsip yang luar biasa yang memerlukan pengendalian dan pengelolaan khusus agar pelayanan informasinya dapat dikelola dengan baik. Fitur aplikasi ini meliputi: Pengelolaan surat masuk dan keluar, Pemberkasan, Pengelolaan arsip inaktif, Pengelolaan arsip statis, Cetak registrasi surat masuk dan keluar, Cetak disposisi dan kartu kendali, Statistik volume surat, Peminjaman arsip, Cetak daftar berkas dan isi berkas, Cetak daftar arsip yang dipindahkan, Cetak daftar arsip inaktif, Cetak daftar arsip usul musnah/yang dimusnahkan, Cetak daftar arsip usul serah, dan Cetak daftar arsip statis.

Gambar 4. 22 SIMARDI



12. Roadshow Workshop Pengelolaan Arsip / Pembinaan Kearsipan Door to Door (Disperpuska)

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas pengelola arsip menjadi salah satu catatan didalam upaya tercapainya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Bimbingan teknis yang dilakukan dalam suatu forum dirasa masih kurang maksimal hasilnya, sehingga diperlukan adanya pendampingan langsung ke objek binaan melalui roadshow workshop pengelolaan arsip/Pembinaan Kearsipan Door to Door.

Gambar 4. 23 Workshop Pengelolaan Arsip



13. Integrasi server Inlislite (Disperpuska dan Diskominfo)

Inovasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan Server yang ada di Perpustakaan dengan Kominfo dengan harapan dapat dikembangkan agar dapat memaksimalkan penggunaan untuk masyarakat

Gambar 4. 24 Integrasi Server Inlislite



14. LUDO LITERASI

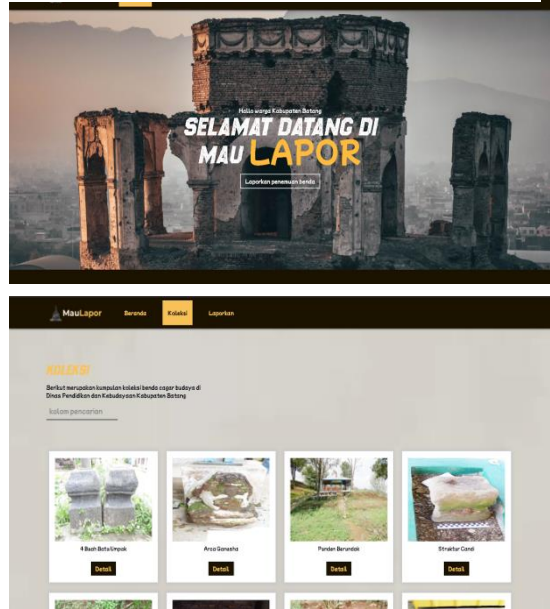
Inovasi ini bertujuan untuk mengenalkan anak pada budaya literasi. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini melibatkan siswa, guru, dan pustakawan yang telah dilaksanakan di beberapa SD di wilayah Kabupaten Batang.

Gambar 4. 25 Ludo Literasi



15. Sistem Informasi Penemuan Benda Cagar Budaya Kabupaten Batang (Disdikbud)

Gambar 4. 26 Mau LAPOR



Sistem Informasi Website Pelaporan Penemuan Cagar Budaya DISDIKBUD Kabupaten Batang adalah sistem informasi website yang berfungsi sebagai sarana masyarakat Kabupaten Batang dalam melakukan pelaporan terkait penemuan benda yang diduga benda cagar budaya.

Untuk user umum tidak perlu melakukan login. Dalam user

umum hanya tersedia 3 navigasi utama yaitu menu beranda, menu koleksi dan menu laporan. Sementara untuk user admin harus melakukan login. Dalam user admin juga terdapat 3 menu utama yaitu menu koleksi yang menampilkan semua koleksi cagar budaya, menu laporan yang menampilkan semua laporan masyarakat terkait penemuan benda cagar budaya dan menu tambah data benda.

Tujuan dari sistem ini adalah agar masyarakat dapat membuat laporan penemuan benda cagar budaya tanpa datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang serta masyarakat dapat memperoleh informasi lebih transparan terkait benda cagar budaya yang didata oleh Dinas.

C. Inovasi dalam Urusan Pilihan

Inovasi dalam Urusan Pilihan adalah inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pilihan yang memiliki inovasi yaitu Disperindagkop & UKM.

1. E-RETRIBUSI

Tujuan E-Retribusi yaitu untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi pelayanan pasar dengan sistem elektronik. E-Retribusi melibatkan para pedagang binaan Disperindagkop dan UKM dan stakeholder terkait. Anggaran inovasi Pelaksanaan E-Retribusi mulai 27 Desember 2021 di 8 Pasar Daerah Kabupaten Batang yaitu Pasar Batang, Pasar Limpung, Pasar Bandar, Pasar Bawang, Pasar Subah, Pasar Warungasem, Pasar Tersono dan Pasar Plelen.

Capaian saat ini target pendapatan pelayanan pasar meningkat. Kendala dalam pelaksanaan E-Retribusi antara lain SDM/personil, jaringan internet, dan peralatan m-pos terbatas. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pembinaan terhadap SDM yang ada dan harapan kami tersedianya sarana prasarana penunjang jaringan internet.

2. PASAR DI KABUPATEN BATANG S.I.A.P (SEHAT INOVATIF AMAN PAKAI) QRIS

Tujuan Pasar di Kabupaten Batang S.I.A.P (Sehat Inovatif Aman Pakai) QRIS yaitu untuk mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan pembayaran secara tunai. Pasar di Kabupaten Batang S.I.A.P (Sehat Inovatif Aman Pakai) QRIS melibatkan Bank Indonesi (BI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Disperindagkop dan UKM, pedagang pasar dan pembeli. Anggaran inovasi tersebut didanai oleh Bank Indonesia (BI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pelaksanaan Pasar di Kabupaten Batang S.I.A.P (Sehat Inovatif Aman Pakai) QRIS telah terselenggara sejak 21 Juli 2022 di 6 Pasar Daerah yaitu Pasar Batang, Pasar Subah, Pasar Limpung, Pasar Bandar, Pasar Tersono, Pasar Blado dan kuliner/restoran. Capaian inovasi tersebut telah tercapai 8053 merchant QRIS.

3. PENDATAAN KOPERASI DAN UMKM OLEH ENUMERATOR (PL KUMKM)

Tujuan Pendataan Koperasi dan UMKM oleh Enumerator yaitu untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Batang. Pendataan Koperasi dan UMKM oleh Enumerator melibatkan enumerator (petugas lapangan), responden (pelaku usaha/UMKM), Tim Pokja terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, Verifikator, Administrator dan Koordinator. Anggaran dari Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM oleh Enumerator dimulai dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan bulan Agustus dan diperpanjang sampai dengan bulan Oktober di Kabupaten Batang. Capaian sudah masuk sebesar 33% dari total 120 orang untuk 60.000 target data. Kendala dalam pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM oleh Enumerator antara lain belum maksimalnya aplikasi pendataan di awal program, ada enumerator yang tidak aktif melakukan pendataan, lokasi pendataan di daerah terpencil yang susah sinyal.

4. PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN DI APLIKASI E-BLANGKON BAGI UMKM

Tujuan Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran di Aplikasi E-Blangkon bagi UMKM yaitu untuk membantu para UMKM agar dapat menjual produknya di Aplikasi E-Blangkon dan bertransaksi untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan para UMKM. Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran di Aplikasi E-Blangkon bagi UMKM melibatkan penjual (UMKM), pembeli (OPD) di Kabupaten Batang. Anggaran Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran di Aplikasi E-Blangkon bagi UMKM disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran di Aplikasi E-Blangkon bagi UMKM di bulan Februari 2022 di Aula Kabupaten Batang.

Capaian telah terdaftar di Aplikasi M-Blangkon sekitar 40 UMKM. Kendala dalam pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran di Aplikasi E-Blangkon bagi UMKM yaitu UMKM belum memahami pentingnya aplikasi E-Blangkon dan dianggap sulit serta

ribet, belum memahami pentingnya pengadaan barang melalui E-Blangkon.

D. Inovasi dalam Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Serta Unsur Pengawasan

Inovasi dalam Unsur Pendukung, Unsur Penunjang dan Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan adalah inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Unsur Pendukung, Unsur Penunjang dan Unsur Pengawas yang memiliki inovasi yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat.

1. PERPUSTAKAAN DIGITAL JDIH DPRD KABUPATEN BATANG (Sekretariat DPRD)

Inovasi ini bertujuan menampilkan secara online koleksi buku, dokumen hukum dan koleksi lainnya. Pihak yang terlibat dalam inovasi adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran, Sub Bagian Aspirasi dan Dokumentasi melalui Pihak Ketiga. Sapaian inovasi saat ini mampu menampilkan secara online: 928 Judul Buku, 713 Dokumen Produk Hukum DPRD Kabupaten Batang, 50 Koleksi Plakat, 123 Dokumen Perda, 369 Dokumen Perbup, 1690 Undang-undang, 182 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan 4.590 Peraturan Pemerintah

2. E-KINERJA (BKD)

E-kinerja adalah aplikasi digital yang dibangun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dengan tujuan sebagai sarana untuk Merekam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Laporan Kinerja Harian PNS Lingkup Kabupaten Batang.

Fitur yang tersedia pada e-Kinerja antara lain : (1) Data dashboard yang berguna untuk melihat presentase capaian laporan kerja tiap PNS yang telah dikerjakan, divalidasi ataupun ditolak atasan apabila ada laporan kinerja yang tidak sesuai dengan bidang dan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), (2) Pada e-Kinerja masing-masing PNS juga dapat melihat TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) kotor yang diterima setiap bulannya, (3) SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), fitur ini berguna untuk input SKP tiap PNS yang diambil berdasarkan SKP atasan dan menjadi pokok sasaran kinerja dalam melakukan laporan kinerja yang dilakukan, (4) Laporan

kinerja harian, tiap PNS dapat melakukan input laporan yang telah dikerjakan yang nantinya akan divalidasi atau ditolak oleh atasan. Pada fitur ini akan berkesinambungan dengan aplikasi e-Presensi dimana kehadiran PNS akan menjadi dasar untuk pengisian laporan. Laporan e-Kinerja bersifat harian dapat diisi dimana saja dan kapan saja selama PNS melakukan absen masuk. Bagi PNS yang berstatus sebagai atasan, laporan kinerja akan tervalidasi otomatis tanpa ada validator (atasan), (5) Detail data pribadi, pada fitur ini akan ditampilkan setiap data PNS, baik itu nama, unit kerja, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) jabatan dan sebagainya, (6) Penerimaan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan), pada fitur ini setiap PNS dapat melakukan penguncian TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) dengan mudah sesuai dengan perhitungan presentasi laporan kinerja dan presensi tiap bulannya, selain itu tiap PNS dapat melihat rekap penerimaan TPP tiap bulannya.

Tujuan adanya e-Kinerja : (1) Merekam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Laporan Kinerja Harian PNS Kabupaten Batang, (2) Melakukan perhitungan kinerja sebagai bahan penghitungan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) bagi PNS Kabupaten Batang, (3) Meningkatkan disiplin PNS terkait dengan kinerja.

E-kinerja bermanfaat sebagai media untuk memantau kinerja bawahan secara daring / online, dalam rangka meningkatkan disiplin dan monitoring PNS terkait dengan kinerja masing-masing. Selain itu diharapkan dengan adanya e-Kinerja akan mempermudah pengelolaan kinerja PNS pada Instansi / Satuan Kerja yang secara terperinci, berkomitmen terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik kepegawaian, serta memetakan kinerja PNS dalam rangka Sistem Merit. E-Kinerja berhubungan langsung dengan SIMPEG dan e-Presensi dalam acuan data dan presensi yang dilakukan PNS.

3. SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (Sentra KI / Bapelitbang)

Sentra KI Kabupaten Batang dibentuk melalui SK Bupati Batang Nomor 050/221/2022 Tanggal 31 Mei 2022. Sentra KI adalah organisasi yang mengakomodir pelayanan dan pendaftaran KI bagi masyarakat kabupaten Batang. Tugas dan fungsinya adalah memberikan sosialisasi dan mengadakan pelatihan dokumen, memberikan konsultasi, memberikan pelayanan dan perlindungan

hukum, komersialisasi dan promosi yang difokuskan pada pengembangan kekayaan intelektual di Kabupaten Batang.

Sampai dengan 22 Agustus 2022, telah diterbitkan 3 (tiga) sertifikasi KI Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Nyadran Gunung Silurah, EBT Batik Gringsing dan Potensi Indikasi Geografi (PIG) Kopi Surjo.

4. Inovasi dalam Optimalisasi PAD (BPKPAD).

Terdapat beberapa inovasi dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Batang antara lain: (1) Call Center Pajak (0851 5994 0907), Gebyar Sadar Pajak, (2) Pelibatkan PPRT (Paguyuban RT) dalam Sosialisasi Pajak, (3) Sosialisasi pajak melalui sosial media (Youtube, Instagram, FB, WA), (4) BeHa/ BRa (BPKPAD Hadir/ BPKPAD Rawuh), dan (5) Penerapan ETPD (Elektronik transaksi pemerintah daerah). Inovasi-inovasi tersebut mampu berkontribusi terhadap capaian PAD sampai dengan Agustus 2022 berada diangka Rp. 162.035.184..585,48 (52,96%).

5. Pengembangan Aplikasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan (SINAWAS) / Inspektorat

Aplikasi SINAWAS merupakan sarana dan prasarana berbasis TIK dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam mendokumentasikan Pelaksanaan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Batang berbasis web (<https://simwas.batangkab.go.id>). Aplikasi ini dibuat bersama Diskominfo Kabupaten Batang. Awal pembuatan aplikasi hanya dapat digunakan oleh admin dari Inspektorat Daerah. Namun dengan pengembangan yang telah dilakukan selama Bulan Juli-Agustus 2022 aplikasi telah dapat diakses oleh Objek Pemeriksaan (Obrik) dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga mempermudah proses tindak lanjut secara efektif dan efisien. Anggaran yang digunakan sebesar Rp14.000.000,00. Sampai dengan saat ini terdapat 26 (dua puluh) obrik yang telah menggunakan aplikasi dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Adapun kendala yang dihadapi adalah sinyal di pedesaan yang kurang kuat sehingga dalam upload dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun hal tersebut telah diatasi dengan menambahkan *wireless repeater*.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2024 sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini :

Tabel 5. 1

Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	310.651.090.238
Pajak Daerah	136.775.000.000
Retribusi Daerah	21.200.663.500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.783.027.000
Lain-lain PAD yang Sah	136.892.399.738
PENDAPATAN TRANSFER	1.473.630.735.600
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.326.386.644.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Jumlah Pendapatan	1.784.281.825.838
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	1.671.308.237.949
Belanja Pegawai	751.412.698.636
Belanja Barang dan Jasa	820.162.057.760
Belanja Hibah	88.767.831.553
Belanja Bantuan Sosial	10.965.650.000
BELANJA MODAL	114.973.134.208
Belanja Modal Tanah	150.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.054.812.425
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.901.229.858
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.279.067.696
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	588.024.229
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000

URAIAN	JUMLAH
BELANJA TRANSFER	42.082.654.076
Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076
Belanja Bantuan Keuangan	28.122.700.000
Jumlah Belanja	1.838.364.026.233
Total Surplus/(Defisit)	-54.082.200.395
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000
Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000
Pembiayaan Netto	54.082.200.395
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
TOTAL APBD	1.845.864.026.233

5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Mendasarkan kerangka pendanaan, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 5.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar,18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan,2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) urusan pengawasan, serta 15 (limabelas)) unsur kewilayahan

E. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang didukung dengan pembangunan atau Rehabilitasi sedang/berat unit sekolah baru, ruang kelas, ruang guru, serta fasilitas sekolah lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka partisipasi sekolah dan persentase capaian SPM Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan melalui Perhitungan, Pemetaan, serta penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase guru berkualifikasi S1/D4.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase penyediaan jenis layanan SPM BK.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten melalui Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, kegiatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten melalui Perencanaan, distribusi, pemerataan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kompetensi Teknis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten Kota melalui Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber daya manusia

kesehatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase tenaga kesehatan yang berizin.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui pengendalian, pengawasan, penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga melalui Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase luas sawah yang beririgasi dan rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Batang yang dilayani oleh jaringan irigasi.

b. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampang Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dari mulai penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pembangunan, peningkatan rehabilitasi sistem pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota serta Pembinaan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase TPA dalam kondisi baik.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak dan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air dalam kondisi baik.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Batang, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui :
penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan

jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; pengelolaan leger jalan; survei kondisi jalan/ jembatan; pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar; pelebaran jalan menambah lajur; rekonstruksi jalan; pemeliharaan berkala jalan; pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan; penggantian jembatan; pelebaran jembatan; rehabilitasi jembatan; pemeliharaan rutin jembatan; dan pemeliharaan berkala jembatan. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam).

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Program ini dilakukan untuk rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah beserta dengan pemanfaatan tata ruang. Program ini dilakukan guna mencapai indikator Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase RLH bagi korban bencana/ terdampak program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada : kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan

permukiman kumuh; dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini ditujukan untuk

mencapai indikator Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase waktu tanggap "*response time*".

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. pelaksanaan program

ini guna mencapai indikator persentase Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar melalui penyediaan permakanan, Sandang, Alat Bantu, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dan Pemberian Layanan Rujukan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten melalui penjangkauan anak-anak terlantar dan data fakir miskin serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan memenuhi kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang didukung dengan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial dan dengan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan memelihara Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

F. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Kegiatan yang mengacu RTK

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta serta pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio penduduk yang bekerja

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya melalui kegiatan pelayanan antar kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pencari pekerja yang mendapat pekerjaan.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan. Selain itu, melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, program hubungan industrial diarahkan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu penurunan jumlah perselisihan HI.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak melalui pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak; Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak. Program ini

ditujukan untuk mencapai indikator partisipasi angkatan kerja perempuan

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelebagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha; Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak; Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; Penguatan jejaring antar

lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan; Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indikator yang hendak dicapai dengan adanya program ini adalah cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, termasuk penyediaan infrastruktur lumbung pangan, penyediaan infrastruktur rantai jemur, serta penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya. program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia. Selain itu, program ini diarahkan pada pengelolaan dan keseimbangan cadangan

pangan kabupaten. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Skor Pola Pangan Harapan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan pangan. melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten; pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah rasio desa mandiri pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga persentase pengawasan keamanan pangan yang merupakan indikator yang ingin dicapai dari adanya program ini melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fasilitasi hak atas tanah program daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui penyusunan dan penetapan RPPLH serta pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Batang. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang serta pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kondisi baik.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli LH. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup.

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

- h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah melalui penyusunan masterplan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kegiatan pasukan got, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sampah di Kabupaten Batang.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Program ini dilakukan dengan cara pengolahan dan penyajian data kependudukan untuk mencapai indikator persentase penyajian data kependudukan yang valid.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase budaya desa yang dilestarikan.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang didukung dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pmdes, fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan kepala desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang didukung dengan fasilitasi kelembagaan desa, penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan desa, fasilitasi tim penggerak PKK, serta fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam peningkatan PAD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk melalui penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan

kependudukan jalur pendidikan formal; Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal; Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal; Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal; Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui perumusan parameter kependudukan; Penyediaan dan pengolahan data kependudukan; penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga; Penyediaan data dan informasi keluarga; Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator peningkatan cakupan kesertaan Ber-KB

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL).

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, peningkatan kapasitas penilai Andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui pengelolaan media komunikasi publik; Layanan hubungan media; Pelayanan informasi publik;

Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; Monitoring opini dan aspirasi publik; Manajemen komunikasi krisis; dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah dan terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten melalui Pengelolaan pusat data pemerintah daerah; Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan kota cerdas; dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam satu daerah Kabupaten. Melalui pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi, program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase koperasi aktif.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase peserta pelatihan dengan predikat baik.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada monitoring, evaluasi dan pendampingan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten serta pembinaan dan pengawasan koperasi. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peserta diklat dengan predikat baik.

d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase penambahan wirausaha baru.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; promosi produk Usaha Kecil dan Menengah; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase produk UMKM yang terstandarisasi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota; penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota melalui Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah izin usaha yang diterbitkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan

dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda melalui koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota; pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan; pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kabupaten/Kota; pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. Selain itu, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan juga diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan

dengan dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase organisasi kepemudaan yang dibina.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian medali kejuaraan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah; pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah; penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah; penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; serta partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah penghargaan yang diterima.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral, pengembangan infrastruktur melalui pemeliharaan dan pengembangan sistem

statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan persandian adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator peningkatan jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase benda cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah

kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota, penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan, kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota, dan kegiatan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

G. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah prosentase capaian produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha serta pengelolaan pembudidayaan ikan melalui penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air melalui pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian bina kelompok masyarakat pengawas.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil melalui penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah Kabupaten/Kota serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan ketersediaan ikan

untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian tingkat konsumsi makan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata;; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah tingkat Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi

pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; perlindungan hasil kreativitas; penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; dan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa); sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia Usaha; Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan

Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas SDG hewan / tanaman. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator capaian jumlah hewan yang terobati.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; dan pembentukan badan usaha milik petani. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian, Persentase validitas data Pertanian, dan Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator jumlah verifikasi teknis.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator

persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota; Pameran dagang nasional; Pameran dagang lokal; Misi dagang bagi produk ekspor unggulan; Peningkatan citra produk ekspor;

dan pembinaan pelaku usaha ekspor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator nilai ekspor perdagangan.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; Pengawasan/penyuluhan metrologi legal. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase pelaksanaan pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah pelaku IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah perizinan berusaha sektor industri.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas; dan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah industri dalam SIINas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota melalui pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase transmigran yang berhasil ditempatkan.

H. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan melalui penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan serta fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum melalui fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, serta kegiatan fasilitasi kerjasama daerah melalui fasilitasi kerja sama dalam negeri. Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu, Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi, Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi, dan Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang didukung pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang didukung melalui Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang didukung Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air. Program ini dilaksanakan guna

pencapaian indikator Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal), Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti, Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target, dan Persentase lelang melalui e-procurement.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Beberapa kegiatan dalam Urusan Sekretariat Daerah ada yang masuk ke dalam program penunjang. Kegiatan ini diarahkan dalam Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tingkat Kematangan OPD, Persentase Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Kepala Daerah, Persentase layanan kebutuhan kantor yang terpenuhi, Persentase layanan kepegawaian yang terpenuhi, Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, melalui penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan Perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik. Kemudian, program juga diarahkan pada Pembahasan Kebijakan Anggaran, melalui pembahasan KUA dan PPAS. pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester, dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD. kemudian juga diarahkan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang

infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah itu program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dprd melalui pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD. Arah lain dari program ini adalah pada penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, melalui kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan pelaksanaan reses. Arah lain yaitu pada pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, melalui pengawasan kode etik DPRD. yang terakhir program ini diarahkan pada fasilitasi tugas DPRD melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peraturan daerah non APBD yang ditetapkan, persentase perda APBD yang ditetapkan, serta persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana.

I. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, melalui Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.

Kemudian program ini juga diarahkan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Profil pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah data dan informasi yang tersedia.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Monitoring, evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu

Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu, persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia,

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan ini untuk memenuhi Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

kemudian terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil perencanaan bidang IPW.

Program ini dilakukan untuk mencapai target persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target, persentase indikator program pembangunan bidang PSDA yang mencapai target, dan persentase indikator program pembangunan bidang IPW yang mencapai target.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dipenuhi yaitu penyampaian Raperda APBD tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator tersusunnya data aset Pemerintah Daerah menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah; penetapan wajib pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; penagihan pajak daerah; serta

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dicapai yaitu persentase peningkatan penerimaan PAD, penyampaian raperda pertanggungjawaban tepat waktu, dan persentase realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah. Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan sumber daya manusia. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, melalui Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Kemudian Program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, melalui Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial

dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, melalui Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Serta program ini juga diarahkan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, melalui Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Program ini ini dilakukan untuk memenuhi target Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

J. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu melalui penyediaan bahan logistik kantor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah pemeriksaan yang dilakukan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Pengawasan kinerja pemerintah daerah; Reviu laporan kinerja; Reviu laporan keuangan; Pengawasan desa; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Kerjasama pengawasan internal; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; Pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan. program ini ditujukan untuk mencapai indikator Level SPIP.

K. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Batang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat

kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

2. Kecamatan Wonotunggal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa

yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

3. Kecamatan Bandar

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

4. Kecamatan Blado

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

5. Kecamatan Bawang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

6. Kecamatan Kandeman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

7. Kecamatan Tulis

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

8. Kecamatan Subah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

9. Kecamatan Pecalungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna

mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

10. Kecamatan Tersono

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan

untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

11. Kecamatan Limpung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

12. Kecamatan Banyuputih

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

13. Kecamatan Gringsing

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna

mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

14. Kecamatan Warungasem

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan

untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

15. Kecamatan Reban

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

L. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase penurunan konflik sosial.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Persentase ketercapaian layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah; Persentase unit kerja internal yang terlayani; Persentase capaian kinerja Perangkat daerah yang mencapai target.

Berikut ini pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			576.164.067.720,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			574.494.067.720,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			404.709.924.640,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor Indeks Kepuasan Masyarakat persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah Prosentase capaian realisasi anggaran per tahun	92 % 85,45 % 100 % 70 % 100 % 96.50 %	403.297.924.640,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	1.804.400.000,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.454.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	397.637.362.640,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4095 Orang/bulan	395.685.892.640,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.516.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	25.000.000,00	
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	626.821.000,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	100.828.000,00	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.828.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	2.127.440.000,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	395.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	234.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.492.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	976.073.000,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	189 Unit	500.073.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah	89,00 % 88,50 %	1.212.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP Angka Partisipasi Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD Angka Putus Sekolah (APS) SD Prosentase SD yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	100 % 89.00 % 0,026 % 0,027 % 89,00 % 97 %	1.212.000.000,00	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	592.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
							Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/Sederajat Angka Putus Sekolah (APS) SMP Prosentase SMP yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	88 % 0.067 % 88 % 82.60 %	0,00	
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	88.00 %	200.000.000,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah	75 %	200.000.000,00	
	1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar				
							Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	3 Buku	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.670.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.670.000.000,00	
4	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase festival seni yang dilaksanakan	70 %	430.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	8 buah	100.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	13 Objek	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pegiat seni yang terlibat dalam penyelenggaraan kesenian tradisional	72 %	330.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Pengunjung Festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	70 %	865.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga kesenian yang dibina mementaskan hasil kesenian tradisional	60 %	865.000.000,00	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	570 Lembaga	865.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	80 %	375.000.000,00	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan benda cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan didaftarkan setiap tahun	6 buah	375.000.000,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya				
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya				
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			574.494.067.720,00	
	1	-				-			169.784.143.080,00	
7	1	-	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah	89,00 % 88,50 %	166.734.143.080,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	-	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP Angka Partisipasi Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD Angka Putus Sekolah (APS) SD Prosentase SD yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pedidikan sekolah dasar	100 % 89.00 % 0,026 % 0,027 % 89,00 % 97 %	96.952.228.600,00	
	1	-	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	1.630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	767.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	18 Unit	340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	1.503.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	454 Satuan Pendidikan	29.063.749.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	454 Satuan Pendidikan	57.383.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	454 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	454 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
							Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	136 Ruang	4.414.079.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/Sederajat Angka Putus Sekolah (APS) SMP Prosentase SMP yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	88 % 0.067 % 88 % 82.60 %	42.218.000.927,00	
	1	-	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	1.402.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	1.253.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	525.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	806.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	373.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket	544.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	73 Satuan Pendidikan	9.258.112.927,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	73 Satuan Pendidikan	25.956.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	73 Orang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	74 Orang	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	-	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	23000 Peserta Didik	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
							Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
							Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1.022.788.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase TK Negeri yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98 % 85 %	21.871.213.553,00	
	1	-	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	1.254.895.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD				
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	219.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	20 Paket	790.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1050 Peserta Didik	1.478.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	653 Satuan Pendidikan	16.174.318.553,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	30 %	5.692.700.000,00	
	1	-	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	83 Peserta Didik	307.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Satuan Pendidikan	4.235.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	24 Satuan Pendidikan	225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	-	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	-	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3635 Peserta Didik	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	1	-	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	88.00 %	300.000.000,00	
	1	-	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah	75 %	300.000.000,00	
	1	-	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	500 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	1	-	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	89.50 %	2.750.000.000,00	
	1	-	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	58 %	2.750.000.000,00	
	1	-	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	1 Dokumen	1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	1	-	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						RSUD KABUPATEN BATANG			97.181.156.215,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			97.181.156.215,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			97.181.156.215,00	
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	27.475.707.015,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	100 %	27.475.707.015,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	354 Orang/bulan	27.475.707.015,00	RSUD KABUPATEN BATANG
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standart	86 %	69.705.449.200,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan	86 %	705.449.200,00	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 Unit	705.449.200,00	RSUD KABUPATEN BATANG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	69.000.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	69.000.000.000,00	RSUD KABUPATEN BATANG
12	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	94 %	0,00	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	94 %	0,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	0,00	RSUD KABUPATEN BATANG
						DINAS KESEHATAN			210.728.683.339,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			210.728.683.339,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			210.728.683.339,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	125.100.228.491,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	246.946.000,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.385.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	124.301.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	81.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	77.421.380.803,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	820 Orang/bulan	76.934.341.603,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	480.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.094.600,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	3.094.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.094.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.000.000,00	
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	636.167.250,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.365.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	231.397.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	37.865.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	121.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	94.930.200,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	94.930.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	969.455.000,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	494.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.555.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	432.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	825.286.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	371.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	372.786.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	44.876.063.238,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	44.876.063.238,00	DINAS KESEHATAN
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR) CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR) Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR)	4,1 Per 100.000 Penduduk 115 Per 100.000 Penduduk 100 % 21 Per 100.000 Penduduk	82.461.229.048,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	21 unit	26.145.828.673,00	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas				
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	5.716.649.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	10.082.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	1.920.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	4.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	371 Unit	220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	3.805.899.673,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	55.845.900.375,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13200 Orang	2.510.011.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	320.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12900 Orang	603.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35111 Orang	1.048.632.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	112600 Orang	770.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580354 Orang	541.320.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80000 Orang	452.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212515 Orang	200.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10430 Orang	260.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1853 Orang	226.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9000 Orang	313.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15257 Orang	139.888.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	418.566.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	7.871.079.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	442.550.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	803.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	990.296.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	28.946.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1.290.365.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	95.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	71.296.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	676.748.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	29.277.630.658,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional				
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	2 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21 Dokumen	4.270.643.167,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	452.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	27 Unit	130.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	160.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	926.799.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1500 Orang	247.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	275 Orang	160.617.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	21 Orang	8.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	202.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	267.500.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	45 Unit	11.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	24 Unit	256.000.000,00	DINAS KESEHATAN
15	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	1.531.346.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	30.350.000,00	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	15.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	118.100.000,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	20.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2020 Orang	98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.382.896.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	1.382.896.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
16	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	715.355.800,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	115.130.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	127 Dokumen	115.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	274.109.300,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	274.109.300,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	44.500.000,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	44.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	281.616.500,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	76 Unit	281.616.500,00	DINAS KESEHATAN
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	920.524.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	55.000.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	625.524.000,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	625.524.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	240.000.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD LIMPUNG			25.837.066.651,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.837.066.651,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			25.837.066.651,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.104.866.256,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.104.866.256,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	7.104.866.256,00	RSUD LIMPUNG
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	100 %	18.732.200.395,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 %	2.232.200.395,00	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1.582.200.395,00	RSUD LIMPUNG
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	650.000.000,00	RSUD LIMPUNG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	16.500.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	16.500.000.000,00	RSUD LIMPUNG
20	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	0,00	RSUD LIMPUNG
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			91.953.548.354,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			91.953.548.354,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			91.953.548.354,00	
21	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR Persentase capaian kinerja program DPUPR	83,9 % 100 % 15,2 % 93,98 % 90,1 %	13.263.794.858,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Tahun	20.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah dokumen penatausahaan verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	10.355.947.338,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	9.738.947.338,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	617.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000,00	
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	170.430.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	170.430.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan, surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	266.187.887,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.459.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.651.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.487.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	2.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	117.669.687,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung / pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	23 Unit	648.663.400,00	
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	296.673.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	351.990.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	537.480.000,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5450 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	466.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	595 Kendaraan/barang	865.726.233,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	300 Unit	184.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 Unit	570.856.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,25 %	6.372.439.436,00	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	4,75 Km	6.372.439.436,00	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,5 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,5 KM	5.722.439.436,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,4 KM	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	100 % 100 % 100 %	7.086.188.600,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum	100 % 87 %	7.086.188.600,00	
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1000 Lembaga	183.830.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	242.387.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1000 Liter/Detik	6.659.971.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA dalam kondisi baik Persentase TPA dalam kondisi baik	100 % 100 %	1.000.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA dalam kondisi Baik Jumlah TPA dalam kondisi Baik Jumlah TPA Dalam Kondisi Baik	1 Unit 1 Unit 1 Unit	1.000.000.000,00	
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	89500 Ton/hari	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100 %	6.394.910.400,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah penduduk yg memperoleh layanan pengelolaan air limbah	82 %	6.394.910.400,00	
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
							Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	600 M³/Hari	6.062.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	100 Penyelenggara	332.910.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	64,41 %	4.089.363.936,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2,92 Km	4.089.363.936,00	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2922 Sistem Drainase Perkotaan	4.089.363.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	56,04 %	500.000.000,00	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Praarana dan Sarana Pemukiman yang dibangun dikawaan strategis Daerah Kabupate/ Kota	10 Sistem Jaringan	500.000.000,00	
	1	03	07	2.01	0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota				
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota yang dibangun	56007 M ³ /Hari	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan	100 %	8.824.760.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengawasan dan pemeliharaan, jumlah regulasi terkait bangunan gedung, jumlah konsultasi bangunan teknis bangunan gedung, jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan serta jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah derat yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	17 Dokumen/unit	8.824.760.000,00	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8.824.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	60,5 %	42.321.091.124,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	96 Km	42.321.091.124,00	
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan				
							Panjang Jalan yang Dibangun	40 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan				
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	100 Jembatan	2.976.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan				
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	28.595.091.124,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12,5 %	25.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis yang mengikuti pelatihan serta Dokumen SOP tentang pelatihan tenaga konstruksi	50 Orang	25.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	52,4 %	2.076.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda/perkada selain RTRW dan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	10 Dokumen	475.040.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	425.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang				
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	5 Orang	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk kajian pendukung RTRW dan RRTR yang disusun	7 Dokumen	750.960.000,00	
	1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	600.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan data informasi penataan ruang	19 Dokumen	400.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	15 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban pelaksanaan penataan ruang	18 Dokumen	450.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			16.240.025.450,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.210.025.450,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			13.650.025.450,00	
32	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.765.934.950,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.029.000,00	
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.029.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.858.744.750,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.549.336.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	309.408.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	91.845.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.845.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	191.507.500,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.155.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.302.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	220.493.600,00	
	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	53.348.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	87.145.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	110.750.100,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.650.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	286.565.000,00	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	256.565.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	135.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	4.030.000.000,00	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	4.030.000.000,00	
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	9 Laporan	3.875.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2 Dokumen	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	4.654.090.500,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	4.654.090.500,00	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	15 Lokasi	4.354.090.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	25 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	-				-			2.560.000.000,00	
36	1	-	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	162.500.000,00	
	1	-	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	162.500.000,00	
	1	-	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	162.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37	1	-	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	2.397.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	-	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	2.397.500.000,00	
	1	-	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	231 Unit Rumah	2.397.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.000.000,00	
	2	-				-			30.000.000,00	
38	2	-	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	30.000.000,00	
	2	-	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00	
	2	-	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			13.928.345.777,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.928.345.777,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			13.928.345.777,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
39	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan cakupan layanan operasional kantor Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan Satpol PP Persentase capaian kinerja program Satpol PP	94 % 99 % 83 % 97 % 97 %	4.930.695.577,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		12.592.000,00	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.592.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		4.321.919.922,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.277.859.922,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.060.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		85.495.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	60.495.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		199.133.655,00	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.759.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.712.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.761.255,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		37.447.000,00	
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.447.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		112.108.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	64.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.608.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		162.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
40	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	100 %	7.338.674.200,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		6.755.234.200,00	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	1.952.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	156.055.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	489.270.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
							Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60 Kasus	4.106.634.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-		583.440.000,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	60 Laporan	523.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Laporan	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				
							0	0 0	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
41	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	100 %	1.658.976.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		1.608.976.000,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.425.476.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 Unit	78.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	0,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	0 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-		50.000.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 Desa/Kelurahan	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	0,00	
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH			4.546.888.637,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.546.888.637,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.546.888.637,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
42	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program BPBD	95 % 100 % 80 % 97 % 100 %	3.101.624.637,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perkantoran	1 Tahun	2.504.655.377,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.453.990.377,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.025.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	16.640.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	25.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaraan pekerjaan kantor	1 Tahun	161.440.060,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.076.300,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.271.900,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.800.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.164.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	95.727.860,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya barang milik daerah	1 Tahun	169.456.000,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19.456.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselesaikannya pekerjaan penunjang perkantoran	1 Tahun	94.864.200,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.012.500,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.850.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	51.001.700,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kelancaraan pekerjaan kantor	1 Tahun	146.209.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	129.209.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	17.000.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
43	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	100 % 100 %	1.445.264.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	185.130.000,00	
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	114.880.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	360 Orang	70.250.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	631.139.000,00	
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	50.845.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	80 Orang	8.950.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi				
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	73.700.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				
							Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	11.300.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	325.269.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	161.075.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penanganan korban bencana serta terpenuhinya pelaporan penanganan bencana	100 %	397.513.000,00	
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	13.500.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	7 Dokumen	225.656.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135 Orang	93.417.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	29.940.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	231.482.000,00	
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	59.129.400,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	3 Dokumen	59.779.600,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	2 Kegiatan	112.573.000,00	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			
						DINAS SOSIAL			8.953.376.255,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.953.376.255,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			8.953.376.255,00	
44	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai kompetensi yg dibutuhkan Skor Nilai SAKIP Dinas Sosial	85 persen 86 indeks	2.831.490.155,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	11.184.000,00	
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	11.184.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	18 Laporan	2.075.115.022,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.764.812.872,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	298.501.850,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11.800.300,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah	15 Laporan	210.132.965,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.827.830,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.826.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.770.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.337.985,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	103.570.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli/ direhab	1 Unit	37.822.806,00	
	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.822.806,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Laporan	199.325.750,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3570 Laporan	9.393.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	90.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	98.982.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara	1315 Unit	297.909.612,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	169.032.800,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	26.584.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	66.293.560,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	35.998.752,00	DINAS SOSIAL
45	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	85 persen	540.014.400,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang mengalami peningkatan kemampuan	85 Orang	540.014.400,00	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Orang	20.771.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	204.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				
							Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	160516 Keluarga	201.233.400,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	498 Lembaga	54.460.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Sertifikat	58.600.000,00	DINAS SOSIAL
46	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	40 persen	3.500.000,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran yang pulang ke desa/kelurahan asal	8 Orang	3.500.000,00	
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	3.500.000,00	DINAS SOSIAL
47	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	76 persen	219.976.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penanganan dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	74 Orang	219.976.300,00	
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	1.066.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
							Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang	1.250.300,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2865 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan				
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	42.660.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
48	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	74 persen	4.647.340.100,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak terlantar	1600 Orang	1.650.000.000,00	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1600 Orang	1.650.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yg didirikan/ difasilitasi	11 Lembaga	2.997.340.100,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	170877 Orang	106.423.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	76561 Keluarga	48.976.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2039 Keluarga	2.739.989.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	50 Orang	101.950.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
49	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 persen	623.075.100,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	220 Orang	585.090.100,00	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	551.565.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial				
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	28.275.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	1 Kegiatan	37.985.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	37.985.000,00	DINAS SOSIAL
50	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	87.980.200,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	87.980.200,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	68.780.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.200.000,00	DINAS SOSIAL
						DINAS KETENAGAKERJAAN			7.853.782.452,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.744.995.952,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.744.995.952,00	
51	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja Disnaker	60 %	5.918.641.438,00	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen pelaporan dinas	5 dokumen	5.000.000,00	
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyaknya petugas pengelola keuangan OPD Gaji dan Tunjangan PNS	12 bulan 12 bulan	2.391.510.053,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.176.939.853,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	214.570.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	2 orang	25.000.000,00	
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan rutin Dinas	12 tahun	125.272.900,00	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.976.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.592.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.400.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.304.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	undefined undefined	3.000.000.000,00	
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	248.358.485,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	3.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.458.185,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.150.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	123.500.000,00	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	8.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	95.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
52	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	1 dokumen	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1 dokumen	0,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
53	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio penduduk yang bekerja	72 %	1.357.470.450,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	768 orang	849.584.600,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	768 Orang	849.584.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan	85 lembaga	10.300.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	85 Lembaga	10.300.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri / Wirausaha baru	100 orang	497.585.850,00	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	497.585.850,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
54	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	36 %	258.404.399,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jml pencari kerja yang mendapat pelayanan AK.1	6955 orang	258.404.399,00	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	6955 Orang	258.404.399,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
55	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	14,6 rasio	210.479.665,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP yang disahkan	17 lembaga	138.343.865,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	17 Perusahaan	74.658.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	112 Laporan	63.685.865,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Perselisihan HI yang berhasil dilakukan mediasi	100 persen	72.135.800,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	72.135.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			108.786.500,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			108.786.500,00	
56	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	100 %	108.786.500,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang mendapat pelatihan	5 KK	108.786.500,00	
	3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi				
							Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	5 Kepala Keluarga	108.786.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			16.733.776.628,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.733.776.628,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.464.413.470,00	
57	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.268.013.470,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.405.000,00	
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	8.405.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.896.852.270,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.834.812.270,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00	
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	188.007.300,00	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.700.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.857.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.563.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.855.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	956.523.900,00	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	875.023.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	193.225.000,00	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	84.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	98.975.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
58	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	115.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000,00	
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
59	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	0,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
60	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	0,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
61	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	50.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	25.000.000,00	
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota				
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	45 Organisasi	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	25.000.000,00	
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
62	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	31.400.000,00	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	31.400.000,00	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Layanan	31.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			12.269.363.158,00	
63	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	100 %	412.716.000,00	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	100 %	412.716.000,00	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	64.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34 Laporan	183.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15 Dokumen	164.916.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
64	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan Cakupan Kesertaan Ber-KB	73,96 %	7.550.747.158,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Bangga Kencana)	4.7 %	981.158.028,00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Laporan	408.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	15 Laporan	195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	27.508.028,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	50 Organisasi	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase jml PKB/PLKB (1 PKB/PLKB mengampu 2 Desa)	56.45 %	1.606.600.000,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	253 Orang	1.110.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	496.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan	35 Faskes	4.411.489.130,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34 Laporan	28.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	43016 Orang	2.132.986.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	2.082.003.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34 Laporan	167.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	551.500.000,00	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	37 Kampung	542.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
65	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	4.305.900.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	4.255.900.000,00	
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Unit	360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1851 Orang	3.887.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1 Kelompok	8.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah ormas	3 ormas	50.000.000,00	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			17.640.594.812,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			442.000.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			442.000.000,00	
66	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	12,5 %	3.000.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai	terlaksananya pengembangan LPMD	1 kegiatan 1 kegiatan	3.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan LPMD			
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	3.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
67	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	89,5 %	229.710.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Terlaksananya kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan	66.671.000,00	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	24.200.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	19.481.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	12.100.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				
							Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	10.890.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan kabupaten atau Kota Jumlah pelaksana kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kab/Kota	1 kegiatan 1 kegiatan	113.039.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Ton	98.640.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.399.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi Jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	1 kegiatan 1 kegiatan	50.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
68	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rasio Desa mandiri Pangan Rasio Desa mandiri Pangan	16 % 3,13 %	171.780.000,00	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan penanganan kerawanann pangan kewenangan kabupaten Kota	2 kegiatan	171.780.000,00	
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	171.780.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
69	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	37.510.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelaksanaan pengawsan keamanan panga segar daerah kabupaten Kota jumlah kegiatan pelaksanan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	2 kegiatan 2 kegiatan	37.510.000,00	
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				
							KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	37.510.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.198.594.812,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			17.153.594.812,00	
70	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	13.796.485.733,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 kegiatan	89.279.552,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	45.491.390,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8.540.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	35.248.162,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	2 kegiatan	10.909.396.812,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	10.874.116.812,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	35.280.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	35.280.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	25.000.000,00	
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	6 kegiatan	357.513.900,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.128.300,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.410.600,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.400.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.275.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 kegiatan	1.773.785.719,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	245.054.303,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43.300.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.478.431.416,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 kegiatan	641.509.750,00	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	131.785.150,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	454.724.600,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
71	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	0,015 %	475.576.129,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	prosentase penggunaan sarana pertanian	100 %	400.576.129,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	375.576.129,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten atau kota	1 kegiatan	75.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
72	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 %	2.341.450.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian	1 kegiatan	653.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	653.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian	5 kegiatan	1.688.450.000,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1.688.450.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				
							Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5 Unit	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
73	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan Persentase validitas data Pertanian	1,8 % 100 % 100 %	540.082.950,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian	3 kegiatan	540.082.950,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	435.082.950,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	105.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			442.000.000,00	
	2	-				-			0,00	
74	2	-	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	12,5 %	0,00	
	2	-	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengembangan LPMD Terlaksananya pengembangan LPMD	1 kegiatan 1 kegiatan	0,00	
	2	-	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.198.594.812,00	
	3	-				-			45.000.000,00	
75	3	-	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	45.000.000,00	
	3	-	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengendalian Bencana Pertanian	1 kegiatan	45.000.000,00	
	3	-	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			14.227.713.227,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.227.713.227,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			14.227.713.227,00	
76	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	11.964.020.827,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	36.791.900,00	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	36.791.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.246.597.202,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.168.832.602,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	77.764.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	105.103.100,00	
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	400 Orang	105.103.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	246.653.305,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.228.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.455.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.658.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.060.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	141.251.005,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	13.521.860,00	
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	13.521.860,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.035.180.240,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	92.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4.937.630.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.280.173.220,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	144.087.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	2.112.086.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
77	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	100 %	0,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	100 %	0,00	
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				
							Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya KLHS	100 %	0,00	
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	50 indeks 80 indeks	200.704.900,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	-		26.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	26.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen laporan	100 %	174.704.900,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	40.504.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	134.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
79	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH dalam kondisi baik	60 %	383.403.200,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase jumlah RTH dan Sarpras yang dikelola	100 %	383.403.200,00	
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
							Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	383.403.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
80	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
81	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	60 %	62.562.400,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang terselesaikan	100 %	62.562.400,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
							Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.562.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
82	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	90 %	90.849.900,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kinerja	100 %	90.849.900,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	90.849.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	70 %	1.526.172.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah, volume , dokumen dan unit kegiatan yang dilaksanakan	100 %	1.253.502.700,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	101.605.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1.151.897.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sampah	100 %	272.669.300,00	
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	272.669.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.911.178.653,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.911.178.653,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.911.178.653,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
84	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kapasitas Pegawai Dan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas Pegawai	100 %	4.929.507.453,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang selama 1 Tahun	100 %	130.000.000,00	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	100 %	3.323.056.493,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	3.302.956.493,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	20.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengamanan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang	100 %	102.000.000,00	
	2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	102.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	40.050.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	40.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Dengan Baik	100 %	419.731.400,00	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	336.515.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	29.740.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	43.475.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kegiatan Kantor	100 %	469.951.036,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	349.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	117.651.036,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	100 %	444.718.524,00	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 Unit	276.910.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	115.308.524,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
85	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	85 %	488.326.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	85 %	488.326.000,00	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	438.326.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
86	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran	97,4 %	433.318.000,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	97,4 %	433.318.000,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0 Dokumen	311.718.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	121.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
87	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	95,4 %	1.060.027.200,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	95,4 %	60.027.200,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	0 Dokumen	60.027.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	95 %	1.000.000.000,00	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			36.054.202.616,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.054.202.616,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			36.054.202.616,00	
88	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	12 % 95 % 25 % 96 % 95 %	2.705.657.716,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian Kinerja anggaran program perangkat daerah	95 Prosen	4.335.000,00	
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	4.335.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.384.665.416,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.322.643.866,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.021.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00	
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	81.552.600,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.418.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.038.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.495.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	
	2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	121.104.700,00	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.137.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.967.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	89.000.000,00	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
89	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	persentase budaya desa yang dilestarikan	40 %	35.000.000,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah adat dan budaya desa yang dibina	40 Desa	35.000.000,00	
	2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
90	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	46,03 %	30.263.140.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang dibina dan diawasi Penyelenggaraan Administrasinya	46,03 Desa	30.263.140.500,00	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	3.490.440.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	4 Dokumen	26.552.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
91	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	70 %	3.050.404.400,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKD yang Aktif dalam Pemberdayaan Desa	70 Desa	3.050.404.400,00	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	560.499.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	1.825.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	114.904.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						DINAS PERHUBUNGAN			33.745.424.859,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.745.424.859,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			33.745.424.859,00	
92	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	27.768.385.809,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.254.400,00	
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.254.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.737.232.008,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3.704.172.008,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	33.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	422.373.001,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.702.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.476.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	102.993.201,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.500.000,00	
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	22.902.666.400,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.199.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	698.146.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	667.360.000,00	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	557.360.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	25.000.000,00	
	2	15	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
93	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	5.977.039.050,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00	
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	4.250.534.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2844 Unit	1.536.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	1.689.334.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1600 Unit	1.025.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	202.748.000,00	
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	202.748.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	297.840.600,00	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Laporan	297.840.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	524.681.600,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	48.648.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10000 Unit	206.698.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	144.335.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	66.600.000,00	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	16.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	227.406.000,00	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	227.406.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	107.228.850,00	
	2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	107.228.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.360.892.590,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.360.892.590,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6.933.754.640,00	
94	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan Persentase capaian kinerja program Diskominfo	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.634.510.640,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	10.000.000,00	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.017.011.640,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.957.672.980,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	59.338.660,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	242.087.300,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.152.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.349.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.008.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.577.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD	100 %	7.366.600,00	
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7.366.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	100 %	1.137.045.100,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	5.625.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	943.936.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.484.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD	100 %	196.000.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	25.000.000,00	
	2	16	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
95	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	69 %	1.244.244.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah Daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	69 %	1.244.244.000,00	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	329.244.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media				
							Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
96	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	70 %	1.055.000.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 %	125.000.000,00	
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara online	100 %	930.000.000,00	
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	16 Unit	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	810.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			327.137.950,00	
97	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100 %	327.137.950,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dalam satu tahun	210 datasheet	327.137.950,00	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	102.137.950,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				
							Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	52 Orang	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral				
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	10 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur				
							Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100.000.000,00	
98	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	100 %	100.000.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	100 %	100.000.000,00	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			19.445.318.136,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.194.504.136,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.976.374.536,00	
99	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.686.734.136,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.200.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.413.823.973,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	6.380.083.973,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	28.740.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00	
	2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	405.438.563,00	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	148.038.463,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	80.400.100,00	
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	80.400.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	503.181.500,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	400.080.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.601.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	253.690.000,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	196.690.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
100	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	110.000.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	110.000.000,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Unit Usaha	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
101	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	20.375.700,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.375.700,00	
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15 Unit Usaha	20.375.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
102	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	129.640.400,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru terfasilitasinya modal UKM	10 persen 40 UKM	129.640.400,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150 Unit Usaha	129.640.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
103	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	29.624.300,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	29.624.300,00	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro				
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	29.624.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.250.814.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.884.819.680,00	
104	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	2.668.819.680,00	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	2.668.819.680,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0 Dokumen	2.668.819.680,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
105	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	38.750.000,00	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	38.750.000,00	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	200 Laporan	38.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
106	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor perdagangan	59034726 USD	77.250.000,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan pembinaan ekspor	5 Kegiatan	77.250.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	77.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
107	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	100.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	100.000.000,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	150 Unit	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			7.674.500.000,00	
108	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	7.624.500.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	7.624.500.000,00	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100 Dokumen	7.104.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
109	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	50.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.194.504.136,00	
	2	-				-			218.129.600,00	
110	2	-	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	90 %	218.129.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	-	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Koperasi Presentase peserta pelatihan predikat baik	75 lembaga 90 persen	218.129.600,00	
	2	-	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	218.129.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.250.814.000,00	
	3	-				-			691.494.320,00	
111	3	-	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	25.600.000,00	
	3	-	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Verifikasi Teknis	100 persen	25.600.000,00	
	3	-	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	25.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
112	3	-	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	557.564.320,00	
	3	-	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	557.564.320,00	
	3	-	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	557.564.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
113	3	-	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	89.500.000,00	
	3	-	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	40.000.000,00	
	3	-	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	672 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	-	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	49.500.000,00	
	3	-	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	672 Laporan	49.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
114	3	-	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	18.830.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	-	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	18.830.000,00	
	3	-	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				
							0	0 0	18.830.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang	18.830.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.301.030.142,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.301.030.142,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.301.030.142,00	
115	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.900.274.635,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00	
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.552.119.986,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.511.259.986,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	40.860.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	337.531.579,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.958.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.207.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.815.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.999.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.996.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	143.555.579,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	52.845.000,00	
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	52.845.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	698.171.470,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	288.938.270,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404.233.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	228.606.600,00	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	167.925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	35.181.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	25.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
116	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	87.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	87.200.000,00	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	87.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
117	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	49.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	49.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
118	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	766.009.107,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	766.009.107,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	606.980.457,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	90.758.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	68.270.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
119	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	408.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	408.800.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	46.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	235.095.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal				
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	127.605.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
120	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	89.746.400,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	89.746.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	89.746.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			14.303.095.208,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.412.167.702,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			10.412.167.702,00	
121	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.979.167.702,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	165.433.992,00	
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	60.281.242,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	105.152.750,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.354.420.090,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.238.774.090,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.646.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	238.612.600,00	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.347.200,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.888.200,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.900.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.477.200,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	114.169.220,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.883.420,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.290.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.995.800,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	106.531.800,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	32.050.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	74.481.800,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	0,00	
	2	19	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
122	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	2.045.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	8 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.970.000.000,00	
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	75 Dokumen	1.970.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
123	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	4.188.000.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	1.000.000.000,00	
	2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha				
							Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	20 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	20 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	300.000.000,00	
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota				
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	350 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0,00	
	2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah				
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	700 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	4 Pelatda	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				
							Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	700 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota				
							Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	20 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				
							Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.115.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	75 Organisasi	2.115.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi				
							Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	2 Organisasi	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	773.000.000,00	
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	773.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
124	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	200.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	200.000.000,00	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan				
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2 Organisasi	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.890.927.506,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.890.927.506,00	
125	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0,00	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0,00	
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
126	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	3.553.729.506,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	35 Lokasi	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	40 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00	
	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	35 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	45 Unit	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	16 Lokasi	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	40 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.253.729.506,00	
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	30 Lokasi	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15 Laporan	1.453.729.506,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	10 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota				
							Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	25 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)				
							Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	100 Usaha	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota				
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				
							Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	25 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
127	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	195.198.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	195.198.000,00	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	21.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	24.198.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Promosi	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
128	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	121.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	121.000.000,00	
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan				
							Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur				
							Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	3 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Insentif yang Diberikan	3 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	4 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Produk	21.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
129	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	21.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	21.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4 Orang	21.000.000,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	6 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	0,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				
							Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	2 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			4.858.286.634,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.858.286.634,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.513.638.484,00	
130	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.011.870.905,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.350.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	11.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.345.421.275,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.309.761.275,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	35.660.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	105.968.300,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.182.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.526.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.440.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	7.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	413.334.980,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	103.594.580,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	306.740.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	135.796.350,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	90.702.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	998.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	32.095.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
131	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	501.767.579,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	207.872.729,00	
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	14 Perpustakaan	37.919.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				
							Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	17 Layanan	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka				
							Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	102.647.229,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	800 Eksemplar	15.306.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	293.894.850,00	
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100 Lokus	162.940.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	106.600.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				
							Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Perpustakaan	19.354.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			344.648.150,00	
132	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	18.7 indeks 75,4 indeks	293.144.800,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	65.460.300,00	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	109500 Berkas	56.928.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Laporan	8.532.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	175.426.500,00	
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	175.426.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	52.258.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150 Pengguna	22.352.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	29.905.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
133	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	51.503.350,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	19.731.250,00	
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	4 Arsip	19.731.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	31.772.100,00	
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	31.772.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN			9.086.990.680,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.086.990.680,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			8.119.936.780,00	
134	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.130.936.780,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	150.000.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.382.041.280,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/bulan	5.042.223.280,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	339.818.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	85.000.000,00	
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	222.568.500,00	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.051.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	128.517.500,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	233.177.000,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.250.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.927.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	58.150.000,00	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	53.150.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
135	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	1.649.000.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	137.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	123.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	25 Kelompok	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	785 orang Unit Usaha	14.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	1.487.000.000,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	1.487.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00	
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				
							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	40 Rekomendasi	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
136	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	310.000.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	60.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	250.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket Unit	190.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Orang	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
137	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	0,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
138	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	30.000.000,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	0,00	
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	30.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10000 Ton	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			967.053.900,00	
139	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	120.000.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	0,00	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	20 Laporan	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-	0,00	
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	6 Laporan	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	5 Laporan	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
140	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	582.053.300,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	20.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	30.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	465.000.000,00	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	465.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	-	-	67.053.300,00	
	3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum				
							Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	12 Ha	67.053.300,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
141	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	130.000.600,00	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00	
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	80 dokumen/ laporan	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	110.000.600,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	110.000.600,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
142	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	125.000.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				
							Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	12 laporan	125.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
143	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	10.000.000,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	10 unit usaha / 10 Laporan	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
						SEKRETARIAT DAERAH			58.447.591.539,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			58.447.591.539,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			56.479.923.829,00	
144	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.232.857.429,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.045.000,00	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.045.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	13.333.567.596,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	12.810.959.596,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	462.332.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	60.276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00	
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.944.161.150,00	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	260.018.550,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	225.026.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	124.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	165.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	638.876.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	680.466.500,00	
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	311.885.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	368.581.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.722.195.600,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	819.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	266.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	456.285.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.402.827.847,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	72.074.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	1.798.557.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	262.196.847,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	470.866.069,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	55.866.069,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2.458.218.067,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.894.058.067,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	144.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	420.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	516.335.000,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	127.883.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	211.993.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	50.491.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	125.966.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	651.174.600,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	144 Laporan	179.664.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	144 Laporan	138.527.200,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	144 Laporan	332.982.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
145	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	31.684.514.600,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	603.312.000,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	19 Dokumen	70.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	93.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	439.422.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	30.707.428.300,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	30.530.913.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	87.735.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	88.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	296.526.300,00	
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	296.526.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	77.248.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	37.248.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
146	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	562.551.800,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan	100 paket	562.551.800,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	315.336.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	142.215.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-				-			1.967.667.710,00	
147	4	-	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	589.804.750,00	
	4	-	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	589.804.750,00	
	4	-	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen	182.526.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	407.278.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
148	4	-	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	1.377.862.960,00	
	4	-	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	415.000.000,00	
	4	-	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15 Dokumen	125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	535.080.000,00	
	4	-	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	154.110.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	213.826.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	167.143.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	427.782.960,00	
	4	-	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	309.922.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	-	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	117.860.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD			53.086.303.989,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			53.086.303.989,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			53.086.303.989,00	
149	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor Persentase administrasi keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian	12 bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	38.594.500.269,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							kinerja program Perangkat Daerah			
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	9 dokumen	90.000.000,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terfasilitasi	3 kegiatan	3.421.321.769,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.211.750.269,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	199.572.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.999.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi barang milik daerah	10 dokumen	234.999.900,00	
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.999.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	20 orang	318.000.000,00	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terfasilitasi	8 kegiatan	814.601.900,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.996.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	214.229.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	119.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 unit	490.897.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	90.979.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	199.918.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang kantor yang tersedia	10 unit	340.000.000,00	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Laporan	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	149 unit	584.997.800,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	9.997.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	32.069.681.500,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	31.660.171.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	135 Paket	309.510.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	230.000.000,00	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
150	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD Persentase penyerapan aspirasi masyarakat Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	14.491.803.720,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda non APBD yang ditetapkan	5 Perda	1.214.303.720,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	1.014.303.720,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan anggaran yang dibahas	8 dokumen	310.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	360 laporan	1.455.000.000,00	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	80 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	80 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	80 Laporan	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	80 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	24 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 %	2.767.500.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	407.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD				
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah anggota DPRD yang melakukan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	45 orang	1.275.000.000,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses				
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kepatuhan Anggota DPRD terhadap kode etik DPRD	100 %	20.000.000,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	100 %	7.450.000.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 Dokumen	7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0 Dokumen	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8.646.904.535,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.646.904.535,00	
	5	01				PERENCANAAN			6.950.285.880,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
151	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 50 % 97 % 83 %	5.084.143.480,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	16.000.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	4.005.483.433,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.893.623.433,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	106.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	28 laporan	50.000.000,00	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3 jenis	218.188.347,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.129.600,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.038.650,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	65.508.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.890.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	88.122.097,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	1 jenis	37.393.300,00	
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.393.300,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	3 jenis	270.336.400,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.002.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.734.400,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah yang terpelihara	3 jenis	486.742.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	220.402.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	226.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
152	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 % 100 % 100 %	810.660.600,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	3 Dokumen	588.660.500,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	85.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik				
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	49.258.500,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	48.648.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	15 Usulan	17.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	373.504.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu	52 Perangkat Daerah	222.000.100,00	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	222.000.100,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
153	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	90,5 % 90,5 % 90,5 %	1.055.481.800,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 laporan	594.985.800,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	254.990.800,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	59.995.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Laporan	460.496.000,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	320.496.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12 Laporan	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			125.000.000,00	
154	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	55 %	125.000.000,00	
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan	2 Rekomendasi	125.000.000,00	
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-				-			920.618.655,00	
155	5	-	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 % 100 % 100 %	323.007.055,00	
	5	-	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	3 Dokumen	127.575.355,00	
	5	-	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	127.575.355,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang tersedia	1 Data	195.431.700,00	
	5	-	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	121.092.200,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	74.339.500,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
156	5	-	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	90,5 % 90,5 % 90,5 %	597.611.600,00	
	5	-	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 laporan	409.460.000,00	
	5	-	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	179.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	50.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	111.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	45.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	8.975.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Laporan	188.151.600,00	
	5	-	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	172.532.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	8.819.600,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	6.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-				-			651.000.000,00	
157	5	-	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	55 %	651.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	-	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi utama kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan	2 Rekomendasi	280.000.000,00	
	5	-	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	52 Perangkat Daerah	371.000.000,00	
	5	-	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	-	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			401.126.310.894,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			401.126.310.894,00	
	5	02				KEUANGAN			399.792.930.644,00	
158	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	37.623.008.337,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	41.492.500,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.130.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.862.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	32.831.704.439,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	32.743.284.439,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	790.711.700,00	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92 Orang	740.711.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	941.673.058,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.000.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	410.483.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	72.883.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	156.592.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	83.686.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	180.527.508,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	181.278.000,00	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	181.278.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.181.216.640,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	524.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	647.216.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.654.932.000,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	92 Unit	714.175.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	726.060.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	129.697.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
159	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	357.339.034.857,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	11.058.813.681,00	
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	38.530.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	29.310.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	19.860.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	19.860.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	285.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	280.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	9.780.660.531,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	8 Dokumen	76.713.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	52 Dokumen	94.670.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	10 Dokumen	86.133.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	348.075.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	900.365.900,00	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	37.059.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	112.389.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	65 Laporan	303.345.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	216.608.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	21.271.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	94.401.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	115.290.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	345.379.855.276,00	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	321.419.901.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	13.959.954.076,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
160	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	1.635.862.150,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1.635.862.150,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga				
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	162.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	296 Laporan	1.055.000.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	173.983.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	136.280.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	87 Orang	108.597.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
161	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	3.195.025.300,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	3.195.025.300,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen	100.681.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	115.261.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7800 Laporan	1.393.939.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	187.885.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah				
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	250 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7000 Layanan	195.965.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	874.709.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	226.583.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-				-			1.333.380.250,00	
162	5	-	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	1.333.380.250,00	
	5	-	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	291.424.050,00	
	5	-	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	145.737.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	145.687.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	1.041.956.200,00	
	5	-	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	33.384.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250 Dokumen	315.443.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	15.593.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	117.387.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	128.401.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	187.513.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	-	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	244.232.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			7.958.395.298,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.958.395.298,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			7.033.038.548,00	
163	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program BKD	100 %	4.732.128.201,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	15.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	3.357.430.151,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.333.970.151,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan BinteK, Sosialisasi dan workshop	3 laporan	114.718.650,00	
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	80.083.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	12 laporan	440.305.700,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.750.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	114.054.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	91.420.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	50.156.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.924.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	404.378.700,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.665.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	400.295.000,00	
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	201.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.495.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
164	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	100 %	2.300.910.347,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 laporan	969.366.107,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	26.862.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	686.859.117,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	62.637.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	119.007.790,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN	12 laporan	732.691.000,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	17.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	695.071.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	12 laporan	327.575.840,00	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	101.555.840,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	226.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100 %	271.277.400,00	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	68.702.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN				
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5703 Orang	112.365.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	90.210.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				925.356.750,00
165	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	100 %	925.356.750,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	1 laporan	117.031.150,00	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	70 Orang	117.031.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS	200 ASN	808.325.600,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	808.325.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						INSPEKTORAT DAERAH			11.224.026.034,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.224.026.034,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.224.026.034,00	
166	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	undefined undefined	8.252.793.694,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	undefined undefined	25.360.000,00	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	25.360.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	undefined undefined	6.364.284.034,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.253.184.034,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120 Dokumen	52.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	58.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	undefined undefined	127.525.000,00	
	6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48 Dokumen	127.525.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase jumlah Kualitas dan Komptenesi SDM Pengawasan	001 undefined	500.000.000,00	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	60 Orang	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	undefined undefined	482.053.400,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.146.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.187.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	80.159.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	151.560.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	undefined undefined	13.181.860,00	
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	13.181.860,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	undefined undefined	234.210.400,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	124.210.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	001undefined %undefined	506.179.000,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	205.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	301.179.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
167	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	100 %	2.624.756.140,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	80 Persen	2.242.218.850,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24 Laporan	286.536.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	150.872.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15 Laporan	337.263.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	74.019.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	175 Laporan	438.618.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal				
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	298.576.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	175 Dokumen	656.334.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase jumlah penanganan kasus	80 Persen	382.537.290,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	81.404.450,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	301.132.840,00	INSPEKTORAT DAERAH
168	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level APIP Level APIPProsentase kualitas pendampingan dan asistensi Persentase kapabilitas APIP Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	3 Level 3 Level 3 indeks 3 Level	346.476.200,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	80 Persen	106.518.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	56.930.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	49.588.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	80 Persen	239.958.200,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15 perangkat daerah	42.071.950,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	46.318.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	126.568.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
						KECAMATAN BATANG			11.719.446.053,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.719.446.053,00	
	7	01				KECAMATAN			11.719.446.053,00	
169	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	12 bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	8.791.230.903,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	7.603.500,00	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.603.500,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	7.494.291.593,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	6.654.690.293,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	839.601.300,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	50.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	276.688.650,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.990.100,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	66.958.050,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	94.765.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	60.995.500,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.980.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	108.454.800,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	108.454.800,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	595.763.060,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	8.287.500,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.255.400,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	449.220.160,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	258.429.300,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	167.404.950,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	58.616.550,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	32.407.800,00	KECAMATAN BATANG
170	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	22.483.400,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	1 kegiatan	22.483.400,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	22.483.400,00	KECAMATAN BATANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
171	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	2.874.718.750,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	90 %	5.650.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.650.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	2.839.068.750,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	63.462.750,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.260.000.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	1.515.606.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	30.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	30.000.000,00	KECAMATAN BATANG
172	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	10.423.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	21 laporan 100 %	10.423.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.423.000,00	KECAMATAN BATANG
173	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	4.070.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	4.070.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4.070.000,00	KECAMATAN BATANG
174	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	16.520.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	85 %	16.520.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BATANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	11.520.000,00	KECAMATAN BATANG
						KECAMATAN TULIS			1.898.941.665,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.898.941.665,00	
	7	01				KECAMATAN			1.898.941.665,00	
175	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.817.541.665,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	2 Laporan	1.529.171.665,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.500.191.665,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	28.980.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 %	4.800.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.800.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	3 Laporan	55.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	6 Laporan	94.470.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.230.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.600.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.040.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	16.600.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah	100 % 3 Laporan	60.440.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.840.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	45.600.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	4 Unit 8 Unit	73.660.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	52.160.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.500.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	KECAMATAN TULIS
176	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 % 75 % 75 %	21.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai SOP	1 Laporan 1 Dokumen	21.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN TULIS
177	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	25.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN TULIS
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	20.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN TULIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
178	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	10.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibun	17 Desa	10.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN TULIS
179	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.400.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	1 Laporan	10.400.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10.400.000,00	KECAMATAN TULIS
180	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	15.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	[deleted] Presentase aparatur Desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 %	15.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN TULIS
						KECAMATAN WARUNGASEM			1.753.958.568,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.753.958.568,00	
	7	01				KECAMATAN			1.753.958.568,00	
181	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.694.764.568,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 tahun	1.249.358.568,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.221.458.568,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.900.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	1 tahun	5.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	1 tahun	73.107.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.500.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.874.500,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.525.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.867.500,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.340.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	1 paket	48.300.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	48.300.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	1 tahun	72.799.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.100.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	8.400.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.299.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 tahun	246.200.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	35.700.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.000.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.500.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
182	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	23.810.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 laporan	23.810.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	23.810.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
183	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 tahun	5.500.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
184	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	9.764.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	1 tahun	9.764.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.764.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
185	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	2.200.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	2.200.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2.200.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
186	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	85 %	17.920.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	1 tahun	17.920.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10.920.000,00	KECAMATAN WARUNGASEM
						KECAMATAN WONOTUNGGAL			1.962.655.956,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.962.655.956,00	
	7	01				KECAMATAN			1.962.655.956,00	
187	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.906.619.356,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 12 bulan 12 bulan	1.432.756.596,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan Orang/bulan	1.415.476.596,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	17.280.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	40.980.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan Dokumen	37.380.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan Laporan	3.600.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Wonotunggal) Persentase aparatur yang disiplin Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan 1 Stel 100 % 1 Kali	5.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase administrasi perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 % 1 tahun	67.142.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.792.200,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.085.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.640.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.595.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.440.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.590.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase pengadaan barang milik daerah	20 Unit 1 tahun 100 %	34.220.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.673.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18.547.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pengadaan barang milik daerah	12 bulan 12 bulan 1 tahun 100 %	60.247.060,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	1.875.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.569.960,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.802.100,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket 1 tahun 1 tahun 1 tahun	266.273.500,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	56.793.500,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	9.480.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
188	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	25.086.100,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kali	25.086.100,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.086.100,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
189	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 Tahun	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
190	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	8.090.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	8.090.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	8.090.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
191	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	8.125.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45 Orang 1 Laporan	8.125.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	8.125.000,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
192	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	9.735.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan 1 Kegiatan	9.735.500,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	9.735.500,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN WONOTUNGGAL
						KECAMATAN BANDAR			2.222.231.706,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.222.231.706,00	
	7	01				KECAMATAN			2.222.231.706,00	
193	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat	100 % 98 % 100 % 100 % 100 %	2.140.903.706,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan PD	1 Tahun	1.633.462.306,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.608.562.306,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	24.900.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	12 bulan	50.850.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	9.800.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	27.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang	14.050.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adminstrasi Umum PD	12 bulan	76.805.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.499.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.406.400,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 Laporan	7.400.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	53.600.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	31.600.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Kecamatan	12 bulan	326.186.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	48.658.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	271.628.000,00	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5.900.000,00	KECAMATAN BANDAR
194	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	8 layanan 7 layanan 75 %	14.128.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD	100 % 1 keg	14.128.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	14.128.000,00	KECAMATAN BANDAR
195	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
196	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100 % 100 %	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Laporan Gangguan Trantibmum	12 Laporan	5.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
197	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	5.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	tersedianya dana untuk logistik kegiatan Tersedianya dana untuk mobilisasi kegiatan	12 bulan 17 Desa	5.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
198	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	52.200.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya dana untuk kegiatan koordinasi Tersedianya dana untuk Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan 12 bulan	52.200.000,00	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	52.200.000,00	KECAMATAN BANDAR
						KECAMATAN BLADO			1.750.447.156,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.750.447.156,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01				KECAMATAN			1.750.447.156,00	
199	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.719.347.156,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 %	1.221.697.156,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.199.197.156,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.500.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	100 %	26.538.300,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.738.300,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	5.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	103.540.900,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.825.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.635.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.500.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.900,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	2.580.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	24.000.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	20.380.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.380.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	86.164.400,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12.540.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.624.400,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	256.026.400,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	37.526.400,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.500.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN BLADO
200	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	13.825.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	13.825.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	13.825.000,00	KECAMATAN BLADO
201	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	100 % 90 %	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BLADO
202	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BLADO
203	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	5.775.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	5.775.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang	5.775.000,00	KECAMATAN BLADO
204	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	1.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	1.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN BLADO
						KECAMATAN REBAN			2.169.849.804,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.169.849.804,00	
	7	01				KECAMATAN			2.169.849.804,00	
205	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.119.661.804,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 %	1.564.599.804,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.542.099.804,00	KECAMATAN REBAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22.500.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	12 Dokumen	21.060.122,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	16.260.122,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	50.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	0,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	78.766.600,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.449.500,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.073.100,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.934.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.200.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.680.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.430.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	58.689.600,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	37.549.600,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	21.140.000,00	KECAMATAN REBAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor Jumlah penyediaan jasa kantor	100 % 1 Tahun	87.739.544,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.239.544,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	258.806.134,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	41.109.200,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.705.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.991.934,00	KECAMATAN REBAN
206	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	27.768.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun 1 Tahun	22.768.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	17.768.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN REBAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	1 Tahun	5.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN REBAN
207	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Tahun	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN REBAN
208	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1 Tahun	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN REBAN
209	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	7.420.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 Tahun	7.420.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	7.420.000,00	KECAMATAN REBAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
210	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	85 %	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 persen	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN REBAN
						KECAMATAN KANDEMAN			1.716.798.570,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.716.798.570,00	
	7	01				KECAMATAN			1.716.798.570,00	
211	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor	100 % 90 % 100 % 100 % 100 %	1.692.415.570,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.301.627.993,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.278.927.993,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	22.700.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	19.800.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	0,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	60.666.100,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.403.500,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.968.600,00	KECAMATAN KANDEMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.789.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.855.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.250.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	209.082.928,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.109.100,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.973.828,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	63.287.100,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.650.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.637.100,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.951.449,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	35.451.449,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	0,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2.500.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
212	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	19.408.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	19.408.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	19.408.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	4.975.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	4.975.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.975.000,00	KECAMATAN KANDEMAN
214	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	0,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN KANDEMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
						KECAMATAN TERSONO			1.985.119.794,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.985.119.794,00	
	7	01				KECAMATAN			1.985.119.794,00	
215	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 60 % 98,5 % 100 %	1.895.903.794,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10 Laporan	1.338.420.434,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.310.580.434,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	22.840.000,00	KECAMATAN TERSONO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	2 Laporan	4.800.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	56.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	95.183.360,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.403.360,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.280.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	75 %	5.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	3.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	123.520.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	103.020.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	272.980.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	241.980.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	21.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
216	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	10.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	8 Layanan	10.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
217	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	25.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	8 usulan	20.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 kegiatan	5.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
218	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	11.420.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	20 desa	11.420.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.420.000,00	KECAMATAN TERSONO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
219	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	22.796.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	8 Kegiatan 8 laporan	22.796.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	8.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20 Dokumen	14.796.000,00	KECAMATAN TERSONO
220	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	20.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	20.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	68 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN TERSONO
						KECAMATAN GRINGSING			1.647.723.240,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.647.723.240,00	
	7	01				KECAMATAN			1.554.197.040,00	
221	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.497.089.540,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.234.170.520,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.211.670.520,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.500.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	4.800.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN GRINGSING
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya layanan operasional kantor	12 bulan	85.219.020,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.534.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.155.100,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.189.920,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.340.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya layanan operasional kantor	12 bulan	123.780.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.280.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	49.120.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	26.120.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
222	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	17.107.500,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	17.107.500,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	17.107.500,00	KECAMATAN GRINGSING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN GRINGSING
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	30.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan yang Aktif	12 laporan	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	75 %	25.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12 Keluarga	25.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
224	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00	KECAMATAN GRINGSING
225	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik undefined	100 % undefined	5.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	1 kegiatan	5.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
226	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des	85 %	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	1 kegiatan	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	0,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			93.526.200,00	
227	7	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	93.526.200,00	
	7	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Paeraturan Perundang-Undangan	80 orang	0,00	
	7	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	0,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	0,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	93.526.200,00	
	7	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	31.526.200,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
	7	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.000.000,00	KECAMATAN GRINGSING
						KECAMATAN SUBAH			1.528.424.590,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.528.424.590,00	
	7	01				KECAMATAN			1.528.424.590,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
228	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	1.460.424.590,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan jumlah keuangan yang disusun	12 dokumen	1.251.748.590,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.180.924.590,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45.924.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.900.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	2 dokumen	25.362.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	20.562.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur pemerintah yang disiplin	100 %	6.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	0,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	6.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Perangkat Daerah	100 %	68.646.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.846.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.500.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.340.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.820.000,00	KECAMATAN SUBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.340.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	2 paket	23.595.200,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12.167.200,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.428.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penyediaan jasa kantor	100 %	40.282.800,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	750.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.170.800,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.362.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang mi;lik daerah	100 %	44.790.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.200.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.250.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.340.000,00	KECAMATAN SUBAH
229	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	3.600.000,00	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	3.600.000,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	3.600.000,00	KECAMATAN SUBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
230	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	34.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan pembangunandes a yang menjadi prioritas	100 %	24.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan perempuan di pedesaan	100 %	10.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
231	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	4.400.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	17 desa	4.400.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.400.000,00	KECAMATAN SUBAH
232	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	10.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	77 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
233	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	16.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 %	16.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
						KECAMATAN LIMPUNG			1.657.367.461,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.657.367.461,00	
	7	01				KECAMATAN			1.657.367.461,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 90 % 100 % 100 %	1.609.602.561,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 %	1.089.176.741,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.066.676.741,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22.500.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[deleted] Jumlah laporan aset yang disusun	2 Laporan	27.600.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	22.800.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	1 kegiatan	7.090.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.090.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71 Orang	0,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	61.400.100,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.539.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.091.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.678.600,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.100.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.991.500,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	27.172.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.172.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	163.623.420,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.375.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.245.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.169.100,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.834.320,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	233.540.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	38.450.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.500.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.590.300,00	KECAMATAN LIMPUNG
235	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	18.177.400,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	75 %	18.177.400,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.177.400,00	KECAMATAN LIMPUNG
236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
237	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN LIMPUNG
238	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	5.775.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	5.775.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	5.775.000,00	KECAMATAN LIMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
239	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	13.812.500,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	13.812.500,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.812.500,00	KECAMATAN LIMPUNG
						KECAMATAN BANYUPUTIH			1.761.766.071,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.761.766.071,00	
	7	01				KECAMATAN			1.761.766.071,00	
240	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.729.612.471,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 lap	1.270.920.711,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.202.614.711,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.406.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.900.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang yang disusun	1 tahun	25.164.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	20.364.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	14.704.300,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	6.750.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	2.954.300,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	70.574.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.446.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.446.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.588.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.340.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.600.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	1 paket	44.528.360,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	8.006.500,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.521.860,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.516.100,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.016.100,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	264.205.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	27.455.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.750.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	208.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
241	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	75 % 100 %	18.522.500,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perangkian	100 %	18.522.500,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.522.500,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
242	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
243	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	3.250.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	3.250.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.250.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
244	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 % 85 %	2.606.100,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 % 1 tahun	2.606.100,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	1 Orang	2.606.100,00	KECAMATAN BANYUPUTIH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
245	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	2.775.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	2.775.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.775.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
						KECAMATAN PECALUNGAN			1.494.377.160,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.494.377.160,00	
	7	01				KECAMATAN			1.494.377.160,00	
246	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor - persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian	100 % 1034182621 Persen 100 % 100 % 100 % 100 %	1.447.681.960,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							kinerja program Perangkat Daerah			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	2200000 Persen	7.100.000,00	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Yang Disusun	770229821 Persen	993.607.160,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	973.127.160,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	14.880.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang di Susun	46200000 Persen	46.200.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	42.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.200.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Aparatur Yang Disiplin	39000000 Persen	19.385.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.200.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	7.185.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah	49539150 Persen	47.658.300,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.989.400,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.478.200,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.955.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.135.700,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.100.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	19741650 Persen	104.850.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	31.550.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	73.300.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Kantor	78972000 Persen	84.222.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	67.222.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milih Daerah	6 Jenis	144.659.500,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	19.622.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	119.037.500,00	KECAMATAN PECALUNGAN
247	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN Sesuai SOP persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	10000000 Persen 75 %	12.695.200,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Yang Memiliki SOP	21337200 Persen	12.695.200,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.337.200,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	1.358.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
248	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Presentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan yang Aktif	90 % 21337200 Persen	10.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	10000000 Persen	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		5.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
249	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Pesentase Gangguan Trantibumyang Dapat Terselesaikan	100 % 5000000 Persen	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah desa/ kelurahan terfasilitasi Dalam Penanganan Gangguan Trantibum	5000000 Persen	5.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
250	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimte, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiional	100 % 9800000 Persen	9.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi (Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial)	9800000 Persen	9.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
251	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi Desa yang Melaksanakan serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	10000000 Persen 85 %	10.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Meningkatkan Pemahaman tentang Keuangan dan Administrasi Desa	10000000 Persen	10.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN PECALUNGAN
						KECAMATAN BAWANG			1.945.548.817,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.945.548.817,00	
	7	01				KECAMATAN			1.945.548.817,00	
252	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.862.223.517,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	15 Orang 18 Orang	1.366.134.629,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.336.134.629,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Orang 4 Orang	34.800.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 tahun Laporan	4.800.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	50.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Tahun Orang	50.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	10 Kegiatan	92.482.312,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	5.080.600,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	8.582.800,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	30.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	10.096.200,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun Dokumen	1.440.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Laporan	32.282.712,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan kantor menjadi lebih baik dan lancar	5 Kegiatan	9.900.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	8.800.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	13 Unit	308.906.576,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun Unit	28.504.300,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit Unit	250.402.276,00	KECAMATAN BAWANG
253	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	75 %	41.235.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	7 Buah	21.505.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	21.505.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	19.730.000,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	14.250.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun Laporan	5.480.000,00	KECAMATAN BAWANG
254	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan yang masuk prioritas atau perangkungan	8 Kegiatan	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
255	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	22.090.300,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penanganan trantibum	20 Desa	22.090.300,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Tahun Laporan	22.090.300,00	KECAMATAN BAWANG
256	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	85 %	15.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang memahami tentang keuangan dan administrasi desa	100 Orang	15.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Tahun Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN BAWANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	0,00	KECAMATAN BAWANG
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			21.604.392.298,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			21.604.392.298,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			21.604.392.298,00	
257	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.740.967.698,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.436.700,00	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.436.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.276.486.298,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.230.006.298,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.320.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00	
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	106.270.940,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.663.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.443.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.995.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.859.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.820.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.989.140,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kend dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumalh asert yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah Sarpras gedung yang dibeli	6 Unit	23.994.400,00	
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	23.994.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	122.880.960,00	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.880.960,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	195.898.400,00	
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	130.158.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	5.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	4.880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
258	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	95 %	1.000.096.600,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	19 kegiatan	1.000.096.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10500 Orang	345.096.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	655.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
259	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	16.578.664.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	16.578.664.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	183.130.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	104 Orang	16.175.534.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1 Laporan	220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
260	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	30.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	30.000.000,00	
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	103 Orang	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
261	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	206.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	206.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	206.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
262	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	1.048.664.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	1.048.664.000,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	700 Orang	65.991.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 Orang	312.672.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	670.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								J U M L A H	1.838.364.026.233,00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Sub bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja daerah. Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6. 1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian tahun 2024	Perangkat Daerah Koordinator
-1	-2	-3	-4	-5
1	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	22,3	Sekretariat Daerah
2	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5067	Sekretariat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70,04	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	91,98	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,93	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7-6,2	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	9.803	Sekretariat Daerah
8	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	21,6	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penduduk Miskin	%	8,34-7,90	Sekretariat Daerah
10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,6	Sekretariat Daerah
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	197,04	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,04	Sekretariat Daerah
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,66	Sekretariat Daerah
14	Nilai SAKIP	Skor	70,5	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian tahun 2024	Perangkat Daerah Koordinator
-1	-2	-3	-4	-5
15	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Level 3	Sekretariat Daerah
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	79	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,45	Sekretariat Daerah
18	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	155	Sekretariat Daerah
19	Indeks Rasa Aman	Indeks	4,2	Sekretariat Daerah
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,81	Sekretariat Daerah
21	Indeks Demokrasi	Indeks	72	Sekretariat Daerah
22	Angka Kriminalitas	%	0,015	Sekretariat Daerah

Sumber : RPD Kab. Batang Tahun 2023-2026

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,1
		Angka Harapan Sekolah	tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,4

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	136
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	8,08

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,72
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,89
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	89
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	80,95
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	70
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES /SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	11,69

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100 persen	86
		Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	86
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.25.00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	87
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	85

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	71,2
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	69,87
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten: kota x 100	88,5
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01
		Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	11,07
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL : HGB x 100	28,87
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,56
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	81
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada lalu x 100	63
		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	63
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	85
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,5
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
		Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x 100	4
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	72
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	Survei melalui 3 komponen yaitu :	75
				(Toleransi + kesetaraan + kerjasama) : 3 x 100	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,8
		Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada) x 100	100
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk dikawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana: Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana: Jumlah Desa Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan: Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x100 +Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi: Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 : 4	67,44
		Persentase Penanggulanga n Bencana secara cepat dan akurat	Indeks	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	74
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	85

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,71
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86
11	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	97
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	31,17
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target : Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah x 100	80
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$r = \{Pt: P_0\} \times (1: t) - 1\} \times 100$	1,13
				r = laju pertumbuhan penduduk	
				Pt = Jumlah Penduduk tahun t	
				P ₀ = Jumlah penduduk tahun dasar	
				t = selisih tahun Pt dengan P ₀	
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	5 Σ ASFR	3
		Ratio KDRT	Rasio	Jumlah KDRT: Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0071

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,2747
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH: Luas lahan x 100	60
		Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran): cim-LiJ	50
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50: 0.0 x ieu-0.1)	80
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan: Luas wilayah administrasi	68,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	23
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,56
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,78
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,48
		Persentase pkk aktif	%	Jumlah pkk aktif : jumlah pkk x 100	50,21

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,45
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	85
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	2,3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan: jumlah penduduk	1,5
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	v / c ratio Jalan Kabupaten v : volume kendaraan c : kapasitas jalan	0,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,5
		Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,47
		Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	12,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Perangkat daerah Jumlah capaian sasaran strategis Perangkat daerah x 100	78

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	75
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	Jml investor tahun n dikurangi jml investor tahun (n-1) dibagi jml investor tahun n x 100	40
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	21
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1 kali 100	10
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif: kajian yang dilaksanakan) x 100	10
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	35

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	TGM= (0,3 ×(FM+DM+JB))+0,05×(FAI+DAI)	66,33
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	IPLM= ∑UPLM: AM	2,8
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,66
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional	Indeks	T=(a+i+s+j): 4	75,4
				T = tingkat ketersediaan arsip	
				a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	
				i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	T=(m+b+g+a+c+i): 6	22,4
				T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	
				m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	
				b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	
				g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten: kota dengan NSPK	
				a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	
				c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	
				i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	84,5
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,9

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	93,3
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	96
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	87
		Persentase Hewan Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,024
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)			
		a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecet, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74	119.615
		b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jaguang 89	71.156
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,6

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,76
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen *100	0,0103
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
		Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,98
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	78
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	78
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,5
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	60 Capaian sasaran pemda+20 sasaran perangkat daerah+20capaian program daerah	78

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	(Rata-rata capaian indikator kinerja program + rata-rata capaian IKU + rata-rata Capaian IKD) /3 x 100	90,5
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah program dalam RKPD th berkenaan : jumlah program APBD th berkenaan x 100	100
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Jumlah Program dalam Renja Perangkat Daerah : Jumlah Program dalam Renstra Perangkat Daerah X 100	100
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	60,1
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	100
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.50.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,7
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	STATUS	WTP
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP : jumlah total OPD) x 100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	$[(\text{Realisasi Pendapatan Daerah tahun } n) - (\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n-1)] : (\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n-1) \times 100$	0,5
		Persentase Peningkatan PAD	%	$[(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1)] : (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \times 100$	2,03
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	200
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	$(\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter} : \text{Total Parameter Yang Terisi}) \times (1 : \text{jumlah parameter}) \times \text{Nilai Dasar } 25$	86
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	$(\text{Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik"} : \text{Jumlah ASN Kab. Batang}) \times 100$	100
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	$(\text{Jumlah realisasi ASN yg dilatih} : \text{Jumlah Pendaftar Pelatihan}) \times 100$	70
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	85
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	$\text{pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya} \times 100$	85
		Persentase penanganan	%	$\text{jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan} :$	85

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		pengaduan masyarakat		jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
30	Kecamatan Bandar	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	41
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1
		Presentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	41
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
31	Kecamatan Banyuputih	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	45,5
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
32	Kecamatan Batang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	50
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
33	Kecamatan Bawang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	70
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66
34	Kecamatan Blado	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	33,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	33,6
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
35	Kecamatan Gringsing	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	73,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	60
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66
36	Kecamatan Kandeman	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,30 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	65
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	85

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
37	Kecamatan Limpung	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	58,82
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	41,18
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66
38	Kecamatan Pecalungan	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	65

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Maju dan Mandiri tiap tahun			
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
39	Kecamatan Reban	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		PersentaseStat us Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri: Jumlah Desa) x 100	36,84
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	31,57
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
40	Kecamatan Subah	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	35,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x 100	35,29
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66
41	Kecamatan Tersono	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	70
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
42	Kecamatan Tulis	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,57 (SB)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	60
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
43	Kecamatan Warungasem	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	85
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
44	Kecamatan Wonotunggal	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	33,3

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	40
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75

6.3 Indikator Kinerja dan Program Prioritas Pembangunan

Tabel 6.3 dibawah ini memuat seluruh indikator kinerja serta program prioritas pembangunan di Kabupaten Batang

Tabel 6. 3
Penetapan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
01.01	Pendidikan					
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikanx 100	100	
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
01.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.02	Kesehatan					
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikator SPM x 100	100	Dinas Kesehatan
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	Dinas Kesehatan
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	82	Dinas Kesehatan
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	12,24	Dinas Kesehatan
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100	RSUD Limpung
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Limpung
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Batang
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	86	RSUD Batang
01.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100	4,25	DPUPR
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	
01.03.04	Program Pengembangan dan Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan Regional	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam kondisi baik : Jumlah TPA seluruhnya x100	100	DPUPR
01.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100	DPUPR
01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	64,41	DPUPR
01.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	56,04	DPUPR
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	100	DPUPR
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	60,5	DPUPR
01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analisis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	DPUPR
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	52,4	DPUPR
01.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100	DPRKP
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	63	DPRKP
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	81	DPRKP
01.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
01.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib*100	100	Satpol PP
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani : Jumlah Korban Bencana X 100	100	BPBD
		Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana : Jml. desa terkena bencana) x 100	100	
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran*100	100	Satpol PP
01.06	Sosial					
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100	Dinas Sosial
01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	40	Dinas Sosial
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100	Dinas Sosial
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100	Dinas Sosial
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100	Dinas Sosial
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100	Dinas Sosial
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
02.07	Tenaga Kerja					
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu ke RTKD : Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	100	Dinas Ketenagakerjaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas : Angkatan Kerja x 100	72	Dinas Ketenagakerjaan
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	36	Dinas Ketenagakerjaan
02.07.05	Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 100	14,6	Dinas Ketenagakerjaan
02.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,2	DP3AP2KB
02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Inde x	Jml Perempuan Yg Mengalami Kekerasan : Jml Penduduk Perempuan	100	DP3AP2KB
02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	jml lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan/jml lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga x 100	21,43	DP3AP2KB
02.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedi : jumlah jenis data yang dibutuhkan x100	100	DP3AP2KB
02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	80	DP3AP2KB
02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg trtangani : Jml kekerrasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100	DP3AP2KB
02.09	Pangan					
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan keamndirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5	Dinas Pangan dan Pertanian
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,5	Dinas Pangan dan Pertanian
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x 100	16	Dinas Pangan dan Pertanian
02.09.05	Prorgram Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x100	100	Dinas Pangan dan Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
02.10	Pertanahan					
02.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonan tanah seluruhnya x 100	80	DPRKP
02.11	Lingkungan Hidup					
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas air (Permendagri 86/2017)	50	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas udara (Permendagri 86/2017)	80	
						Dinas Lingkungan Hidup
02.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik : jumlah RTH eksisting x 100	60	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani : Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	60	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	90	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulan sampah x 100	70	Dinas Lingkungan Hidup
02.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th) : 2] x 100	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th) : 2] x 100	97,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
02.13.02	Program Penataan Desa	persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	46,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	DP3AP2KB
02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	%	Jml peserta KB Aktif Modern / Jml Pasangan Usia Subur x 100%	73,84	DP3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Jml PUS yg ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jml Pasangan Usia Subur x 100%	13,36	
02.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina : Jumlah Keluarga x 100	78,21	DP3AP2KB
02.15	Perhubungan					
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan	87	Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
				LLAJ yang ditetapkan x 100		
02.16	Komunikasi dan Informatika					
02.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	69	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.17	Koperasi dan UKM					
02.17.04	Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68	Disperindagkop dan UKM
02.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90	Disperindagkop dan UKM
02.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90	Disperindagkop dan UKM
02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 } x 00	10	Disperindagkop dan UKM
02.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	15	Disperindagkop dan UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa pada tahun N : Jumlah Koperasi pada tahun n x 100	45,21	Disperindagkop dan UKM
02.18	Penanaman Modal					
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	40	DPMPTSP
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	100	DPMPTSP
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100	DPMPTSP
02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan x100	7,5	DPMPTSP

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
02.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	45	DPMPTSP
02.19	Kepemudaan dan Olahraga					
02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	32	Disparpora
02.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan	med ali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	40	Disparpora
02.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima : jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10	Disparpora
02.20	Statistik					
02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.21	Persandian					
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.22	Kebudayaan					
02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) :jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan : dengan jumlah seluruh benda cagar budaya x 100	80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.23	Perpustakaan					
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung tahun sebelumnya) x 100	0,16	Dinas Perpustaka-an dan Kearsipan
02.24	Kearsipan					
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)	inde ks	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$ T = tingkat ketersediaan arsip, a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, i = tase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,4	Dinas Perpustaka-an dan Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
02.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	indeks	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$ m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	22,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Urusan Pilihan					
03.25	Kelautan dan Perikanan					
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	$\frac{\text{Realisasi Capaian Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100$	96	Dislutkannak
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	$\frac{\text{Realisasi Produksi Perikanan Budidaya}}{\text{Target Produksi Perikanan Budidaya}} \times 100$	93	Dislutkannak
03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	$\frac{\text{Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan}}{\text{Target}} \times 100$	100	Dislutkannak
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	$\frac{\text{Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan}}{\text{Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan}} \times 100$	96	Dislutkannak
03.26	Pariwisata					
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	$\frac{\text{Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n}}{\text{Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1}} \times 100$	17	Disparpora
03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100$	20	Disparpora
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	$\frac{\text{jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI}}{\text{jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar}} \times 100$	20	Disparpora

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	35	Disparpora
03.27	Pertanian					
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,0103	Dinas Pangan dan Pertanian
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian X 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	100	Dislutkannak
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)x100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
03.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target) x 100	100	Dislutkannak
03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100	
		Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan	%	(Realisasi Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan : Target) x 100	85	Dislutkannak
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	(Realisasi Peningkatan Prasarana Pertanian yang Dilakukan Pembangunan, Perawatan dan Rehabilitasi : Target) x 100	100	Dislutkannak
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan Ternak yang Terobati : Target Hewan Ternak yang Terobati) x 100	100	Dislutkannak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
03.30	Perdagangan					
03.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100	Disperindagkop dan UKM
03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x100	36,36	Disperindagkop dan UKM
03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x 100	75	Disperindagkop dan UKM
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan -nilai impor pada tahun n kabupaten kota	59.034.726	Disperindagkop dan UKM
03.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang : Potensi UTTP x 100	75	Disperindagkop dan UKM
03.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100	Disperindagkop dan UKM
03.31	Perindustrian					
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0078	Disperindagkop dan UKM
03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n- jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x100	84	Disperindagkop dan UKM
03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	84	Disperindagkop dan UKM
03.32	Transmigrasi					
03.32.03	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	%	Jumlah Transmigran yang ditempatkan : Jumlah Transmigran yang mendaftar x 100	100	Dinas Ketenagakerjaan
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
04.01	Sekretariat Daerah					
04.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah x 100	100	Bagian Hukum
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100	100	Bagian Pemerintahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	100	Bagian Pemerintahan
		Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	(realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk) : (persentase target penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk hukum) x 100	95	Bagian Kesra
						Bagian Hukum
04.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah Penyertaan Modal) x 100	15	Bagian Perekonomian
		Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakan yang dikeluarkan baik pusat atau daerah) x 100	100	Bagian Perekonomian
		Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100	96	Bagian Perekonomian
		Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100	Bagian Adpem
						Bagian PBJ
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan organisasi perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	32 (sedang)	
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100	Bagian Organisasi
		Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100	Bagian Organisasi
		Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda : target x 100	90	Bagian Prokompim
						Bagian Umum
04.02	Sekretariat DPRD					

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100	Sekretariat DPRD
		Persentase kUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)	100	
		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100	Sekretariat DPRD
		Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan failitasi peningkatan kapasitas DPRD	100	Sekretariat DPRD
		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah anggota DPRD yg melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat : jumlah anggota DPRD x 100	100	
		Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100	
		Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan admnistrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100	
		Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100	
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
05.01	Perencanaan					
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	90,5	Bapelitbang
		Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	90,5	
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	90,5	
05.02	Keuangan					
05.02.03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	stat us	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
		Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	stat us	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	
		Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	90	
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100	BPKPAD
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	[(Realisasi tahun n) - (Realisasi tahun n-1)] : Realisasi tahun n-1 x 100	2,03	BPKPAD
05.03	Kepegawaian					
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu : Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100	Badan Kepegawaian Daerah
05.04	Pendidikan dan Pelatihan					

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat)x100	100	Badan Kepegawaian Daerah
05.05	Penelitian dan Pengembangan					
05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x100	55	Bapelitbang
6	Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan					
06.01	Pengawasan					
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	Inspektorat
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3	Inspektorat
		Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan : kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran x 100	70	
7	Unsur Kewilayahan					
07.01	Kecamatan					
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perangkingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	75	Kecamatan Batang
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Batang
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Batang
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Batang
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Wonotunggal

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Wonotunggal
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Wonotunggal
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Bandar
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bandar
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bandar
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Bandar
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Blado
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Blado
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Blado
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Blado
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Bawang
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bawang
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bawang
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Bawang
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Kandeman
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Kandeman
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Kandeman
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Kandeman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Tulis
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tulis
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tulis
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Tulis
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Subah
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Subah
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Subah
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Pecalungan
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Pecalungan
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Pecalungan
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Tersono
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tersono
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tersono
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Tersono
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Limpung
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Limpung
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Limpung
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Limpung

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Banyuputih
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Banyuputih
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Banyuputih
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Gringsing
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Gringsing
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Gringsing
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Gringsing
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Warungasem
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Warungasem
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Warungasem
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Warungasem
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Reban
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Reban
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Reban
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Reban
8	Unsur Pemerintahan Umum					
08.01	Kesatuan Bangsa dan Politik					
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	95	Badan Kesbangpol
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100	Badan Kesbangpol
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	Badan Kesbangpol

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100	Badan Kesbangpol
08.01.06	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	Badan Kesbangpol

Sumber : Bapelitbang Kab. Batang, 2022

6.4 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang tahun 2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran, IKU perangkat daerah, serta indikator program perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	{(PDRB th n – PDRB th (n-1)) : PDRB th (n-1)} x100	5,7-6,2	Sekretariat Daerah
2	Laju Inflasi (%)	%	Angka Inflasi	2,3-3,3	Sekretariat Daerah
3	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	juta rupiah	PDRB th n : jumlah penduduk th n	22,3	Sekretariat Daerah
4	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	Persentase pendapatan penduduk 40 terendah terhadap total pendapatan	21,6	Sekretariat Daerah
5	Persentase Angka Kemiskinan (%)	%	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang : jumlah penduduk Kab. Batang	8,34-7,90	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	70,04	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	Rasio IPM Perempuan dibanding IPM Laki-Laki	91,98	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik	63,93	Sekretariat Daerah
9	Angka Harapan Hidup (tahun)	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,89	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah (th)	tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,4	Sekretariat Daerah
11	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,1	Sekretariat Daerah
12	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	Rata-rata pengeluaran penduduk per tahun	9.803	Sekretariat Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x100	5,6	Sekretariat Daerah
14	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa/kelurahan x 100	12,9	Sekretariat Daerah
15	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	97	Sekretariat Daerah
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas : Angkatan Kerja x 100	72	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat	85,45	Sekretariat Daerah
18	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)] : (Realisasi PAD Tahun n-1)*100	2,03	Sekretariat Daerah
19	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Sekretariat Daerah
20	Persentase penguatan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,024	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,5	Sekretariat Daerah
22	Kontribusi sektor pertanian/perkeb unan terhadap PDRB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan : Jumlah PDRB x 100	24,76	Sekretariat Daerah
23	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1) x 100	17	Sekretariat Daerah
24	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dari BPS	12,75	Sekretariat Daerah
25	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor industrin terhadap PDRB dari BPS	32,99	Sekretariat Daerah
B	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	Nilai IDSD	3,5067	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen	68,66	Sekretariat Daerah
3	Nilai SAKIP	skor	(30 perencanaan kinerja + 25 pengukuran kinerja + 15 pelaporan kinerja + 10 evaluasi internal + 20 capaian kinerja)	70,5	Sekretariat Daerah
4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	Penilaian secara kualitatif melalui reuiu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan	level 3	Sekretariat Daerah
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	IKLH Kabupaten = (IPA x 30) + (IPU x 30) + (ITH x 40)	65,04	Sekretariat Daerah
6	Indeks Infrastruktur	indeks	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int	197,04	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD	79	Sekretariat Daerah
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota	155	Sekretariat Daerah
9	Indeks Rasa Aman	indeks	survei / kuisioner kepada masyarakat	4,2	Sekretariat Daerah
10	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisioner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah	0,81	Sekretariat Daerah
11	Indeks Demokrasi	indeks	Kualitatif, melalui kuisioner	72	Sekretariat Daerah
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	Total Pengeluaran RT Non Pangan : Total Pengeluaran x 100	47,27	Sekretariat Daerah
13	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	rasio	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB	0,05	Sekretariat Daerah
14	Angka kriminalitas	rasio	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun : Jumlah penduduk	0,015	Sekretariat Daerah
15	Angka Beban ketergantungan	%	(Penduduk usia64 : Penduduk usia 15-64) x100	42,8	Sekretariat Daerah
C	Aspek Pelayanan Umum				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
	Angka Partisipasi Sekolah	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100	Disdikbud
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80	Disdikbud

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100	Disdikbud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Disdikbud
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5	Disdikbud
	Persentase capaian SPM Pendidikan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikan x 100	100	Disdikbud
	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	90	Disdikbud
2	Kesehatan				
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.00 0 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	136	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	8,08	Dinas Kesehatan
	Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,72	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	89	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan tenaga	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	80,95	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	sesuai standar (PMK 43. Th 2019)				
	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	70	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	11,69	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,89	Dinas Kesehatan
	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikator SPM x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	82	Dinas Kesehatan
	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	12,24	Dinas Kesehatan
	Persentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100	100	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	86	RSUD Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,25	RSUD Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	RSUD Batang
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Batang) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Batang
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun (RSUD Batang)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	86	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Limpung)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	100	RSUD Limpung
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (RSUD Limpung)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100	RSUD Limpung
	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	85	RSUD Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	RSUD Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	RSUD Limpung
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limpung) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Limpung
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	71,2	DPUPR
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	69,87	DPUPR
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota x 100	88,5	DPUPR
	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	DPUPR
	Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	11,07	DPUPR
	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL / HGB x 100	28,87	DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100	4,26	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam Kondisi baik : jumlah TPA seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100	DPUPR
	Persentase drainase dalam	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan	64,41	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	kondisi baik/pembuangan aliran air		aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100		
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	56,04	DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab xkan 100	100	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	88,65	DPUPR
	Rasio tenaga operator/teknisi/a nalisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analisis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	81	DPUPR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63	DPRKP
	Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	81	DPRKP
	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada x 100	63	DPRKP
	Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	63	DPRKP
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	81	DPRKP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Sarana dan Utilitas Umum)				
	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (SPM)	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100	DPRKP
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	63	DPRKP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65	DPRKP
5	Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	75	Satpol PP
	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	75	Satpol PP
	Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x100	4	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	72	Satpol PP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP)	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk di kawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana/ Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana/ Jumlah Deas Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan/ JUmlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x 100 + Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi/ Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 / 4	67,44	BPBD
	Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	%	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100	BPBD
	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani (SPM)	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib x 100	100	Satpol PP
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah Korban Bencana X 100	100	BPBD
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana/Jml. desa terkena bencana) x 100	100	BPBD
	Persentase waktu tanggap "respon time" (SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran x 100	100	Satpol PP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	BPBD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	BPBD
6	Sosial				
	Persentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	74	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	pengasuhan keluarga				
	Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	85	Dinas Sosial
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	Dinas Sosial
	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	40	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100	Dinas Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,71	Dinas Sosial
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
1	Ketenagakerjaan				
	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja / jumlah angkatan kerja x 100	97	Dinas Ketenagakerjaa n
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	31,17	Dinas Ketenagakerjaa n

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	100	Dinas Ketenagakerjaan
	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas / Angkatan Kerja x 100	72	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	36	Dinas Ketenagakerjaan
	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 1000	14,6	Dinas Ketenagakerjaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Dinas Ketenagakerjaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Dinas Ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Ratio KDRT	rasio	Jumlah KDRT : Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0071	DP3AP2KB
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0	DP3AP2KB
	Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,2747	DP3AP2KB
	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,2	DP3AP2KB
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerrasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100	DP3AP2KB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	didalam unit pelayanan terpadu				
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan : jumlah penduduk usia kerja perempuan x 100	1,64	DP3AP2KB
	cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedia : jumlah jenis data yang dibutuhkan x 100	100	DP3AP2KB
	cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	80	DP3AP2KB
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerasan thd perempuan yg terlaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	DP3AP2KB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	DP3AP2KB
3	Pangan				
	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,024	Dinas Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)				
	a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74	119.615	Dinas Pangan dan Pertanian
	b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jagung 89	71.156,0 0	Dinas Pangan dan Pertanian
	Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,6	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan keamndirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,5	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandiri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x100	16	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,3	Dinas Pangan dan Pertanian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Pertanahan				
	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	85	DPRKP
	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100	DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonan tanah seluruhnya x 100	80	DPRKP
5	Lingkungan Hidup				
	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH : Luas lahan x 100	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran)/cim-LiJ	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50/0.0 x ieu-0.1)	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan : Luas wilayah administrasi	68,5	Dinas Lingkungan Hidup
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani /Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	90	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulan sampah x 100	70	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,45	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	85	Disdukcapil
	Persentase menurunnya data ganda dan anomali	%tase	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	2,3	Disdukcapil
	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th) : 2] x 100	85	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th) : 2] x 100	97,4	Disdukcapil
	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,4	Disdukcapil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	23	Dispermades
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,56	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,78	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,48	Dispermades
	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	Jumlah pkk desa binaan : pkk desa sekab. Batang x 100	50,21	Dispermades
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Dispermades
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Dispermades
	Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	40	Dispermades
	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	46,03	Dispermades
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	70	Dispermades
8	Pengendalian Penduduk dan KB				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$r = \{Pt/Po\} \times (1/t)-1\} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah Penduduk tahun t P₀ = Jumlah penduduk tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P₀	1,13	DP3AP2KB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Index	5 Σ ASFR	3	DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	DP3AP2KB
	Peningkatan Cakupan Kesertaan Ber-KB	%	PUS yang ber-KB : Jum. PUS x 100	73,96	DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina	78,21	DP3AP2KB
9	Perhubungan				
	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan : jumlah penduduk	1,5	Dinas Perhubungan
	Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	v / c ratio Jalan Kabupaten	0,5	Dinas Perhubungan
			v : volume kendaraan		
			c : kapasitas jalan		
	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	87	Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Dinas Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika				
	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,5	Diskominfo
	Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,47	Diskominfo
	Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100	Diskominfo
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	69	Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara	70	Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	diselenggarakan secara online dan terintegrasi.		online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Diskominfo
11	Koperasi dan UKM				
	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	90	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 } x 100	10	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N- 1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N- 1) X 100	15	Disperindag-kop dan UKM
12	Penanaman Modal				
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	75	DPMPTSP
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Trilyun	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di batang	2	DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	DPMPTSP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	DPMPTSP
	Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	40	DPMPTSP
	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x100	100	DPMPTSP
	Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100	DPMPTSP
	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan	7,5	DPMPTSP
	Persentase data dan informasi	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	45	DPMPTSP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	penanaman modal yang tersedia				
13	Kepemudaan dan Olahraga				
	Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	35	Disparpora
	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n- 1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n- 1} x 100	4	Disparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	32	Disparpora
	capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	40	Disparpora
	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima:jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10	Disparpora
14	Statistik				
	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi / Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
15	Persandian				
	Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
16	Kebudayaan				
	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100	Disdikbud
	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	70	Disdikbud
	Persentase festival seni yg dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100	Disdikbud
	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	70	Disdikbud
17	Perpustakaan				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	$TGM = \frac{(0,3 \times (FM + DM + JB)) + 0,05 \times (FAI + DAI)}{1}$	66,33	Disperpuska
	indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	$IPLM = \frac{\sum UPLM}{AM}$	2,8	Disperpuska
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung tahun sebelumnya) x 100	0,16	Disperpuska
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,8	Disperpuska
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,66	Disperpuska
18	Kearsipan				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$	75,4	Disperpuska
			T = tingkat ketersediaan arsip		
			a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		
			i = tase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		
			s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		
			j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		
			$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$		
		Indeks		22,4	Disperpuska

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		
			m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		
			b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK		
			g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK		
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK		
			c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK		
			i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
	Urusan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan				
	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	84,5	Dislutkannak
	Kontribusi sektor Perikanan dan Pernakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,9	Dislutkannak
	Persentase Capaian Produksi Perikanan dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	93,3	Dislutkannak
	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	96	Dislutkannak
	Capaian Bina Kelompok	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang	100	Dislutkannak

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Masyarakat Pengawas		Diberdayakan : Target) x 100		
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	96	Dislutkannak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Dislutkannak
2	Pariwisata				
	Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	21	Disparpora
	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1 x 100	10	Disparpora
	Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif/kajian yang dilaksanakan) x 100	10	Disparpora
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	Disparpora
	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI :jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	20	Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	35	Disparpora
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Disparpora
3	Pertanian				
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,76	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen x 100	0,0103	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	87	Dislutkannak
	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100	Dislutkannak

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dislutkannak
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kenaikan pelaksanaan penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,0103	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian X 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Perdagangan				
	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	12,75	Disperindagkop dan UKM
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Disperindagkop dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Disperindagkop dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100	Disperindagkop dan UKM
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x 100	36,36	Disperindagkop dan UKM
	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x100	75	Disperindagkop dan UKM
	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan -nilai impor pada tahun n kabupaten kota	#####	Disperindagkop dan UKM
	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang : Potensi UTTP x 100	75	Disperindagkop dan UKM
	Presentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100	Disperindagkop dan UKM
5	Perindustrian				
	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0078	Disperindagkop dan UKM
	Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n- jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x 100	84	Disperindagkop dan UKM
	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	84	Disperindagkop dan UKM
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah				
	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	90	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,98	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	(realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + tase penyediaan informasi produk) : (persentase target penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + tase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk hukum) x 100	95	Sekretariat Daerah
	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah Penyertaan Modal) x 100	15	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakan yang dikeluarkan baik pusat atau daerah)* 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100	96	Sekretariat Daerah
	Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	32 (sedang)	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan	%	Jumlah PD yang telah mendapat	100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Standar Operasional Prosedur (SOP)		menerapkan SOP : jumlah PD x 100		
	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda : target x 100	90	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD				
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey/Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	78	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100	Sekretariat DPRD
	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD per tahun : jumlah seluruh anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan admistrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,5	Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	Perencanaan				
	Indeks Perencanaan	Indeks	60%*Capaian sasaran pemda+20%*sasaran perangkat daerah+20%*capaian program daerah	78	Bapelitbang
	Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	(Rata-rata capaian indikator kinerja program + rata-rata capaian IKU + rata-rata Capaian IKD) /3 x 100	90,5	Bapelitbang
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah Program dalam RKPD : Jumlah Program dalam APBD X 100	100	Bapelitbang
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Jumlah Program dalam Renja Perangkat Daerah : Jumlah Program dalam Renstra Perangkat Daerah X 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	90,5	Bapelitbang
	Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	90,5	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	90,5	Bapelitbang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.50.00	Bapelitbang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,7	Bapelitbang
2	Keuangan				
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	OPINI	WTP	BPKPAD
	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP / jumlah total OPD) x 100	100	BPKPAD
	Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)] : (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1) x 100	0,5	BPKPAD
	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)]/(Realisasi PAD Tahun n-1) x 100	2,03	BPKPAD
	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100	BPKPAD
	Penyampaian Raperda Pertanggungjawab an tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	90	BPKPAD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	BPKPAD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	BPKPAD
3	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan				
	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	200	BKD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	BKD
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	(Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi) x (1/jumlah parameter) x Nilai Dasar 25	86	BKD
	Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	(Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja x : Jumlah ASN Kab. Batang) x 100	100	BKD
	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	(Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah Pendaftar Pelatihan) x 100	70	BKD
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu : Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100	BKD
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat)x100	100	BKD
4	Penelitian dan Pengembangan				
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	60.10.00	Bapelitbang
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan	55	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	pengembangan yang ditindaklanjuti		penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x100		
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	Pengawasan				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	Inspektorat Daerah
	Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3	Inspektorat Daerah
	Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	70	Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Inspektorat Daerah
	Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan Batang				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Batang
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	50	Kecamatan Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Batang
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	50	Kecamatan Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Kecamatan Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perankingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	75	Kecamatan Batang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Batang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Batang
2	Kecamatan Banyuputih				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Banyuputih
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Banyuputih
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Kecamatan Banyuputih
	Jumlah Desa dengan Status maju dan Mandiri	Desa	Jumlah Desa dengan Status maju dan Mandiri	5	Kecamatan Banyuputih
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Kecamatan Banyuputih
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Banyuputih
	Persentase Lembaga	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD	90	Kecamatan Banyuputih

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Kemasyarakatan di Desa yang Aktif		terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW		
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Banyuputih
3	Kecamatan Bandar				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Bandar
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	41,18	Kecamatan Bandar
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	Kecamatan Bandar
	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	desa	Jumlah desa dengan status maju dan mandiri	7	Kecamatan Bandar
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Kecamatan Bandar
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Bandar
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bandar
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan	100	Kecamatan Bandar

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			baik : jumlah acara) x 100		
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Bandar
4	Kecamatan Bawang				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Bawang
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang mencapai target : jumlah desa seluruhnya) x 100	70	Kecamatan Bawang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	Kecamatan Bawang
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Bawang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Bawang
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Bawang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bawang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Bawang
5	Kecamatan Blado				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Blado
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,6	Kecamatan Blado
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Kecamatan Blado
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,6	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Blado
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Blado
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Blado
6	Kecamatan Gringsing				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Gringsing
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	73,3	Kecamatan Gringsing
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Kecamatan Gringsing
	Persentase Jumlah Desa Berkembang	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Gringsing

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun				
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Gringsing
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Gringsing
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	85	Kecamatan Gringsing
7	Kecamatan Kandeman				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,30 (B)	Kecamatan Kandeman
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	65	Kecamatan Kandeman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	85	Kecamatan Kandeman
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Kandeman
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Kandeman
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK,	90	Kecamatan Kandeman

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			Karang Taruna, Posyandu, RT, RW		
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Kandeman
8	Kecamatan Limpung				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Limpung
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	58,82	Kecamatan Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Limpung
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	41,18	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Limpung
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Limpung
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan	100	Kecamatan Limpung

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			baik : jumlah acara) x 100		
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Limpung
9	Kecamatan Pecalungan				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Pecalungan
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Pecalungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	65	Kecamatan Pecalungan
	Presentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Transtibum yang terselesaikan : Gangguan Transtibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Pecalungan
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Pecalungan
	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Transtibum yang terselesaikan : Gangguan Transtibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompicam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Pecalungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
10	Kecamatan Reban				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Reban
	Persentase Status Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	36,84	Kecamatan Reban
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Kecamatan Reban
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri/ Jumlah Desa) x 100	31,57	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Reban
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	85	Kecamatan Reban
11	Kecamatan Subah				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Subah
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang Maju dan Mandiri : jumlah desa seluruhnya) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	Kecamatan Subah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	Kecamatan Subah
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Subah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Subah
12	Kecamatan Tersono				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Tersono
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tersono
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Kecamatan Tersono
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tersono
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Kecamatan Tersono

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Tersono
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tersono
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Tersono
13	Kecamatan Tulis				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,57 (SB)	Kecamatan Tulis
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Kecamatan Tulis
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Tulis
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Tulis
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Tulis
14	Kecamatan Warungasem				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Warungasem
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Warungasem
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Kecamatan Warungasem
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	85	Kecamatan Warungasem
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Warungasem
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan	85	Kecamatan Warungasem

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			baik : jumlah acara) x 100		
15	Kecamatan Wonotunggal				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,80 (C)	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,3	Kecamatan Wonotunggal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,42	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	40	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	75	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	85	Kecamatan Wonotunggal
	Unsur Pemerintahan Umum				Bakesbangpol

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2024	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Indeks Kerukunan	%	Dilakukan Survey (Toleransi+Kesetaraan+K erjasama) : 3*100	75	Bakesbangpol
	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Skor	Nilai hasil evaluasi mplementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	71,5	Bakesbangpol
	Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada)*100	100	Bakesbangpol
	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) * 100	100	Bakesbangpol
	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	95	Bakesbangpol
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100	Bakesbangpol
	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	Bakesbangpol
	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekosobud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100	Bakesbangpol
	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	Bakesbangpol

BAB VII PENUTUP

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2024. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2024.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antarpelaku pembangunan.

Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2024, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2024 kedalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA tahun Anggaran 2024, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2022.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 diharapkan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. RKPD Tahun 2024 akan dijabarkan kedalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang tahun 2024 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja.
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024.
7. Dalam Pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan yakni tahun 2024.

PJ BUPATI BATANG,

Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M